

Harrys Pratama Teguh, S.H.I, M.H.
Dr. H. Usep Saepullah, M.Ag.

TEORI DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS

Penundaan Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati di Indonesia
(Kasus: Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik)

Pengantar **Dr. H. Siswara, M.Si.**



Harrys Pratama Teguh, S.H.I, M.H.

Dr . H. Usep Saepullah, M.Ag.

TEORI DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS

**Penundaan Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati di Indonesia
(Kasus: Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik)**

Pengantar Dr. H. Siswara, M.Si.



Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TEORI DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS

ISBN 978-979-076-605-1

Cet. I: Juni 2016, 16 × 24 cm, xii + 466 halaman

Penulis: **Harrys Pratama Teguh, S.H.I., M.H. & Dr. H. Usep Saepullah, M.Ag.**

Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**

Setting, Montase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**

Cetakan I: Juni 2016

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162–164

Telp.: (022) 5210588, Faks.: (022) 5224105

E-mail: pustaka_seti@yahoo.com

Bandung 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copyright © 2016 **CV PUSTAKA SETIA**

Dilarang mengutip memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah. Kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan, ampunan, dan perlindungan dari kejelekan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan-Nya, tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang membawa kita untuk menuju jalan yang benar, membawa kita untuk menuju umat Islam yang cerdas, pintar, serta religius yakni *habibina, wa syafi'ina, wa maulana* Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga *yaumul Kiamaah*.

Saya sebagai sahabat penulis yang berprofesi sama sebagai dosen merasa senang dan bangga dengan terbitnya buku ini yang secara garis besar tidak lepas dari masalah teori dan praktik hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, hukum pidana yang berasal dan berlaku juga di negeri Belanda. Di Indonesia masih diberlakukan hukum pidana peninggalan kaum penjajah, yang teks aslinya masih bertuliskan dalam bahasa Belanda.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia sejak lama telah melakukan usaha-usaha untuk memperbaharui hukumnya, termasuk usaha pembaharuan dalam lingkup hukum pidana. Pada hukum pidana, pembaharuan yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (*strafrecht*), hukum pidana formal atau hukum acara pidana (*strafvorderingsrecht*), dan hukum pelaksanaan pidana (*stravoll streckungrecht*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus secara bersama-

sama diperbarui sebab jika hanya salah satu bidang yang diperbaharui akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu, tujuan dari pembaharuan dari pembaharuan hukum dalam rangka mewujudkan suatu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional (berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya.

Dengan adanya arah kebijakan hukum yang jelas, diharapkan terciptanya kondisi kehidupan masyarakat hukum yang selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui buku ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan masyarakat dan mampu membantu pemerintah ataupun lembaga terkait lainnya, terutama dalam meningkatkan kesadaran, kecerdasan, dan disiplin terhadap hukum.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam belajar di berbagai lembaga pendidikan. Dengan demikian, seluruh generasi penerus bangsa akan lebih terjamin dan tidak ada lagi masalah pendidikan yang diakibatkan ketidaksemangatan masyarakat dalam belajar.

Dr. H. Siswara, M.Si.

PENGANTAR PENULIS

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus* ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku ini dan berbagai sumber yang digunakan sebagai data dan fakta pada buku ini.

Penulis mengakui bahwa penulis mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Demikian pula, dengan buku ini. Tidak semua hal dapat dideskripsikan dengan sempurna sekalipun penulis melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca sebagai batu loncatan yang dapat memperbaiki karya penulis pada masa datang sehingga karya berikutnya dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih baik.

Penulis mengharapkan agar para pengguna buku ini memperoleh banyak manfaat yang dapat dipetik dan diambil dari karya ini. Semoga buku ini dapat meningkatkan semangat bagi mahasiswa, masyarakat, dan pengguna buku ini dalam mempelajari hukum acara pidana khusus dalam berbagai kasus yang terjadi di negeri ini.

Harrys Pratama Teguh, S.H.I., M.H.

Dr. H. Usep Saepullah, M.Ag.

...dalam hal ini, penulis merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ...

...dalam hal ini, penulis merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ...

...dalam hal ini, penulis merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ...

...dalam hal ini, penulis merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ...

...dalam hal ini, penulis merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ...

Harys Pratama Teguh, S.H., M.H.
Dr. H. Usop Saepullah, M.Ag.

F.	Sumber Hukum dalam Prinsip-prinsip Hukum Pidana	58
G.	Hak Negara dalam Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana	69

BAB 3

POKOK-POKOK SISTEM HUKUM PIDANA DAN PERADILAN

PIDANA	103
A. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penggolongan Hukum Pidana	103
B. Hubungan Hukum Pidana dengan Ilmu Lain	120
C. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia	122
D. Acara Persidangan Pidana	136
E. Perbuatan yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum	141
F. Proses Pelaksanaan Perkara Persidangan di Pengadilan Negeri	141

BAB 4

TEORI DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA

A.	Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana	153
B.	Ruang Lingkup KUHAP dan Ketentuan Peralihannya	159
C.	Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Pidana	165
D.	Tahap Penuntutan.....	195
E.	Tahapan dan Proses Persidangan	215
F.	Tahap Setelah Persidangan.....	250

BAB 5

PENEGAKAN HUKUM EKSEKUSI MATI DIKAITKAN DENGAN PENINJAUAN KEMBALI

A.	Hak Asasi Manusia (HAM)	265
B.	Sistem Peradilan Pidana	284
C.	Pidana Mati.....	354
D.	Fakta dan Data Eksekusi Mati di Indonesia	379

E.	Peninjauan Kembali (PK) pada Ketentuan Pasal 263 dan Pasal 268 Ayat (3) KUHP	408
F.	Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK).....	415
G.	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU/VI/2008 tentang Penolakan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati	421

BAB 6

ANALISIS PASAL 263 DAN 268 KUHP DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATAAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK).....	427
--	------------

A.	Pertimbangan Penundaan Eksekusi Mati terhadap Terpidana Mati Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)..	427
B.	Tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Berkaitan dengan Penundaan Eksekusi Pidana Mati	428

DAFTAR PUSTAKA.....	453
----------------------------	------------

BIOGRAFI PENULIS	465
-------------------------------	------------

BAB 1

PENGETAHUAN DASAR ILMU HUKUM (INTRODUCTION TO LEGAL STUDIES)

A. Pengertian dan Kegunaan Penemuan Hukum

Setiap manusia di muka bumi membutuhkan bantuan, pertolongan, dan kebersamaan dengan manusia lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan yang diidam-idamkan karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu hidup bermasyarakat. Untuk memelihara berbagai kepentingan dan ketertiban dalam masyarakat, diperlukan suatu norma berupa aturan, rambu, dan batasan lainnya yang harus ditaati oleh setiap individu yang disebut norma hukum. Tujuan keberadaan norma hukum ini adalah menciptakan tata tertib yang aman, damai, dan terhindar dari berbagai tindakan kriminal. Tanpa hukum, seseorang tidak akan dilindungi oleh hukum sehingga ia boleh dibunuh, hartanya boleh diambil, dan dalam keadaan tertentu ia bisa hidup tanpa suami, tanpa istri, tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa baju, bahkan tanpa makan dan minum.

Hukum lahir atas kebutuhan hidup manusia untuk hidup bersama dalam masyarakat dengan tenang, teratur, damai, dan tertib sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan agar kepentingan setiap manusia dapat terlindungi

dan hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Tiga unsur¹ yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum di antaranya:

1. kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
2. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
3. keadilan (*gerechtigkeits*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*), dan masyarakat pun mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Selain itu, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang adil.

Hukum diperlukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pada sisi lain, sebagai upaya penyelesaian suatu perkara, adakalanya hakim menghadapi masalah karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.

1. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum yang dalam bahasa asing dikenal dengan *rechtsvinding* dan *law making* adalah menemukan hukum karena hukum itu tidak lengkap atau tidak jelas. Adapun dari segi teori, dikatakan bahwa hukum itu sudah ada pada perilaku manusia, yaitu manusia itu sendiri (*Paul Scholten*).

Terbentuknya suatu peraturan hukum mempunyai tujuan tertentu, yaitu mengatur kegiatan kehidupan manusia, sedangkan kegiatan kehidupan manusia tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Oleh karena itu,

1 Unsur-unsur hukum sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas merupakan ungkapan dosen ketika memberikan kuliah pada mata kuliah *Pengantar Ilmu Hukum* bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang, yaitu badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif. Sebaliknya, secara umum, hukum itu bersifat memaksa, yaitu hukum itu tegas yang jika dilanggar dapat mendatangkan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

tidak mengherankan jika setiap peraturan hukum yang dibuat tidak lengkap dan tidak selalu jelas. Karena tidak lengkap atau tidak jelas, hukumnya harus dilengkapi dan dijelaskan. Ini berarti bahwa hukumnya harus ditemukan, digali di dalam masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Sebagai contoh adalah perjanjian sewa beli tidak diatur dalam KUHPerd, tetapi merupakan perilaku dua orang yang kemudian dituangkan dalam yurisprudensi menjadi hukum.

Penemuan hukum tidak sama dengan penciptaan hukum. Menemukan hukum berarti menemukan hukum yang sudah ada, sedangkan menciptakan hukum berarti menciptakan suatu (hukum) yang sebelumnya tidak ada. Hakim pada dasarnya dilarang menciptakan hukum (undang-undang), apalagi menilai undang-undang karena tugas hakim adalah menerapkan penemuan hukumnya. Sekalipun demikian, dalam menemukan hukum, tidak tertutup kemungkinan apabila hakim yang tugasnya sehari-hari menemukan hukum dalam memecahkan masalah hukum konkret, menciptakan hukum sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali hukum di dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini seorang ahli hukum tidak dapat menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut, tetapi harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan berperan serta dalam menetapkan atau menentukan hal-hal yang merupakan hukum dan hal-hal yang bukan hukum walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya.

Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, yaitu:

- a. menyesuaikan kaidah hukum yang konkret (*perundang-undangan*) terhadap tuntutan nyata yang ada pada masyarakat dengan selalu memerhatikan kebiasaan, pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup di dalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada dalam masyarakat;
- b. memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab

adakalanya pembuat Undang-undang (*wetgever*) tertinggal oleh perkembangan dalam masyarakat.²

2. Kegunaan Penemuan Hukum

Kegunaan penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung, memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan pada kenyataannya sering terjadi hal-hal berikut:

- a. adakalanya pembuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah yang sangat umum sifatnya sehingga memiliki lebih dari satu pengertian atau pemaknaan;
- b. adakalanya istilah kata, pengertian, kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas maknanya atau tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan dalam masyarakat;
- c. adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

Dalam menghadapi beberapa kemungkinan tersebut, seorang hakim selaku pengemban profesi hukum harus menemukan dan menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Selain itu, hakim harus memiliki banyak pandangan tentang hukum karena hukum itu luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan.

B. Pengertian Ilmu Hukum, Unsur Hukum, dan Ciri-ciri Hukum

Secara etimologis, istilah hukum diambil dari beberapa istilah sebagai berikut.

1. Hukum berasal dari bahasa Arab dari istilah *alkas* yang diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum.

2 Untuk lebih jelas, lihat tulisan Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H., "Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Adil" Media Online, <http://id.shvoong.com/books/1902522-metode-penemuan-hukum-upaya-mewujudkan/>, 2009.

2. *Recht* berasal dari bahasa Latin *Rechtum* yang mempunyai arti tuntunan, bimbingan, pemerintahan yang didukung oleh kewibawaan. Muncul istilah bahasa Belanda *Gerechtigdheid* dan *Gerechtigkeid* dari Bahasa Jerman yang berarti keadilan.
3. *Lex* berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata *Lesere*, artinya mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah.
4. *Ius* berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum, dari kata *Lubere* yang berarti mengatur. Secara etimologis, *ius* berarti hukum yang berkaitan erat dengan keadilan yang mempunyai 3 unsur, yaitu:
 - a. wibawa;
 - b. keadilan;
 - c. tata kedamaian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian hukum berkaitan dengan keadilan, kewibawaan, ketataan, dan peraturan (*yang berisi norma*).

Menurut para ahli, hukum adalah sebagai berikut.

1. Prof. Dr. P. Borst

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan/perbuatan manusia dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata/keadilan dan kedamaian.
2. Prof. Dr. Van Kan

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.
3. Suardi Tasrif, S.H.

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh yang berwenang berisikan perintah/larangan/izin untuk berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.
4. M.H. Tirtaanardjaja, S.H.

Hukum adalah semua aturan/norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dari berbagai tindakan dalam pergaulan hidup dengan

ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan yang akan membahayakan diri sendiri/harta, seperti hilangnya kemerdekaan dengan didenda.

Dari keempat pendapat tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hukum bersifat memaksa dan ditaati.
2. Peraturan dibuat dari yang berwenang.
3. Hukum memerintahkan dan melarang.
4. Hukum mengatur tata tertib masyarakat.

Para ahli hukum di Indonesia berkesimpulan bahwa hukum memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri tersendiri. Unsur-unsur hukum meliputi:

1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat;
2. peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang;
3. peraturan yang secara umum bersifat memaksa walaupun tidak dapat dipaksa;
4. sanksi dapat dikenakan bagi orang yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Maksud uraian unsur-unsur hukum tersebut adalah setiap peraturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat diadakan oleh badan yang berwenang, yaitu badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif dan sebaliknya. Secara umum, hukum bersifat memaksa, yaitu hukum itu tegas. Orang yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ciri-ciri hukum, antara lain:

1. adanya unsur perintah, larangan, dan kebolehan;
2. adanya sanksi yang tegas;
3. adanya perintah dan larangan;
4. perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang.

Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang lain yang disebut sebagai kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan kemasyarakatan yang bagi siapa saja yang dengan sengaja melanggar

suatu "Kaidah Hukum" akan dikenakan sanksi berupa "hukuman". Pada dasarnya jenis-jenis hukuman tersebut terdiri atas beberapa jenis bentuk, tetapi sesuai dengan Bab II (Pidana) Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis hukum adalah:

PIDANA	
POKOK	TAMBAHAN
1. Pidana mati.	1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana penjara.	2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana kurungan.	3. Pengumuman putusan hakim.
4. Pidana denda.	
5. Pidana tutupan.	

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Sifat hukum yang penulis maksud adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap orang yang tidak mematuhi agar kaidah-kaidah hukum itu dapat ditaati karena tidak semua orang hendak menaati kaidah-kaidah hukum tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tentang fungsi hukum, jelas bahwa hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kata "pasti" dapat dijadikan sebagai pedoman kekuasaan dan "adil" karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, dan hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, kepastian dan keadilan tidak hanya berupa tuntutan moral, tetapi secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Setiap manusia dapat mengatakan bahwa dua sifat itu termasuk paham hukum sendiri (*den begriff des Rechts*).

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti kepastian dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi dapat diperundangkan dan dilaksanakan, bahkan setiap orang dapat dituntut melaksanakannya, setiap tuntutan dapat dipenuhi, dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.

Para ahli berpendapat tentang kepastian orientasi hukum. Kepastian pelaksanaan mengandaikan *kepastian orientasi*³ hukum harus sedemikian jelas sehingga mensyaratkan hakim untuk berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku. Hal itu berarti kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hal-hal yang dilarang dan diwajibkan ataupun yang tidak diwajibkan oleh hukum. Kepastian orientasi secara independen dapat menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas.

2. Keadilan

Tuntutan keadilan mempunyai dua arti. Dalam arti formal, keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum, sedangkan dalam arti material dituntut agar hukum sesuai mungkin dengan ciri-ciri keadilan dalam masyarakat. Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan sama tanpa pengecualian, melainkan bahwa setiap orang dapat diperlakukan menurut hukum yang berlaku, setiap orang yang karena berkedudukan, fungsi, atau kelakuan yang memenuhi deskripsi dalam suatu norma hukum akan diperlakukan menurut norma hukum itu.

Di hadapan hukum, semua orang itu sama derajatnya dan semua orang berhak atas perlindungan hukum. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum yang sesuai dengan asas kesamaan hukum (*Rechtsgleichheit*) atau kesamaan kedudukan di hadapan undang-undang (*gleichheit vor dem Gesetz*).

Hukum yang tidak adil bukanlah hukum, dan tatanan hukum yang diperlukan dan diakui oleh masyarakat bukan sembarangan tatanan normatif, melainkan suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik dan wajar maka arah pelaksanaan keadilan adalah konstitutif atau merupakan persyaratan hakiki bagi hukum.⁴

Suatu hukum itu dikatakan adil atau tidak adil dapat dilihat dari legitimasi tuntutan keadilan yang harus sesuai mungkin dengan ciri-ciri keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan.

3 *Ibid.*, Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, 2011, hlm. 49-51.

4 Ditulis Gustav Radbruch: hukum bisa saja tidak adil ..., tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil.

3. Legitimasi Etis

Legitimasi etis mempersoalkan wewenang kekuasaan politik dari segi norma moral. Legitimasi muncul dalam dua konteks. *Pertama*, setiap tindakan negara, baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma dan moral. Pertanyaan tersebut merupakan unsur penting dalam pengarahannya kekuasaan kebijaksanaan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangkauan tertentu legitimasi etis terhadap setiap kebijaksanaan negara sendiri merupakan masalah etika politik yang pembahasannya membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam hubungan dengan masalah teori hukum kodrat dan positivisme hukum.

Kedua, legitimasi etis yang menjadi pokok bahasan dalam dunia etika politik tidak menyangkut setiap kebijaksanaan dari kekuasaan politik, tetapi dasar kekuasaan politis itu sendiri, dan tidak menyangkut norma hukum masing-masing, tetapi mencakup sistem hukum sendiri sebagai tata tertib penataan normatif kehidupan masyarakat yang dipersoalkan.

Tuntutan legitimasi etis harus dibatasi pada dua bentuk wilayah legitimasi, yaitu legitimasi pragmatis dan legitimasi ideologis. Seorang ideolog tidak hanya mempertanyakan apakah suatu kebijaksanaan sesuai atau tidak dengan ideologinya, tetapi ideologinya juga harus mutlak dan dapat diterima.

Adapun prinsip-prinsip etika politik tidak bersifat mutlak, tetapi selalu dapat dan harus dipertanyakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip moral dasar yang kebal terhadap penyalahgunaan ideologis karena tidak dapat dipakai untuk membenarkan berbagai kebijaksanaan yang cukup konkret. Pendekatan ideologis merupakan pendekatan etis yang defisien atau cacat karena menuntut ketaatan buta terhadap suatu ajaran yang dapat menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban etis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum merupakan peraturan, norma, petunjuk, dan pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Norma hukum diadakan untuk ditujukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, pengertian hukum adalah pengertian sosial, sedangkan pelaksanaan hukum dapat dipaksakan bagi yang melanggar. Adapun sanksi dari pelanggaran tersebut adalah denda, ganti rugi, sosial, dan penjara.

C. Perkembangan Hukum, Kodifikasi Hukum, dan Karakter Hukum

1. Perkembangan Hukum (*Legal Developments*)

Perkembangan hukum (*legal developments*) dalam uraian ini bertujuan untuk mempermudah pendalaman materi secara sistematis agar dapat dibaca secara mudah terhadap tahapan perkembangan sejarah hukum di Indonesia. Ringkasan sejarah hukum sangat bermanfaat karena sebagai landasan hukum yang fundamental terhadap masa sebelumnya (Orde Lama) dan masa sesudah Orde Baru, yaitu masa atau zaman Reformasi.

Untuk mengembalikan citra bangsa Indonesia sebagai negara hukum, terutama dalam bidang hukum dan politik, meyakinkan bahwa revolusi belum selesai, dan tetap menjadikan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 sebagai landasan idiil (Konstitusional), pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1967, dan membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Pembangunan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh dengan Ketetapan MPRS No. XX yang menetapkan, sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 secara murni dan konsekuen, yaitu Pancasila.

Setiap pembangunan lima tahun yang merupakan *Rule of Law* pada tahun 1969 merujuk pada paragraf Pendahuluan Bab XIII Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berasas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Hukum difungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat pada proses pembangunan yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum. Fungsi hukum tidak hanya terbatas pada persoalan normatif, tetapi juga pada persoalan legititatif melalui kodifikasi dan unifikasi hukum Nasional.

Sistem hukum modern yang berasal dari Barat masuk dalam tata hukum kolonial pada paruh akhir abad ke-19 ketika pemerintah Hindia Belanda secara sistematis mulai mengintensifkan kekuasaannya atas negeri jajahan sepanjang abad tersebut. Sistem hukum tersebut secara berangsur memasuki tradisi-tradisi lokal atau adat kerajaan pribumi di berbagai daerah yang dikuasai langsung oleh Belanda yang dikenal dengan nama *de rechtstreeks-bestuurgebieden*. Ketika pemerintah Hindia Belanda mengakhiri kekuasaannya di bumi Indonesia, sistem hukum dan sistem

administrasi pemerintahan yang tersusun menurut tradisi Barat diwarisi para nasionalis Indonesia.

Perkembangan hukum di Indonesia pada tahun pertama kemerdekaan dalam praktiknya merupakan kelanjutan yang telah dipraktikkan pada masa sebelumnya dengan penyesuaian dan modifikasi tertentu. Sekalipun demikian, bagan-bagan konfigurasi yang bersifat Barat tersebut tidak mudah dihilangkan dan tetap bertahan bertahun-tahun kemudian tanpa dapat dielakkan.

2. Kodifikasi Hukum (*Law Codification*)

Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:

- a. hukum tertulis (*statute law, written law*), yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan;
- b. hukum tak tertulis (*unstatutory law, unwritten law*), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis dan ditaati seperti peraturan perundangan (*hukum kebiasaan*).

Kodifikasi hukum merupakan pembukuan secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu. Aliran-aliran (praktik) hukum setelah adanya kodifikasi hukum adalah sebagai berikut.

- a. *Aliran Legisme* yang berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang maka di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran ini berpendapat:

- 1) satu-satunya aliran hukum adalah Undang-Undang;
- 2) di luar Undang-Undang tidak ada hukum.

Dalam aliran Legisme, hakim hanya didasarkan pada Undang-Undang (UU). Indonesia umumnya mempergunakan *Rechtsvinding*, yang berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada setiap Undang-Undang (UU) dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat, apabila setiap ada perkara hakim melakukan tindakan sebagai berikut.

- 1) Menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya.
- 2) Kemudian melihat pada Undang-Undang:
 - a) Apabila Undang-Undang (UU) menyebutnya, perkara diadili menurut Undang-Undang.

- b) Apabila Undang-Undang (UU) kurang jelas, setiap hakim mengadakan penafsiran.
 - c) Apabila ada ruangan-ruangan kosong, hakim mengadakan konstruksi hukum (*rechtsverfijning* atau *argumentum a contrario*).
- 3) Hakim juga melihat jurisprudensi, hukum agama, serta hukum adat yang berlaku.

b. Aliran *Freie Rechtslehre* berpendapat bahwa hukum terdapat di dalam masyarakat. Menurut paham *Freie Rechtslehre* atau hukum bebas, hukum tumbuh di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat berupa kebiasaan dalam kehidupan dan hukum alam (*kodrat*) yang sudah merupakan tradisi sejak dahulu, baik yang diajarkan oleh agama maupun yang merupakan adat istiadat. Aliran *Freie Rechtslehre* berkembang menjadi dua aliran sebagai berikut.

- 1) Aliran hukum bebas sosiologis yang berpendapat bahwa hukum bebas adalah kebiasaan dalam masyarakat dan berkembang secara sosiologis.
- 2) Aliran hukum bebas *natuurrechtelijk* yang berpendapat bahwa hukum bebas adalah hukum alam.

c. Aliran *Rechtsvinding* (aliran di antara aliran *Legisme* dan aliran *Freie Rechtslehre*) berpendapat bahwa hukum terdapat dalam undang-undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Aliran ini bertolak belakang dengan aliran hukum bebas. Berbeda dengan aliran hukum bebas yang bertolak pada hukum di luar Undang-Undang (UU), aliran *Rechtsvinding* mempergunakan Undang-Undang (UU) dan hukum di luar undang-undang (UU). Dalam pemutusan perkara, mula-mula hakim berpegang pada Undang-Undang (UU). Apabila ia tidak menemukan hukumnya, ia harus menciptakan hukum sendiri dengan berbagai cara, seperti mengadakan interpretasi (*penafsiran terhadap Undang-Undang*) dan melakukan konstruksi hukum. Menurut aliran *Rechtsvinding*, hukum terbentuk dengan beberapa cara:

- 1) pembentukan undang-undang (*wetgeving*);
- 2) administrasi (*Tata Usaha Negara*);

- 3) peradilan (*rechtsspraak*);
- 4) kebiasaan/tradisi yang sudah mengikat masyarakat;
- 5) ilmu (*wetenschap*).

Kodifikasi hukum bertujuan mendapatkan kesatuan dan kepastian hukum (*rechseenheid* dan *rechtszekerheid*) yang dihasilkan dari kodifikasi tersebut, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Adapun unsur-unsur suatu kodifikasi adalah jenis hukum tertentu, sistematis, dan lengkap.

Contoh kodifikasi hukum

Di Eropa adalah:

- a. *Corpus Iuris Civilis*, yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari kerajaan Romawi Timur pada tahun 527-565;
- b. *Code Civil*, yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Prancis pada tahun 1604.

Kodifikasi hukum di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Karakter Hukum (*Legal Character*)

Karakter hukum dapat diuraikan secara singkat berikut ini.⁵

a. *Hukum dan Kesadaran Manusia (Law and Awareness)*

Kesadaran hukum pada hakikatnya adalah membicarakan manusia secara umum, bukan membicarakan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu, seperti hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya.

Setiap manusia sejak dilahirkan sampai meninggal tidak lepas dari kepentingan. Kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Akan tetapi, setiap kepentingan manusia selalu diancam atau diganggu oleh bahaya yang ada di sekelilingnya, seperti pencurian, penipuan,

5 Lihat Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 13 dst.

perkosaan, perzinaan, pembunuhan, atau bencana alam, seperti tsunami, lumpur panas, atau taufan.

Perlindungan terhadap bahaya tersebut dapat terpenuhi dengan terciptanya kaidah (*peraturan*) hukum. Dengan terciptanya kaidah hukum, manusia merasa lebih terlindungi terhadap ancaman bahaya. Jadi, fungsi kaidah hukum adalah melindungi kepentingan antarsesama manusia. Adapun kesadaran manusia dapat dilihat dari hal-hal berikut.

1) Kecenderungan individualis (*individualist tendency*)

Kecenderungan ini disebut kecenderungan egois yang ditandai oleh kehendak untuk bereksistensi. Kecenderungan ini menyebabkan manusia untuk selalu mempertahankan diri untuk menguasai lingkungan sekitarnya.

2) Kecenderungan kolektivis (*the tendency of collectivist*)

Pada diri manusia terdapat kecenderungan kolektivis, yang ditandai bahwa manusia selalu ingin mengadakan hubungan (kontak) dengan pihak lain di luar dirinya. Jika kecenderungan individualis membuat manusia pasif, kecenderungan kolektivis membuat manusia aktif dan setiap individu manusia terlebur dalam masyarakat (*persekutuan*) dengan manusia lainnya.

3) Kecenderungan orde (*orientation order*)

Manusia kadang-kadang terombang-ambing oleh kedua kecenderungan tersebut sampai muncul kecenderungan ketiga, yaitu kecenderungan orde (*orientation order*). Kecenderungan ini memberikan arah penyesuaian dan keseimbangan serta membimbing manusia kepada kehidupan yang adil dalam suatu masyarakat yang teratur dengan norma yang berlaku di dalamnya.

b. Hukum dan Orde Tendenz

Hukum adalah norma hidup untuk berbuat dan bertindak dalam masyarakat. Hukum merupakan pengaturan (*ordering*) dari masyarakat. Pahami hukum tersebut hanya mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat, sedangkan hubungan manusia dengan Tuhan dengan norma agama tidak diatur sama sekali.

c. **Teori Hukum Kodrat**

Paham hukum kodrat merupakan aturan filsafat Yunani dan Romawi sekitar tahun 300 SM sampai tahun 200 sesudah Masehi yang mempunyai pengaruh besar atas pemikiran Eropa kemudian hari. Ajaran tentang hukum kodrat dikembangkan lebih lanjut oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan paham *lex aeterna*, yaitu hukum abadi ilahi yang dicerminkan dalam hukum kodrat alam semesta.

Hukum abadi ilahi itu diresapkan dengan dua cara seperti dalam alam yang tidak berakal budi. Hukum kodrat identik dengan hukum alam, yaitu hukum yang dilihat dalam segala gerakan dan perkembangan alam. Bagi makhluk yang berakal budi, hukum kodrat merupakan hukum moral yang dapat menuntun manusia untuk menentukan hal-hal yang disebut adil dan hal-hal yang tidak adil. Paham hukum kodrat menjadi salah satu paham utama filsafat Eropa.

1) **Teori Hukum Kodrat Menurut Thomas Aquinas**

Dalam tradisi Cicero, Thomas membedakan antara tiga hukum, yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum manusia atau positif (*lex humana*). Hukum abadi adalah kebijaksanaan atau rencana abadi ilahi yang berkenan menciptakan alam semesta maka seluruh realitas alam semesta dan segala yang terjadi di dalamnya mengikuti hukum abadi.

Dilihat dari segi ciptaan, dapat dikatakan bahwa hukum kodrat termasuk pada hukum abadi. Hal tersebut disebabkan ciptaan dengan segala apa yang ada padanya berasal dari kebijaksanaan ilahi dan berwujud menurut hukum abadi yang lebih mencerminkan kodratnya. Kodrat tersebut secara hakiki merupakan realitas dan kekuasaan suatu ciptaan yang dampak pada lingkungannya berwujud organisme yang bernyawa, berkembang, bereaksi, berkembang biak, dan sebagainya ditentukan oleh kodratnya.

Walaupun berada di bawah hukum alam, sebagai makhluk rohani, manusia mempunyai kebebasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia tidak secara buta harus tunduk terhadap faktor-faktor alamiah, tetapi dapat mengambil sikap terhadap dorongan insting, nafsu, dan emosi. Dengan kata lain, walaupun dalam batas kemampuan alamiah, setiap manusia dapat menentukan cara ia bertindak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami satu-satunya makhluk di dunia yang dapat bertindak melawan kodratnya adalah manusia. Hukum kodrat baginya tidak bekerja dengan otomatis, tetapi berwujud hukum dalam arti yang sesungguhnya, namun juga mengabaikan kewajiban. Secara lebih terperinci, hukum positif harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiel. Secara formal, hukum positif harus adil, yang berarti memenuhi tiga hal seperti:

- a) hukum harus terarah pada pelaksanaan kesejahteraan umum;
- b) hukum harus diadakan oleh lembaga yang berwenang;
- c) hukum harus membebani para bawahan hukum secara merata secara materiel.

Dilihat dari segi isi, Thomas membedakan tiga cara hukum positif dapat sesuai dengan hukum kodrat, yaitu:

- a) apabila hukum positif mengungkapkan hukum kodrat (misalnya, dengan melarang pembunuhan sewenang-wenang);
- b) apabila hukum positif dapat berupa kesimpulan logis dari hukum kodrat (misalnya, dari norma keadilan dapat ditarik kesimpulan tentang sah tidaknya sistem bunga atas suatu uang pinjaman);
- c) hukum positif memberikan ketentuan dalam hal memang perlu diatur, tetapi dari segi hukum, kodrat sama saja pengaturan yang dipilih.

2) Hukum Akal Budi Zaman Pencerahan

Filsafat *Thomas Aquinas* masih pada abad ke-13 voluntarisme mulai menggerogoti anggapan yang mendasar teori hukum kodrat bahwa realitas memiliki struktur objektif yang dapat diketahui oleh akal budi. Abad tersebut yang menyaksikan berbagai perubahan dramatis tersebut adalah abad ke-16 era Reformasi protestan yang berhasil memasukkan hak subjektivitas ke dalam agama, ilmu alam membebaskan diri dari dogma-dogma *Aristoteles* dengan mengembangkan metode pengamatan empiris.

Hukum kodrat oleh kaum rasionalis tidak dipahami oleh *Aquinas* atas dasar sebagai struktur objektif realitas sebagai dalil-dalil normatif yang didiskusikan oleh akal budi dan hakikat manusia. Dengan demikian, distingsi antara hukum kodrat primer dan sekunder hilang hukum kodrat menjadi kaku dan apriori. Oleh sebab itu, teori hukum kodrat rasionalisme tidak bertahan lama.

3) **Meninjau Kembali Teori Hukum Kodrat**

Suatu tatanan sosial setiap manusia harus irasional yang berarti sesuai dengan kebutuhan masyarakat bahwa ia menunjang harapan dan ciri-ciri masyarakat tentang suatu kehidupan yang wajar. Suatu tatanan masyarakat hanya sah apabila memenuhi tuntutan rasionalis ini.

Teori hukum kodrat menjamin kebebasan tatanan sosial dan suatu hukum positif hanya diakui apabila sesuai dengan tuntutan dasar martabat manusia. Fakta menyatakan bahwa suatu pihak yang memiliki kekuasaan tidak memiliki hak apa pun untuk menetapkan hukum kepada orang lain karena memerintah orang lain harus didasarkan pada kodrat manusia, yang implikasinya adalah segenap hukum dan peraturan harus dipertanggungjawabkan secara etis.

d. Hukum dan Norma Kesopanan (*Laws and Norms of Decency*)

Perbandingan dan hubungan antara norma hukum dan norma kesopanan adalah sebagai berikut.

- 1) Norma hukum dan norma kesopanan didukung oleh kesadaran kolektif. Perbedaannya, norma hukum didukung oleh negara (suatu bentuk organisasi kemasyarakatan yang terbesar), sedangkan norma kesopanan didukung oleh masyarakat (komunitas) yang terbatas.
- 2) Pelanggaran terhadap norma hukum diadili oleh pengadilan, sedangkan pelanggaran norma kesopanan diancam dengan sanksi yang berwujud kecaman atau ketidaksenangan dari masyarakat.
- 3) Tujuan norma hukum adalah menciptakan kedamaian, ketenteraman, dan keteraturan dalam masyarakat.
- 4) Wilayah pengaruh keberlakuan norma kesusilaan adalah umat manusia yang secara universal berada pada wilayah pengaruh keberlakuan norma hukum negara dan wilayah pengaruh keberlakuan kesopanan.

e. Hukum dan Kekuasaan

Hubungan hukum dan kekuasaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Hukum adalah penataan (*ordering*) yang dibuat oleh negara dan hukum menentukan atau mewujudkan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

- 2) Hukum pada suatu sisi sangat erat dengan unsur keadilan (lihat arti kata yang berkaitan dengan kata *gerechtigheid*) dan pada sisi lain, hukum juga berhubungan dengan kekuasaan (lihat makna substansi kata hukum yang berkaitan dengan autorita (*kewibawaan*)).
- 3) Hubungan keadilan dan kekuasaan diungkapkan oleh Pascal, sebagaimana dikutip oleh Notohamidjoyo⁶ sebagai berikut, "Memang benar bahwa keadilan diikuti, memang keadilan perlu ditaati, keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya, kekuasaan tanpa keadilan sewenang-wenang, keadilan tanpa kekuasaan akan ditentang sebab orang jahat akan senantiasa ada, kekuasaan tanpa keadilan akan digugat, keadilan dan kekuasaan harus dihubungkan. Oleh sebab itu, sesuatu yang adil harus kuat dan sesuatu yang kuat harus dijadikan adil."

f. Hukum dan Kebebasan

Kebebasan pada dasarnya merupakan hak asasi setiap manusia yang sifat hukumnya mengikat. Pendapat lain mengatakan bahwa apabila ada ikatan, tidak ada kebebasan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa hukum itu mengikat agar manusia memiliki kebebasan. Beberapa jenis kebebasan, antara lain:

- 1) kebebasan untuk hidup;
- 2) kebebasan untuk memilih;
- 3) kebebasan untuk memiliki;
- 4) kebebasan dari paksaan luar;
- 5) kebebasan dari paksaan batin;
- 6) kebebasan dari rasa takut dan seterusnya.

Hukum mengikat dalam rangka melakukan kebebasan yang dimiliki dan diinginkan oleh manusia seperti ketaatan pada undang-undang yang berdampak pada adanya kebebasan hidup setiap individu. Taat pada hukum pada dasarnya agar kita dapat hidup dengan bebas dari negara yang mencampuri hubungan pribadi dengan Tuhan⁷ (*Perspektif Filsafat Hukum*), dalam *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Nomor 1, Tahun 5, Januari-Juni 2005.

6 *Ibid.*

7 Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Utama, 2001, hlm. 79,

Ada pula kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Hak atas kebebasan beragama termuat dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 29 *Declarations of Human Rights*, Pasal 18 *Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 18. Adapun hak atas Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat termuat dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 dan *Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 19.

D. Penafsiran Hukum, Konstruksi Hukum, Sumber Hukum

1. Penafsiran Hukum (*Rechtsinterpretatie*)

Penafsiran hukum yang dikenal dengan istilah interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai teks Undang-Undang (UU) agar ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan dengan melakukan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak jelas, yaitu penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim, sebagai salah satu penegak hukum, harus dilandasi dengan pertimbangan dari asas-asas penerapan hukum positif yang dilakukan dalam rangka:

- a. melaksanakan hukum sebagai fungsi pelayanan atau pengawasan terhadap kegiatan masyarakat;
- b. mempertahankan hukum akibat terjadi pelanggaran atas suatu aturan hukum seperti yang dilakukan oleh badan peradilan.

Penafsiran hukum adalah tugas dari badan peradilan yang pada hakikatnya merupakan tugas dan wewenang seorang hakim untuk memutus suatu perkara dengan pertimbangan yang ada serta dapat dijadikan landasan kuat bagi hakim dalam mengeluarkan keputusan hukum, tanpa memandang subjek ataupun objek yang lebih dikenal. Dengan kata lain, tidak memihak kepada siapa pun walaupun pelaku mempunyai hubungan dekat dengan aparat penegak hukum peradilan, yaitu hakim. Secara garis besar, dalam pandangan hukum, semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi sebagai makhluk Allah SWT. untuk menjalani kehidupan, beribadah, ataupun sebagai pencari keadilan hukum. Indonesia menggunakan aliran *Rechtsvinding* berarti hakim memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terikat (*gebonden vrijheid*) dan ketertarikan yang bebas (*vrije gebondenheid*).

Uraian tersebut telah menggambarkan pentingnya penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim untuk memutus suatu perkara dan menyelesaikan suatu sengketa dalam proses penyelenggaraan peradilan. Adapun hal-hal penting dalam suatu penafsiran hukum yang dinilai penting untuk diketahui dan dipahami sesuai dengan perkembangan pengetahuan ilmu hukum, yaitu sebagai berikut.

a. Macam-macam Penafsiran Hukum

Menurut Logemann, dalam melakukan penafsiran hukum, ahli hukum diwajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang yang dianggap menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang (UU).⁸ Dalam usaha mencari dan menentukan kehendak pembuat Undang-Undang (UU) itulah dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa metode atau cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan seorang ahli hukum, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penafsiran gramatikal (*taatkundige interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat dalam konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang (UU) dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.
- 2) Penafsiran sejarah (*historische interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan dengan meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan Undang-Undang (UU) yang bersangkutan.
- 3) Penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), yaitu penafsiran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan, dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat dalam suatu tata hukum, dalam rangka penemuan asas-asas hukum umum yang dapat diterapkan dalam masalah hukum tertentu.
- 4) Penafsiran sosiologis (*teleologis*) sejalan dengan pandangan L.J. van Apeldoorn, salah satu tugas utama seorang ahli hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal konkret yang ada di dalam masyarakat.

8 Lihat tulisan Mohammad Aldyan, S.H., "Penafsiran dan Konstruksi Hukum" Sarana Sosialisasi Hukum dari Masyarakat Indonesia oleh Masyarakat Indonesia dan untuk Masyarakat Indonesia, tempat tidak disebutkan, 2008.

- 5) Penafsiran otentik, yaitu penafsiran terhadap kata, istilah, atau pengertian di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat Undang-Undang (UU) sendiri.

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim untuk memeriksa dan memberi keputusan atas perkara yang diserahkan kepadanya dan tidak diperbolehkan menolak dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas pengaturannya. Adapun Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dipertegas kembali asas-asas moralitas yang mendasari profesi hakim sebagai pegangan dalam bersikap dan bertindak selama mengemban profesi sebagai hakim peradilan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

b. Cara Penafsiran Hukum

- 1) Dalam pengertian subjektif dan objektif
 - a) Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
 - b) Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
- 2) Dalam pengertian sempit dan luas
 - a) Dalam pengertian sempit (*restriktif*), yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi.
 - b) Dalam pengertian secara luas (*ekstensif*), yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya.
- 3) Dilihat dari sumbernya, penafsiran dapat bersifat:
 - a) otentik, yaitu penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum;

- b) doktrinair atau ilmiah, yaitu penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoretis;
- c) hakim, yaitu penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu.

c. Metode Penafsiran Hukum

- 1) Penafsiran gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran menurut bahasa atau kata-kata.
- 2) Penafsiran historis, yaitu meneliti sejarah undang-undang yang bersangkutan.
- 3) Penafsiran sistematis, yaitu suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan ataupun pada perundang-undangan hukum lainnya.
- 4) Penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan tujuannya, yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.
- 5) Penafsiran otentik, yaitu penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak boleh oleh siapa pun dan pihak mana pun.
- 6) Penafsiran perbandingan, yaitu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dan hukum positif yang berlaku antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.

2. Konstruksi Hukum (*Rechtsconstructie*)

a. Konstruksi Analogi (*Argumentum Peranalogiam*)

Analogi merupakan proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio ledis (*genus*) dari suatu undang-undang kemudian menerapkannya pada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, penafsiran peraturan hukum sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dianggap sesuai dengan peraturan tersebut.

Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus hukum perdata. Adapun hukum pidana tidak mengenal analogi karena bertentangan dengan asas pokok hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa ketentuan perundang-undangan yang menetapkannya terlebih dahulu (*nullum crimen sine lege*). Dengan konstruksi analogi, seorang ahli hukum harus memasukkan suatu perkara dalam lingkup pengaturan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dibuat untuk menyelesaikan suatu perkara.

b. Konstruksi Penghalusan Hukum (*Rechtsverfijning*)

Konstruksi ini merupakan kebalikan dari konstruksi analogi. Apabila analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan, penghalusan hukum justru mempersempit lingkup peraturan perundang-undangan (bersifat *restriktif*).

c. Konstruksi Kontrario (*Argumentum a Contrario*)

Dalam keadaan ini, hakim harus memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan tersebut.⁹ Perbedaannya adalah dalam analogi, hakim akan menghasilkan kesimpulan yang positif dalam arti bahwa ia menerapkan aturan pada masalah yang sedang dihadapinya, sedangkan pada konstruksi *Argumentum a Contrario*, hakim sampai pada kesimpulan yang negatif.

3. Sumber Hukum (*Legal Resources*)

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga pelanggaran aturan itu akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Berikut ini adalah macam-macam sumber hukum.

- a. Sumber hukum materiel, yaitu tempat materi hukum diambil dari faktor pembentukan hukum. Sumber hukum materiel merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan

⁹ *Argumentum a Contrario*, yaitu pengungkapan secara berlawanan, yaitu penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-Undang.

Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus hukum perdata. Adapun hukum pidana tidak mengenal analogi karena bertentangan dengan asas pokok hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa ketentuan perundang-undangan yang menetapkannya terlebih dahulu (*nullum crimen sine lege*). Dengan konstruksi analogi, seorang ahli hukum harus memasukkan suatu perkara dalam lingkup pengaturan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dibuat untuk menyelesaikan suatu perkara.

b. Konstruksi Penghalusan Hukum (*Rechtsverfijning*)

Konstruksi ini merupakan kebalikan dari konstruksi analogi. Apabila analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan, penghalusan hukum justru mempersempit lingkup peraturan perundang-undangan (bersifat *restriktif*).

c. Konstruksi Kontrario (*Argumentum a Contrario*)

Dalam keadaan ini, hakim harus memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan tersebut.⁹ Perbedaannya adalah dalam analogi, hakim akan menghasilkan kesimpulan yang positif dalam arti bahwa ia menerapkan aturan pada masalah yang sedang dihadapinya, sedangkan pada konstruksi *Argumentum a Contrario*, hakim sampai pada kesimpulan yang negatif.

3. Sumber Hukum (*Legal Resources*)

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga pelanggaran aturan itu akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Berikut ini adalah macam-macam sumber hukum.

- a. Sumber hukum materiel, yaitu tempat materi hukum diambil dari faktor pembentukan hukum. Sumber hukum materiel merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan

⁹ *Argumentum a Contrario*, yaitu pengungkapan secara berlawanan, yaitu penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-Undang.

sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (*pandangan keagamaan, kesusilaan*), hasil penelitian ilmiah (*kriminologi*), keadaan geografis, dan lain-lain.

b. Sumber hukum formal, yaitu peraturan yang memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan peraturan itu berlaku secara formal. Disebut sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara dan bentuk hukum positif tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut. Beberapa sumber hukum formal adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-undang, yaitu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-Undang (UU) dalam arti formal dan materiel:
 - a) dalam arti formal, yaitu keputusan penguasa yang diberi nama Undang-Undang (UU) yang dilihat dari segi bentuknya dapat disebut undang-undang. Undang-Undang (UU) dibuat serta dikeluarkan oleh Badan Perundang-undangan yang berwenang;
 - b) dalam arti materiel:
 - (1) penetapan yang diikuti penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas;
 - (2) semua peraturan perundangan bersifat berlaku untuk umum;
 - (3) keputusan penguasa yang dilihat dari segi isi mempunyai kekuatan mengikat untuk umum.
- 2) Kebiasaan, yaitu tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, normal dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Kebiasaan dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa harus berlaku demikian. Syarat timbulnya kebiasaan adalah:
 - a) syarat materiel, yaitu perbuatan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat tertentu;

- b) syarat intelektual, yaitu keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Hukum kebiasaan merupakan himpunan kaidah yang tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan, tetapi dalam kenyataannya telah ditaati karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum dan kaidah-kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa masyarakat yang tidak termasuk hubungan badan-badan perundang-undangan. Hukum kebiasaan dapat ditaati jika ada syarat, yaitu:

- a) suatu perbuatan tetap dilakukan orang;
- b) keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena telah merupakan kewajiban.

Kelemahan hukum kebiasaan:

- a) bersifat tidak tertulis sehingga tidak dapat dirumuskan secara eksplisit dan pada umumnya sukar menggantinya;
- b) tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena bentuk kebiasaan mempunyai sifat beragam.

Persamaan undang-undang dan hukum kebiasaan adalah:

- a) merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat dalam masyarakat;
- b) perumusan kesadaran hukum suatu bangsa.

Perbedaan undang-undang dan hukum adalah:

- a) Undang-Undang (UU) merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang, subjek hukum, sedangkan kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan;
- b) Undang-Undang (UU) lebih menjamin kepastian hukum daripada kebiasaan karena kebiasaan hanya sebagai pelengkap.

4. Perjanjian Internasional (*Traktat*)

Perjanjian Internasional (*traktat*) merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Dikatakan demikian karena traktat harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai perjanjian internasional. Dasar hukum perjanjian internasional adalah Pasal 11 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang berisi:

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

5. Yurisprudensi

Pengertian yurisprudensi di negara-negara yang hukumnya *Common Law* sedikit lebih luas yang mempunyai makna ilmu hukum, sedangkan pengertian yurisprudensi di negara-negara Eropa Kontinental termasuk Indonesia hanya berarti putusan pengadilan.

Sudikno¹⁰ mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan yang pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan, yurisprudensi dapat berarti putusan pengadilan. Dalam arti sebagai putusan pengadilan, yurisprudensi dibedakan lagi dalam dua macam:

- a. Yurisprudensi biasa, yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti yang terdiri atas:
 - 1) putusan perdamaian;

10 Sudikno Mertokusumo adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata yang lahir di Surabaya, 7 Desember 1924, menjadi dosen di almamaternya (1963), dan beberapa kali menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi penasihat hukum pemerintah RI dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di pengadilan Singapura. Ia juga masih aktif mengajar S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Lihat situs http://id.wikipedia.org/wiki/Sudikno_Mertokusumo.

- 2) putusan Pengadilan Negeri yang tidak dibanding;
 - 3) putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dikasasi;
 - 4) seluruh Putusan Mahkamah Agung (MA).
- b. Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim dalam perkara sejenis.

6. Doktrin

Doktrin adalah pendapat dari pakar senior yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum tepercaya, terutama pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut. Doktrin tersebut tidak hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, tetapi juga dalam pergaulan hukum internasional. Bahkan, doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting. Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian dan kewarisan, doktrin merupakan sumber hukum utama, yaitu pendapat pakar-pakar fiqh, seperti Syafii, Hambali, Malik, dan sebagainya.

E. Subjek Hukum dan Objek Hukum

1. Subjek Hukum (*Rechts Subjek*)

Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, yaitu individu (orang) dan badan hukum (*perusahaan, organisasi, institusi*). Dengan kata lain, subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Beberapa subjek hukum adalah sebagai berikut.

a. Manusia Biasa (*Natuurlijke Person*)

Setiap manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak cakap seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (*telah berusia 21 tahun dan berakal sehat*).

2) Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Orang yang Tidak Cakap untuk Membuat Perjanjian adalah:

- a) Orang-orang yang belum dewasa (*belum mencapai usia 21 tahun*).
- b) Orang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) yang terjadi karena gangguan jiwa pemabuk atau pemboros.
- c) Seorang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri.

Dalam pengertian secara yuridis, ada dua alasan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum. *Pertama*, manusia mempunyai hak-hak subjektif. *Kedua*, kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (*Pasal 2 KUHPerdata*), tetapi tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat penulis sampaikan terkait dengan ketentuan agar suatu subjek dapat dikatakan cakap menurut hukum ataupun tidak cakap menurut hukum.

1) Syarat-syarat cakap hukum:

- a) seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun);
- b) seseorang yang berusia di bawah 21 tahun, tetapi pernah menikah;
- c) seseorang yang sedang tidak menjalani hukum;
- d) berjiwa sehat dan berakal sehat.

2) Syarat-syarat tidak cakap hukum:

- a) seseorang yang belum dewasa;
- b) sakit ingatan;
- c) kurang cerdas;
- d) orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- e) seorang wanita yang bersuami.¹¹

11 Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Badan Hukum (Legal Person)¹²

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (*melakukan perbuatan hukum*). Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan berbagai persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggota suatu badan hukum.

Hal tersebut sangat jelas bahwa badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Didirikan dengan akta notaris.
- 2) Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan negara setempat.
- 3) Dimintakan pengesahan Anggaran Dasar (AD) kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk badan hukum dana pensiun, pengesahan anggaran dasarnya dilakukan Menteri Keuangan.
- 4) Diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.
- 5) Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut.
- 6) Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
- 7) Memiliki tujuan tertentu.
- 8) Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Bermacam-macam bentuk badan hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Badan hukum publik, yaitu negara, Daerah Swatantra Tingkat I dan II, kotamadya, kotapraja, desa.
- 2) Badan hukum perdata yang dapat dibagi lagi dalam:

12 Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 23.

- a) Badan Hukum (Perdata) Eropa, seperti perseroan terbatas, yayasan, lembaga, koperasi, gereja.
- b) Badan Hukum Indonesia, seperti masjid, wakaf, koperasi Indonesia.

2. **Objek Hukum (*Rechts Object*)**

Badan hukum privat (*privat recths persoon*) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu perhubungan hukum. Objek hukum disebut benda.

Menurut Hukum Perdata,¹³ benda adalah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang, sedangkan menurut Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pengertian benda dibedakan dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹⁴ Objek hukum yang bersifat kebendaan adalah sebagai berikut.

a. **Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud**

1) Benda berwujud

Benda berwujud mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, diraba oleh pancaindra, dan sering dapat diukur dan ditimbang. Misalnya, rumah, buku, pohon, mobil, dan sebagainya.

2) Benda tidak berwujud (*benda immaterial*)

Benda tidak berwujud (*benda immaterial*) mencakup semua jenis hak, seperti hak cipta, hak merek, hak atas tagihan, dan lain-lain.

b. **Benda Bersifat Kebendaan (*Materiekegoderen*)**

1) Benda bergerak (*moving objects*)

Benda bergerak tersebut dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

13 Subekti dan R. Tjiprosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 157.

14 *Ibid.*

- a) Benda bergerak karena sifatnya menurut Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)¹⁵ adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, sepeda, meja, hewan, wesel, dan yang dapat berpindah sendiri, contohnya ternak.
- b) Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang (UU),¹⁶ misalnya hak memungut hasil (*Uruchtgebruik*) atas benda-benda bergerak, hak pakai (*Gebruik*) atas benda bergerak, pohon-pohon, gedung, mesin-mesin dalam pabrik, hipotik, dan saham-saham perseroan terbatas.

2) Benda tidak bergerak (*things don't move*)

Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

- a) Benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.
- b) Benda tidak bergerak karena tujuannya, yaitu mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik.
- c) Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak atas benda yang tidak bergerak. Misalnya, hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotek.

Dengan demikian, benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan empat hal berikut.

- a) Pemilikan (*bezit*), yaitu dalam hal benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),¹⁷ yaitu *berzitter* dari barang bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.
- b) Penyerahan (*levering*), yaitu terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (*hand by hand*) atau dari

15 *Ibid.*, hlm. 159.

16 *Ibid.*, hlm. 160 (Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

17 *Ibid.*, hlm. 495.

tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

- c) Kedaluwarsa (*verjaring*), yaitu untuk benda-benda bergerak tidak mengenal kedaluwarsa, sebab *bezit* di sini sama dengan pemilikan (*eigendom*) atas benda bergerak tersebut, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal kedaluwarsa.
- d) Pembebanan (*bezwaring*), yaitu terhadap benda bergerak dilakukan pand (gadai, fidusia), sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotek adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia.

c. **Benda Bersifat Tidak Kebendaan (*Immateriekegoderen*)**

Benda yang bersifat tidak kebendaan (*immateriekegoderen*) adalah benda yang dirasakan oleh pancaindra (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya, merek perusahaan, paten, dan ciptaan musik/lagu.

F. **Nilai-nilai Dasar Hukum**

Dalam segi formal keadilan dan kewajiban hukum terjamin, tetapi secara materiel, hukum harus diarahkan pada nilai-nilai yang secara hakiki termasuk dengan paham atau ide hukum (ide dalam arti pelaton, sebagai hakikat).¹⁸ Dalam fungsi hukum ini terlihat dua nilai yang secara hakiki hendak dilindungi dan dijamin serta memiliki nilai kesamaan dan kebebasan hanya karena dua nilai itu dihargai oleh manusia.

1. **Kesamaan**

Eksistensi hukum dapat diterima apabila hukum menjamin kesamaan. Kesamaan ini adalah kesamaan kedudukan di hadapan hukum yang termuat dalam patokan bahwa hukum berlaku umum maka hukum menjamin kedudukan dasar yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam merealisasikan harapan hidup masyarakat.

Hal tersebut dapat ditentukan dalam kerangka paham tentang tatanan dunia dan masyarakat yang wajar apabila dalam kebudayaan feodal masyarakat dilihat sebagai tatanan hierarkis dalam arti setiap

18 Dengan "ide" hukum (dimaksud gagasan mengenai apa yang kita kehendaki kebenarannya apabila kita mengusahakan hukum).

pihak dijamin sama dalam menunaikan kewajiban, dan menikmati haknya menurut kedudukan dan tatanan tersebut. Inti kesamaan, yaitu diperlakukan menurut kriteria objektif yang berlaku dan bukan menurut siapa yang lebih mampu untuk melaksanakan kehendak yang dijamin oleh hukum dalam tatanan sosial yang feodal.

2. Kebebasan

Hukum mencegah dari mencampuri dan mendominasi kehidupan sehingga secara langsung menunjukkan bahwa hukum secara hakikat harus melindungi kebebasan. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan menjadi pokok filsafat hukum Hegel dan filsafat politik Hobbes yang sepihak tampak kontradiktif. Jadi, hukum secara hakiki pada intinya merupakan hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri, lepas dari paksaan untuk hidup menurut kemampuannya sendiri.

3. Solidaritas

Solidaritas sosial diartikan sebagai harapan tertentu (*expectation*) dan terus-menerus yang diciptakan masyarakat secara bersama dan merata serta dapat menyebabkan masyarakat menikmati dunia tanpa ragu, disertai dengan interaksi secara normal dalam kehidupan yang stabil. Oleh karena itu, nilai tersebut harus menuntut bahwa hukum menunjang sikap semua anggota masyarakat sebagai senasib sepenanggungan.

Fraternite, persaudaraan, tanggung jawab dan keadilan sosial merupakan istilah modern yang mengungkapkan kesadaran secara hakiki yang termuat dalam segala tatanan yang pantas disebut hukum, yaitu bahwa setiap manusia bertanggung jawab antarsesama manusia dan tidak boleh ada di antara manusia yang dibiarkan berada dalam penderitaan.

BAB 2

ASAL-USUL TERBENTUKNYA HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Hal ini secara langsung memengaruhi hukum yang diberlakukan di negara ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan bernegara dengan menciptakan tata sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia karena dalam hukum pidana terkandung aturan yang menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (*nestapa*) dan menentukan syarat pidana dapat dijatuhkan.¹ Materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan sering digambarkan sebagai pedang bermata dua, satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, dan pada sisi lain, penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memerhatikan konteks masyarakat tempat hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung

1 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 1.

1. Tradisi Hukum Setelah Kemerdekaan

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia memiliki dua tradisi hukum yang masing-masing terbuka untuk dipilih, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk-beluknya dan sistem hukum rakyat dengan segala keragaman.

Pada awalnya para pemuka nasional mencoba membangun hukum Indonesia dengan mencoba melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial yang tidak mudah. Inilah periode awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional. Akan tetapi, dalam kenyataannya hal tersebut berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasinya tidak sesederhana model strategi dalam doktrin.

Para advokat Indonesia bersama cendekiawan lainnya menginginkan negara yang memakai sistem hukum corak Eropa yang berlaku pada masa kolonial. Hal tersebut karena berbagai kesulitan yang menurut Soetandyo, tidak hanya timbul disebabkan keragaman hukum rakyat, tetapi karena sistem pengelolaannya sebagai suatu tata hukum yang modern terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tidak mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.

Pernyataan ini bukan alasan pembenar terhadap berlangsungnya keadaan dan proses pewarisan sistem hukum kolonial di Indonesia pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, faktanya terdapat faktor yang sulit dinafikan dalam kerangka membangun sistem hukum nasional Indonesia yang benar-benar terlepas dari tradisi sistem hukum kolonial.

Faktor dimaksud bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tidak terumus secara eksplisit, tetapi kondisi yang tidak mudah dirombak, termasuk seluruh alur perkembangan sistem hukum di Indonesia yang telah banyak terbangun dan tergariskan secara pasti berdasarkan konfigurasi asas-asas yang telah diletakkan sejak lama sebelum runtuhnya kekuasaan pemerintahan kolonial.

Dalam perjalanan selanjutnya, memilih dan meyakini bahwa lebih praktis untuk melanjutkan tradisi sistem hukum kolonial yang dianggap telah dipahami serta memiliki struktur yang lebih pasti ternyata bukan tanpa masalah, melainkan mengesampingkan pilihan terhadap pemakaian hukum rakyat yang beragam dan tidak terumus secara eksplisit, dengan memilih pola hukum Eropa yang menganut asas ketunggalan melalui cara kodifikasi bukan tanpa konsekuensi.

Problema yang kemudian muncul adalah masalah fleksibilitas norma tertulis dalam implementasinya pada lembaga pengadilan. Rumusan norma hukum yang eksplisit dalam wujud perundang-undangan terkesan kaku dan limitatif meskipun dalam pengimplementasiannya masih terbuka peluang bagi hakim untuk melakukan interpretasi karena kodifikasi norma hukum apa pun tercipta dengan kondisi yang tidak selalu lengkap. Selain aspek norma, faktor lembaga pengadilan juga merupakan problema tersendiri karena keberadaan lembaga tersebut juga merupakan hasil introduksi pemerintah kolonial dalam sistem hukum rakyat jajahan.

Oleh karena itu, dalam penerapannya untuk kasus-kasus konkret di pengadilan, norma atau kaidah hukum sering memunculkan berbagai persoalan yang bermuara pada sulitnya mewujudkan keadilan substansial (*substantial justice*) bagi para pencariinya karena cara pandang hakim terhadap hukum sering sangat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim hanya menangkap apa yang disebut keadilan hukum (*legal justice*), tetapi gagal menangkap keadilan masyarakat (*social justice*). Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan hakim peradilan. Akibatnya, kinerja pengadilan sering disoroti karena sebagian besar dari putusan pengadilan masih menunjukkan lebih kental (*bau formalisme-prosedural*) daripada kedekatan pada rasa keadilan warga masyarakat.

Menurut Esmi Warassih dalam pidato pengukuhanannya sebagai guru besar, penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.⁸ Meskipun hal tersebut disadari, tampaknya untuk membangun hukum nasional yang bermula dari titik nol, apalagi bertolak dari konfigurasi baru yang masih harus ditemukan terlebih dahulu ditambah oleh budaya hukum para yuris yang mendukung beban kewajiban membangun hukum nasional, sangat sulit untuk menemukan pemikiran-pemikiran yang lateral dan menerobos. Oleh karena itu, untuk berpikir dan bertindak menurut alur tradisi ini dan

8 Lihat Esmi Warassih Pujirahayu, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)"; Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001, hlm. 12.

bergerak dengan modal sistem hukum positif peninggalan hukum Hindia Belanda, namun tidak dibenarkan apabila dikatakan bahwa para pemuka hukum Indonesia tidak memiliki ide-ide baru untuk melepaskan diri dari pasungan hukum kolonial.

2. Hukum Tertulis Dianggap Futuristik dan Berkepastian

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara di dunia sekarang ini pada umumnya termasuk dalam kategori hukum yang modern.⁹ Hukum modern memiliki ciri:

- a. bentuknya tertulis;
- b. berlaku untuk seluruh wilayah negara;
- c. sebagai instrumen yang secara sadar dipakai untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Ketiga ciri hukum modern tersebut secara eksplisit melekat pada sistem hukum yang berasal dari Eropa daratan yang diwarisi Indonesia setelah merdeka. Oleh karena itu, pertimbangan untuk memilih hukum yang bentuknya tertulis dianggap lebih berorientasi ke masa depan.

Pertimbangan lainnya seiring dengan cita-cita pendirian Negara Bangsa dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah masalah uniformitas. Apabila pilihan dijatuhkan pada hukum adat, hal tersebut akan menuai sejumlah masalah pada kemudian hari karena keragaman hukum adat sebagai sistem hukum rakyat umumnya tidak terumus secara eksplisit.

Keadaan tersebut jika ditengok jauh ke belakang merupakan hasil kuatnya pengaruh konsep *adatrechtspolitik*-nya Van Vollenhoven yang sangat ironi dan memutarbalikkan fakta. Hal ini disebabkan *adatrechtspolitik* yang dimaksudkan untuk melestarikan hukum lokal yang tetap di tangan rakyat setempat sebenarnya mengukuhkan kekuasaan lembaga-lembaga yang diawasi oleh Belanda atas hukum adat yang merupakan hasil karya penguasa Belanda; dengan pembentukan pengadilan adat oleh pemerintah kolonial dengan pemeriksaan keputusan pengadilan adat oleh *Landraad*

⁹ Satjipto Rahardjo, "Hukum dalam Perspektif Perkembangan", dalam *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 178.

dengan pemberian keputusan persoalan adat oleh hakim *Landraad* yang berkebangsaan Belanda.

Hal tersebut membuktikan bahwa penelitian adat yang telah dilakukan nyata-nyata telah melanggar asas utama teori hukum adat bahwa hukum adat itu hidup dalam tradisi lokal, kini setelah ditulis hukum adat hidup dalam buku oleh para hakim Belanda digunakan seolah-olah buku-buku tersebut adalah kitab Undang-Undang.¹⁰

C. Sejarah Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia

1. Masa Sebelum Penjajahan Belanda

Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh *Vasco da Gamma* pada tahun 1596, Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis dan lebih bersifat lokal. Lokal dalam hukum pidana adat diberlakukan di wilayah adat tertentu dan tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dan hukum perdata (*privaat*).¹¹

Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam ketentuannya persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu.

Pada beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contoh adalah hukum pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islam. Demikian pula, hukum pidana adat Bali yang sangat terpengaruh oleh ajaran Hindu.¹²

Hukum pidana adat mengalami persentuhan dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam peraturan tertulis. Beberapa aturan lain mengenai hukum

10 Daniel S. Lev, *Hukum dan...*, *op.cit.*, hlm. 454-455.

11 Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982, hlm. 43.

12 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), 1973, *Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana, Laporan Penelitian*, Jakarta: LPHN, dan BPHN, 1973, *Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Bina Cipta.

pidana ini dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana di wilayah yang bersangkutan. Pada beberapa wilayah, hukum adat telah diwujudkan dalam bentuk tulisan sehingga dapat dibaca oleh khalayak umum. Contohnya, *Kitab Kuntara Raja Niti* yang berisi hukum adat Lampung, *Simbur Tjahaja* yang berisi hukum pidana adat Sumatra Selatan¹³ dan *Kitab Adigama* yang berisi hukum pidana adat Bali.¹⁴

2. Masa Sesudah Kedatangan Penjajahan Belanda

a. Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) Tahun 1602-1799

Masa pemberlakuan hukum pidana Barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara yang ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*. VOC adalah kongsi dagang Belanda yang memperoleh hak keistimewaan *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* berbentuk hak *Octrooi Staten General (OSG)*, meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan. Pemberian hak tersebut memberikan konsekuensi bahwa VOC memperluas daerah jajahannya di kepulauan Nusantara dan dalam usahanya memperbesar keuntungan, VOC memaksakan aturan yang dibawanya dari Eropa untuk ditaati orang-orang pribumi.

Setiap peraturan yang dibuat VOC diumumkan dalam bentuk plakaat. Setelah diumumkan, plakaat peraturan tersebut dilepas tanpa disimpan sehingga tidak dapat diketahui peraturan mana yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku. Hal demikian mendorong VOC untuk mengumpulkan kembali peraturan-peraturan itu. Kumpulan peraturan-peraturan itu disebut sebagai *Statuten van Batavia (Status Betawi)* yang dibuat pada tahun 1642.¹⁵

Pada tahun 1766 Status Batavia dibuat kembali dan dihasilkan Statuta Batavia Baru yang berlaku sebagai hukum positif bagi orang pribumi dan orang asing dengan kekuatan hukum yang sama dengan berbagai peraturan lain. Walaupun berisi kumpulan peraturan, status tersebut belum dapat disebut sebagai kodifikasi hukum karena belum tersusun secara sistematis.

13 Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, 1989, Bandung: Alumni.

14 I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, 1993, Bandung: Eresco, hlm. 14.

15 Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 43.

Dalam perkembangannya, salah seorang Gubernur Jenderal VOC, *Pieter Both*, mendapat kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilan-peradilan adat.¹⁶

Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) mencampuri urusan peradilan pidana adat ini disebabkan beberapa hal berikut.

- 1) Sistem pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak memadai untuk memaksakan kepada penduduknya agar menaati setiap peraturan yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Sistem peradilan pidana adat kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi karena permasalahan alat bukti.
- 3) Adanya perbedaan pemahaman mengenai kejahatan dan pelanggaran antara hukum pidana adat dan hukum pidana yang dibawa VOC. Contohnya, perbuatan yang menurut hukum pidana adat tidak dianggap sebagai kejahatan, tetapi menurut pendapat VOC dianggap kejahatan sehingga perlu dipidana yang setimpal.¹⁷

Bentuk campur tangan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dalam hukum pidana adat adalah terbentuknya *Pepakem Cirebon* yang digunakan para hakim dalam peradilan pidana adat. *Pepakem Cirebon* berisi sistem pemidanaan, seperti pemukulan, cap bakar, dirantai, dan sebagainya.¹⁸

Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan pendudukan wilayah Nusantara digantikan oleh Inggris, Gubernur Jenderal Raffles. Raffles dianggap sebagai gubernur jenderal terbesar dalam sejarah koloni Inggris di Nusantara yang tidak mengadakan perubahan-perubahan terhadap hukum yang telah berlaku.

b. Masa Besluiten Regering (Tahun 1814–1855)

Ketika negara Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara. Pada masa tersebut peraturan terhadap koloni diserahkan kepada raja sepenuhnya sebagai penguasa mutlak, bukan kepada kongsi dagang sebagaimana terjadi pada

16 J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, 2001, hlm. 13.

17 Kanter dan Sianturi, *Asas-asas ...*, hlm. 43.

18 *Ibid.*, hlm. 44.

masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Peraturan baru tersebut didasarkan *Besluiten Regering*, yaitu berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar (UUD) negeri Belanda yang mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Dengan demikian, negara Belanda pada masa tersebut lebih menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional.

Untuk mengimplementasikannya, raja mengangkat komisaris jenderal yang ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan di *Netherlands Indie* (Hindia Belanda), di antaranya *Elout*, *Buyskes*, dan *Van dr Capellen*. Komisaris jenderal tersebut tetap memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris dan tidak mengadakan perubahan peraturan karena menunggu terbentuknya kodifikasi hukum.¹⁹

Dengan adanya keterangan ini, praktis masa *Besluiten Regering* (BR) tidak memberlakukan hukum pidana baru, tetapi menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan di luar hukum pidana, seperti *Reglement op de Rechtilijke Organisatie* (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan (POP), *Algemeen Bepalingen van Wetgeving* (AB) atau Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan, *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Wetboek van Koopenhandel* (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) atau Peraturan tentang Acara Perdata.

c. **Masa Regering Reglement (1855-1926)**

Masa *Regering Reglement* dimulai setelah perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda dari *monarki konstitusional* menjadi *monarki parlementer*. Perubahan ini terjadi pada tahun 1848 dengan adanya perubahan Undang-Undang (UU) yang dalam bahasa Belanda disebut (*Grond Wet*) yang mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja dan parlemen (*Staten Generaal*) mulai campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan pada wilayah jajahan negara Belanda.

Perubahan penting ini diawali dengan dicantumkannya Pasal 59 Ayat (1), (2), dan (4) yang menyebutkan bahwa Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Aturan tentang kebijakan pemerintah dan sistem keuangan ditetapkan melalui

19 Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 44. Lihat juga J. B. Daliyo, *Pengantar...*, hlm. 15.

undang-undang. Hal lain yang menyangkut daerah-daerah jajahan dan harta, apabila dianggap perlu, diatur oleh undang-undang.²⁰

Melalui ketentuan ini tampak bahwa kekuasaan pada pemerintahan Belanda terhadap daerah jajahan di Indonesia mulai berkurang. Peraturan-peraturan yang menata di setiap daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan raja dengan *Koninklijk Besluit*, tetapi harus melalui mekanisme perundang-undangan pada tingkat parlemen.

Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan negara jajahan adalah *Regeling Reglement* (RR) berbentuk undang-undang dan diundangkan dengan *Staatblad* Nomor 2 tahun 1855. Selanjutnya, RR disebut sebagai Undang-Undang Dasar (UUD) Pemerintah Jajahan Belanda. Pada masa berlakunya *Regeling Reglement* ada beberapa kodifikasi hukum pidana yang berhasil diundangkan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan *Staatblad* Nomor 55 tahun 1866 (*Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*).
- 2) Tambahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa (*Algemene Politie Strafreglement*).
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi yang diundangkan dengan *Staatblad* Nomor 85 tahun 1872 (*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*).
- 4) *Politie Strafreglement* bagi orang bukan Eropa.
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan *Staatblad* Nomor 732 tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918 (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*).

d. Masa Indische Staatregeling (1926-1942)

Indische Staatregeling (IS) adalah pembaharuan dari *Regeling Reglement* (RR) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926 yang diundangkan melalui *Staatblad* Nomor 415 tahun 1925. Perubahan tersebut diakibatkan oleh perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan *Grond Wet* negara Belanda pada tahun 1922.

20 *Ibid.*, hlm. 17.

Berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) dan (2) IS, susunan negara Hindia Belanda ditentukan dengan undang-undang, dan keberadaan sistem hukum di Indonesia semakin jelas, khususnya dalam Pasal 131 dan Pasal 163 IS yang menyebutkan pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku. Pasal 131, Pasal 163 *Indische Staatregeling* dinilai lebih mempertegas pemberlakuan hukum pidana Belanda sejak diberlakukan 1 Januari 1918.

e. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa pendudukan Jepang, selama lebih kurang 3,5 tahun, hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Pemerintahan bala tentara Jepang (*Dai Nippon*) memberlakukan kembali peraturan zaman Belanda dahulu dengan dasar *Gun Seirei* melalui *Osamu Seirei*. Pasal 3 Undang-Undang (UU) tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, beserta hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui untuk sementara waktu apabila tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Melalui dasar tersebut, dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan, termasuk hukum pidana, masih menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatregeling*.

Dengan demikian, hukum pidana yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk ditentukan dalam Pasal 131 *Indische Staatregeling* dan golongan-golongan penduduk yang ada dalam Pasal 163 *Indische Staatregeling*. Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan *Gun Seirei* Nomor istimewa 1942, *Osamu Seirei* Nomor 25 tahun 1944, dan *Gun Seirei* Nomor 14 tahun 1942.

Gun Seirei Nomor istimewa tahun 1942 dan *Osamu Seirei* Nomor 25 tahun 1944 berisi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, sedangkan *Gun Seirei* Nomor 14 tahun 1942 mengatur pengadilan di Hindia Belanda. Pada masa tersebut Indonesia mengenal dualisme hukum pidana atas wilayah Hindia Belanda yang dibagi menjadi dua bagian wilayah dengan penguasa militer yang tidak saling membawahi. Wilayah Indonesia bagian timur berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang, tepatnya di Makassar, sedangkan wilayah Indonesia barat berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang, tepatnya di Jakarta.

Akibatnya, dalam berbagai hal terdapat perbedaan peraturan yang berlaku di tiap-tiap wilayah.²¹

3. Masa Setelah Kemerdekaan

a. Tahun 1945-1949

Dengan diproklamasikan negara Indonesia sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan dijadikan tonggak awal mendobrak sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya, dan menetapkan tata hukum dengan konstitusi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 untuk mewujudkan cita-cita bahwa proklamasi adalah awal pendobrak sistem tata hukum kolonial menjadi sistem tata hukum nasional. Hal ini bukanlah hal yang mudah dan secara cepat dapat diwujudkan sehingga memerlukan pembicaraan yang lebih matang dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sekadar memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka.

Untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) karena hukum nasional belum dapat diwujudkan, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 mengamanatkan dalam Pasal II Aturan Peralihan agar segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa Indonesia belum merdeka. Sambil menunggu adanya tata hukum nasional yang baru, segala peraturan hukum yang telah diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan diberlakukan sementara.

Hal ini juga berarti *funding fathers* bangsa Indonesia mengamanatkan kepada generasi penerusnya untuk memperbaharui tata hukum kolonial menjadi tata hukum Nasional,²² Presiden Soekarno selaku presiden pertama

21 Kanter dan Sianturi, *Asas-asas...*, hlm. 46.

22 Moh. Koesnoe, "Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini", dalam *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 100.

kali mengeluarkan kembali Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri atas dua pasal, yaitu:

- 1) *Pasal 1*: Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar, masih tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut.
- 2) *Pasal 2*: Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, dikeluarkanlah Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.²³

Dengan titik tonggak waktu penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang atas wilayah Indonesia ini, semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang dan dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda (NICA) setelah tanggal 8 Maret 1942, tidak berlaku lagi.

Pasal 2 Undang-Undang (UU) tersebut menyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi *bala* tentara Hindia Belanda dicabut. Pasal 2 tersebut diperlukan karena sebelum tanggal 8 Maret 1942 panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda mengeluarkan *Verordeningen van het militer gezag*. Secara lengkap Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyebutkan bahwa semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dulu (*Verordeningen van het militer gezag*) dicabut.²⁴

Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ternyata belum menjawab persoalan. Hal ini disebabkan perjuangan fisik bangsa Indonesia atas penjajahan Belanda belum selesai. Secara *de jure*, Indonesia memang telah memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, tetapi secara *de facto*, penjajahan Belanda atas Indonesia masih berkelanjutan.

23 K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana Sampai dengan Akhir 1980*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 25.

24 *Ibid.*

Melalui aksi teror yang dilancarkan oleh NICA Belanda ataupun negara-negara boneka yang berhasil dibentuk atas aksi kolonialismenya di Indonesia, pada tanggal 22 September 1945 Belanda mengeluarkan kembali aturan pidana yang berjudul Ketentuan-ketentuan Sementara yang Luar Biasa Mengenai Hukum Pidana (*Tijdelijke Biutengewonge Bepalingen van Strafrecht*) dengan *Staatblad* Nomor 135 tahun 1945 yang mulai berlaku tanggal 7 Oktober 1945.

Ketentuan ini antara lain mengatur diperberatnya ancaman pidana untuk tindak pidana yang menyangkut ketatanegaraan, keamanan, dan ketertiban, perluasan daerah berlakunya pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dibekukannya Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar peraturan ini dapat berlaku surut.

Dengan adanya dua peraturan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia oleh dua "*penguasa*" yang bermusuhan ini, muncullah dua hukum pidana yang diberlakukan bersama-sama di Indonesia. Para ahli hukum pidana menyebutkan bahwa dua hukum pidana ini merupakan masa dualisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁵

b. Tahun 1949-1950

Tahun 1949-1950 negara Indonesia menjadi negara serikat. Sebagai konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari negara Belanda, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sebagai aturan peralihannya, Pasal 192 Konstitusi RIS menyebutkan:

*Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini.*²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 47-48. Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 16.

²⁶ Engelbrecht, Kitab Undang Undang, Undang-undang, Peraturan-peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1960, hlm. 67.

Dengan adanya ketentuan ini, praktis hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan dahulu, yaitu *Wetboek van Strafrecht* yang berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun demikian, permasalahan dualisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang muncul setelah Belanda datang kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan masih tetap berlangsung pada masa ini.

c. Tahun 1950-1959

Setelah negara Indonesia menjadi negara berbentuk negara serikat lebih kurang selama 7 bulan 16 hari, sebagai trik politik agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara republik-kesatuan. Dilihat dari perkembangan tersebut, konstitusi yang berlaku pun berubah, yaitu diganti dengan Undang-Undang Dasar (UUD) sementara. Sebagai peraturan peralihan yang tetap memberlakukan hukum pidana masa sebelumnya pada masa Undang-Undang Dasar (UUD) sementara ini, Pasal 142 Undang-Undang Dasar (UUD) sementara menyebutkan:

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini.²⁷

Dengan adanya ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Dasar (UUD) yang masih bersifat sementara tersebut, hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-(*Wetboek van Strafrecht*). Akan tetapi, permasalahan dualisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang muncul pada tahun 1945 sampai akhir masa berlakunya Undang-Undang Dasar (UUD) sementara ini diselesaikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 73 tahun 1958 yang menyatakan Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh

27 *Ibid.*, hlm. 17.

Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-undang Hukum Pidana. Dengan demikian, permasalahan dualisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Indonesia dianggap telah selesai dengan ketentuan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

d. Tahun 1959-Sekarang

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sebagai konstitusi.

Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan dasar Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun Indonesia telah mengalami empat pergantian bentuk negara, konstitusi yang menghasilkan sumber utama hukum pidana tidak mengalami perubahan signifikan, yaitu tetap pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-(*Wetboek van Strafrecht*) walaupun pemberlakuannya tetap mendasarkan diri pada ketentuan peralihan pada masing-masing konstitusi.

Masa pemberlakuan hukum pidana di Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibagi menjadi empat masa, yaitu:

- 1) masa pasca-kemerdekaan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945;
- 2) masa setelah Indonesia menggunakan konstitusi negara serikat (Konstitusi Republik Indonesia Serikat);
- 3) masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara (UUDS 1950);
- 4) masa Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

D. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (*Wetboek van Strafrecht*)

Induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915

dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886.²⁸

Walaupun WvSNI merupakan turunan dari WvS Belanda, pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas penyesuaian (*konkordansi*) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 saat pemerintahan *Lodewijk Napoleon*. Kodifikasi hukum pidana Nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*, tetapi baru dua tahun berlaku pada tahun 1811 Prancis menjajah Belanda dan memberlakukan kodifikasi hukum pidana (*Code Penal*) yang dibuat tahun 1810 saat *Napoleon Bonaparte* menjadi penguasa Prancis.

Pada tahun 1813 Prancis meninggalkan negara Belanda, tetapi negara Belanda masih mempertahankan *Code Penal* itu sampai tahun 1886.²⁹ Pada tahun 1813 negara Belanda melakukan usaha pembaharuan hukum pidananya (*Code Penal*) selama sekitar 68 tahun (sampai tahun 1881) dengan selama usaha pembaharuan hukum pidana itu, *Code Penal* mengalami beberapa perubahan seperti pada bentuk ancaman pidana.

Pidana penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam *Code Penal* ditiadakan dan diganti dengan pidana yang lebih lunak. Pada tahun 1881 negara Belanda menegaskan dan mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal Napoleon*, yang mulai diberlakukan lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 1886. Sebelum mengesahkan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal Napoleon* tahun 1886, di wilayah Hindia-Belanda ternyata pernah diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa (*Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*) dengan *Staatblad* tahun 1866 Nomor 55 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1867.³⁰ Dengan demikian, pada masa tersebut terdapat dualisme hukum pidana, yaitu hukum pidana bagi golongan Eropa dan hukum pidana bagi golongan non-Eropa. Dualisme tersebut dirasakan *Idenburg (Minister van Kolonien)* sebagai permasalahan yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, pada tahun 1915 keluarlah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) Nomor 33 15 Oktober 1915 yang mengesahkan

28 Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 15.

29 Kanter dan Sianturi, *Asas-asas...*, hlm. 42.

30 *Ibid.*, hlm. 44.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie dan berlaku tiga tahun kemudian, yaitu mulai 1 Januari 1918.

Tahun	Peristiwa	Selisih Waktu
1810	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Prancis	1 tahun
1811	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Belanda	56 tahun
1867	<i>Wetboek van Strafrecht voor Europeanen</i> berlaku di Hindia-Belanda	6 tahun
1873	<i>Wetboek van Strafrecht voor Inlander</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	8 tahun
1881	<i>Wetboek van Strafrecht</i> disahkan di Belanda	5 tahun
1886	<i>Wetboek van Strafrecht</i> diberlakukan di Belanda	29 tahun
1915	<i>Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indie</i> disahkan untuk Hindia-Belanda	3 tahun
1918	<i>Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indie</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	28 tahun
1946	<i>Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indie</i> disebut sebagai KUHP Indonesia	
Jumlah Total Selisih		136 tahun

E. Problematika Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*)

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda menjajah Indonesia maka sejak 17 Agustus 1945, selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia. Akan tetapi, idealisme ini tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Sampai sekarang, hukum pidana Indonesia masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda, yang secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan sejak 59 tahun lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum

yang bersifat nasional, tetapi pada realitasnya hukum pidana positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]-[*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*]) Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda.³¹

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-(*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*) telah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1918 hingga 2011 saat telah memasuki usia lebih dari 93 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda, yaitu tahun 1881, KUHP telah berumur 130 tahun. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-(*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*) dapat dianggap telah usang dan sangat tua. Walaupun Indonesia telah beberapa kali mengubah materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perubahan ini tidak sampai pada masalah substansial dari KUHP tersebut.³²
3. Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht* yang menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bisa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang beredar di pasaran telah diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana, seperti terjemahan Mulyatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh negara Indonesia maka setiap terjemahan dapat saja memiliki redaksi yang berbeda-beda.³⁴

31 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 70-71.

32 Lihat *The Dutch Penal Code*, terj. Louise Rayar dan Stafford Wadsworth, Colorado: Fred B. Rothman, 1997.

33 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, hlm. 71.

34 Dalam pandangan peneliti, kecuali KUHP terjemahan BPHN, KUHP terjemahan Mulyatno, R. Susilo dan lainnya belum mencantumkan beberapa perubahan parsial dalam KUHP, seperti jenis pidana ditambahkan pidana tutupan, pengkalian 15 kali untuk pidana denda, dan perluasan wilayah berlakunya hukum pidana menurut tempat. Di samping itu, terdapat juga perbedaan dalam menerjemahkan suatu istilah, seperti *overspel* yang diterjemahkan menjadi beberapa kata, seperti zina, mukah, dan gendak. Yang lebih fatal lagi adalah ancaman pidana pada Pasal 386 tentang pemerasan. Di dalam KUHP versi BPHN dan terjemahan dari Engelbrecht, ancaman pidananya 9 bulan, sedangkan dalam KUHP versi Mulyatno dan R. Susilo ancaman pidananya 9 tahun. KUHP aslinya (WvS) yang berbahasa Belanda menyebutnya dengan "jaren" yang berarti "tahun".

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai warisan kolonial Belanda memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. Kitab ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan *the Romano Germanic Family*. *The Romano Germanic family* tersebut dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan seperti aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*).³⁵

Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

5. Jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilihat dari tiga sisi masalah dasar³⁶ hukum pidana, seperti pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, masalah-masalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut.

a. Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat kaku dalam arti tidak mungkin modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga lebih kaku sehingga tidak dapat memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana.

Bandingkan Mulyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1994, Engelbrecht, *Kitab Undang Undang...*, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, t.t.

35 Rene David, John E. C. Brierley, *Major Legal System in The World Today*, London: Stevens and Sons, 1978, hlm. 24.

36 Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 86.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai warisan kolonial Belanda memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. Kitab ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan *the Romano Germanic Family*. *The Romano Germanic family* tersebut dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan seperti aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*).³⁵

Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

5. Jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilihat dari tiga sisi masalah dasar³⁶ hukum pidana, seperti pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, masalah-masalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut.

a. Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat kaku dalam arti tidak mungkin modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga lebih kaku sehingga tidak dapat memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana.

Bandingkan Mulyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1994, Engelbrecht, *Kitab Undang Undang...*, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, t.t.

35 Rene David, John E. C. Brierley, *Major Legal System in The World Today*, London: Stevens and Sons, 1978, hlm. 24.

36 Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 86.

Sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana mati,³⁷ pidana denda,³⁸ pidana penjara,³⁹ dan pidana bagi anak.

b. Tindak pidana

Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat positivis dalam arti harus dicantumkan dengan Undang-Undang (asas legalitas formal) maka kitab tersebut tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan.⁴⁰

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut pada *daadstrafrecht*, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan, yang pada saat ini sudah banyak ditinggalkan dengan hanya melihat dari aspek perbuatan (*daad*) dan menafikan aspek pembuat (*dader*).⁴¹

-
- 37 Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 26-27.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- 38 Masalah pidana denda dalam KUHP terutama terkait dengan jumlah denda yang sangat minim, karena penyesuaian kurs pidana denda terakhir kali dilakukan dengan UU Nomor 18 Prp tahun 1960. Sebagai contoh adalah ketentuan tentang pidana kurungan pengganti denda. Dalam KUHP, persamaan pidana denda dengan pidana kurungan adalah Rp. 7,50 (tujuh, lima puluh rupiah) disamakan dengan 1 hari kurungan.
- 39 R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: BPHN/Bina Cipta, 1979.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- 40 Permasalahan seperti ini sedikit terobati dengan dikenalnya asas legalitas materiel yang mengakui adanya nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam perundang-undangan seperti UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 dan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, hlm. 109.
- 41 Muladi, "Perbandingan Sistem Pidana dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia", dalam *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 152.

Setiap tindak pidana yang muncul pada era modern ini, seperti *money laundering*, *cyber criminal*, lingkungan hidup, dan beberapa perbuatan yang menurut hukum adat dianggap tindak pidana belum *tercover* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, secara sosiologis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah tertinggal zaman dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana, antara lain mengenai asas kesalahan (*Culpabilitas*) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi hanya disebutkan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagai penjelasan WvS.⁴²

Asas *Culpabilitas* merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara objektif memang telah melakukan tindak pidana yang secara faktual telah memenuhi rumusan asas legalitas, dan secara subjektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku yang secara ilmiah memenuhi rumusan asas *culpabilitas*.

Masalah lainnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak. Anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45-47 adalah mereka yang berumur di bawah 16 tahun. Pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara terperinci tentang aturan pemidanaan bagi anak, Pasal 45 hanya menyebutkan beberapa alternatif yang dapat diambil oleh hakim jika terdakwa adalah anak di bawah umur 16 tahun.⁴³ Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴⁴

42 Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 85.

43 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm 143 dan *Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 tahun 1997)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

44 Roeslan Saleh, "Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", kertas kerja dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, Jakarta:

Pada dataran realitas sering beberapa tindak pidana terkait dengan korporasi, seperti pencemaran lingkungan.

F. Sumber Hukum dalam Prinsip-prinsip Hukum Pidana

1. Sumber Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum materiel adalah tempat materiel diambil. Sumber hukum materiel ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, dan keadaan geografis.

Adapun sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu bersifat formal. Sumber hukum formal adalah Undang-Undang (UU), perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Perspektif hukum pidana, khususnya di Indonesia, menyebutkan Pancasila sebagai sumber hukum materielnya. Pancasila merupakan faktor atau landasan utama pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia maka setiap peraturan perundang-undangan dibuat berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan faktor utama yang melandasi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum formal dalam hukum pidana di Indonesia ada dua, yaitu: (a) sumber hukum tertulis dan terkodifikasi; (b) sumber hukum tertulis tidak terkodifikasi.

a. Sumber Hukum Tertulis dan Terkodifikasi

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan dipertegas dengan

BPHN, 1984, hlm. 48-53. Ulasan menarik mengenai kejahatan korporasi ini dapat dilihat dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, dan I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 12 Oktober 1999.

Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 (LN nomor 127 tahun 1958) tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

2) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Biasa Disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Drt. tahun 1951 sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan Kejaksaan negeri, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya.

Ada dua macam hukum acara pidana yang merupakan akibat dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa pada zaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (*Staatsblad* tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.). Hal ini disebabkan tujuan pembaharuan itu bukanlah mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, melainkan ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 telah menetapkan hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, ketentuan yang tercantum di dalamnya tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum, khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.

Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum dan sebagaimana telah dijelaskan di muka, *Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) (*Staatsblad* tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 81), serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal tersebut mengenai hukum acara pidana, harus dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum

nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

b. Sumber Hukum Tertulis dan Tidak Terkodifikasi

Selain dua sumber hukum tersebut di atas, dalam teori hukum terdapat sumber hukum formal lainnya, yaitu yurisprudensi:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang mengandung ketentuan pidana di dalamnya.

Pengertian yurisprudensi di negara-negara dengan sistem hukum Inggris atau Amerika (*Common Law*) sedikit lebih luas, yaitu ilmu hukum, sedangkan pengertian yurisprudensi di negara-negara *Civil Law* hanya berarti putusan pengadilan. Adapun yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan di negara Anglo Saxon dinamakan preseden.

Sudikno Mertokusumo mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwajib. Sekalipun demikian, Sudikno menyepakati pandangan, yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan dan dapat pula berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan dalam dua macam berikut.

- 1) Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti yang terdiri atas:
 - a) Putusan Perdamaian;
 - b) Putusan Pengadilan Negeri yang tidak di Banding;
 - c) Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak di Kasasi;
 - d) Seluruh putusan Mahkamah Agung (MA).

- 2) Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), yaitu putusan hakim yang diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

Di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yurisprudensi diakui sebagai salah satu sumber hukum, tetapi tidak mengikat. Indonesia tidak mengenal asas *binding of precedent*. Dengan demikian, hakim dapat memutus perkara dengan menggunakan pertimbangan sendiri, tetapi tidak melarang hakim untuk menggunakan putusan terdahulu sebagai acuan untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diperiksa.

2. Prinsip-prinsip Hukum Umum dalam Perspektif Hukum Pidana

Prinsip hukum umumnya diartikan sebagai asas dalam hukum pidana. Hukum pidana sebagaimana cabang ilmu lain dalam pohon hukum memiliki asas atau prinsip-prinsip yang diakui secara umum. Prinsip-prinsip umum tersebut adalah sebagai berikut.

- a. **Asas Legalitas**, secara lengkap berbunyi *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*, artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa kekuatan perundang-undangan yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana.⁴⁵
- b. **Asas Geen Straf Zonder Schuld**, disebut juga sebagai asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, artinya tidak ada seorang pun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat.⁴⁶
- c. **Asas Teritorial**, mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara.⁴⁷

Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, "*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.*"

⁴⁵ Perhatikan Pasal 1 ayat 1 KUHP.

⁴⁶ Perhatikan Pasal 44 juncto Pasal 45 KUHP.

⁴⁷ Perhatikan Pasal 2 dan 3 KUHP.

Pasal ini dengan tegas menyatakan asas teritorial sehingga ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi negara yang berdaulat. Asas teritorial lebih menitikberatkan terjadinya perbuatan pidana dalam wilayah negara tanpa mempermasalahkan siapa pelakunya. Adapun asas personal atau asas nasional yang aktif menitikberatkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tanpa mempermasalahkan tempat terjadinya perbuatan pidana.

Asas yang banyak diikuti oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah asas teritorial. Hal ini wajar karena tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu negara harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan hukum negara tempat yang bersangkutan berada.

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: "*Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.*"

Ketentuan ini memperluas berlakunya Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak berarti bahwa perahu (kendaraan air) dan pesawat terbang dianggap bagian wilayah Indonesia. Tujuan pasal ini adalah perbuatan pidana yang terjadi dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah teritorial suatu negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di atas alat pelayaran Indonesia di luar wilayah Indonesia, alat pelayaran pengertian lebih luas dari kapal. Kapal merupakan bentuk khusus dari alat pelayaran di luar Indonesia atau di laut bebas dan laut wilayah negara lain. Asas-asas *Extra Teritorial/kekebalan* dan hak-hak istimewa (*Immunity and Privilege*):

- 1) kepala negara asing dan anggota keluarganya;
- 2) pejabat-pejabat perwakilan asing dan keluarganya;
- 3) pejabat-pejabat pemerintahan negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui negara-negara lain atau menuju negara lain;

Pasal ini dengan tegas menyatakan asas teritorial sehingga ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi negara yang berdaulat. Asas teritorial lebih menitikberatkan terjadinya perbuatan pidana dalam wilayah negara tanpa mempermasalahkan siapa pelakunya. Adapun asas personal atau asas nasional yang aktif menitikberatkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tanpa mempermasalahkan tempat terjadinya perbuatan pidana.

Asas yang banyak diikuti oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah asas teritorial. Hal ini wajar karena tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu negara harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan hukum negara tempat yang bersangkutan berada.

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: "*Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.*"

Ketentuan ini memperluas berlakunya Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak berarti bahwa perahu (kendaraan air) dan pesawat terbang dianggap bagian wilayah Indonesia. Tujuan pasal ini adalah perbuatan pidana yang terjadi dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah teritorial suatu negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di atas alat pelayaran Indonesia di luar wilayah Indonesia, alat pelayaran pengertian lebih luas dari kapal. Kapal merupakan bentuk khusus dari alat pelayaran di luar Indonesia atau di laut bebas dan laut wilayah negara lain. Asas-asas *Extra Teritorial/kekebalan* dan hak-hak istimewa (*Immunity and Privilege*):

- 1) kepala negara asing dan anggota keluarganya;
- 2) pejabat-pejabat perwakilan asing dan keluarganya;
- 3) pejabat-pejabat pemerintahan negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui negara-negara lain atau menuju negara lain;

Pasal ini dengan tegas menyatakan asas teritorial sehingga ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi negara yang berdaulat. Asas teritorial lebih menitikberatkan terjadinya perbuatan pidana dalam wilayah negara tanpa mempermasalahkan siapa pelakunya. Adapun asas personal atau asas nasional yang aktif menitikberatkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tanpa mempermasalahkan tempat terjadinya perbuatan pidana.

Asas yang banyak diikuti oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah asas teritorial. Hal ini wajar karena tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu negara harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan hukum negara tempat yang bersangkutan berada.

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: "*Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.*"

Ketentuan ini memperluas berlakunya Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak berarti bahwa perahu (kendaraan air) dan pesawat terbang dianggap bagian wilayah Indonesia. Tujuan pasal ini adalah perbuatan pidana yang terjadi dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah teritorial suatu negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di atas alat pelayaran Indonesia di luar wilayah Indonesia, alat pelayaran pengertian lebih luas dari kapal. Kapal merupakan bentuk khusus dari alat pelayaran di luar Indonesia atau di laut bebas dan laut wilayah negara lain. Asas-asas *Extra Teritorial/kekebalan* dan hak-hak istimewa (*Immunity and Privilege*):

- 1) kepala negara asing dan anggota keluarganya;
- 2) pejabat-pejabat perwakilan asing dan keluarganya;
- 3) pejabat-pejabat pemerintahan negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui negara-negara lain atau menuju negara lain;

- 4) suatu angkatan bersenjata yang dipimpin;
- 5) pejabat-pejabat badan internasional;
- 6) kapal-kapal perang dan pesawat udara militer/ABK di atas kapal ataupun di luar kapal.

Asas Personalitas Nasional Aktif, *Asas Personal* atau *Asas Nasional* yang aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga negara yang sedang berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat. Apabila ada warga negara asing yang berada dalam suatu wilayah negara telah melakukan tindak pidana dan tidak diadili menurut hukum negara tersebut, berarti bertentangan dengan kedaulatan negara tersebut.

Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukum Pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia diluar Indonesia yang melakukan perbuatan pidana tertentu Kejahatan terhadap keamanan Negara, martabat kepala negara, penghasutan, dan lain-lain.⁴⁸ Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan:

- 1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang diluar Indonesia melakukan: salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.

Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

- 2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Sekalipun rumusan Pasal 5 ini memuat perkataan, "*diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang diluar wilayah Indonesia*" sehingga seolah-olah mengandung asas personal, sesungguhnya Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat asas melindungi kepentingan nasional (*asas nasional pasif*). Hal tersebut karena ketentuan pidana yang

⁴⁸ Perhatikan Pasal 5 s.d. 7 KUHP.

diberlakukan bagi warga negara di luar wilayah teritorial wilayah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) ditujukan untuk mencegah agar warga negara asing yang berbuat kejahatan di negara asing tersebut, dengan jalan menjadi warga negara Indonesia, tindak pidana yang dilakukan di negara asing tersebut, apakah menurut undang-undang di sana merupakan kejahatan atau pelanggaran, tidak menjadi permasalahan, karena mungkin pembagian tindak pidananya berbeda dengan di Indonesia. Hal yang penting adalah tindak pidana di negara lain tempat perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, hal tersebut merupakan kejahatan, bukan pelanggaran. Ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): *Berlakunya pasal 5 ayat (1) butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.*

Latar belakang ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir 2 KUHP adalah untuk melindungi kepentingan nasional timbal balik (*mutual legal assistance*). Oleh karena itu, menurut Moeljatno, sudah sewajarnya pula diadakan imbalan terhadap maksimum pidana yang mungkin dijatuhkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) negara asing.

- e. **Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)**, yaitu asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan.

Asas tersebut juga diberlakukan di Indonesia sehingga hukum pidana berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun bukan.

Sekalipun asas personal tidak lagi digunakan sepenuhnya, ada asas lain yang memungkinkan diberlakukannya hukum pidana

nasional terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah negara, yaitu Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

- 1) Salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 104, 106, 107, 108, dan 131.
- 2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
- 3) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu.
- 4) Salah satu kejahatan yang disebut dalam Pasal-Pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 Huruf (j) tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 L, huruf (m, n, dan o) tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini terkandung asas melindungi kepentingan, yaitu melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional (universal). Pasal ini menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang (baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing) yang di luar Indonesia melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena Pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat/kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Pasal 4 ke-1).
- 2) Kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel/materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (Pasal 4 ke-2).
- 3) Kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau bagian-bagiannya (Pasal 4 ke-3).
- 4) Kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia (Pasal 4 ke-4).

f. **Asas Universal**, berlakunya Pasal 2-5 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional). Asas ini diberlakukan untuk menjaga kepentingan dunia/internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri. Siapa pun dan di mana pun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan. Beberapa kejahatan yang dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia berdasarkan asas universal adalah:

- 1) Kejahatan mata uang yang dikeluarkan oleh negara tertentu.⁴⁹
- 2) Kejahatan perampokan/pembajakan di laut/udara.⁵⁰

Dikatakan melindungi kepentingan internasional (kepentingan universal) karena rumusan Pasal 4 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas) dan Pasal 4 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat

49 Perhatikan Pasal 4 sub ke-2 KUHP yang didasarkan pada Konvensi Jeneva 1929.

50 Perhatikan Pasal 4 sub 4 KUHP yang diperbaharui dengan UU Nomor 4 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan yang didasarkan pada Deklarasi Paris 1858, Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971.

udara) tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas negara yang dipalsukan atau kapal laut dan pesawat terbang negara mana yang dibajak. Pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dimaksud dalam Pasal 4 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pemalsuan yang menyangkut mata uang atau uang kertas negara Indonesia, tetapi juga mungkin menyangkut mata uang atau uang kertas negara asing. Pembajakan kapal laut atau pesawat terbang yang dimaksud dalam Pasal 4 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menyangkut kapal laut Indonesia atau pesawat terbang Indonesia, dan mungkin juga menyangkut kapal laut atau pesawat terbang negara asing.

Jika pemalsuan mata uang, pembajakan kapal, laut atau pesawat terbang tersebut mengenai kepemilikan Indonesia, asas yang berlaku diterapkan adalah asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif). Adapun jika pemalsuan mata uang atau uang kertas, pembajakan kapal laut atau pesawat terbang adalah mengenai kepemilikan negara asing, asas yang berlaku adalah asas melindungi kepentingan internasional (asas universal).

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua. Pasal ini berkenaan dengan kejahatan jabatan yang sebagian besar sudah diserap menjadi tindak pidana korupsi. Akan tetapi, beberapa Pasal seperti Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 telah diubah oleh Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan tersendiri sekalipun masih menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diacu. Hal demikian apakah Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih dapat diterapkan?

Untuk masalah tersebut, perhatikan Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: *"setiap orang di luar wilayah Negara republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau*

keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14."

Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia yang berlaku juga bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga. Demikian pula, yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia ataupun dalam ordonansi perkapalan.

Dengan telah diundangkannya tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan berdasarkan Buku Kedua Bab XXIX A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertimbangan lain untuk memasukkan Bab XXIX A Buku Kedua ke dalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menunjukkan bahwa kejahatan penerbangan sudah digunakan sebagai bagian dari kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diterapkannya beberapa Pasal seperti Pasal 2, 5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum-hukum internasional. Menurut Moeljatno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi:

- 1) kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat yang mempunyai hak eksteritorial. Bagi mereka, hukum nasional suatu negara tidak berlaku;
- 2) duta besar negara asing beserta keluarganya juga mempunyai hak eksteritorial;
- 3) anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara, sekalipun ada di luar kapal. Menurut hukum internasional kapal perang adalah teritori negara yang memilikinya;
- 4) tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu.

Beberapa prinsip tersebut umumnya merupakan prinsip yang tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga di negara-negara di dunia. Perbedaannya terletak dalam hal pengaturannya. Indonesia secara

tersurat ataupun tersirat mencantumkan prinsip umum tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi beberapa negara di dunia tidak mencantumkan prinsip tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi hidup sebagai prinsip yang mendasari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan-peraturan di negara tersebut.

G. Hak Negara dalam Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana

1. Hapusnya Hak Negara untuk Menuntut Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan, dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dengan demikian, dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang, secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa ada hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Berkaitan dalam asas hukum pidana adalah seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*) maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.

Tindak pidana lebih menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana. Kemudian, apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan sangat bergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu, pelaku juga mempunyai kesalahan.

Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur terpenting, dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini. Oleh karena itu, apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, unsur dengan sengaja ini menguasai atau

meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian bahwa orang yang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus memenuhi rumusan *willens* atau menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Di samping unsur kesengajaan, ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian, kealpaan, dan culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) dan kealpaan disadari (*bewuste schuld*). Dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat "*menduga terjadinya*" akibat perbuatannya atau pelaku "*kurang berhati-hati*".

Wilayah culpa terletak di antara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat didefinisikan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Unsur terpenting dalam culpa adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang menyebabkannya dapat membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku dapat menduga bahwa akibat perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang (UU).

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang dilarang itu, hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatan pidananya itu. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu secara jelas dapat ditimpakan kepada pelakunya itu. Akan tetapi, jika hubungan kausal tersebut tidak ada, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana itu tidak dapat ditimpakan kepada pelakunya itu sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Dasar pemidanaan ini ada yang bersifat alasan peniadaan pidana yang bersifat khusus, yang mencakup dasar objektif, yaitu unsur luar dari pelaku dan dasar subjektif, yaitu unsur dalam dari pelaku, serta dasar adanya alasan pembenar atau dasar adanya alasan pemaaf. Alasan peniadaan pidana yang bersifat khusus ini terdapat pada pasal terkait seperti pada Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan Pasal 165, serta Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap pembuat tindak pidana, yaitu sebagai berikut.

a. *Ne Bis In Idem* (Pasal 76 KUHP)

Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* adalah "tidak atau jangan dua kali yang sama". Sering juga digunakan istilah "*nemodebet bis vexari*" (tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya) yang dalam literatur Angka Saxon diterjemahkan menjadi "*No one could be put twice in jeopardy for the same offence*". Dasar pikiran atau ratio dari asas ini adalah:

- 1) menjaga martabat pengadilan (tidak memerosotkan kewibawaan);
- 2) menjaga kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan.

Diakuinya asas *Ne bis In Idem* ini terlihat dalam rumusan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan (Ayat (1) Sub 1) sebagai berikut:

"Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (herzeining), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap."

Dengan demikian, penuntutan terhadap seseorang dapat hapus berdasar *ne bis in idem* apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 2) orang terhadap siap putusan itu dijatuhkan adalah sama;
- 3) perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.

Jika syarat ini dipenuhi, terhadap putusan tersebut tidak ada alat hukum/upaya hukum (*rechtsmiddel*) yang dapat dipakai untuk mengubah keputusan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa peninjauan kembali (*herzeining*) merupakan salah satu upaya hukum sehingga pengecualian yang tersebut dalam Pasal 76 sebenarnya tidak perlu. Jadi, dengan adanya *herzeining*, putusan itu belum berkelanjutan dari tuntutan hukum yang pertama, dan bukan merupakan tuntutan hukum yang kedua kali.

1) **Keputusan Hakim Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap**⁵¹

Sampai saat ini, ketidakpastian hukum masih dipertanyakan, penulis tidak tahu kapan hukum itu berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut diperkuat dengan adanya keputusan Pengadilan yang masih bisa dibanding ke Mahkamah Agung (MA), putusan Mahkamah Agung (MA) yang bisa diajukan Peninjauan Kembali (PK), dan hasil Peninjauan Kembali (PK)-pun bisa di Peninjauan Kembali (PK) lagi, Peninjauan Kembali (PK) lagi dan seterusnya.

Kapan suatu perkara akan dieksekusi karena setiap perkara yang akan dieksekusi masih bisa diajukan grasi? Seseorang yang dihukum mati seharusnya segera dihukum mati, tetapi ternyata ia harus mengalami 10 tahun penjara sebelum dieksekusi mati. Ini artinya ia dijatuhi hukuman mati *plus* 10 tahun penjara. Keputusan hakim (yang berkekuatan hukum tetap) yang dimaksud di sini adalah keputusan terhadap perbuatan atau perkara yang dapat berupa:

- a) Pembebasan (*vrijspreek*) Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)-(dulu 313 RIB).
- b) Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechvervolg*) Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)-(dulu 314 RIB).
- c) Penjatuhan pidana Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)-(dulu 315 RIB).

Dengan demikian, keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan terdakwa. Asas *ne bis in idem* tidak berlaku untuk keputusan hakim yang belum berhubungan dengan pokok perkara yang biasanya disebut "penetapan-penetapan" (*beschikking*), misalnya:

51 Perhatikan Pasal 76 KUHP.

pidana baru A, dalam hal B kemudian tertangkap, ia tetap masih dapat dituntut walaupun misalnya A dibebaskan.

c) Putusan pemidanaan:

- (1) yang seluruhnya telah dijalani, atau
- (2) yang telah diberi ampun (grasi), atau
- (3) yang wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kedaluwarsa.

2) Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu

Harus ada *feit* (perbuatan) yang sama. Ini segi objektif dari *ne bis in idem* (*objective identiteit*). Masalah ini merupakan masalah yang paling sukar, seperti halnya dijumpai dalam *concursum*/gabungan tindak pidana, misalnya A melakukan pemerkosaan di jalan umum (Pasal 285 dan 281). Seandainya jaksa hanya menuntut berdasar Pasal 285 (perkosaan) dan ternyata tidak terbukti sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan, apakah jaksa masih dapat menuntut yang kedua kalinya berdasar Pasal 281 (melanggar kesusilaan di muka umum)? Apakah putusan yang pertama merupakan *res judicata* (putusan yang *ne bis in idem*)?

Jawaban terhadap masalah ini bergantung atau berkisar pada apa yang dimaksud dengan "*feit*". Jika kasus di atas dipandang sebagai *concursum realis*, sehingga dapat dikatakan terdakwa melakukan beberapa perbuatan, dimungkinkan ada penuntutan lagi. Akan tetapi, apabila dipandang sebagai *concursum idealis*, yang hanya dipandang ada satu perbuatan, hanya dimungkinkan adanya satu kali penuntutan dengan catatan berikut:

- a) apabila dipandang sebagai *concursum realis*, tidak ada *ne bis in idem*;
- b) apabila dipandang sebagai *concursum idealis*, ada *ne bis in idem*.

Dalam yurisprudensi, ajaran *feit* materiel pada *ne bis in idem* telah ditinggalkan pada tahun 1932, yaitu dengan Arrest HR 27 Juni 1932. Contoh kasusnya adalah orang yang mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketenteraman umum, memukul dada dan menendang kaki seorang anggota polisi yang sedang menjalankan tugasnya. Di sini mula-mula terdakwa diputus dan dipidana karena menganiaya polisi (Pasal

356 Sub. 2), kemudian dituntut lagi oleh jaksa mengenai mengganggu ketenteraman umum dalam keadaan mabuk (Pasal 492). Tuntutan kedua ini oleh pengadilan dapat diterima dan terdakwa dapat dijatuhi pidana.

Ketika terdakwa banding, dan pengadilan tinggi menyatakan ada *ne bis in idem*, jaksa mengajukan kasasi ke *Hoge Raad* dengan mengatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan dua perbuatan dipandang dari sudut hukum pidana. Jadi, tidak ada perbuatan yang sama, seperti dimaksud dalam Pasal 76 HR yang melihat ada dua perbuatan yang mempunyai ciri yang berlainan sehingga tuntutan jaksa dapat diterima.

Persoalan *feit* (perbuatan) pada Pasal 76, di samping berkaitan erat dengan masalah *concursum*, juga berhubungan dengan masalah, *alternativitas* dalam tuduhan dapat meliputi masalah berikut.

- a) Perbuatannya/ketentuan yang dilanggar: perbuatan A sebenarnya dapat dikualifikasikan dalam tiga kemungkinan, yaitu:
 - (1) dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338),
 - (2) karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359),
 - (3) dengan sengaja menganiaya yang berakibat mati (Pasal 351 ayat (3)).
- b) Waktu terjadinya tindak pidana

Misalnya, seseorang dituntut telah melakukan pencurian pada tanggal 1 Juni 1979, tetapi dalam surat tuduhan tercantum tanggal 1 Juli 1979. Apabila terdakwa dibebaskan untuk tuduhan pencurian tercantum tanggal 1 Juni, jaksa tidak dapat menuntut lagi berdasar tanggal yang tepat. Di sini ada *ne bis in idem*.

Dalam hal ini sebenarnya sebelum ada putusan, jaksa dapat mengajukan permintaan untuk "mengubah surat tuduhan berdasar Pasal 282 HIR, asal *feit*-nya tetap.

- c) Tempat terjadinya tindak pidana

Misalnya, semula terdakwa dituduh mencuri di taman Diponegoro, kemudian dibebaskan. Kemudian, jaksa mengajukan tuduhan lagi. Berdasarkan tempat pencurian yang sebenarnya dilakukan, yaitu di Stadion Diponegoro. Di sini pun ada *ne bis in idem*.

Kesukaran dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perkataan "*feit*" diubah menjadi "*strafbaar feit*". Dengan perubahan ini menurut Pompe, penerapan Pasal 76 lebih mudah. Akan tetapi, diakui bahwa itu berarti menyempitkan berlakunya Pasal 76, artinya kemungkinan penuntutan kembali menjadi longgar. Menurut Pompe, halangan dalam penuntutan baru, dapat lebih merugikan kepentingan umum daripada mengulangi percobaan untuk penerapan undang-undang pidana dengan setepat-tepatnya.

b. Matinya Terdakwa (Pasal 77) dan Matinya Terpidana (Pasal 83)⁵²

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan Hak menuntut hukum akan gugur (tidak laku lagi) lantaran terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan, hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, pengusutan pun dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan (*niet-outvanhelijk verklaard*).

Hal demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya. Dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terletak prinsip bahwa penuntutan hukum harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dimaksud telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, tuntutan atas peristiwa itu habis dan tuntutan tersebut tidak dapat diarahkan kepada ahli warisnya.

Pengecualiannya diatur dalam Pasal 361 dan 363 H.I.R yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara, atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah.

Hal ini wajar karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berpendirian bahwa yang dapat menjadi subjek hukum hanyalah orang yang bersangkutan dan pertanggungjawaban bersifat pribadi sehingga tidak ada suatu tanggung jawab pidana diwariskan. Konsekuensi dari pemikiran ini adalah bahwa kematian seorang tersangka atau terdakwa menyebabkan

52 Perhatikan Pasal 77 KUHP.

kewenangan seorang jaksa penuntut menjadi gugur. Sementara kematian seorang terpidana menyebabkan kewajiban menjalankan pidana menjadi terhapuskan.

Karena sifat individual hukum acara pidana, baik wewenang penuntut umum untuk menuntut pidana seseorang yang disangka melakukan delik maupun wewenang untuk mengeksekusi pidana menjadi hapus karena kematian terdakwa atau terpidana.

c. *Daluwarsa (Verjaring)*-(Pasal 78 KUHP)⁵³

1) *Daluwarsa Penuntutan*

Ditetapkannya lembaga daluwarsa penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya dilandasi oleh beberapa pemikiran berikut.

- a) Perputaran waktu tidak hanya secara perlahan menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi, tetapi juga menghapuskan keinginan untuk melakukan pembalasan.
- b) Berjalannya waktu sekaligus menghapuskan jejak-jejak tindak pidana yang menyebabkan kesulitan pembuktian.
- c) Pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup terhidup dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan.

Sekalipun demikian, alasan utama dari ketiga alasan itu adalah kebutuhan untuk memidana dan kesulitan pembuktian. Oleh karena itu, *adagium punier non (simper) necesse est* (menghukum tidak selamanya perlu) menjadi dasar dari keberadaan lembaga ini.

a) *Tenggang waktu daluwarsa penuntutan*

Tenggang waktu daluwarsa ditetapkan dalam Pasal 78 Ayat (1) yaitu:

1. untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan: sesudah 1 tahun;
2. untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan atau penjara maksimum 3 tahun: daluwarsanya sesudah 6 tahun;

⁵³ Perhatikan Pasal 78-80 KUHP.

3. untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun daluwarnya 12 tahun;
4. untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup: daluwarnya sesudah 18 tahun.

Menurut Pasal 79 tentang Tenggang Daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam pasal tersebut, yang menyangkut *vorduurende delict* (delik berlangsung terus lihat penjelasan dalam bab tentang jenis delik). Adapun yang diatur dalam Pasal 79 adalah:

1. Kejahatan terhadap mata uang (Pasal 244) perhitungan daluwarsa didasarkan pada waktu setelah uang dipakai atau diedarkan;
2. Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (Pasal 328, 329, 330, dan 333), daluwarsa dihitung keesokan hari setelah orang tersebut dibebaskan atau ditemukan meninggal dunia;
3. Kejahatan terhadap register kependudukan (pasal 556-558 a), sehari setelah data tersebut dimasukkan dalam catatan register.

b) Pencegahan dan penangguhan

(1) Pencegahan (*stuiting*)

Menurut Pasal 80 Ayat (1), Tenggang Daluwarsa terhenti/tercegah (*gestuit*) apabila ada tindakan penuntutan (*daad van vervolging*). Pada mulanya tindakan penuntutan diartikan secara luas, yaitu mencakup tindakan-tindakan pengusutan (*daad van opsporing*).

Yurisprudensi kemudian menerima pendapat yang lebih sempit, yaitu hanya perbuatan-perbuatan penuntut umum yang langsung menyangkutkan hakim dalam acara pidana (misalnya, menyerahkan perkara ke sidang, mendakwa/mengajukan tuduhan, memohon revisi), jadi tindakan pengusutan tidak lagi dianggap termasuk tindakan penuntutan.

Menurut Pasal 80 Ayat (2), sesudah terjadinya pencegahan (*stuiting*) mulai berjalan tenggang daluwarsa yang baru; selama terhentinya dan selama ada tindakan penuntutan, tenggang waktunya tidak dihitung.

(2) Penangguhan (*scorsing*)

Menurut Pasal 81 Ayat (1), tenggang daluwarsa penuntutan tertunda/tertanggihkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan Praejudisiil, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan yang dalam hal ada penundaan/pertangguhan (*schorsing*) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus.

Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertanggihkan, hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.

(3) Daluwarsa ppidanaan

Sama dengan daluwarsa penuntutan, landasan pemikiran atas daluwarsa ppidanaan didasarkan pada dua hal.

- (a) Dalam kenyataannya perputaran waktu tidak hanya secara perlahan menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi, tetapi juga menghapuskan keinginan untuk melakukan pembalasan.
- (b) Bahwa pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan.

Perbedaannya di sini, yaitu alasan kesulitan pembuktian tidak lagi relevan.

(a) Daluwarsa kewenangan menjalankan pidana

Tenggang waktu daluwarsanya diatur dalam Pasal 84 Ayat (2), yaitu:

- 1) untuk semua pelanggaran: daluwarsanya 2 tahun.
- 2) untuk kejahatan percetakan: daluwarsanya 5 tahun.
- 3) untuk kejahatan lainnya: daluwarsanya sama dengan daluwarsa penuntutan (lihat Pasal 78) ditambah sepertiga.

Pada Ayat (3) ditetapkan bahwa tidak ada daluwarsa untuk kewenangan menjalankan hukuman mati, sedangkan menurut Pasal 85 Ayat (1), tenggang daluwarsa dihitung mulai pada keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan. Ini tidak sama dengan putusan hakim yang *inkracht van gewijsde* (putusan ayat berkekuatan tetap).

Pada umumnya memang putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, ada putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan tetap, yaitu "verstek-vonnis" (keputusan di luar hadirnya terdakwa).

c) Pencegahan dan Penangguhan Daluwarsa Pidana

1) Pencegahan (*stuiting*)

Pencegahan (*stuiting*) terhadap daluwarsa hak untuk menjalankan/mengeksekusi pidana dapat terjadi dalam dua hal (Pasal 85 Ayat (2)), yaitu:

a) Jika terpidana melarikan diri selama menjalani pidana.

Dalam hal ini, tenggang daluwarsa baru dihitung pada keesokan harinya setelah melarikan diri.

b) Jika pelepasan bersyarat dicabut

Dalam hal ini, pada esok harinya setelah pencabutan, tenggang daluwarsa baru mulai berlaku.

Dengan demikian, selama ada pencegahan, jangka lewat waktu yang telah dilalui hilang sama sekali (tidak dihitung).

2) Penangguhan (*schorsing*)

Penundaan (*schorsing*) terhadap daluwarsa, hak untuk mengeksekusi pidana dapat terjadi dalam dua hal (Pasal 33 ayat (3)), yaitu:

a) selama perjalanan pidana ditunda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) selama terpidana dirampas kemerdekaannya (ada calon tahanan), walaupun perampasan kemerdekaan itu berhubungan dengan pembedaan lain.

Dalam Pasal 78 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya dengan ketentuan berikut.

1. Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan.
2. Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun.
3. Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara, yang lebih dari 3 bulan.
4. Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dilakukan mati atau penjara seumur hidup.

d. Penyelesaian di Luar Pengadilan (Denda Maksimum dan Biaya-biaya Bila Penuntutan Telah Dimulai)⁵⁴

Peraturan dari Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa yang umurnya sebelum melakukan perbuatan itu belum cukup enam belas tahun, penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum yang diatur dalam Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian, pada satu pihak penyidik atau penuntut umum dan pihak lainnya tersangka merupakan pihak-pihak yang sederajat terhadap hukum.

Dengan demikian, pembayaran denda harus dilakukan kepada penuntut umum dalam waktu yang ditetapkan oleh penuntut umum tersebut. Kiranya tidak dapat dimungkiri bahwa acara ini berasal dari hukum perdata, seperti halnya kebaikan pihak-pihak menjelaskan suatu delik aduan, hal tersebut dinilai sangat jelas bahwa cara ini bertentangan dengan sifat hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Namun, dalam perkara-perkara kecil yang ancaman hukumannya hanya diancam dengan pidana denda saja sifat hukum publik itu perlu disimpangi untuk mempermudah dan mempercepat acara penyelesaiannya.

⁵⁴ Perhatikan Pasal 82 KUHP.

e. Ketentuan Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana di Luar KUHP

1) Grasi (Clemency)

Grasi berasal dari bahasa Belanda "*Gratie*", dalam bahasa Inggris "*Granted*" yang berarti wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapus seluruh, sebagian atau mengubah bentuk hukuman itu.

Definisi grasi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden⁵⁵ meskipun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

Grasi bukan sebuah upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa yang hanya sampai pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Grasi merupakan upaya non-hukum yang didasarkan pada hak prerogatif presiden yang diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi maka dapat diketahui bahwa grasi dapat diperoleh oleh:

- a) Dapat dimohonkan pada pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.⁵⁶
- b) Jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 1 (satu) tahun sejak memperoleh kekuatan hukum tetap,⁵⁷ kecuali dalam hal sebagai berikut:

⁵⁵ Lihat Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

⁵⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

⁵⁷ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

(1) Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut.

(2) Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

- c) Permohonan grasi diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya dengan persetujuan terpidana, kepada Presiden, dan khusus permohonan grasi untuk pidana mati dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.⁵⁸
- d) Salinan permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden disampaikan juga kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.⁵⁹
- e) Presiden memberikan keputusan berupa pemberian atau penolakan grasi melalui Keputusan Presiden terhadap permohonan grasi, setelah memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.⁶⁰

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa risiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah (*innocent people*).

Selain hal tersebut, adanya kekhilafan dalam proses hukum yang meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya. Dapat dikatakan grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi risiko tersebut meskipun grasi berada di luar lingkup peradilan pidana.

Hal ini memberikan indikasi bahwa meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata negara, hukum pidana memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari putusan eksekusi.

⁵⁸ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

⁵⁹ Lihat Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

⁶⁰ Lihat Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

2) Amnesti (*Amnesty*)

Amnesti berasal dari kata Yunani, *amnestia* yang berarti pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.⁶¹ Oleh karena itu, amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan panjang serta adanya jaminan bahwa kelompok tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Pemberian amnesti oleh suatu negara ditujukan terhadap delik yang bersifat politik, seperti pemberontakan, pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, ataupun yang sudah dijatuhi hukuman dengan pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut.

3) Abolisi (*Abolition*)

Abolisi berasal dari bahasa Inggris *abolition* yang berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah, abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Dengan kata lain, abolisi merupakan keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dan pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa abolisi bukanlah pengampunan dari presiden kepada para terpidana, melainkan upaya presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka karena pemeriksaan dan penuntutan tersebut dianggap dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

4) Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Rehabilitasi berasal dari bahasa Latin *habilitare* yang berarti "membuat baik". Dalam perspektif ini, rehabilitasi adalah tindakan presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena keputusan hakim yang dinilai tidak seberapa atas perbuatannya dibandingkan dengan

61 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

perkiraan semula atau bahkan seorang tersangka dinilai oleh kepala negara yang dalam hal ini seorang presiden dianggap tidak bersalah sama sekali.⁶²

Fokus rehabilitasi terlihat pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dengan tidak bergantung pada Undang-Undang, tetapi pada pandangan masyarakat. Secara psikologis tentu penetapan seseorang sebagai terpidana atas sebuah perkara hukum akan membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, rehabilitasi dapat dianggap sebagai tanggung jawab psikologis presiden dalam memperbaiki nama, hak, dan citra seseorang yang terlanjur dihubungkan dengan perkara hukum, tetapi tidak dapat dibuktikan keterlibatannya atau sangkaan yang salah.

5) Remisi (*Remission*)

Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi menjelaskan bahwa remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁶³

Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut.

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 - Berkelakuan baik; dan
 - Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

62 Lihat Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, dan Lihat Keputusan Presiden RI Nomor 142 tahun 2000, Pemberian Rehabilitasi pada Sdr. Nurdin A.R.

63 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 11-14.

3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan LAPAS dengan predikat baik.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia yang diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada ketiga peraturan tersebut, terdapat beberapa poin yang dinilai penting, yaitu sebagai berikut.

1. Remisi khusus tertunda waktu pelaksanaannya:

- a. Diberikan kepada terpidana pada saat Hari Raya keagamaan yang dianutnya dengan ketentuan sudah menjalani tahanan di dalam Lapas/Rutan selama 6 (enam) bulan atau lebih dan masa tahanannya tidak terputus.⁶⁴
- b. Sebelum Hari Raya keagamaan yang dianut perkaranya sudah divonis belum diterima oleh Lapas/Rutan dengan ketentuan jaksa maupun yang bersangkutan menyatakan secara tertulis ataupun secara lisan tidak mengajukan Banding atau Kasasi.
- c. Usulan remisi dapat diajukan sebelum Hari Raya Keagamaan yang dianutnya, sedangkan pemberiannya ditunda sampai putusan atau vonis sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Remisi khusus bersyarat, yaitu remisi 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan

64 Perhatikan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.Pk.02.02 tahun 2010 tentang Remisi Susulan.

besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Selanjutnya, remisi khusus bersyarat tersebut memperhitungkan masa habisnya suatu hukuman. Apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin, maka remisi khusus bersyarat tersebut ada remisi tambahan,⁶⁶ yaitu apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana memenuhi syarat yang sudah ditentukan, antara lain:⁶⁷

1. Berbuat jasa kepada negara.
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
3. Melakukan kegiatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan.

Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi dianggap lebih manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia selama menjalani masa pidana di Lembaga Permasyarakatan daripada Keputusan Presiden sebelumnya. Adapun Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1), yaitu remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Narapidana dan anak pidana yang telah dalam pengajuan pengusulan Remisi Umum Susulan, Remisi Khusus Tertunda, dan Remisi Khusus Bersyarat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan.⁶⁸

65 Perhatikan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.Pk.02.02 tahun 2010 tentang Remisi Susulan.

66 Lihat Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 174 tahun 1999 tentang Remisi.

67 Lihat Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 174 tahun 1999 tentang Remisi.

68 Perhatikan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.Pk.02.02 tahun 2010 tentang Remisi Susulan.

Maksud dari kelakuan baik, yaitu narapidana yang menaati peraturan yang berlaku selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. Pembahasan mengenai remisi tersebut, khususnya mengenai dasar hukum dari pengurangan masa menjalani hukuman (remisi), tidak terlepas kaitannya dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 14 sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya.⁶⁹

Dengan adanya kewenangan presiden memberikan remisi tersebut, dapat dipahami bahwa narapidana dapat diberi ampunan, baik berupa pengurangan untuk sebagian maupun keseluruhannya. Istilah pengurangan hukuman ini dalam perkembangannya mempunyai arti masing-masing.

Pengurangan untuk sebagian bagi narapidana yang dihukum dengan hukuman pidana dengan maksud koreksi terhadap putusan pengadilan, digunakan istilah *grasi*. Adapun pengurangan untuk sebagian atau seluruhnya bagi narapidana yang dihukum dengan hukuman sementara atau seumur hidup, istilah yang digunakan adalah *remisi*.

Adanya pemisahan tersebut bermula sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah yang memuat pengurangan masa menjalani pidana yang dalam Keputusan Presiden tersebut telah disebutkan secara terperinci mengenai remisi dan pelaksanaannya, yaitu terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 14 dan 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).
3. Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 tentang Remisi.
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01.HN.02.01 tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang Remisi Susulan.

69 E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 251.

6. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 2006.

Dalam pembahasan ini penulis lebih mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01.Hn.02.01 tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan. Oleh sebab itu, pengajuan dan pemberian remisi narapidana yang harus dilampirkan antara lain sebagai berikut.

1. Fotokopi keputusan vonis dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah dilegalisir oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
2. Untuk narapidana B I/B II harus dilampiri dengan daftar perubahan.
3. Surat Kelakuan Baik/Ieter F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.
4. Negara untuk pengusulan narapidana seumur hidup bisa diberi remisi apabila pidana seumur hidup telah diubah menjadi pidana sementara, perubahan tersebut diusulkan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi antara lain sebagai berikut.
 - a. Usulan untuk memperoleh perubahan pidana penjara sementara diajukan oleh terpidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁷⁰
 - b. Terpidana membuat surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia yang diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan negara setempat kemudian

70 Perhatikan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 174 tahun 1999 tentang Remisi.

dikirim ke Presiden RI melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁷¹

c. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dilakukan oleh Presiden yang diwujudkan dalam surat Keputusan Presiden,⁷² apabila sudah ada surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia, bahwa pidana seumur hidup telah dirubah menjadi pidana sementara, maka untuk tahun berikutnya narapidana yang bersangkutan akan diusulkan untuk mendapat remisi.⁷³

d. Narapidana yang pernah mengajukan permohonan grasi atau pidana penjara seumur hidup dan ditolak Presiden, dalam hal ini maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Rumah Tahanan negara) yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Narapidana dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Permohonan tersebut dibuat oleh Narapidana atau pihak lain selaku kuasa Narapidana dengan persetujuan Narapidana yang bersangkutan dengan formulir yang sudah ditentukan, persetujuan tersebut kemudian ditanda tangani atau dicap ibu jari kiri Narapidana yang bersangkutan pada surat permohonan di hadapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Setelah selesai maka Kepala Lembaga melengkapi surat permohonan dengan memberikan dan melampirkan surat keterangan berkelakuan baik mengenai Narapidana tersebut, kemudian dikirim surat tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.⁷⁴

(2) Kepala Kejaksaan Negeri segera menyampaikan surat permohonan beserta lampirannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai pertimbangan untuk Presiden.

71 Perhatikan Pasal 9 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor: 174 tahun 1999 tentang Remisi.

72 Perhatikan Pasal 9 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor: 174 tahun 1999 tentang Remisi.

73 Perhatikan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor: 174 tahun 1999 tentang Remisi.

74 Perhatikan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01.Hn.02.01 tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan khusus terdapat beberapa poin yang dinilai penting untuk disampaikan pada pembahasan ini, yaitu sebagai berikut.

1. Remisi Umum (*General Remission*), adalah Pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan setiap Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Besar remisi umum, yaitu:⁷⁵

- a. Satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam)–12 (dua belas) bulan.
- b. Dua bulan bagi narapidana atau anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut.⁷⁶

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi 1 atau 2 bulan.
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan.
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan.
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 bulan.
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 bulan setiap tahun.

2. Remisi Khusus (*Special Remission*), yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan setiap Hari Besar Keagamaan (Idhul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak) kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Besar remisi khusus sebagai berikut:⁷⁷

75 Perhatikan Pasal 4 Ayat (1), (2) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

76 Perhatikan Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

77 Perhatikan Pasal 4 Ayat (1), (2) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan-12 (dua belas) bulan.
- b. Tahun Pertama (telah menjalani 6-12 Bulan) Mendapat 15 (Lima belas) Hari.
- c. Tahun I (telah menjalani lebih dari 1 Th.) Mendapat 1 (Satu) Bulan.
- d. Tahun II Mendapat 1 (Satu) Bulan.
- e. Tahun III Mendapat 1 (Satu) Bulan.
- f. Tahun IV Mendapat 1 (Satu) Bulan dan 15 (Limabelas) Hari.
- g. Tahun V Mendapat 1 (Satu) Bulan dan 15 (Limabelas) Hari.
- h. Tahun VI dan seterusnya Mendapat 2 (Dua) Bulan.

Pemberian *remisi khusus* tersebut dilaksanakan sebagai berikut:⁷⁸

- a. Pada tahun I diberikan remisi 15 hari atau 1 bulan.
- b. Pada tahun II & III masing-masing diberikan remisi 1 bulan.
- c. Pada tahun IV & V diberikan remisi 1 bulan 15 hari.
- d. Pada tahun VI & seterusnya diberikan remisi 2 bulan setiap tahun.

Gambaran lebih detailnya sebagai berikut:

TAHUN KE	BESARNYA REMISI UMUM	BESARNYA REMISI KHUSUS
I Tahun Pertama (apabila telah menjalani 6-12 bulan)	1 (satu) bulan	15 (lima belas) hari
I Tahun Pertama (apabila telah menjalani lebih dari 1 tahun)	2 (dua) bulan	1 (satu) bulan
II Tahun Kedua	3 (tiga) bulan	1 (satu) bulan
III Tahun Ketiga	4 (empat) bulan	1 (satu) bulan

⁷⁸ Perhatikan Pasal 5 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

TAHUN KE	BESARNYA REMISI UMUM	BESARNYA REMISI KHUSUS
IV Tahun Keempat	5 (lima) bulan	1 (satu) bulan, 15 (lima belas) hari
V Tahun Kelima	5 (lima) bulan	1 (satu) bulan, 15 (lima belas) hari
VI Tahun Keenam dan seterusnya	6 (enam) bulan	2 (dua) bulan

3. Remisi Tambahan (*Additional Remission*), adalah Remisi yang diberikan pada setiap dasawarsa Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Besar Remisi adalah satu perduabelas ($\frac{1}{12}$) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan. (Kepres No. 120 tahun 1955). Besaran Remisi Dasawarsa bergantung dari masa tahanan pelaku kriminal, contoh: Masa Pidana 2 tahun akan mendapatkan Remisi Dasawarsa adalah: $\frac{1}{12} \times 2 \text{ tahun} = 2 \text{ bulan}$, berikut gambarannya untuk diketahui dan dipahami:

- a. $\frac{1}{2}$ (Satu Perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.
- b. $\frac{1}{3}$ (Satu Pertiga) dari remisi umum yang telah diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:⁷⁹

1. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan.
2. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
3. Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
4. Dijatuhi hukuman kurungan sebagai pengganti pidana denda.

⁷⁹ Perhatikan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Analisis di atas dengan ketentuan perubahan terhadap Pasal 14 Ayat (1), dan (2) UUD 1945 tentang amnesti dan abolisi bertujuan untuk peningkatan fungsi dan peran DPR dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden dalam memberikan Pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, Abolisi terhadap para terpidana dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,⁸⁰ dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Hapusnya Hak Negara untuk Menjalankan Pidana

Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum, yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum definisi penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan yang bertugas menuntut atau penuntut umum ditentukan di Pasal 13 jo Pasal 1 Ayat (6) yang pada dasarnya menyebutkan Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁸¹

Pengertian lain jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸² Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Etika dan tanggung jawab profesi jaksa

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸³ Karena kedudukannya tersebut, dalam melakukan penuntutan dengan mengambil langkah-langkah berikut.

- a. Menerima dan memeriksa berkas.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas pada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan kepada terdakwa/saksi-saksi.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, kejaksaan

80 Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang Menegaskan "Presiden Memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan Memerhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung."

81 Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

82 Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

83 Pasal 1 Angka 6 Huruf a UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, ataupun lainnya. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang berikut.

a. Bidang Pidana

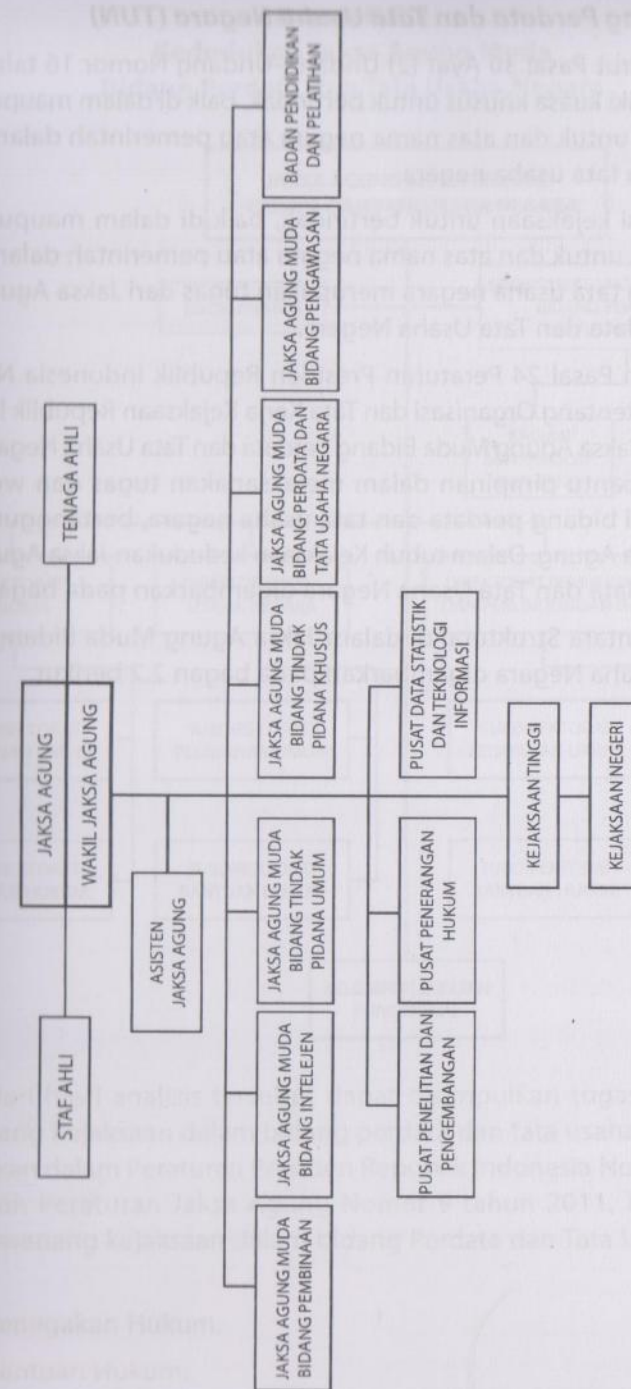
Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu:⁸⁴

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas, penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan. Ini artinya, setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan. Dengan kata lain, hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

84 Perhatikan Pasal 30 Ayat (1), BAB III Tugas dan Wewenang, Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bagan 6.1.1
Kedudukan Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

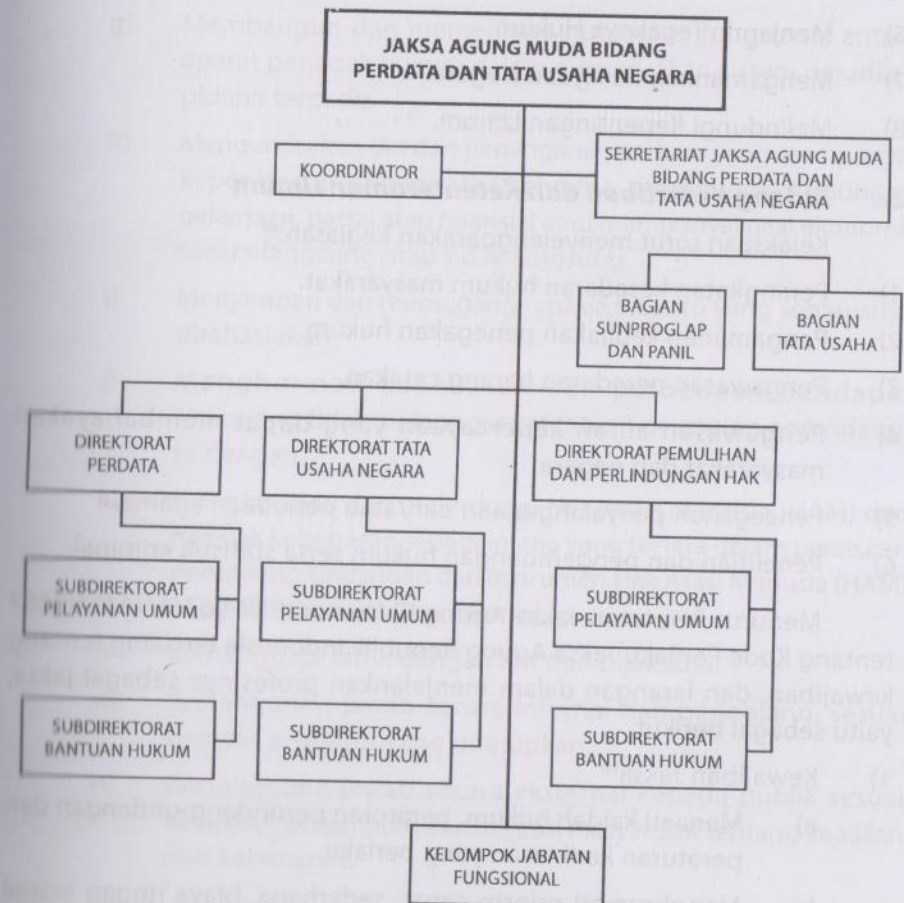
Menurut Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, jaksa memiliki kuasa khusus untuk bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Fungsi kejaksaan untuk bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Dalam tubuh Kejaksaan kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara digambarkan pada bagan 2.1.

Sementara Struktural di dalam Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara digambarkan pada bagan 2.2 berikut.

Bagan G.2.2
Kedudukan Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 tahun 2011. Tugas, fungsi, dan wewenang kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) Penegakan Hukum.
- 2) Bantuan Hukum.

- 3) Pertimbangan Hukum.
- 4) Pelayanan Hukum.
- 5) Tindakan Hukum Lain.
- 6) Menjamin Tegaknya Hukum.
- 7) Mengamankan Kekayaan Negara.
- 8) Melindungi Kepentingan Umum.

c. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:⁸⁵

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Menurut Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia tertuang tentang kewajiban, dan larangan dalam menjalankan profesinya sebagai jaksa, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kewajiban Jaksa⁸⁶
 - a) Menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
 - b) Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 - c) Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran.
 - d) Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan/ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung.

⁸⁵ Perhatikan Pasal 30 Ayat (3).

⁸⁶ Perhatikan Pasal 3, BAB II Kewajiban, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia.

- e) Bertindak secara objektif dan tidak memihak.
- f) Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban.
- g) Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.
- h) Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.
- i) Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
- j) Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima secara universal.
- l) Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.
- m) Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- n) Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

2) Larangan Jaksa⁸⁷

- a) Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
- b) Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.
- c) Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.

⁸⁷ Perhatikan Pasal 4, BAB II Kewajiban, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia.

- d) Meminta, menerima hadiah keuntungan, serta melarang keluarganya meminta dan menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya.
- e) Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai, finansial, mempunyai nilai ekonomis secara langsung/tidak langsung.
- f) Bertindak diskriminatif dalam bentuk apa pun.
- g) Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum.
- h) Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

BAB 3

POKOK-POKOK SISTEM HUKUM PIDANA DAN PERADILAN PIDANA

A. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penggolongan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan,¹ dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Hukum merupakan perantara utama dalam hubungan sosial antarmasyarakat terhadap kriminalisasi dan sarana bagi negara untuk menuntut pelaku dalam konstitusi hukum dengan menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan sebagainya.

Hukum merupakan peraturan atau ketentuan tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelakunya.

2. Pengertian Hukum Pidana

Hingga saat ini, belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian *tindak pidana* (*strafbaar feit*) karena hukum pidana secara

¹ Robertson, *Crimes against humanity*, 90; see "*Analytical Jurisprudence*" for extensive debate on what law is; in *The Concept of Law* Hart argued law is a "system of rules"; Campbell, *The Contribution of Legal Studies*, 184.

tradisional lebih memuat peraturan yang mengandung kehormatan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.² Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana.

Menurut Moeljatno, istilah hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk:

- a. menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan hal yang melanggar larangan yang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. menentukan cara pelaksanaan pengenaan pidana itu apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berkenaan dengan pengertian hukum pidana, C.S.T. Kansil memberikan definisi hukum pidana sebagai hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan. Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa hukum pidana bukanlah hukum yang mengandung norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap norma hukum mengenai kepentingan umum. Kepentingan umum menurut C.S.T. Kansil adalah sebagai berikut.

- a. Badan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
- b. Kepentingan umum tiap manusia, yaitu, jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang

² Bambang Purnama, "Asas-asas Hukum Pidana" Alia Indonesia, Tempat tidak disebutkan, tahun tidak disebutkan.

- jawab. Dengan demikian, unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu:
- a. perikelakuan manusia yang berdampak pada kriminalitas;
 - b. pelanggaran hukum, kecuali apabila ada dasar pembenaran.

Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah:

- a. perilaku manusia;
- b. terjadi sikap yang melanggar hukum;
- c. pelaku mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum;
- d. tidak ada penyimpangan kejiwaan yang memengaruhi sikap tindak tersebut.

Dilihat dari ruang lingkupnya hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi dengan tidak mengesampingkan asas legalitas, dalam sistem hukum pidana dikenal juga hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat dari masih diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat.

Hukum adat yang beragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*Gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia terdapat sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan secara konkret, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berpedoman pada Pasal 5 Ayat (3) Huruf (b) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Drt tahun 1951, jelas bahwa masih dibuka jalan untuk memberlakukan delik adat, walaupun dalam arti terbatas. Contohnya adalah: Putusan pengadilan negeri Poso tanggal 10 Juni 1971, Nomor: 14/Pid/1971 tentang Tindak Pidana Adat Persetubuhan Diluar Kawin. Duduk

telah melakukan persetubuhan di luar kawin. Dengan demikian, terdakwa menyebabkan "E" tersebut hamil dan melahirkan anak. Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan delik kesusilaan berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Huruf (b) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1951 1 Drt tahun 1951 jo. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

1) Hukum Pidana Objektif (*Ius Peonale*)

Hukum pidana objektif (*Ius Peonale*) merupakan seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana jenis dan macam pidana serta bagaimana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu dan batas daerah tertentu, artinya seluruh warga dari daerah (hukum) tersebut wajib menaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut, hukum pidana objektif (*Ius Peonale*) adalah semua peraturan yang memuat ancaman dari peraturan yang diadakan ancaman hukuman. Hukum pidana objektif ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a) Hukum pidana materiel, yaitu peraturan yang mengandung perumusan: perbuatan yang dapat dihukum, orang-orang yang dapat dihukum, jenis hukum yang dapat dijatuhkan.
- b) Hukum pidana formal, yaitu disebut juga sebagai hukum acara, memuat peraturan tentang cara negara beserta alat-alat perlengkapannya melakukan hak untuk menghukum (mengancam, menjatuhkan, atau melaksanakan).

2) Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*)

Hukum pidana subjektif (*Ius puniendi*) merupakan hak penguasa untuk mengancam suatu pidana kepada suatu tingkah laku sebagaimana digariskan dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana, dan mewajibkan terpidana untuk melaksanakan pidana yang dijatuhkan.

c. Hukum Pidana Kodifikasikan (*Gecodificeerd*) dan Hukum Pidana Tidak Dikodifikasikan (*Niet Gecodificeerd*)

- 1) Hukum pidana dikodifikasikan

Hukum pidana tidak dikodifikasikan, misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti:

- a) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- c) Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.

d. Hukum Pidana Umum (*Algemeen Strafrecht*) dan Hukum Pidana Khusus (*Bijzonder Strafrecht*)

1) Hukum Pidana Umum (*Algemeen Strafrecht*)

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum).

2) Hukum Pidana Khusus (*Bijzonder Strafrecht*)

Hukum pidana khusus adalah peraturan yang hanya ditunjukkan pada tindakan tertentu (tindak pidana subversi) atau golongan tertentu (*milliter*) atau tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi, dan lain-lain. Menurut Samidjo, S.H., hukum pidana khusus dapat disebut sebagai berikut.

a) Hukum pidana militer

Hukum pidana militer merupakan ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP militer atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHPPT), dan dikenal juga Kitab Undang-undang Disiplin Tentara (KUHDPT).

b) Hukum pidana fiskal (pajak)

Hukum pidana fiskal (pajak) merupakan bagian hukum administrasi negara atau hukum tata negara. Beberapa sarjana menganggap bahwa hukum pajak merupakan ilmu yang berdiri sendiri, berdampingan dan sejajar dengan disiplin ilmu yang lain. Dalam hukum pajak di samping ada sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dan kejahatan.

Hukum pidana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat di luarnya, yaitu ketentuan-ketentuan yang khusus (*lex specialist*) untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan keseluruhan yang sistematis. Hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan dalam buku I KUHP berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana (peristiwa yang dapat dikenakan hukuman = *staafbaar feit*) yang diuraikan di luar KUHP. Undang-Undang perpajakan membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dalam dua jenis, yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

c) Hukum pidana ekonomi

Hukum pidana ekonomi merupakan ketentuan yang mengatur pelanggaran ekonomi yang dapat mengganggu kepentingan umum. Tindak pidana ekonomi diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang mulai berlaku tanggal 13 Mei 1995, undang-undang darurat tersebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana ekonomi secara umum adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat.

d) Hukum pidana politik

Hukum pidana politik merupakan ketentuan yang mengatur kejahatan politik, misalnya mengkhianati rahasia negara, intervensi, pemberontakan, sabotase. Dari kata majemuk tersebut, begitu banyak pengertian yang kita dapatkan dari istilah kejahatan ataupun istilah politik. Sementara kejahatan berdasarkan *social definition of crimes* adalah definisi kejahatan, dengan kata lain kejahatan tersebut belum dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, seperti kejahatan politik (*political crime*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan korporasi (*corporate crime*), kejahatan jalanan (*street crime*), kejahatan dalam rumah tangga (*domestic crime*), dan sebagainya.

Menurut Yuwono Sudarsono, politik adalah proses hidup yang serba hadir dalam setiap lingkungan sosial budaya. Politik sering disalahartikan, misalnya larangan untuk berpolitik, deideologisasi, deparpolitisasi yang hampir semua orang telah mengetahui bahwa pelarangan itu juga merupakan perbuatan politik sekalipun terdapat berbagai pengertian politik, dengan pencapaian tujuan oleh individu yang dihubungkan dengan faktor kekuasaan atau kewenangan.

Jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam peraturan pidana khusus, jadi hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Hal tersebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang ditentukan dalam Pasal 63 Ayat (2) dan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

e. **Hukum Pidana Umum (*Algemeen Strafrecht*) dan Hukum Pidana Lokal (*Plaatselijk Strafrecht*)**

1) **Hukum Pidana Umum (*Algemeen Strafrecht*)**

Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional,³ adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara.

³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 12.

2) Hukum Pidana Lokal (*Plaatselijk Strafrecht*)

Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai dalam peraturan daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun pemerintahan kota.⁴

Penjatuan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-alat kekuasaannya terikat pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵

Selain itu, atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supranasional). Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui, dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa di dunia. Contoh hukum pidana internasional, yaitu sebagai berikut.

- a) Hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London (8-8-1945) yang menjadi dasar bagi Mahkamah Militer Internasional di Neurenberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua.
- b) Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain mengenai korban perang yang luka dan sakit di darat dan di laut, tawanan perang, penduduk sipil dalam peperangan.⁶

4 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 13.

5 P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 21.

6 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 14.

4. Tujuan dan Penggolongan Hukum

a. Tujuan Hukum

Hukum merupakan peraturan hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap orang yang tidak mematuhi. Sebagaimana dengan pengertian hukum, banyak pendapat mengenai tujuan hukum, antara lain sebagai berikut.

- 1) *Prof Subekti, S.H.*, hukum pada tujuan negara, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan yang menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang mendapat bagian yang sama pula.
- 2) *Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn*, tujuan hukum adalah mengatur hubungan antarsesama manusia secara damai dengan memerhatikan berbagai pertimbangan kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang.
- 3) *Geny*, tujuan hukum adalah mencapai keadilan dan berdaya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan. Persoalan tujuan hukum menurut Achmad Ali dapat dikaji melalui tiga sudut pandang berikut:
 - a) hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, yaitu tujuan hukum dititikberatkan pada kepastian hukumnya;
 - b) filsafat hukum, yaitu tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
 - c) sosiologi hukum, yaitu tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, hukum ditujukan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Adapun fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Fungsi hukum yang berkembang di tengah masyarakat terdiri atas sebagai berikut.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan, termasuk memberikan pengarahan kepada seluruh umat manusia untuk mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Hukum dapat memaksa agar dunia hukum itu ditaati anggota masyarakat.

2) Sarana mewujudkan keadilan lahir dan batin, yaitu:

- a) hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang;
- b) hukum mempunyai sifat memaksa;
- c) hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis.

Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya mengikat, hukum dapat memberi keadilan serta dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

3) Sarana penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

4) Fungsi kritis

Dr. Soedjono Dirdjosisworo⁷ mengatakan, saat ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas), tetapi mengatur aparatur penegak hukum.

5) Syarat agar fungsi hukum terlaksana dengan baik

Fungsi hukum akan terlaksana dengan baik jika para penegak hukum memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik dengan cara tertentu, misalnya:

- a) menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing;

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 155.

- b) apabila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan *a contrario*.

Di samping hal-hal tersebut, dibutuhkan kecakapan, keterampilan, dan ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

b. Penggolongan Hukum

1) Berdasarkan wujudnya

- a) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara.
- b) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat), alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi (*Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus*).

2) Berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya

- a) Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya).
- b) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya).
- c) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).

3) Berdasarkan waktu yang diaturnya

- a) Hukum yang berlaku disebut hukum positif (*ius constitutum*).
- b) Hukum yang berlaku pada waktu mendatang (*ius constituendum*).
- c) Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

- 4) Berdasarkan pribadi yang diaturnya
 - a) Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu.
 - b) Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan.
 - c) Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda.

5) Berdasarkan isi masalah yang diaturnya

Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

- a) Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara.
 - (1) Hukum tata negara, yaitu hukum yang mempelajari negara tertentu, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara, dan sebagainya.
 - (2) Hukum administrasi negara, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur cara bekerja alat-alat perlengkapan negara termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ negara.
 - (3) Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan hukum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan melanggar (ringan) dengan ancaman denda.
 - (4) Hukum acara disebut juga hukum formal (pidana dan perdata). Hukum acara adalah seperangkat aturan yang berisi tata cara menyelesaikan, melaksanakan, atau mempertahankan hukum material. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penuntutan.

- b) Hukum privat (*hukum perdata*) adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan, Perdata berarti warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah *Burgelijk Wetboek* (BW), dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga hukum dagang dan hukum adat. Hukum perdata dapat dibagi sebagai berikut.

- (1) Hukum perseorangan (*individual law*), yaitu himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan Badan Hukum (PT, CV, Firma, dan sebagainya) merupakan "*pembawa hak*" atau sebagai "*subjek hukum*".
- (2) Hukum keluarga (*family law*), yaitu hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga. Hukum keluarga dapat dibagi sebagai berikut.
 - (a) Kekuasaan orang tua, yaitu kewajiban membimbing anak sebelum cukup umur, kekuasaan orang tua putus ketika seorang anak telah dewasa (21 tahun), terlalu nakal, putusnya perkawinan.
 - (b) Perwalian, yaitu seseorang/perkumpulan tertentu yang bertindak sebagai wali untuk memelihara anak yatim piatu sampai cukup umur. Hal ini terjadi, misalnya karena perkawinan kedua orangtuanya putus, di Indonesia wali pengawas dilakukan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan.
 - (c) Pengampunan, yaitu seseorang yang ditunjuk hakim untuk menjadi kurator (*pengampun*) bagi orang dewasa yang diampuninya (*kurandus*) karena adanya kelainan, sakit ingatan, boros, lemah daya, tidak sanggup mengurus diri, dan berkelakuan buruk.

(d) Perkawinan, yaitu mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak (*laki-laki dan perempuan*) dengan maksud hidup bersama untuk jangka waktu yang lama menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(3) Hukum kekayaan (*property law*), yaitu hukum yang mengatur benda (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau objek hak milik) dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum kekayaan mencakup hal-hal berikut

(a) Hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak (diakui dan dihormati setiap orang). Hukum benda terdiri atas: 1) hukum benda bergerak, karena sifatnya (kendaraan bermotor) dan karena penetapan undang-undang (surat-surat berharga); 2) hukum benda tidak bergerak, karena sifatnya (tanah dan bangunan), karena tujuannya (mesin-mesin pabrik), dan karena penetapan undang-undang (hak opstal dan hipotik).

(b) Hukum perikatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Pihak pertama (kreditur) berhak atas suatu prestasi (pemenuhan sesuatu). Pihak lain (debitur) wajib memberikan sesuatu. Debitur yang tidak menepati perkataannya dinamakan wanprestasi, sedangkan objeknya adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan yang terdiri atas:

- i. memberikan sesuatu, yaitu membayar harga menyerahkan barang, dan sebagainya;
- ii. berbuat sesuatu, yaitu memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan karena putusan pengadilan, dan sebagainya;

iii. tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak mendirikan bangunan, tidak memakai merek tertentu karena putusan pengadilan.

(4) Hukum waris (*inheritance law*), yaitu hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah meninggal. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan ahli waris, urutan penerimaan waris, hibah, serta wasiat. Pembagian waris dapat dilakukan dengan cara berikut.

(a) Menurut Undang-Undang (UU), pembagian warisan kepada si pewaris yang memiliki hubungan darah terdekat. Contohnya, jika seorang ayah meninggal, hartanya akan diwariskan kepada istri dan anaknya, tetapi apabila ia tidak mempunyai keturunan pembagian, warisannya diatur menurut Undang-Undang (UU).

(b) Menurut wasiat, yaitu pembagian waris berdasarkan pesan atau kehendak terakhir (wasiat) dari pewaris yang harus dinyatakan secara tertulis dalam akta notaris. Penerimaan warisan disebut *legataris*, sedangkan bagian warisan yang diterimanya disebut *legaat*, dalam arti luas hukum perdata mencakup hukum dagang dan hukum adat.

(5) Hukum dagang (*wetboek van koophandel*), yaitu hukum yang mengatur masalah perdagangan perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia (*person*) dalam perdagangan atau perniagaan. Hal-hal yang diatur mencakup seperti Buku 1 (*perniagaan pada umumnya*) dan Buku II (*hak dan kewajiban yang timbul dalam dunia perniagaan*).

(6) Hukum adat (*customary law*), yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu serta hanya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, pernikahan menurut adat Manggarai-Flores, pernikahan daerah Bugis, pembagian waris di Batak.

(1) Macam badan hukum publik:

- (a) Badan hukum yang mempunyai teritorial, suatu badan hukum itu pada umumnya harus memerhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya.
- (b) Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial, suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu.

(2) Macam badan hukum privat (perdata):

- (a) Perkumpulan (*Vereniging*).⁸
- (b) Perseroan terbatas.⁹
- (c) Rederji.¹⁰
- (d) *Kerkgenootschappen*.¹¹
- (e) Koperasi.¹²
- (f) Yayasan, dan seterusnya

Untuk membedakan kedua jenis badan hukum tersebut, ada beberapa kriteria yang perlu diketahui, yaitu badan hukum perdata, yakni badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, sedangkan badan hukum publik, yaitu badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum.

Kalangan sarjana Jerman berpendapat bahwa perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum perdata terletak pada apakah badan hukum tersebut mempunyai kekuasaan sebagai penguasa, dan badan hukum itu dianggap mempunyai kekuasaan

sebagai penguasa, yaitu jika badan hukum tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan yang mengikat orang lain yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut (*wewenang*). Menurut *de heersende' leer*, Indonesia tidak mempergunakan kriteria dari Jerman, tetapi menggunakan kriteria:

- (a) berdasarkan terjadinya;
- (b) lapangan pekerjaan dari badan hukum, yaitu apakah lapangan pekerjaan itu untuk kepentingan umum atau tidak.

Menurut Soenawar Soekowati, untuk menentukan perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum perdata, kita dapat menggunakan gabungan pendapat dari *de heersende' leer* dan para sarjana Jerman, untuk saling melengkapi serta ketentuan dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata). Menurutny, badan hukum yang didirikan dengan konstruksi hukum publik belum tentu merupakan badan hukum publik dan belum tentu mempunyai wewenang publik. Sebaliknya, badan hukum yang didirikan oleh orang-orang swasta, tetapi dalam stelsel hukum tertentu, badan tersebut mempunyai kewenangan publik. Jadi, untuk memecahkan masalah tersebut dalam stelsel hukum Indonesia dapat digunakan kriteria berikut:

- a. dilihat dari cara pendiriannya atau terjadinya, badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
- b. lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya, badan hukum itu melakukan perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik atau tidak. Jika tidak, badan hukum itu merupakan badan hukum publik;
- c. mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, ia adalah badan hukum publik.

8 Diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata, Stb. 1870-64, dan Stb. 1939-570.

9 Diatur dalam Pasal 36 KUHDagang.

10 Diatur dalam Pasal 323 KUHDagang.

11 Diatur dalam Stb. 1927-156.

12 Diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok Koperasi.

B. Hubungan Hukum Pidana dengan Ilmu Lain

Ilmu hukum pidana mencakup beberapa cabang ilmu, mencakup ilmu-ilmu sosial dan budaya, yaitu ilmu tentang kaidah dan ilmu tentang pengertian yang keduanya disebut sebagai dogmatika hukum pidana serta ilmu tentang kenyataan. Berbagai ilmu tersebut adalah sebagai berikut.

1. Politik hukum pidana mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan, untuk mencegah terjadinya delikueni dan kejahatan.
2. Filsafat hukum pidana pada hakikatnya merenungkan nilai-nilai hukum pidana dengan berusaha merumuskan dan menyerasikan nilai-nilai yang berpasangan, tetapi mungkin bertentangan.
3. Objek dalam dogmatik hukum pidana adalah hukum pidana positif yang mencakup kaidah dan sistem sanksi. Ilmu hukum pidana positif bertujuan mengadakan analisis dan sistematisasi kaidah-kaidah hukum pidana untuk kepentingan penerapan yang benar. Ilmu tersebut berusaha untuk menemukan asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar dari hukum pidana positif yang kemudian menjadi patokan bagi perumusan serta penyusunan secara sistematis.
4. Sosiologi hukum pidana memusatkan perhatian pada sebab-sebab timbulnya peraturan-peraturan pidana tertentu serta efektivitasnya dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi hukum pidana sebagai berikut:
 - a. memengaruhi kaidah-kaidah hukum pidana dan warga masyarakat;
 - b. efek dari proses kriminalisasi serta deskriminalisasi;
 - c. identifikasi terhadap mekanisme produk dari hukum pidana;
 - d. identifikasi terhadap kedudukan serta peranan para penegak hukum;
 - e. efek dari setiap peraturan pidana terhadap kejahatan, terutama perilakunya.
5. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delikueni dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial. Jadi, ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum pidana, penyimpangan terhadap hukum atau pelanggaran, dan reaksi terhadap pelanggaran-

pelanggaran tersebut. Kriminologi mencakup tiga bagian pokok, yaitu:

- a. sosiologi hukum pidana yang meneliti dan menganalisis kondisi-kondisi tempat hukum pidana berlaku;
 - b. etiologi kriminal yang meneliti serta mengadakan analisis terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan;
 - c. penologi ruang lingkupnya mencakup pengendalian terhadap kejahatan.
6. Kriminologi merupakan teori tentang gejala hukum. Hubungan antara hukum pidana dan kriminologi adalah keduanya sama-sama berbicara tentang kejahatan, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang diancam pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objek. Objek hukum pidana menunjuk pada apa yang dipidana menurut norma-norma hukum pidana yang berlaku, sedangkan objek kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Dengan demikian, wajar apabila batasan luas kedua objek ilmu itu tidak sama.
- Hukum pidana memerhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, sedangkan kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melibatkan individu sebagai manusia. Dengan demikian, hukum pidana melihat bahwa perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana disebut sebagai kejahatan, sedangkan kriminologi melihat bahwa perbuatan bertentangan dengan hati nurani manusia disebut kejahatan.
- Titik tolak sudut pandang hukum pidana memiliki dua dimensi, yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, yaitu faktor motif (mental, psikologi, penyakit, hereditas) dan faktor sosial yang memberikan kesempatan bergerak. Hukum pidana lebih menekankan pada pertanggungjawaban, sedangkan kriminologi menekankan pada *accountability*, yaitu apakah perbuatan tersebut selayaknya diperhitungkan pada pelaku, cukup membahayakan masyarakat. Dalam kriminologi, unsur kesalahan tidak relevan. Interaksi hukum pidana dan kriminologi disebabkan hal-hal berikut.
- a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut sistem yang memberikan kedudukan penting bagi kepribadian

penjahat dan menghubungkan dengan sifat dan berat-ringannya (ukuran) pembedaannya.

- b. Sejak dahulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan orang gila dan anak-anak yang menyangkut perspektif dan pengertiannya.

Kriminologi terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *kriminale science* sekarang menghadapi beberapa problematika yang sama sekali baru dan berhubungan erat dengan kriminologi. Dunia kriminologi tidak bergantung pada perspektif dan nilai-nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi.

Dalam hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.

C. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem, undang-undang, dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama lebih kurang 300 tahun. Andi Hamzah menyatakan¹³ bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Oleh karena itu, meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, dan Singapura bertumpu pada sistem Anglo Saxon.

Walaupun bertumpu pada sistem Belanda, hukum pidana Indonesia modern dapat dipisahkan dalam dua kategori, yaitu hukum pidana acara dan hukum pidana materiel. Hukum acara pidana dalam bahasa Inggris merupakan "*procedural law*", sedangkan hukum pidana materiel merupakan "*substantive law*".

13 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 33.

Kedua kategori tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara berturut-turut, tetapi hasil wawancara¹⁴ menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah dibahas oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tingkat nasional Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut belum dapat disahkan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memunculkan beberapa hal yang sangat menarik terkait dengan perubahan pada sistem hukum pidana dan patut didiskusikan kenyataannya adalah sampai sekarang Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut belum dilaksanakan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah diajukan kepada legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama lebih kurang dua puluh tahun dan belum dapat disepakati apalagi disahkan. Oleh karena itu, untuk sementara, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan Undang-Undang (UU) yang berlaku dan digunakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum untuk melaksanakan urusan sehari-hari dalam menerapkan hukum pidana di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya menentukan prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan, misalnya hakim, jaksa, polisi, dan lain-lainnya. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan pelanggaran dan kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki ataupun dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut.

Sebagai contoh, Pasal 340 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁵ tentang kejahatan yang menegaskan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.¹⁶

14 Wawancara terpisah dengan Dosen-dosen Fakultas Hukum UNRAM: Lalu Parman dan M. Lubis, SH., M.Hum. pada tanggal 27 Januari 2009.

15 R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 357.

16 Dengan pemakaian kata "selama-lamanya", kita memahami bahwa itu adalah ancaman hukuman yang paling maksimal yang dapat hakim jatuhkan kepada terdakwa, sedangkan hukuman minimal tak ada sekalipun. Ialah merupakan salah satu perbedaan penting yang disampaikan oleh dosen hukum ketika diwawancarai sebab RUU KUHP akan menentukan ancaman, baik minimal maupun maksimal untuk setiap kejahatan

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan persyaratan dan ancaman (sanksi) substantif yang dapat diterapkan oleh penegak hukum. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan hal-hal yang terkait dengan prosedur. Sebagai contoh, Pasal 110 tentang peranan polisi dan jaksa¹⁷ yang menyebutkan, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Poin-poin penting dalam hukum pidana adalah sebagai berikut.

1. Sumber-sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis.¹⁸ Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.¹⁹ Sumber hukum yang tertulis dan terkodifikasi (artinya tersusun dalam satu buku) adalah sebagai berikut.²⁰

- a. Buku I tentang Ketentuan Umum (*Pasal 1-103*).
- b. Buku II tentang Kejahatan (*Pasal 104-488*).
- c. Buku III tentang Pelanggaran (*Pasal 489-569*).

Adapun sumber hukum yang tertulis tidak terkodifikasi, terutama beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan, antara lain:²¹

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang (UU) Psikotropika;

masing-masing. Menurut Bapak Lubis, sesuai dengan KUHP sekarang, baik mencuri sapi maupun ayam, ancamannya sama.

17 Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 79.

18 Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 59-61.

19 Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 216-217.

20 *Ibid.*, Fully Handayani, hlm. 59-61.

21 *Ibid.*, Titik Triwulan Tutik, hlm. 216-217.

- d. Undang-Undang (UU) Merek, Cipta, Paten, dan sebagainya;
- e. Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1967 tentang Narkoba;
- f. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Anti Terorisme.

Ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang (UU) Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen, Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya.²²

2. Asas-asas Hukum Pidana

Asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah sebagai berikut.

- a. Legalitas (*Asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), artinya bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa kekuatan suatu Undang-Undang (UU) yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana.²³
- b. Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (*Asas Geen Straf Zonder Schuld*), artinya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat.²⁴
- c. Apabila ada perubahan dalam undang-undang setelah peristiwa itu terjadi maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka,²⁵ artinya bahwa jika pada saat perbuatan dilakukan kemudian terjadi perubahan ketentuan Undang-Undang (UU) maka Undang-Undang (UU) yang memberikan ancaman hukum yang paling ringan yang akan diberlakukan oleh si tersangka.

Misalnya, seseorang dituduh melakukan perbuatan korupsi pada tahun 1998 dan diancam hukuman oleh Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 1971 dengan ancaman hukuman 10 tahun. Pada saat proses persidangan (tahun 1999), pemerintah mengeluarkan

22 *Ibid.*, Titik Triwulan Tutik, hlm. 216-217.

23 Lihat Ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

24 Lihat Ketentuan Pasal 44 jo Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

25 Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang (UU) baru, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengancam perbuatan tersebut dengan ancaman hukuman 20 tahun. Oleh karena itu, sesuai dengan asasnya dipakailah ketentuan yang paling ringan bagi terdakwa, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. Hukum Pidana Khusus mengesampingkan Hukum Pidana Umum (*Lex Specialis derogat legi Generalis*).²⁶ Artinya bahwa sumber hukum pidana terdiri atas dua jenis, yaitu terkodifikasi dan non-terkodifikasi. Pada Undang-Undang (UU) yang tidak terkodifikasi, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana seperti korupsi, undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang (UU) Korupsi (*lex specialis*), atau bagi orang yang melakukan jual beli narkoba, yang diberlakukan adalah Undang-Undang (UU) Narkoba (*lex specialis* bukan KUHP).
- e. *Nationalitas aktif*,²⁷ artinya bahwa setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia akan dikenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan kepada setiap subjek hukum, termasuk seluruh manusia yang melakukan kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun perbuatannya dilakukan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁸

3. Unsur-unsur Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, kita dapat merujuk pada rumusan peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi dan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

26 Lihat Ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

27 Lihat Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

28 Lihat Pasal 3 ayat (2, 3, 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah:

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

Simons menyebutkan dua unsur dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut.

- a. Unsur subjektif, ada orang atau pelaku yang harus memenuhi syarat-syarat berikut.

1) Bertanggung jawab

Ada orang-orang yang hanya "*bertanggung jawab sebagian*" karena penyakit yang dideritanya sehingga orang-orang tersebut dapat digolongkan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sebagian. Misalnya sebagai berikut.

- a) Kliptomani, yaitu penyakit suka mencuri. Ia menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (UU), tetapi ia melakukan tindakan tersebut karena penyakitnya. Seorang Kliptoman tidak bertanggung jawab atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia tetap dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana lainnya, seperti membunuh, memperkosa, dan sebagainya.
- b) Pyromani adalah penyakit kejiwaan berupa suka membakar suatu barang yang bukan miliknya, tetapi tidak pernah menyadari bahwa perbuatan membakar barang milik orang lain adalah perbuatan pidana. Oleh karena itu, seorang pyromani tidak bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan pembakaran, tetapi ia tetap bertanggung jawab atas tindak pidana lainnya, misalnya mencuri, membunuh, dan sebagainya.
- c) Nymphomani adalah penyakit kejiwaan berupa suka berbuat tidak senonoh pada seorang wanita. Penyakit ini

biasanya lebih pada penekanan untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan karena ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (UU). Seorang nypomani tetap bertanggung jawab atas perbuatan pidana lain, seperti merusak barang milik orang lain, membunuh, mencuri, dan sebagainya.

- d) Claustrophobi adalah penyakit kejiwaan, yaitu rasa ketakutan yang hebat apabila berada di ruang yang sempit. Seorang claustrphopie tidak bertanggung jawab apabila dia melakukan suatu perbuatan pidana seperti merusak pintu untuk berusaha keluar di tempat yang sempit.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut, tentu harus ada surat keterangan ahli (*psykolog*) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menderita penyakit tersebut.

2) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi karena suatu alasan tertentu, perbuatan tersebut bisa dimaafkan. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a) gila;
- b) belum dewasa/belum cukup umur;
- c) di bawah pengapuan.

Jadi, apabila orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memenuhi salah satu alasan di atas, perbuatan pidana yang dilakukannya bisa dimaafkan. Menurut Undang-Undang (UU), terhadap anak yang belum dewasa melakukan suatu perbuatan pidana, Tindakan Tata Tertib yang akan dilakukan oleh negara, antara lain tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya maksimal $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok yang diancamkan kepadanya. Misalnya, seorang anak usia 9

tahun yang melakukan pembunuhan,²⁹ dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dibina atau dikembalikan kepada orang tuanya, untuk dididik.

ii. Unsur objektif bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi syarat-syarat berikut.

- 1) Memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang (UU), artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (UU). Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan Undang-Undang (UU) atau belum diatur dalam suatu Undang-Undang (UU), perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.
- 2) Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.
- 3) Tidak ada alasan pembenar; artinya bahwa meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam Undang-Undang (UU) dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat "*Alasan Pembenar*", perbuatan tersebut bukan merupakan "*Perbuatan Pidana*", yang termasuk alasan pembenar adalah sebagai berikut.
 - a) *Perintah UU/Jabatan*. Contohnya, seorang polisi yang menembak kaki penjahat yang melarikan diri. Meskipun tindakan menembak tersebut termasuk perbuatan yang dilarang, karena hal ini dilakukan perintah jabatan, tindakan tersebut bisa dibenarkan.
 - b) *Overmacht*. Contohnya, bangunan milik seseorang yang roboh karena bencana alam sehingga menimbulkan banyak korban. Meskipun pemilik bangunan adalah pihak yang bertanggung jawab atas robohnya bangunan, karena robohnya akibat bencana alam, hal ini bisa dibenarkan.
 - c) *Keadaan darurat/daya paksa*. Contohnya, seorang yang membela diri karena terpaksa dengan melukai seorang yang telah menodongkan pistol untuk membunuhnya, akan dibenarkan oleh Undang-Undang (UU).

²⁹ Lihat (ps. 238 KUHP) yang ancaman hukumannya 20 tahun, maka ia akan dikenai pidana maksimal $\frac{1}{3} \times 18 \text{ th} = 6 \text{ tahun}$.

4. Tindak Pidana Delik

a. Pengertian Delik (*Delicht*)

Delicht berasal dari bahasa Latin *delictum*. Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu, perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana.

Menurut Simons, delik adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang (UU) telah dinyatakan sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.³⁰ Berdasarkan rumusan Simons, delik memuat beberapa unsur, yaitu:

- 1) perbuatan;
- 2) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);
- 3) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 4) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat dihukum apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu.
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan tersebut terjadi.³¹

Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat dihukum, kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu. Menurut Moeljatno, kata "*perbuatan*" dalam "*Perbuatan Pidana*" mempunyai arti abstrak, yaitu menunjuk pada dua kejadian yang

30 Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 4.

31 *Ibid.*, hlm. 3-4.

konkret, yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian.³²

b. Unsur-unsur Delik

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoretis; (2) sudut undang-undang. Teoretis, artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tecermin pada rumusannya. Adapun sudut undang-undang adalah cara kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Moeljatno,³³ unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.

- 1) Perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 2) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna,³⁴ tindak pidana terdiri atas unsur-unsur berikut.

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
- 2) Perbuatan/rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, yaitu kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian, dijatuhi pidana.

Dengan demikian, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, tetapi semata-mata mengenai perbuatannya. Tindak pidana tertentu dalam KUHP itu terdiri atas unsur-unsur berikut:

- 1) tingkah laku;
- 2) melawan hukum;

32 Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, hlm. 22.

33 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 79.

34 *Ibid.*, hlm. 79.

- 4) akibat konstitutif;
- 5) keadaan yang menyertai;
- 6) syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) objek hukum tindak pidana;
- 10) kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Menurut Lamintang,³⁵ unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

"Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan."

1) Unsur Pokok Subjektif

Unsur subjektif tindakan adalah sebagai berikut:

- a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³⁵ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

6. Macam-macam Delik

Setiap perkara pidana, pemrosesan perkara sangat digantungkan pada jenis deliknya. Macam-macam delik yang penulis himpun dari beberapa sumber adalah sebagai berikut.

- 1) Delik biasa, yaitu delik yang setiap perkaranya dapat diproses tanpa persetujuan dari yang dirugikan (*korban*). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara. Contohnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan perbuatan cabul terhadap anak dalam Pasal 82.³⁶

Dalam rumusan Pasal 82 terlihat jelas bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya maka delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Pencabulan tersebut merupakan delik biasa bukan delik aduan maka perkara pencabulan tersebut tetap diproses walaupun sudah ada pencabutan laporan dari keluarga korban.

- 2) Delik berkualifikasi, yaitu suatu perbuatan yang bersifat khusus yang disertai mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana.³⁷

³⁶ Perhatikan bunyi Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁷ Lihat dalam Pasal 365 terhadap Pasal 362, Pasal 374 terhadap Pasal 372.

3) Delik kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan yang ditentukan oleh penguasa negara.³⁸ Ada 3 (tiga) kejahatan yang dikenal dalam KUHP, yaitu sebagai berikut.

- a) Kejahatan terhadap negara.³⁹
- b) Kejahatan terhadap harta benda yang jika ditekankan, kejahatan ini lebih kepada tindak pidana kriminalitas pencurian.⁴⁰ Menurut undang-undang, pencurian dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu:
 - (1) Pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP.
 - (2) Pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 KUHP.
 - (3) Pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP.
 - (4) Pencurian ringan pada Pasal 364 KUHP.
 - (5) Pencurian dalam kalangan keluarga pada Pasal 367 KUHP.
- c) Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang, misalnya penganiayaan dan pembunuhan.

Pelanggaran, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan bentuk-bentuk pelanggaran.⁴¹ Pelanggaran dibagi tiga macam, yaitu pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut.

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada sikap kejahatan.

38 Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 96.

39 Perhatikan Pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada Pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 134 KUHP.

40 Perhatikan Pasal 362 s.d. 367 KUHP, pemerasan pada Pasal 368 s.d. 371 KUHP, penipuan pada Pasal 406 s.d. 412 KUHP.

41 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 78.

- b) Jika menghadapi kejahatan, bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran, hal itu tidak diperlukan.

- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.⁴²
- d) Tenggang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana adalah satu tahun, sedangkan kejahatan hak tersebut adalah dua tahun.

- 4) Delik dolus, yaitu suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.⁴³
- 5) Delik culpa, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).⁴⁴
- 6) Delik commissionis, yaitu perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana,⁴⁵ delik *commisionis* tersebut terjadi di tempat dan waktu pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.
- 7) Delik ommisionis, yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.⁴⁶
- 8) Delik formal, tekanan perumusan delik ini adalah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.⁴⁷
- 9) Delik materiil, yaitu tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan. Contoh yang dapat penulis uraikan pada bab ini adalah Pasal 359 KUHP dalam Hukum Pidana

42 Perhatikan Pasal 54 KUHP, Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 26.

43 Perhatikan Pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik dolus lainnya, yaitu Pasal 354 KUHP, Pasal 359 KUHP, dan Pasal 187 KUHP.

44 Perhatikan kasus mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

45 Perhatikan Pasal 359 KUHP, Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 100.

46 Perhatikan BAB V Pasal 164 KUHP, Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 67.

47 Perhatikan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

ada suatu adagium, "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya, ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas.

- 10) Delik murni, yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, setiap negara yang memakai sistem hukum pidana yang apabila warga negaranya berani melakukan suatu perbuatan tindak pidana kriminalisasi, sudah barang tentu negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 KUHP, setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.
- 11) Delik aduan, yaitu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain, misalnya, perkosaan, pencurian, dan sebagainya. Jadi, sebelum ada pengaduan, belum merupakan delik.⁴⁸ Pada delik aduan ini korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Dalam kasus perkosaan, misalnya, kedua pihak melakukan kesepakatan perdamaian mengingat kondisi psikologis korban atau untuk melindungi kehormatan keluarga. Dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).

D. Acara Persidangan Pidana

Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri, proses persidangannya adalah sebagai berikut.

1. Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara.⁴⁹

48 Menurut Mr. Drs. E. Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II*, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).

49 Ketika diwawancarai oleh penulis Ketua Pengadilan Mataram Suryanto S.H., M.Hum., mengatakan di Pengadilan Negeri Mataram pada saat wawancara ada 11 hakim yang tersedia untuk ditugaskan menyidangkan perkara, padahal seharusnya paling sedikit ada 15 hakim. Ketersediaan hakim ditentukan oleh Departemen Kehakiman kantor pusat Jakarta sehingga pada umumnya hakim yang ditugaskan ke suatu lokasi biasanya tidak berasal dari lokasi tersebut, dan ditugaskan selama 3 tahun kemudian dimutasi ke tempat lain.

Kejaksaan bertanggung jawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan dimulai maka kejaksaan wajib mengurus semua hal terkait dengan mengangkut terdakwa dari Lembaga Perasyarakatan (*penjara*) ke pengadilan, dan sebaliknya pada saat persidangan selesai.

Pengadilan Negeri biasanya mengadakan beberapa ruang tahanan, khususnya untuk menahan tahanan sebelum dan sesudah perkaranya di sidang. Surat dakwaan yang menyatakan tuntutan-tuntutan dari kejaksaan terhadap terdakwa dibaca oleh jaksa. Pada saat itu terdakwa didudukkan di bagian tengah ruang persidangan berhadapan dengan hakim, kedua belah pihak, yaitu *Penuntut Umum (jaksa)* dan *Penasihat Hukum (pengacara pembela)* duduk berhadapan di sisi kanan dan kiri.

Setelah dakwaan dibaca, tahap pemeriksaan saksi dimulai. Terdakwa berpindah dari posisinya di tengah ruangan dan duduk di sebelah penasihat hukumnya, jika memang dia mempunyai penasihat hukum. Jika tidak ada, dialah yang menduduki kursi penasihat hukum itu.⁵⁰

Ketika pemeriksaan terdakwa masih berjalan, Penuntut Umum akan ditanya oleh hakim apakah ada saksi dan berapa saksi yang akan dipanggil dalam sidang yang sedang berlangsung pada hari itu pula.⁵¹ Jika ada tiga saksi yang akan dipanggil, ketiga orang tersebut dipanggil oleh jaksa dan duduk di bangku atau kursi berhadapan dengan hakim (*posisi kursi yang sama dengan terdakwa*).

Kemudian, hakim menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi masing-masing, yaitu nama, tempat kelahiran, umur, bangsa, agama, pekerjaan dan ada hubungan dengan si terdakwa. Kemudian, saksi sambil berdiri, bersumpah sekalian dengan kata pengantar sesuai dengan agamanya, dengan kata-kata berikut:

50 Sebenarnya ada banyak perbedaan secara fisik di antara sebuah ruang sidang di RI dan Australia, baik letakan saksi, penuntut umum, pengacara, maupun suasananya secara umum. Misalnya, pada awal persidangan Ketua Majelis menyuruh semua orang untuk mematikan atau mendinginkan telepon genggamnya. Padahal, sering terdengar suara telepon berbunyi dari bagian umum dan orang cepat keluar untuk mengangkat teleponnya.

51 Dari observasi penulis di Pengadilan Negeri Mataram dapat dikatakan bahwa dalam kasus yang lebih berat, atau rumit bisa terjadi banyak saksi yang dipanggil sehingga suatu perkara akan berlanjut pada beberapa hari.

"Demi Tuhan saya bersumpah sebagai saksi saya akan menerangkan dalam perkara ini yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya."

Saat saksi bersumpah, salah satu Panitera Pengganti akan mengangkat sebuah Al-Quran atau kitab suci lainnya sesuai dengan agama yang dipercaya di atas kepala saksi tersebut. Hal tersebut dinilai menarik karena orang Hindu diberi dupa yang dipegang sambil bersumpah. Salah satu perbedaan terkait dengan hal ini adalah semua saksi bersumpah pada saat bersamaan, sedangkan di Australia setiap saksi akan bersumpah justru sebelum dia akan memberikan keterangan.

Setelah saksinya bersumpah, saksi pertama duduk di bangku di depan hakim, sedangkan saksi yang lain disuruh untuk keluar dari ruang persidangan. Itulah saatnya pemeriksaan saksi dimulai oleh Ketua Hakim yang merupakan salah satu perbedaan besar di antara sistem persidangan di Australia dan Republik Indonesia (RI).

Setelah hakim selesai mengajukan pertanyaannya, ia memberikan kesempatan kepada jaksa untuk memeriksa saksi, disusul oleh penasihat hukum. Pada akhir pemberian keterangan dari saksi masing-masing, seorang terdakwa diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan tersebut. Hakim akan menyimpulkan keterangan yang telah diberikan dengan mengatakan, misalnya:

"Kita semua telah mendengar saksi mengatakan bahwa pada tanggal 23 November kemarin dia membeli narkoba dari Anda dalam bentuk dua 'pocket' ganja di rumah Anda dan Anda menerima uang sebanyak Rp40.000. Bagaimana Anda menganggap keterangan itu? Benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju?"

Kemudian, terdakwa diperbolehkan untuk menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan tersebut. Setelah itu, saksi diminta untuk turun dari kursinya dan duduk di bagian umum di belakang hingga proses ini berlanjut dan semua saksi dari kejaksaan telah memberikan keterangannya.

Selanjutnya, penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk memanggil saksi yang mendukung atau membela terdakwa melalui proses yang sama sebagaimana digambarkan di atas. Setelah semua saksi memberikan keterangan, tahap pemeriksaan saksi selesai dan perkara akan ditunda agar jaksa dapat mempersiapkan tuntutan.

yang dimaksud adalah sebuah rekomendasi dari jaksa seputar sanksi yang dimintai dari hakim.⁵²

Jika acara tersebut sudah selesai, ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Setelah itu, para hakim mengambil keputusan yang dapat dijatuhkan pada hari tersebut. Setelah itu, dilakukan musyawarah terakhir di antara para hakim. Jika dalam musyawarah tersebut para hakim tidak dapat mencapai kesepakatan, keputusan dapat diambil dengan cara suara terbanyak. Oleh sebab itu, dalam setiap menjalankan tugasnya sebagai wakil tuhan untuk menciptakan keadilan, hakim selalu berjumlah ganjil, yaitu tiga, lima, ataupun tujuh hakim. Keputusan para hakim terdiri atas tiga alternatif:⁵³

1. perkara terbukti—terdakwa dihukum.
2. perkara tidak terbukti—terdakwa dibebaskan.
3. perbuatan terbukti, tetapi tidak perbuatan pidana—terdakwa dilepas dari segala tuntutan (*onslag*).

Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."

Lima kategori alat bukti tersebut adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Keterangan saksi ahli, menurut Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah hal-hal yang dinyatakan seorang

⁵² Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 282.

⁵³ Wawancara dengan Dedy Koesnomo, *op.cit.*

ahli di sidang pengadilan. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada saat pemeriksaan di sidang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, setelah ahli tersebut mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat keterangan ahli adalah sebagai berikut:

1. dinyatakan oleh seorang ahli;
2. dinyatakan di dalam sidang pengadilan;
3. diberikan di bawah sumpah.

Dengan demikian, keterangan seorang saksi ahli yang didapat dalam persidangan pidana adalah sah untuk dijadikan alat bukti dalam suatu persidangan pidana. Setelah memutuskan bersalah tidaknya, hakim harus menentukan sanksi, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

"Hakim harus menilai semua fakta-fakta. Misalnya dalam perkara pencurian, perbuatannya mungkin terbukti, tetapi hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukannya untuk berfoya-foya, melainkan untuk anaknya yang sakit. Kalau begitu, dapat dia ringankan tuntutan dari Jaksa, misalnya dari sepuluh bulan, menjadi delapan bulan. Lagi pula hakim dapat melebihi tuntutan dari jaksa... semuanya bergantung pada perbedaan persepsi."⁵⁴

Itulah proses hukum acara pidana secara garis besar sehingga terdakwa dibuktikan bersalah atau tidak bersalah. Jika memang terbukti bersalah dan telah dijatuhkan hukuman penjara,⁵⁵ ia akan dibawa ke Lembaga Permasyarakatan untuk menjalani hukumannya.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Seperti dikatakan oleh Pak Mion Ginting S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2009, memang ada hukuman yang tersedia untuk hakim selain hukuman penjara. Pasal 10 KUHP menjelaskan jenis jenis hukuman termasuk; hukuman mati, seumur hidup, penjara, denda dan hukuman ringan, seperti pidana bersyarat di mana hukuman penjaranya tidak harus dijalankan terlebih dahulu bilamana selama waktu yang disyaratkan oleh hakim dia tidak melakukan kejahatan apa pun, maka hukuman tersebut akan dihapus (dalam bahasa Inggris hukuman macam ini disebut *suspended sentence*). Kemudian, ada hukuman

E. Perbuatan yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum

Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap yang menaati semua hukum dan norma yang berlaku. Contoh perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sebagai berikut.

1. Keluarga

- a. Mematuhi nasihat orang tua.
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga.
- c. Membersihkan rumah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Sekolah

- a. Menghormati guru.
- b. Mematuhi tata tertib sekolah.
- c. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
- d. Tidak menyontek pada saat ulangan.
- e. Melaksanakan tugas piket.

3. Masyarakat

- a. Ikut melaksanakan ronda malam.
- b. Mengikuti kegiatan kerja bakti.
- c. Menaati peraturan (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat.

4. Negara

- a. Turut serta membela negara.
- b. Menaati hukum yang berlaku di negara.

F. Proses Pelaksanaan Perkara Persidangan di Pengadilan Negeri

Melakukan kunjungan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan melihat secara langsung keberadaan para napi di dalam penjara Indonesia merupakan pengalaman penulis yang sangat menarik. Dalam wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas), Purwadi,

kurungan yang terpidana masuk ke penjara pagi, tetapi diperbolehkan untuk pulang pada waktu malam hari, di Australia sama sekali tidak ada hukuman sejenis ini.

dijelaskan bahwa orang-orang yang ditahan dalam lapas dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. tahanan—yang perkaranya masih berlanjut pada tahap persidangan dan belum ada keputusan dari hakim;
2. narapidana (Napi)—terpidana yang sudah dijatuhkan keputusan dan hukuman penjara oleh pengadilan.

Narapidana pria yang ditahan di lapas dipisahkan berdasarkan perbuatan kriminalnya, yaitu pencurian, lalu lintas, penipuan, pembunuhan, toto gelap (*togel*), judi, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk “*memotong jaringan*” kejahatan yang dilakukannya.

Penjahat narkoba misalnya ditahan dalam lima buah kamar dengan jumlah orang lebih kurang 30 orang per kamar dengan kamar mandi dan WC di dalam satu kamar. Tempat tidur setiap narapidana memakai sebuah tikar yang terbentang di atas lantai yang terbuat dari beton.

Salah satu petugas menjelaskan bahwa setiap kamar memiliki satu orang wali, yang ditugaskan untuk mendengar keluhan narapidana, menetapkan aturan tata tertib di dalam kamar, dan mengurus semua hal terkait dengan jangka penahanan untuk tiap-tiap narapidana, baik cuti bersyarat, pelepasan bersyarat, maupun remisi. Contohnya, lapas yang terletak di wilayah Nusa Tenggara Barat Mataram yang dirancang untuk dihuni oleh 350 orang, tetapi diisi oleh hampir 600 orang tahanan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Lapas Mataram melebihi kapasitasnya (*over capacity*).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) juga mengatakan bahwa berbagai fasilitas di lapas sangat terbatas dan program-program pembinaan ataupun rehabilitasi berkurang. Sekalipun demikian, Lapas Mataram dilengkapi dengan bengkel untuk tempat bekerja para narapidana, misalnya memperbaiki atau mencuci sepeda motor atau mobil.

Deskripsi di atas merupakan suatu peristiwa hukum, tetapi untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan tindak pidana atau bukan, harus diadakan penyelidikan. Jenis alur dalam persidangan adalah sebagai berikut.

1. Alur Persidangan Perkara Pidana

Jalur untuk mengetahui tindak pidana adalah melalui sebagai berikut.

a. *Pengaduan*, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.⁵⁶

b. *Laporan*, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.⁵⁷

Menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),⁵⁸ penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (UU). Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah setiap pejabat (polisi) negara Republik Indonesia. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut.

1. Menerima laporan (pengaduan) dari seorang tentang tindak pidana.⁵⁹
2. Mencari keterangan dan barang bukti.⁶⁰
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.⁶¹
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶²
5. Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.

⁵⁶ Untuk lebih jelas, lihat kembali Pasal 1 butir 25 KUHP.

⁵⁷ Untuk lebih jelas, lihat kembali Pasal 1 butir 24 KUHP.

⁵⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 230.

⁵⁹ Untuk lebih jelas, lihat Pasal 5 KUHP.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 5 KUHP.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 5 KUHP.

⁶² *Ibid.*, Pasal 5 KUHP.

- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁶³
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas.⁶⁴
 7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.⁶⁵

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan.

Menurut Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.⁶⁶
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.⁶⁷

63 *Ibid.*, Pasal 5 KUHP.

64 *Ibid.*, Pasal 5 KUHP.

65 Perhatikan dengan cermat dan pahami Pasal 16 ayat (1) KUHP.

66 Poin nomor 1 s.d. 3, 6, 7, 9, mempunyai kedudukan yang sama Pasal 7 KUHP.

67 Perhatikan dengan cermat dan pahami Pasal 7 Jo Pasal 131 KUHP.

8. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.⁶⁸
9. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
10. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
11. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.⁶⁹
12. Mengadakan penghentian penyidikan.
13. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
14. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.⁷⁰
15. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.⁷¹
16. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.⁷²
17. Penyerahan berkas perkara dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁷³
18. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;

68 Perhatikan dengan cermat Pasal 7 jo Pasal 132 Ayat (2, 3, 4, 5) KUHP.

69 Perhatikan dan pahami Pasal 7 jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 133 Ayat (1) KUHP.

70 Perhatikan dan pahami Pasal 7 Ayat (3) KUHP.

71 Perhatikan dan pahami Pasal 8 Ayat (1) KUHP.

72 Perhatikan dengan cermat dan pahami Pasal 8 Ayat (2) KUHP.

73 Perhatikan dan pahami Pasal 8 Ayat (3) KUHP.

- g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) yang berlaku.⁷⁴
16. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.⁷⁵
 17. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.⁷⁶
 18. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan.⁷⁷
 19. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi.⁷⁸
 20. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.⁷⁹

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum melakukan upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri atas penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat.

74 Perhatikan dan pahami Pasal 75 KUHP.

75 Perhatikan dan pahami Pasal 110 ayat (2) KUHP.

76 Lihat Pasal 31 ayat 1 KUHP.

77 Lihat Pasal 31 ayat (2) KUHP.

78 Lihat Pasal 110 ayat (3) KUHP.

79 Lihat Pasal 114 KUHP.

- a. Penangkapan. Menurut Pasal 1 Butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (UU).
- b. Penahanan. Menurut Pasal 1 Butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya yang diatur dalam undang-undang.
- c. Penyitaan. Menurut Pasal 1 Butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- d. Penggeledahan Rumah. Menurut Pasal 1 Butir 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, pasal tersebut diketahui bahwa tujuan penggeledahan rumah adalah untuk melakukan tindakan pemeriksaan, melakukan tindakan penyitaan, dan melakukan tindakan penangkapan.
- e. Penggeledahan Badan. Menurut Pasal 1 Butir 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Pemeriksaan badan atau pakaian ini hanya bertujuan mencari benda-benda yang tersembunyi di dalam badan untuk disita. Adapun benda yang dicari tersebut harus yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan atau yang dituduhkan.

Dalam tindakan pengeledahan, pihak yang berhak melakukannya adalah penyidik atas perintah penyidik dan penyidik sendiri. Penyidik dalam hal ini adalah setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dalam pengeledahan rumah atau badan hanya dapat bertindak atas perintah dari penyidik.⁸⁰

Sementara karena kewenangan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik dapat melakukan pengeledahan sendiri terkait dengan perkara yang ditanganinya,⁸¹ tetapi dalam melakukan tindakan pengeledahan, ada syarat-syarat formal yang wajib dipenuhi oleh penyidik.

Para penyidik menuangkan hasil penyidikan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian menyerahkan BAP tersebut kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.

Menurut Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penuntut umum mengembalikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas.

Apabila penuntut umum menilai bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut telah lengkap, penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan, dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/1205/IX/2000 terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan terkait masalah pengeledahan badan dan pengeledahan pakaian sebagai berikut:⁸²

80 Perhatikan Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

81 Perhatikan Pasal 7 Ayat (1) Huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

82 Lihat tulisan yang berjudul "Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum" nama penulis tahun penulisan, serta media penerbitnya tidak diketahui.

1. Pengeledahan badan, khususnya terhadap wanita, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu wanita atau dapat meminta bantuan seorang wanita yang dapat dipercaya.
2. Jika perlu dilakukan pemeriksaan pengeledahan rongga badan dapat diminta bantuan pejabat kesehatan/paramedis.
3. Pengeledahan pakaian, harus dilakukan di ruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum.

Dengan demikian, apabila ada seorang wanita yang akan digeledah, khususnya pada bagian rongga badan, ia dapat menolak untuk digeledah/diperiksa jika penyidik/penyidik pembantunya bukanlah seorang wanita. Setelah melakukan pengeledahan, penyidik wajib memberikan berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Alur Persidangan Perkara Perdata

Berikut gambaran alur penyelesaian perkara perdata.

- a. Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang dibuka untuk umum.
- b. Hakim memeriksa para pihak sudah hadir atau belum.
 - 1) Jika Penggugat dan kuasanya tidak hadir, Majelis Hakim akan memanggil Penggugat dan kuasanya pada tanggal sidang yang telah ditentukan.⁸³
 - a) Jika Penggugat (dan kuasanya) masih juga tidak hadir, setelah pemanggilan kedua maka gugatan akan gugur.⁸⁴
 - b) Jika Penggugat (dan kuasanya) hadir maka proses dilanjutkan ke nomor 2.c.
 - c) Jika Tergugat (dan kuasanya) tidak hadir maka Majelis Hakim akan memanggil tergugat (dan kuasanya) sekali lagi pada tanggal sidang yang telah ditentukan.

83 Huruf A bagian nomor 1 & 3 mempunyai kedudukan yang sama pada Pasal 126 HIR.

84 Lihat Pasal 124 HIR.

Jika Tergugat (dan kuasanya) masih juga tidak hadir, setelah pemanggilan kedua maka Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan sudah memenuhi syarat-syarat formal.

- 2) Jika tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan, gugatan tidak diterima, melalui putusan *verstek*.
- 3) Jika memenuhi syarat-syarat formal gugatan, Hakim akan memeriksa apakah gugatan sudah beralasan menurut hukum atau tidak.
 - a) Jika iya, Gugatan akan dikabulkan seluruhnya/sebagian melalui putusan *verstek*.
 - b) Jika tidak, maka gugatan akan ditolak melalui putusan *verstek*.
 - c) Jika penggugat dan kuasanya hadir, maka proses dilanjutkan ke nomor 2.c.
- 4) Jika Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir maka Majelis Hakim akan menunda, sidang berikutnya dalam jangka waktu 22 hari untuk Mediasi.
 - a) Jika sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, dibuatlah perjanjian perdamaian.
 - b) Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum oleh Penggugat dan pemberian jawaban oleh Tergugat.
 - (1) Setelah agenda di atas, agenda di atas pun akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat.
 - (2) Pemeriksaan saksi dan berbagai bukti lain dari kedua belah pihak, adalah tahapan setelah proses replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan cukup oleh Majelis Hakim.
 - (3) Ketika semua saksi dan barang-barang bukti telah selesai diperiksa maka tibalah pada agenda kesimpulan, yang ditutup dengan pembacaan putusan hakim.

Alur Proses Perkara Pidana Banding

Berikut gambaran alur penyelesaian perkara pidana banding.

- a. Berkas Perkara pidana banding dikirim oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.
- b. Berkas Perkara diterima Bagian Umum Pengadilan Tinggi.⁸⁵
- c. Berkas Perkara setelah dicatat di buku agenda, kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Panitera/Sekretaris.
- d. Berkas Perkara didisposisi Ketua Pengadilan Tinggi.
- e. Berkas Perkara dikembalikan ke Panitera/Sekretaris kemudian diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Kepaniteraan Pidana.
- f. Berkas Perkara oleh Kepala Sub Bagian Umum diteruskan ke Panitera Muda Pidana.
- g. Berkas Perkara yang diterima Sub Kepaniteraan Pidana, kemudian dicatat ke dalam buku agenda penerimaan Berkas Perkara Banding, setelah diteliti kelengkapannya syarat-syarat banding sesuai ketentuan undang-undang, perkara yang persyaratannya lengkap diberikan nomor Register Banding dan yang belum lengkap tidak diberi nomor Register, kekurangan tersebut dimintakan ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Berkas perkara sudah diberi nomor register, dicatat ke dalam Buku Register Induk Perkara Pidana, kemudian diberi blangko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.⁸⁶
- h. Perkara yang sudah siap dibagi & ditetapkan majelisnya diserahkan kepada Panitera atau Sekretaris untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- i. Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dikembalikan kepada Panitera maupun Sekretaris.
- j. Panitera atau Sekretaris menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

⁸⁵ Keterangan: No. 1 sampai dengan No. 2 memerlukan waktu 1–14 hari.

⁸⁶ Keterangan: No. 2 sampai dengan No. 7 memerlukan waktu 1–2 hari dan No. 7 memerlukan waktu 1–7 hari.

- k. Berkas Perkara oleh Panitera atau Sekretaris diserahkan Panitera Muda Pidana untuk didistribusikan ke Majelis Hakim yang bersangkutan.⁸⁷
- l. Perkara banding Panitera Muda Pidana diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.⁸⁸
- m. Perkara yang sudah diputus diminutasi oleh Panitera Pengganti yang bersangkutan.
- n. Perkara yang selesai diminutasi oleh Panitera Pengganti diserahkan kepada Majelis Hakim untuk ditandatangani.
- o. Perkara setelah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti diserahkan kepada Panitera Muda Pidana.
- p. Kepaniteraan Pidana setelah mencatat putusan banding ke dalam Buku Register Induk Perkara Pidana, membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara (bendel-A) beserta salinan putusan banding ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kemudian diajukan kepada Panitera/Sekretaris untuk ditandatangani.⁸⁹
- q. Setelah Surat Pengantar selesai ditandatangani dikembalikan kepada Panitera Muda Pidana.
- r. Berkas Perkara oleh Panitera Muda Pidana dikirim kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- s. Berkas Perkara diserahkan kepada Kasub Bagian Umum untuk dikirim kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁹⁰
- t. Berkas Perkara diterima kembali oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁹¹

87 Keterangan: No. 7 sampai dengan No. 11 memerlukan waktu 1–7 hari.

88 Keterangan: No. 11 sampai dengan No. 12 memerlukan waktu 1–3 hari.

89 Keterangan: No. 12 sampai dengan No. 16 memerlukan waktu 7–60 hari dan No. 16 memerlukan waktu 1–3 hari.

90 Keterangan: No. 16 sampai dengan No. 19 memerlukan waktu 1 hari dan No. 19 memerlukan waktu 1–2 hari.

91 Keterangan: No. 19 sampai dengan No. 20 memerlukan waktu 1–7 hari.

BAB 4

TEORI DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana

1. Definisi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur cara penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Pandangan ahli hukum mengenai Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut.

- a. Simon: hukum acara pidana adalah upaya negara dan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana atau menjatuhkan pidana.¹
- b. Sudarto: hukum acara pidana adalah aturan yang memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.²

Adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik meliputi bidang yang luas, yaitu selain memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, juga memuat eksekusi putusan hakim tentang susunan

1 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, hlm. 21.

2 Ibid.

peradilan, wewenang peradilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya yang berkaitan dengan urusan perkara pidana.

Hukum acara pidana yang spesifik dapat disempitkan lagi menjadi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim. Dari tinjauan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana terkandung dua unsur hukum yang esensial, yaitu:

- a. hukum acara pidana mulai dilaksanakan sekalipun masih pada tingkat timbul dugaan atau sangkaan terjadi perbuatan pidana;
- b. hukum acara pidana sebagai peraturan undang-undang mengatur kewenangan dalam bertindak terhadap alat-alat perlengkapan negara apabila terjadi perbuatan pidana.

Hukum esensial pertama dalam hukum acara pidana dimaksudkan sebagai:

- a. usaha untuk mencari kebenaran atas peristiwa yang diduga atau disangka, termasuk tindakan pidana;
- b. usaha mencari kebenaran tentang orang yang diduga atau disangka menjadi pembuat dari perbuatan pidana yang terjadi.

Adapun peranan unsur esensial yang kedua dalam hukum acara pidana dimaksudkan sebagai petunjuk cara penyelenggaraan kewenangan bertindak atau melakukan pemeriksaan yang dibolehkan menurut undang-undang untuk menghindari kekuasaan sewenang-wenang pada saat menghadapi kejahatan, tetapi orang yang dituduh melakukannya tetap dijamin atau dilindungi oleh hukum.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau mendekati kebenaran materiel, kebenaran materiel adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Hukum pidana memuat perincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum, dan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya, hukum acara pidana mengatur proses yang harus dilalui aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiel terhadap pelanggarnya.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi. Tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi. Sebaliknya, tanpa hukum acara pidana, penegakan hukum pidana tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Padahal, fungsi hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiel, putusan hakim, dan pelaksanaan keputusan hakim.

3. Sejarah Hukum Acara Pidana

Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia.

Sebelum berlakunya UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dimulai dari masa penjajahan Belanda, sedangkan sistem hukum Belanda sedikit dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa yang dimulai pada abad ke-13 yang terus mengalami perkembangan hingga abad ke-19.

Sistem peradilan pidana dimulai di Eropa dengan diperkenalkannya sistem inquisitoir sejak abad ke-13 sampai dengan pertengahan abad ke-19. Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem inquisitoir pada masa tersebut dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan.³

Satu-satunya pemeriksaan pada masa itu ditujukan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka khususnya dalam kejahatan berat. Apabila tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya, petugas pemeriksa memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan.

3 A.Z. Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 75.

Setelah petugas melakukan tugasnya, ia akan menyampaikan berkas hasil pemeriksaannya terhadap pengadilan yang akan memeriksa perkara tersangka atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas tersebut. Walaupun pada masa tersebut telah ada penuntut umum, ia tidak memiliki peranan berarti dalam proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut, atau dalam penundaaan perkara yang bersangkutan.

Apabila diteliti, jelas bahwa proses penyelesaian perkara pidana pada masa itu sangat singkat dan sederhana. Timbulnya gerakan Revolusi Prancis yang telah mengakibatkan banyak bentuk prosedur lama di dalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim sosial dan politik secara revolusi, khususnya dalam bidang peradilan pidana.

Kemudian, ketika bangsa Belanda melakukan penjajahan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkait dengan hukum acara pidana merupakan produk daripada pemerintahan bangsa Belanda, kemudian peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau juga dikenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R).

Dalam H.I.R terdapat dua macam penggolongan hukum acara pidana, yaitu hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*. Penggolongan hukum acara pidana ini merupakan akibat dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk bumi putra dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa dan timur asing pada zaman Hindia Belanda.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 drt. tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, ketentuan yang tercantum di dalamnya belum memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum, *Het Herziene Inlandsch Reglement*, Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951, dan semua pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dicabut dan diganti dengan Undang-Undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diberlakukan,

yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut merupakan era baru dalam lingkungan peradilan di Indonesia, yang berlaku secara nasional berdasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

4. Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana

Untuk mendapatkan kebenaran materiel, hukum acara pidana memerlukan ilmu pengetahuan lain, yaitu sebagai berikut.

- a. Logika, berasal dari bahasa Yunani *logike* dari kata *logos* yang artinya ucapan atau pengertian,⁵ ucapan berarti yang diucapkan, dilisankan, disebutkan.⁶ Ucapan merupakan hasil proses berpikir, sedangkan berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu.⁷ Dengan demikian, logika merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan melalui kata dan dinyatakan dalam bahasa.⁸ Logika bersangkut paut dengan pengetahuan tentang kaidah berpikir.⁹ Kaidah berpikir artinya rumusan asas-asas yang menjadi hukum atau aturan yang menjadi patokan dalam berpikir. Dengan kata lain, logika adalah ajaran tentang berpikir tertib dan benar, atau perumusan lebih teliti, tentang penarikan kesimpulan dan penalaran tanpa meninggalkan keabsahan. Tahap berpikir secara logika adalah orientasi, hipotesis dan verifikasi.
- b. Psikologi, yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia (jiwa) untuk memperlakukan secara tepat, khususnya bagi penyidik, penuntut umum ataupun hakim dalam memeriksa seseorang, dan memahami jiwa mereka. Hal ini karena memeriksa seseorang sebagai saksi berbeda dengan memeriksa orang tersebut sebagai tersangka atau terdakwa. Demikian pula harus diperhatikan usia, pendidikan, dan sebagainya.

4. *Ibid.*, hlm. 77-78.

5. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 2034.

6. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka, 1988, hlm. 982.

7. *Ibid.*, hlm. 682.

8. Diperoleh dari "<http://id.wikipedia.org/wiki/Logika>".

9. *Ibid.*, hlm. 530.

c. Kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab kejahatan dan cara pemberantasnya. Kejahatan diartikan sebagai sosial *phaenomeen* atau kejahatan yang secara konkret terjadi di masyarakat sehingga objeknya tidak hanya kejahatan yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga di luar itu yang oleh masyarakat dianggap sebagai kejahatan.

d. Kriminalistik, digunakan untuk membantu mencari barang bukti dengan menggunakan hasil ilmu pengetahuan lain secara ilmiah. Ilmu-ilmu yang mendukung kriminalistik sering disebut sebagai ilmu forensik, yaitu sebagai berikut.

1) Ilmu kedokteran forensik, yaitu ilmu yang mempelajari tubuh manusia yang ada hubungannya dengan tindakan pidana dan tidak bertujuan untuk menyebabkan penyakit penderita. Ilmu ini mempelajari dan menemukan sebab kematian, identifikasi, sebab luka keadaan mayat pos mortem, dan sebagainya.

2) Toxicologi forensik, yaitu ilmu yang mempelajari racun yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Misalnya, menyelidiki pembunuhan yang dilakukan dengan racun untuk menentukan jenis dan kadarnya.

3) Ilmu kimia forensik, yaitu ilmu yang memakai dasar ilmu kimia analitika untuk membantu peradilan. Misalnya, menyelidiki pemalsuan zat kimia, narkotika atau pembunuhan dengan zat kimia.

4) Ilmu alam forensik, yaitu ilmu yang menggunakan ilmu pengetahuan alam. Ilmu yang termasuk dalam ilmu alam forensik ini, yaitu:

a) balistik kehakiman, yaitu mempelajari tentang senjata api untuk mengetahui jenis senjata, kailiber, jarak tembakan, dan sebagainya;

b) dactylascopy, yaitu mempelajari tentang sidik jari apabila pelaku tindak pidana meninggalkan sidik jarinya sebagai dasarnya bahwa tidak semua orang mempunyai sidik jari yang sama dan sidik jari tidak akan berubah selama hidupnya. Ilmu alam ini digunakan juga untuk membantu memeriksa sebab kecelakaan darurat.

5) Grafologi, yaitu bagian dari kriminalistik yang mempelajari tulisan yang dipalsukan, uang palsu, dan menguraikan tulisan rahasia.

Psikiatri, pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari jiwa manusia, tetapi jiwa manusia yang sakit. Sebab salah satu syarat untuk menjatuhkan pidana adalah harus terbukti kesalahan terdakwa dan kemampuan bertanggung jawab. Salah satu pasal dalam KUHP yang berhubungan erat dengan masalah ini, misalnya Pasal 44 yang intinya menyebutkan bahwa orang yang jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana.

Menurut Prof. Sudarto, sistem yang dipakai KUHP adalah deskriptif normatif. Artinya, penentuan keadaan jiwa dilakukan oleh psikiater (deskriptif), sedangkan penentuan ada atau tidaknya hubungan kausal antara keadaan jiwa tersebut dengan tindakan pidana yang dilakukan ditentukan oleh hakim (normatif).

Ilmu hukum pidana, karena tugas hukum acara pidana adalah mempertahankan hukum pidana, untuk mempelajari dan menerapkan hukum acara pidana secara tepat dan lengkap diperlukan bantuan ilmu hukum pidana.

B. Ruang Lingkup KUHP dan Ketentuan Peralihannya

Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan dari segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini adalah sebagai berikut.

1. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana, ada beberapa asas hukum acara pidana yang penting, yaitu sebagai berikut.

B. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin, yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁴ Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan.

Perlu ditegaskan di sini bahwa pembenahan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya bergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi juga menuntut nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan.

Oleh karena itu, jika semua faktor dapat dimaksimalkan, sistem peradilan pidana akan lebih baik lagi dan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif, dan adil.

e. Tersangka/Terdakwa Berhak Memperoleh Bantuan Hukum

Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHAP¹⁵ menegaskan mengenai bantuan hukum agar hak-hak terdakwa dan tersangka terlindungi dan tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia, hak atas bantuan hukum menjadi penting karena ini merupakan syarat penting agar proses pemeriksaan Tersangka/Terdakwa di mana terdapat perintah UU agar Tersangka/Terdakwa tersebut didampingi oleh Advokat sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum telah diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.¹⁶ Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum telah juga dipertegas dalam KUHAP sebagai pihak yang paling berwenang

untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7,¹⁷ Pasal 137,¹⁸ dan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP.¹⁹ Jika ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut dilanggar, berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, surat dakwaan harus dibatalkan.

Pasal 114 KUHAP²⁰ menyatakan, "*Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.*"

Pasal 56 ayat (1) KUHAP²¹ menyatakan, "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*"

Dalam konteks ini, bantuan hukum jelas wajib disediakan oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan di setiap tingkat. Hal ini diperkuat juga oleh berbagai putusan pengadilan berikut.

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang menyatakan pada pokoknya, "*apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.*"
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.*"

14 Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

15 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 259-260.

16 *Ibid.*, hlm. 287.

17 *Ibid.*, hlm. 230.

18 *Ibid.*, hlm. 285.

19 *Ibid.*, hlm. 286.

20 *Ibid.*, hlm. 278.

21 *Ibid.*, hlm. 256.

- 3) Putusan MA Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 kembali menegaskan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sedangkan Berita Acara Pengeledahan dan Pernyataan tanggal 11 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula."

f. Peradilan Dilakukan Secara Objektif

Tidak memihak, dan tidak pandang bulu, sesuai dengan kehendak UUD 1945 bahwa setiap warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan KUHAP menjamin keobjektifan tersebut, bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara majelis (sekurang-kurangnya dilakukan oleh 3 orang hakim), kecuali dalam perkara cepat.

2. Ketentuan Peralihan (Pasal 284 KUHAP)

Sejak berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan jatuh ke tangan kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 KUHAP²² menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal di dalam KUHAP.

Dalam aturan peralihan Pasal 284 Ayat (1) KUHAP disebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dapat dikatakan bahwa sejak berlakunya KUHAP, dasar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah Pasal 284 Ayat (1) KUHAP²³ yang menyebutkan:

"Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus"

22 Ibid., hlm. 235.

23 Ibid., hlm. 346.

acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

C. Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Pidana

Proses penyelesaian perkara pidana bertujuan agar pelanggaran hukum atau pelaku tindak pidana dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya oleh badan peradilan. Beberapa tahap penyelesaian dalam proses pidana adalah sebagai berikut.

1. Sumber Tindakan

Sumber tindakan dalam Hukum Acara Pidana (HAP) adalah:

- laporan;
- pengaduan;
- tertangkap tangan;
- diketahui sendiri oleh petugas.

2. Kepolisian

Kepolisian menurut Pasal 14 UU No. 5 tahun 1983 tentang UU Zona Eksklusif Indonesia jo Pasal 31 UU No. 9 tahun 1985 adalah penyidik tindak pidana yang merupakan Perwira TNI Angkatan Laut, yang mempunyai tugas dan wewenang berikut.

- Melakukan tahap penyidikan (*opsporing*) sebagai salah satu tahap dalam menangani perkara pidana (pelanggaran terhadap Hukum Pidana Materil) yang dipercayakan kepada pihak penyidik, dalam proses penyidikan haruslah mengacu serta mutlak normatif pada aturan-aturan yang benar-benar dan adil.
- Kewajiban dan kewenangan penyidik dalam menangani suatu perkara pidana (Pasal 7 ayat 1 KUHAP). Penyidik menurut Pasal 6 ayat 1 huruf a, memiliki wewenang berikut.
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

c. Penggunaan upaya paksa atau *dwang middelen* (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) yang dimiliki oleh penyidik haruslah diterapkan secara teliti, hati-hati dan cermat terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelidikan ini berguna untuk mencari dan menemukan peristiwa-peristiwa pidana, guna menentukan dapat tidaknya diadakan penyelidikan.²⁴ Oleh karena itu, tindakan-tindakan penyidik haruslah mencerminkan asas kepantasan, kesantunan, keseimbangan, menghargai hak asasi manusia, kemampuan dan kemauan menenggang perasaan masyarakat yang menjadi objek daerah kerja penyidik.

a. Penyelidik dan Penyelidikan

1) Penyelidik

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) KUHAP).²⁵ Dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP²⁶ ditegaskan sebagai berikut.

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas:

24 Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, hlm. 203.

25 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, op.cit., hlm. 235.

26 *Ibid.*, hlm. 235.

a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- (1) Menerima laporan (pengaduan) dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- (3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- (1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- (2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- (3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- (4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.

Atas perintah, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- (4) Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

b) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) kepada penyidik.

2) Penyelidikan

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).²⁷

Dalam hal tertangkap tangan, tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) KUHAP.²⁸ Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepatnya.

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Adapun laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu baru disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut (Pasal 103 KUHAP).²⁹

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 104 KUHAP).³⁰ Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, menurut Pasal 105 KUHAP, penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyelidik sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) KUHAP.³¹ Langkah-langkah penyelidikan adalah sebagai berikut.

1. **Persiapan Penyelidikan**

Persiapan penyelidikan meliputi:

- a. Menginventarisir informasi yang bersumber antara lain media, masyarakat (informan), Daftar Pencarian Orang (DPO), Berita Acara Pemeriksaan, Daftar Pencarian Barang, dan sumber informasi lainnya.
- b. Membuat Laporan Informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan, diregistrasi, dan diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis.

27 *Ibid.*, hlm. 274.

28 *Ibid.*, hlm. 235.

29 *Ibid.*, hlm. 274.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*, hlm. 235.

- c. Laporan informasi sebagaimana huruf b dibuat oleh Penyelidik.
- d. Dalam hal Laporan Informasi mengandung kebenaran, pejabat melaporkan kepada atasannya secara berjenjang untuk ditindak lanjuti.
- e. Atasan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan.
- f. Anggota yang mendapat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan membuat rencana kegiatan penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran.

2. **Pelaksanaan dan Metode Penyelidikan**

Pelaksanaan penyelidikan, dilakukan sebagai berikut.

- a. Paling sedikit oleh 2 (dua) anggota yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas Penyelidikan.
- b. Metode yang digunakan, meliputi:
 - (1) Pengamatan terhadap orang/sasaran/target, tempat dan barang (*observasi*).
 - (2) Pembuntutan terhadap orang/sasaran/target (*surveillance*).
 - (3) Penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas ke dalam kelompok jaringan (*undercover*).
 - (4) Penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*).
 - (5) Pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan (*controlled delivery*).
 - (6) Penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran (*phone intercept*).
- c. Dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dilengkapi Surat Perintah Tugas yang berlaku paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Surat Perintah Tugas dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum/upaya paksa (Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan) dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak atau tertangkap tangan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya tindakan

upaya paksa yang dilakukan, harus segera dilengkapi dengan administrasi penyidikan sebagaimana yang berlaku.

3. Pengakhiran

Pengakhiran penyelidikan, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan gelar menganalisis hasil penyelidikan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- b. Pelaksanaan gelar dilaksanakan oleh anggota yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas Penyelidikan dipimpin oleh atasan sesuai tingkat kesatuan masing-masing.
- c. Membuat laporan hasil penyelidikan dan diajukan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas Penyelidikan.
- d. Pejabat yang menerima laporan hasil penyelidikan agar menindaklanjuti:
 - (1) Apabila merupakan peristiwa tindak pidana Narkoba dan pelaku tertangkap, petugas yang menangkap segera membuat Laporan Polisi model A dan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Apabila bukan merupakan peristiwa tindak pidana Narkoba, penyelidikan ditutup dan jika ditemukan informasi baru, dapat dibuka kembali untuk dilakukan penyelidikan lanjutan.
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

b. Penyidik dan Penyidikan

1) Penyidik

Dalam Pasal 6 KUHP ditegaskan bahwa:³²

- a) Penyidik adalah:
 - (1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

³² Ibid.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHP mempunyai wewenang:³³

- (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- (b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- (c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- (g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (i) Mengadakan penghentian penyelidikan.
- (j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) KUHP³⁴ mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a).³⁵

Adapun yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

³³ Ibid., hlm. 236.

³⁴ Ibid., hlm. 235.

³⁵ Ibid., hlm. 235.

masing. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) KUHP³⁶ dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang, Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat (1) dan (2) KUHP).³⁷

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) KUHP³⁸ mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 9 KUHP).³⁹

Dalam keadaan mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyelidikan, atas perintah tertulis Menteri Kehakiman, pejabat imigrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 9).

2) Penyidikan

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHP).⁴⁰ Tata cara melakukan tindakan penyidikan diatur dalam Pasal 107 KUHP⁴¹ sebagai berikut.

- a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut

36 *Ibid.*, hlm. 235.

37 *Ibid.*, hlm. 236.

38 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, op.cit., hlm. 235.

39 *Ibid.*, hlm. 237.

40 *Ibid.*, hlm. 274.

41 *Ibid.*, hlm. 275.

pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) KUHP⁴² dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

- ii) Dalam suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a).
- i) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b), ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal (6) Ayat 1 Huruf (a).⁴³

Dalam penyelidikan ataupun penyidikan harus ada laporan atau pengaduan, baik lisan maupun tulisan dengan ketentuan berikut.

- a) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.
- ii) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik.
- i) Setiap pegawai negeri sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- ii) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda

42 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, op.cit., hlm. 235.

43 *Ibid.*, hlm. 235.

(5) Teknik/cara pemanggilan:

- (a) Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat.
- (b) Apabila panggilan tidak dipenuhi, penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus proaktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
- (c) Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa.⁴⁷

c) Penangkapan

Penangkapan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, tetapi harus dilakukan secara *prima facie evident* (bukti permulaan yang cukup) dan harus dilakukan secara tertulis dan sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 KUHAP.

Dalam pelaksanaan tugas penangkapan, agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang penyalahgunaan kekuasaan, petugas penyidik memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan⁴⁸ yang di dalamnya memuat:

- (1) identitas tersangka;
- (2) alasan-alasan penangkapan;
- (3) uraian singkat tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka;
- (4) tempat tersangka akan diperiksa.

Hal tersebut dimuat dalam surat perintah penangkapan agar tersangka dapat mempersiapkan diri untuk membela dirinya dan keluarganya mengetahui tempat tersangka diperiksa dan agar

47 Perhatikan Pasal 112 Ayat (2) KUHAP, *ibid.*, hlm. 277-278.

48 Perhatikan Pasal 18 Ayat 1 KUHAP.

tidak terjadi kesewenang-wenang penyidik dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal tertangkap tangan (*inflagranti delictie, ontdekking of heeterdaad*),⁴⁹ penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa yang menangkap harus segera menyerahkan si tertangkap dan barang bukti yang ada padanya kepada penyidik.

Jangka waktu penangkapan paling lama satu hari (dua puluh empat jam).⁵⁰ Artinya apabila terjadi penangkapan melebihi jangka waktu tersebut, penahanan tidak sah dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan via institusi Pra Peradilan.⁵¹ Penjelasan yang terkait dengan proses penangkapan adalah sebagai berikut.

- (1) Penangkapan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah:
 - (a) Direktur Tindak Pidana Narkoba / Teroris /Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Mabes Polri.
 - (b) Direktur Resor Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polda.
 - (c) Kasat Resor Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 - (d) Kapolsek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban).
- (2) Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat di dalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5).
- (3) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan/peradilan (Pasal 1 Butir 20).⁵²
- (4) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, baru dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup.⁵³
- (5) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model serse: A-5) yang ditandatangani

49 Perhatikan Pasal 18 Ayat 2 KUHAP.

50 Perhatikan Pasal 19 KUHAP.

51 Perhatikan Pasal 77 KUHAP.

52 Perhatikan Pasal 1 Butir 20 KUHAP.

53 Perhatikan Pasal 1 Butir 20 Jo 17 KUHAP.

(5) Teknik/cara pemanggilan:

- (a) Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat.
- (b) Apabila panggilan tidak dipenuhi, penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus proaktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
- (c) Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa.⁴⁷

c) Penangkapan

Penangkapan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, tetapi harus dilakukan secara *prima facie evident* (bukti permulaan yang cukup) dan harus dilakukan secara tertulis dan sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 KUHP.

Dalam pelaksanaan tugas penangkapan, agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang penyalahgunaan kekuasaan, petugas penyidik memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan⁴⁸ yang di dalamnya memuat:

- (1) identitas tersangka;
- (2) alasan-alasan penangkapan;
- (3) uraian singkat tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka;
- (4) tempat tersangka akan diperiksa.

Hal tersebut dimuat dalam surat perintah penangkapan agar tersangka dapat mempersiapkan diri untuk membela dirinya dan keluarganya mengetahui tempat tersangka diperiksa dan agar

47 Perhatikan Pasal 112 Ayat (2) KUHP, *ibid.*, hlm. 277-278.

48 Perhatikan Pasal 18 Ayat 1 KUHP.

tidak terjadi kesewenang-wenang penyidik dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal tertangkap tangan (*inflagranti delictie, ontdekking of heeterdaad*),⁴⁹ penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa yang menangkap harus segera menyerahkan si tertangkap dan barang bukti yang ada padanya kepada penyidik.

Jangka waktu penangkapan paling lama satu hari (dua puluh empat jam).⁵⁰ Artinya apabila terjadi penangkapan melebihi jangka waktu tersebut, penahanan tidak sah dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan via institusi Pra Peradilan.⁵¹ Penjelasan yang terkait dengan proses penangkapan adalah sebagai berikut.

- (1) Penangkapan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah:
 - (a) Direktur Tindak Pidana Narkoba / Teroris / Pembunuhan / Korupsi pada tingkat Mabes Polri.
 - (b) Direktur Resor Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polda.
 - (c) Kasat Resor Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 - (d) Kapolsek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban).
- (2) Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat di dalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5).
- (3) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan/peradilan (Pasal 1 Butir 20).⁵²
- (4) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, baru dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup.⁵³
- (5) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model serse: A-5) yang ditandatangani

49 Perhatikan Pasal 18 Ayat 2 KUHP.

50 Perhatikan Pasal 19 KUHP.

51 Perhatikan Pasal 77 KUHP.

52 Perhatikan Pasal 1 Butir 20 KUHP.

53 Perhatikan Pasal 1 Butir 20 Jo 17 KUHP.

oleh kepala kesatuan/Instansi (KAPOLWIL, KAPOLRES atau KAPOLSEK) selaku penyidik.⁵⁴ Apabila yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik/penyidik pembantu, petugas cukup memberikan satu lembar kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga yang disangka ditangkap (Pasal 18).

- (6) Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan.
- (7) Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan.⁵⁵
- (8) Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan.
- (9) Teknik/cara penangkapan:
 - (a) Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana dapat diperpanjang selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
 - (b) Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
 - (c) Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan.

d) Penggeledahan

Penggeledahan hanya merupakan wewenang penyidik yang dilakukannya dalam rangka mengumpulkan bahan, keterangan yang ada relevansinya dengan tindak pidana. Penggeledahan harus dilakukan seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁵⁶ Apabila petugas kepolisian akan melakukan penggeledahan, ia harus menunjukkan

Surat Perintah Tertulis dari Penyidik dan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- (1) Penggeledahan⁵⁷ dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani pejabat paling rendah oleh:
 - (a) Direktur Tindak Pidana Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Mabes Polri.
 - (b) Direktur Resor Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polda.
 - (c) Kasat Resor Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 - (d) Kapolsek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban).
- (2) Surat Perintah Penggeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Penggeledahan (B-6).
- (3) Petugas yang melaksanakan penggeledahan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan.
- (4) Petugas yang melaksanakan penggeledahan wajib menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut.⁵⁸
- (5) Petugas yang melaksanakan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (6) Penggeledahan dilakukan terhadap:
 - (a) Badan.
 - (b) Rumah atau tempat tertutup lainnya.
 - (c) Kendaraan/benda bergerak lainnya.

54 Perhatikan Pasal 1 Butir 60 Jo 16 Ayat (2).

55 Perhatikan Pasal 32-37 KUHP.

Perhatikan Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP.

56 Vide Pasal 33 KUHP.

57 Dasar hukum penyidik untuk melakukan penggeledahan adalah Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1) KUHP; Pasal 7 ayat (1) huruf (d) KUHP; Pasal 11 KUHP; Pasal 37 KUHP; Pasal 75 KUHP; Pasal 125 KUHP; Pasal 126 KUHP. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya, pakaian, serta badan.

58 Perhatikan Pasal 125 KUHP, *ibid.*, hlm. 281.

- (d) Pesawat udara.
- (e) Kapal laut/kapal sungai.
- (7) Teknik/cara penggeledahan

Dalam hal tersangka wanita yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba (misalkan), penggeledahan badan dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas:

- (a) Dalam hal penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka/pemilik rumah dan/atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Penggeledahan dan selanjutnya dimintakan permohonan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁵⁹
- (b) Dalam hal tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, penggeledahan tetap dilakukan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat dan/atau 2 (dua) orang saksi.
- (c) Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan.
- (d) Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan, penginapan, dan/atau tempat umum lainnya.
- (e) Setelah melakukan penggeledahan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (f) Dalam hal penggeledahan dilakukan terhadap kendaraan/benda bergerak lainnya petugas dapat

⁵⁹ Perhatikan Pasal 126 Ayat (1), (2), (3), dan Pasal 127 Ayat (1) dan (2) KUHP, *ibid.*, hlm. 277.

segera melakukannya tanpa harus ada surat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan.

- (g) Setelah pelaksanaan penggeledahan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, petugas harus segera membuat permohonan penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (h) Dalam hal penggeledahan terhadap pesawat udara, petugas yang akan melakukan penggeledahan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak pengelola bandara dan disaksikan oleh awak pesawat.
- (i) Penggeledahan terhadap Kapal Laut/Kapal sungai dilakukan setelah kapal sandar di pelabuhan dengan disaksikan oleh kapten kapal atau Anak Buah Kapal.
- (j) dalam hal penggeledahan dilakukan terhadap Kapal Laut berbendera asing, petugas harus meminta izin pada negara sesuai dengan bendera tersebut, dan pelaksanaan penggeledahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Setelah melakukan penggeledahan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penggeledahan disertai Berita Acara Penggeledahan, selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penggeledahan selesai dilaksanakan.
- (l) Guna kepentingan penyidikan dan membuat terang perkara, dalam setiap tahapan kegiatan penggeledahan dapat dilakukan dokumentasi.

e) Penyitaan

- (1) Penyitaan⁶⁰ dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah:

⁶⁰ Dasar Hukum Penyitaan adalah Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s.d. 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s.d. 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP.

- (a) Direktur Tindak Pidana Narkoba/Teroris /Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Mabes Polri.
 - (b) Direktur Resor Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polda.
 - (c) Kasat Resor Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 - (d) Kapolsek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban).
- (2) Surat Perintah Penyitaan wajib dicatat di dalam Buku Register Penyitaan (B-7).
 - (3) Petugas yang melaksanakan penyitaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan.
 - (4) Petugas yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai barang yang akan disita.
 - (5) Jenis/macam penyitaan:
 - (a) Benda atau barang yang dapat disita merupakan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba/teroris/pembunuhan/korupsi.⁶¹
 - (b) Penyitaan yang dilaksanakan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat & Surat Perintah Penyitaan.⁶²
 - (c) Setelah melakukan penyitaan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
 - (6) Teknik/cara penyitaan
 - (a) Dalam hal melakukan penyitaan, petugas meminta tersangka/orang yang menguasai barang untuk menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang bukti dengan diawasi dan difoto oleh petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya.

61 Perhatikan Pasal 39 KUHP.

62 Perhatikan Pasal 38 Ayat 2 KUHP.

- (b) Terhadap barang bukti narkoba/teroris/pembunuhan/korupsi dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Test Kit/Narcotest.
- (c) Barang bukti Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi yang telah dihitung atau ditimbang Selanjutnya dibungkus dan dikelompokkan oleh petugas berdasarkan jenisnya.
- (d) Dalam kegiatan penyitaan di TKP, petugas membuat surat tanda penerimaan terhadap benda/barang bukti narkoba/teroris/pembunuhan/korupsi yang disita.
- (e) Surat Tanda Penerimaan ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, pemilik/yang menguasai barang, dan saksi.
- (f) Surat tanda penerimaan salinannya diserahkan kepada pemilik/orang yang menguasai barang.
- (g) Terhadap barang yang disita namun tidak terkait dengan tindak pidana narkoba/teroris/pembunuhan/korupsi, segera dikembalikan kepada pemiliknya dengan disertai surat tanda terima penyerahan barang yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta dibuatkan dalam Berita Acara Penyerahan barang.⁶³
- (h) Setelah melakukan Penyitaan, petugas mengajukan permohonan persetujuan/penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (i) Mengajukan surat penetapan status barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (j) Petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan membuat Berita Acara Penyitaan.
- (k) Barang Bukti yang disita, diberi label dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti serta melaporkan kepada:
 - i. Direktur Tahti pada tingkat Mabes Polri.

63 Perhatikan Pasal 46 KUHP.

- ii. Direktur Tahti pada tingkat Polda.
- iii. Kasi Tahti pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro, dan
- iv. Ba Tahti pada tingkat Polsek.

f) Pemeriksaan

- (1) Pemeriksaan⁶⁴ dilakukan secara langsung dan berhadapan antara diperiksa dengan pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka dan saksi/saksi ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan harus memenuhi persyaratan formal dan materiel yang ditentukan.
- (4) Dalam hal proses pemeriksaan, penyidik/penyidik pembantu harus bersikap baik dan sopan serta dilarang menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, dilakukan dengan memerhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 1 x 24 jam setelah ditangkap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
 - (b) Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, untuk didampingi oleh pengacara/penasihat hukum.
 - (c) Pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan pada masing-masing kesatuan atau tempat lain yang ditunjuk oleh atasan penyidik sebagai ruang pemeriksaan.
 - (d) Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kembali oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dihadapan tersangka dan setelah disetujui, kemudian ditanda tangani oleh tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu yang memiliki Skep Penyidik/Penyidik Pembantu, dan/atau penterjemah.

64 Perhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf (d) KUHP; Pasal 11 KUHP; Pasal 51 KUHP; Pasal 53 KUHP; Pasal 75 KUHP; Pasal 112 s.d. Pasal 120 KUHP; Pasal 132 s.d. Pasal 133 KUHP.

- (6) Dalam hal tersangka tidak mempunyai penasihat hukum, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Tersangka disangka melakukan tindak pidana narkoba/teroris/pembunuhan/korupsi yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih, dan
- (b) Tersangka orang yang tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun atau lebih.

g) Penahanan

Penahanan harus dilakukan berdasarkan hukum, artinya harus adanya dugaan berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan tersebut tersedia ancaman pidana lima tahun atau lebih. Ada tiga jenis penahanan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Ayat 1 KUHAP, yaitu:

- (1) penahanan rumah tahanan negara;
- (2) penahanan rumah;
- (3) penahanan kota.

Jangka waktu penahanan oleh pihak penyidik berdasarkan Pasal 24 KUHAP adalah paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari, oleh pihak jaksa penuntut umum jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari,⁶⁵ sedangkan oleh pihak pengadilan jangka waktunya paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari.⁶⁶ Berikut penjelasan proses penahanan lebih lanjut:

- (1) Penahanan,⁶⁷ dan permohonan perpanjangan penahanan⁶⁸ dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh:

65 Perhatikan Pasal 25 KUHP.

66 Perhatikan Pasal 26 KUHP.

67 Dasar Hukum Penahanan Pasal 20 s.d. Pasal 31 KUHP.

68 Perhatikan Pasal 29 Ayat (1), (2), & (3) KUHP.

- (a) Direktur tindak pidana Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Mabes Polri.
 - (b) Direktur Res Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polda.
 - (c) Kasat Res Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 - (d) Kapolsek pada tingkat polsek (khusus Polsek Urban).
- (2) Surat perintah Penahanan wajib dicatat di dalam buku register Penahanan (b-9).
 - (3) Penahanan tersangka harus dilakukan dalam ruang tahanan dan sebelum ditahan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, difoto dan diambil sidik jarinya.
 - (4) Penyidik/penyidik pembantu membuat Berita Acara Penahanan (BAP) yang ditanda tangani oleh Penyidik/penyidik pembantu dan tersangka yang ditahan.
 - (5) Petugas yang melaksanakan penahanan wajib memberikan Surat Perintah penahanan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka.⁶⁹
 - (6) Penyampaian tembusan Surat Perintah Penahanan harus tercatat dibuku ekspedisi.
 - (7) Dalam hal penahanan dilakukan terhadap Warga Negara Asing (WNA), maka tembusan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada:
 - (a) Perwakilan/Kedutaan Besar/Konsulat Negara tersangka.
 - (b) Kabareskrim Polri. dan
 - (c) Sekretaris NXB Interpol Indonesia.
 - (8) Penangguhan penahanan
 - (a) Terhadap tersangka tindak pidana Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi yang memerlukan penangguhan penahanan, prosesnya dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan yang ditanda tangani paling rendah oleh:

⁶⁹ Perhatikan Pasal 21 Ayat (3) KUHP.

- i. Direktur Tipid Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi atas persetujuan Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri. dan
 - ii. Direktur Res Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi dan Kepala Satuan kewilayahan (kasatwil) atas persetujuan Kapolda pada tingkat Polda dan jajarannya.
- (b) Persetujuan penangguhan penahanan dituangkan secara tertulis.

h) Pembantaran

- (1) Pembantaran dilakukan oleh penyidik apabila tersangka yang pada saat dilakukan penahanan, mengidap penyakit menular/membahayakan dan memerlukan perawatan khusus kerumah sakit rujukan berdasarkan rekomendasi dokter kepolisian.
- (2) Dalam hal kesatuan pada tingkat polsek yang karena kondisi geografinya tidak memiliki dokter kepolisian, dapat menunjuk dokter setempat.
- (3) Selama dalam status pembantaran, tersangka tetap dalam pengawasan penyidik/penyidik pembantu dan pengamanannya dapat dikoordinasikan dengan Dit/Sie/Ba Tahti.
- (4) Apabila tersangka yang dibantar ternyata sembuh sesuai dengan diagnose dokter yang ditunjuk, penyidik membuat Surat Pencabutan Pembantaran dan penahanan dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan.

i) Pengeluaran Tahanan

- (1) Pengeluaran tahanan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang ditanda tangani paling rendah oleh:
 - (a) Direktur Tipid Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Mabes Polri.
 - (b) Direktur Res Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polda.
 - (c) Kasat Res Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro. dan

(d) Kapolsek pada tingkat Polsek (khusus Polsek Urban).

(2) Pengeluaran tahanan dilakukan apabila:

- (a) Berkas Perkara dinyatakan lengkap dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dan
- (b) Demi hukum karena masa waktu penahanan habis.

j) Gelar Perkara

Gelar perkara dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali terhadap seluruh kasus Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi yang disidik, yaitu:

(1) Gelar Perkara Awal

Gelar perkara awal dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah tersangka ditangkap dan diterbitkan Laporan Polisi. Gelar Perkara awal dihadiri oleh:

- (a) petugas penangkap;
- (b) penyidik/penyidik pembantu;
- (c) atasan penyidik;
- (d) pengawas penyidik;
- (e) penyidik fungsional; dan
- (f) unsur internal Polri lain jika diperlukan (fungsi Propam, dan Binkum).

Materi gelar perkara awal meliputi:

- (a) posisi kasus yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan penangkapan tersangka;
- (b) penerapan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan terkait dengan TKP, barang bukti, tersangka, dan saksi;
- (c) penentuan klasifikasi perkara dan target waktu penyelesaian berkas perkara tahap pertama pengiriman kepada Jaksa Penuntut Umum;
- (d) kendala/hambatan yang dihadapi penyidik;
- (e) rencana tindak lanjut.

(2) Gelar Perkara Akhir

Gelar perkara akhir dapat dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum target waktu penyelesaian berkas perkara berakhir. Gelar perkara akhir dihadiri oleh:

- (a) petugas penangkap;
- (b) penyidik;
- (c) atasan penyidik;
- (d) pengawas penyidik;
- (e) penyidik fungsional;
- (f) unsur internal Polri lain jika diperlukan (fungsi Propam dan Binkum).

Materi gelar perkara terdiri atas sebagai berikut.

- (a) Meneliti tindak lanjut hasil gelar perkara awal.
- (b) Perkembangan pemenuhan penerapan unsur-unsur pasal.
- (c) Perkembangan hasil pemeriksaan tersangka, saksi, dan barang bukti yang terkait dengan jaringan pelaku lainnya.
- (d) Meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dalam rangka pengiriman berkas perkara tahap satu kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (e) Menerangkan kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Penanggung jawab pelaksanaan gelar perkara paling rendah adalah:

- (a) Dir Tipid Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Mabes Polri.
- (b) Kabag Wassidik pada tingkat Polda.
- (c) Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro. dan
- (d) Kapolsek pada tingkat Polsek (khusus Polsek Urban). Hasil gelar perkara, dituangkan dalam laporan notulen

- (5) Apabila ditemukan bukti baru (*novum*) atau berdasarkan putusan pengadilan, diterbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan ditandatangani oleh pejabat.

n) Penyimpanan Barang Bukti

- (1) Sebelum dilakukan penyimpanan, barang bukti harus ditimbang, dihitung, dikelompokkan berdasarkan jenis, dibungkus, dilak/disegel, dan difoto yang disaksikan oleh tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Penyimpanan.⁷⁸
- (2) Setelah ditimbang, dihitung, dikelompokkan berdasarkan jenis, dibungkus, dilak/disegel, difoto barang bukti, dan dicatat dalam buku register barang bukti (B-13) secara terperinci berdasarkan:
- (a) Jenis satuan berat (Kg/Gr)
 - (b) Satuan volume (Liter/ml). dan
 - (c) Satuan jumlah (butir, buah, batang).
- (3) Kunci tempat penyimpanan barang bukti dipegang dan disimpan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah.
- (4) Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) minggu sekali oleh petugas dan dicatat dalam buku pengecekan barang bukti.
- (5) Dalam hal penanganan barang bukti lain, penyimpanannya dilakukan ditempat yang ditentukan, dilabel, dan dicatat dalam buku register barang bukti serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPBB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁷⁹

- (a) Menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

78 Anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri 10/2010.

79 Perhatikan Pasal 21 Perkapolri 10/2010.

- (b) Mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti.
- (c) Menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya.
- (d) Mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya.
- (e) Mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti.
- (f) Mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakai kepada pemilik yang berhak dan
- (g) Memusnahkan barang bukti.

Pada dasarnya, barang bukti dapat dikeluarkan untuk:

- (a) Keperluan penyidikan.⁸⁰
- (b) Dikirimkan ke jaksa penuntut umum.⁸¹
- (c) Dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak.⁸²
- (d) Dijual lelang, dalam hal barang bukti yang disita lekas rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi.⁸³
- (e) Dimusnahkan, dalam hal barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang.⁸⁴

m) Pemusnahan Barang Bukti

- (1) Pemusnahan barang bukti Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi, dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (2) Setelah mendapat surat penetapan diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah:

80 Perhatikan Pasal 17 Perkapolri 10/2010.

81 Perhatikan Pasal 18 Perkapolri 10/2010.

82 Perhatikan Pasal 19 Perkapolri 10/2010.

83 Perhatikan Pasal 20 Perkapolri 10/2010.

84 Perhatikan Pasal 21 Perkapolri 10/2010.

- (a) Direktur Tipid Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Mabes Polri.
 - (b) Direktur Res Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polda.
 - (c) Kasat res Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 - (d) Kaposek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban)
- (3) Sebelum pemusnahan dilaksanakan, supaya dilakukan pengetesan terhadap keaslian barang bukti.
- (4) Proses pemusnahan barang bukti Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Didahului dengan membuat rencana kegiatan pemusnahan dan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh penyidik kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
 - (b) Pemusnahan Narkoba dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili instansi atau lain dari Kejaksaan, Departemen Kesehatan, Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan.
 - (c) Terhadap barang bukti Narkoba/Teroris/Pembunuhan/Korupsi, paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan di TKP, dilakukan pemusnahan setelah sebagian disisihkan terlebih dahulu untuk kepentingan penyidikan, ilmu pengetahuan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan tanpa harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat.
 - (d) Khusus untuk tanaman Narkoba yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam lamanya 14 (empat belas) hari.

- (e) Penentuan jumlah/prosentase barang bukti yang harus disisihkan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Terhadap barang bukti Narkotika bukan tanaman, precursor narkotika, psikotropika dan lainnya, pemusnahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Penetapan Status Barang Sitaan untuk Dimusnahkan dan sebelumnya terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan penyidikan/pemeriksaan laboratorium.
- (5) Setelah pelaksanaan pemusnahan, penyidik membuat Berita Acara Pemusnahan yang sekurang-kurangnya memuat:
- (a) Nama, jenis, sifat dan jumlah.
 - (b) Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan.
 - (c) Keterangan mengenai pemilik yang menguasai narkotika.
 - (d) Tandatangan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (6) Pengakhiran dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
- (a) Pengiriman berkas perkara, barang bukti, dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
 - (b) Penghentian penyidikan. dan
 - (c) Mengarsipkan berkas perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara menurut undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.⁸⁵

⁸⁵ Perhatikan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diteruskan ke pengadilan, perkara-perkara yang diterima dari penyidik dilimpahkan ke pengadilan dengan tuntutan agar pengadilan segera memeriksa dan mengadilinya, penuntut umum berhak melimpahkan dan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan di depan hakim.

1. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum (PU)

Menurut Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU Nomor 15 tahun 1961) dinyatakan kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang berikut.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan,⁸⁶ dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

86 Perhatikan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4.

Dalam penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memerhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Setelah penuntut umum memperoleh hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari, ia wajib memberitahukan kepada penyidik tentang kelengkapan hasil penyidikan.

Jika penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi. Dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.⁸⁷ Setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

2. Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat berikut.

a. Syarat Formal

Di antara syarat formal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum.
- 2) Berisi identitas terdakwa/para terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.⁸⁸

87 Perhatikan Pasal 138 KUHAP.

88 Perhatikan Pasal 143 Ayat (2) Huruf (a) KUHAP.

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal ini tidak seluruhnya dipenuhi, dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b. Syarat Materiel

1) Menyebutkan Waktu dan Tempat Tindak Pidana Dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, penguraian unsur mengenal waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai asas legalitas, penentuan *recidive*, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu, misalnya di muka umum, di dalam pekarangan (tertutup) dan lain-lain.

2) Memuat Uraian Secara Cermat, Jelas dan Lengkap Mengenai Tindak Pidana yang Didakwakan

a) Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/teliti, terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

b) Uraian Harus Jelas

Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa melakukan tindak pidana.

Hal-hal yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*) untuk mengetahui apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya.

Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*Obscuur Libel*). Dengan kata lain, jelas berarti harus menyebutkan:

- (1) unsur tindak pidana yang dilakukan;
- (2) fakta dari perbuatan materiel yang mendukung setiap unsur delik;
- (3) cara perbuatan materiel dilakukan.

c) Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang tercecceh/tertinggal atau tidak tercantum dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga menguraikan unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiel, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Sebelum membuat surat dakwaan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan adalah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut merasa yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam KUHP, penuntut umum dapat membuat matriks tindak pidana tersebut.

Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan surat dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud Pasal 143 KUHP karena surat dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) Huruf (a) dan (b) KUHP.

3. Macam-macam Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan.

Berbicara mengenai penerapan pasal pada tindak pidana berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara terperinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan.

Menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan **Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.**

Surat Edaran tersebut ditujukan agar para Penuntut Umum mendapat keseragaman dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini disebutkan tentang bentuk surat dakwaan, yaitu sebagai berikut.

a. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwaan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.⁸⁹

b. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana yang paling tepat dapat dibuktikan.

⁸⁹ Perhatikan Pasal 362 KUHP.

Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri atas beberapa lapisan, hanya satu dakwaan yang dibuktikan tanpa harus memerhatikan urutannya. Jika salah satu telah terbukti, dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dan lainnya digunakan kata sambung *atau*. Contoh dakwaan alternatif:

- 1) Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 2) Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP).

c. Dakwaan Subsidaire

Dakwaan subsidaire juga terdiri atas beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematisasi lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Contoh dakwaan subsidaire:

- 1) **Primair:** Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).⁹⁰
- 2) **Subsidaire:** Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).⁹¹

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam surat dakwaan ini, didakwaan beberapa tindak pidana sekaligus yang dibuktikan satu per satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa **melakukan beberapa tindak pidana** yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Contoh dakwaan kumulatif:

- 1) Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).⁹²

⁹⁰ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 134.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

- 2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).⁹³
- 3) Perkosaan (Pasal 285 KUHP).⁹⁴

e. **Dakwaan Kombinasi**

Disebut dakwaan kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau subsidair. Contoh dakwaan kombinasi:

- 1) **Primair:** Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
Subsidaire: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). dan
- 2) **Primair:** Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).
Subsidaire: Pencurian (Pasal 362 KUHP).

Berbeda dengan *subsidair*, kata *juncto* digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Pasal-pasal ini tidak hanya dibatasi untuk satu undang-undang, dan tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana.

Contoh penggunaan kata *juncto* misalnya: A membantu B dalam melakukan tindak pidana pembunuhan maka A akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) jo. Pasal 55 KUHP (tentang Membantu Melakukan Tindak Pidana), sedangkan B akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP.

Dakwaan di antara keduanya berbeda agar menjelaskan bahwa A bukan merupakan pelaku utama, seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, melainkan merupakan pembantu tindak pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan keadaannya dalam Pasal 55 KUHP.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa penggunaan kata *dan*, atau, *juncto*, atau *primair-subsidair* disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata *atau*) atau dakwaan subsidair. Adapun dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana

yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

f. **Fungsi Surat Dakwaan**

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan:

- 1) Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
- 2) Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/ analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- 3) Bagi terdakwa/penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

g. **Dasar Pembuatan Surat Dakwaan**

Dasar pembuatan surat dakwaan adalah sebagai berikut.

- 1) Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan.⁹⁵
- 2) Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.⁹⁶
- 3) Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum apabila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.⁹⁷

4. **Teknik Pembuatan Surat Dakwaan**

Secara teoretis pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan tentang cara dan teknik pembuatan surat dakwaan. Hal

93 *Ibid.*, hlm. 140.

94 *Ibid.*, hlm. 115.

95 Perhatikan Pasal 14 Huruf (d) KUHP.

96 Perhatikan Pasal 137 KUHP.

97 Perhatikan Pasal 140 Ayat 1 KUHP.

ini disebabkan cara dan teknik pembuatan surat dakwaan merupakan suatu kebiasaan praktis para praktisi hukum dengan bertitik tolak melalui optik pengamatan dan pengalaman praktik.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-04/J.A/II/1993 tanggal 16 November 1993, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/II/1993 dan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa cara dan teknik pembuatan surat dakwaan perlu memerhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut.

a. Penelitian Berkas Perkara

Dalam praktik, penelitian berkas perkara dari penyidik yang lazim disebut: "tugas prapenuntutan" dilakukan "Jaksa Penuntut" dengan bentuk formulir P-16. Fokus penelitian diarahkan pada terpenuhinya kelengkapan formal dan materiel untuk mengetahui sejauh mana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan beserta upaya pembuktian.

b. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan

Setelah mengidentifikasi jenis, sifat, tindak pidana dan ketentuan pidana yang dilanggar, penuntut dapat melakukan pemilihan bentuk surat dakwaan yang paling tepat. Bentuk surat dakwaan harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, surat dakwaan yang digunakan adalah dakwaan tunggal.

Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan yang ditentukan dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidiaritas (bersusun lapis), dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

c. Matriks Surat Dakwaan

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, sebelum merumuskan konsep surat dakwaan, penuntut hendaknya menyusun matriks surat dakwaan yang menggambarkan bagan (*flowchart*) mulai dari kualifikasi tindak pidana beserta pasal yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta perbuatan terdakwa, alat-

alat bukti pendukung dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian.

Masing-masing komponen tersebut diterapkan dalam satu kotak yang berhubungan secara paralel dengan kotak yang berada di sebelah kanannya. *Flowchart* tersebut harus menggambarkan kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang mendukung pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakan dan barang bukti yang dapat melengkapi upaya pembuktian.

Sebelum disusun konsep akhir surat dakwaan sebagai persiapan pelimpahan perkara dilakukan ekspose untuk membahas surat dakwaan beserta upaya pembuktian. Sebagai dasar sebelum merumuskan surat dakwaan, diteliti dan dicermati juga pedoman-pedoman berikut.

- 1) Surat dakwaan sinkron/sejalan/sesuai dengan penyidikan. Dengan demikian, penyidikan benar-benar dipahami bersama.
- 2) Rumusan tentang waktu dan tempat tindak pidana.
- 3) Rumusan tentang posisi para terdakwa apakah sebagai dader, medader, deonpleger, uitlocker atau medeplichtige.
- 4) Rumusan feit yang terjadi apakah satu feit, dua feiten atau perbuatan berlanjut.
- 5) Rumusan unsur-unsur pasal yang dilanggar/didakwakan.
- 6) Unsur-unsur pasal yang dilanggar (didakwakan) diformulasikan dengan perbuatan yang dilakukan.

d. Teknis Redaksional

Hal ini berkaitan dengan cara merumuskan fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perumusan ketentuan pidana yang dilanggar sehingga tampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa sederhana dan kalimat efektif.

5. Perubahan Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah pijakan dasar bagi proses persidangan pidana dalam ranah hukum pidana di Indonesia, tetapi ada kalanya surat dakwaan itu mempunyai kesalahan sehingga diperlukan perubahan surat dakwaan. Adapun langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum dan terdakwa jika ada perubahan surat dakwaan dapatlah diuraikan di bawah ini.

Perubahan surat dakwaan terkait erat dengan Pasal 143 dan 144 KUHAP, yaitu pada Pasal 143 KUHAP mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, sedangkan Pasal 144 KUHAP adalah tentang perubahan surat dakwaan. Berikut penjelasannya.

Pasal 143 KUHAP:

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 144 KUHAP:

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Penuntut umum hanya dapat melakukan pengubahan surat dakwaan dalam dua waktu. *Pertama*, sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dan pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan beberapa kali.⁹⁸ *Kedua*,

⁹⁸ Perhatikan Vide Pasal 144 Ayat (1) KUHAP.

hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.⁹⁹ Adapun hak terdakwa/tersangka adalah memperoleh turunan surat dakwaan yang telah diubah. Dalam teknis perkara, jika perubahan ini dilakukan tidak sesuai waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa memperoleh hak untuk menolak disidangkan dengan dasar dakwaan yang telah diubah tidak sesuai Pasal 144 KUHAP.

Selanjutnya, setelah menerima berkas perkara, majelis hakim langsung menetapkan penetapan hari sidang, yaitu tujuh hari setelah berkas diterima, misalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2011, hakim ketua sidang menerima berkas maka hakim ketua sidang menetapkan penetapan hari sidang pada hari Senin tanggal 8 Februari 2011 sehingga tidak memungkinkan lagi bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaannya. Peluang untuk mengubah surat dakwaan telah diberikan oleh KUHAP, tetapi dalam praktik keseharian, peluang tersebut telah tertutup kemungkinannya.

Dalam praktik, ada kalanya penuntut umum memberikan perubahan surat dakwaan langsung kepada majelis hakim tanpa melalui jalur panitera muda pidana untuk dilakukan register. Ada kalanya juga hakim ketua sidang/majelis hakim menolak untuk langsung menerima perubahan surat dakwaan tanpa melalui panitera muda pidana untuk dilakukan register.

Jika hal ini terjadi, yaitu majelis hakim telah menerima surat dakwaan langsung tanpa melalui panitera muda pidana dan tidak sesuai dengan KUHAP, yaitu telah tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan surat dakwaan, terdakwa mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada perubahan surat dakwaan atau tidak. Oleh karena itu, pada permulaan sidang majelis hakim selalu menanyakan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan. Pada waktu pembacaan surat dakwaan, terdakwa harus memerhatikan secara saksama apakah turunan surat dakwaan yang diterimanya telah sesuai dengan surat dakwaan yang berada pada berkas perkara di tangan majelis hakim.

Jika turunan surat dakwaan dengan surat dakwaan di tangan majelis hakim tidak mempunyai kesamaan, terdakwa mempunyai hak untuk menolak disidangkan dengan alasan adanya kerancuan surat dakwaan. Selanjutnya, terdakwa dapat meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan berupa surat dakwaan tidak dapat diterima.

⁹⁹ Perhatikan Vide Pasal 144 Ayat (2) KUHAP.

penuntut umum dan memperhatikan hak-hak terdakwa untuk disidangkan secara adil. Oleh karena itu, terdapat beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam mengubah surat dakwaan, yaitu sebagai berikut.

a. Pasal 144 ayat 1 dan ayat 2 KUHP menentukan:

- 1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- 2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

b. Bahwa Penuntut Umum telah mengubah surat dakwaan a quo tidak menurut cara dan waktu yang secara tegas ditentukan oleh Pasal 144 ayat 1 dan ayat 2 KUHP karena:

- 1) Perubahan surat dakwaan kesatu tertanggal 20 Januari 2005 No.PDM/88/Jk. Surat dakwaan ini diterima Penasehat Hukum Terdakwa bersamaan saatnya pada waktu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diterima tanggal 3 Februari 2005 dengan Register Perkara Reg.Perk 88/Jakarta Pusat/01/2005.
- 2) Bahwa terjadinya perubahan dakwaan yang kedua tersebut terjadi pada persidangan tanggal 3 Februari 2005 dan diterima dipersidangan dirubah dengan dakwaan kedua.

6. Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing*)

Dalam Pasal 184 KUHP disebutkan, terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang paling mudah dan paling sering dipergunakan adalah Keterangan Saksi.

Dalam praktiknya, hampir semua pembuktian perkara pidana membutuhkan alat bukti berupa keterangan saksi. Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Bahkan, dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput

perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Di samping pembuktian dengan alat bukti lain, diperlukan pula pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Akan tetapi, tidak semua keterangan saksi memiliki nilai dan kekuatan sebagai alat bukti. Misalnya, keterangan saksi di luar dari hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Selain itu, keterangan saksi yang diperoleh dari pendengaran orang lain (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Demikian pula, opini atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi yang bersangkutan. Keterangan saksi demikian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Kemudian sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP, maka keterangan seorang saksi saja, belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut dikenal dengan ungkapan Unus Tetis Nullus Tetis (satu saksi bukan saksi).

Artinya, jika alat bukti yang tersedia hanya terdiri atas seorang saksi tanpa keterangan saksi lain atau alat bukti yang lain, "kesaksian tunggal" tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Permasalahan yang muncul dalam praktik penanganan perkara adalah terdapat dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku, tetapi tidak ada saksi yang secara langsung melihat dan mendengar saat tindak pidana tersebut dilakukan sehingga yang paling mengetahui tentang peristiwa tersebut adalah para pelaku sendiri. Dalam hal inilah diperlukan upaya pembuktian dengan jalan melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) supaya terdapat alat bukti keterangan saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (2) di atas sehingga pelaku yang satu dapat menjadi saksi terhadap pelaku lain. Dasar dilakukannya pemecahan perkara tersebut tercantum dalam Pasal 142 KUHP yang menyatakan:

"Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah."

Dalam Pasal 142 KUHP terdapat pengecualian yang tercantum dalam Pasal 141, yaitu:

"Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lainnya.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi, yang satu dengan yang lain ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Adapun yang dimaksud dengan "tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain" dalam Pasal 141 huruf b adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
- b. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
- c. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pembedaan karena tindak pidana lain.

Pasal 142 KUHP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan "pemecahan berkas perkara" dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Artinya, kewenangan untuk melakukan *splitsing* berada di tangan Penuntut Umum. Akan tetapi, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kapanakah *splitsing* tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum.

Dalam Tambahan Lembaran negara R.I. No. 3209 tentang Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 7 (KUHP) Pasal 142 hanya diterangkan "Cukup jelas".

Apabila diperhatikan redaksi dari Pasal 142 KUHP, yaitu "....Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.", haruslah dilihat tentang pengertian "penuntutan".

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 KUHP, pengertian "Penuntutan" adalah "tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Pelaksanaan *splitsing* seharusnya memang dilakukan pada saat sebelum Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri sebagaimana diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP Penjelasan Pasal 142.

Apabila melihat kewenangan Penuntut Umum, hal tersebut diatur dalam Pasal 14 KUHP sebagai berikut.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Apabila memerhatikan kewenangan penuntut umum di atas, sebelum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, tugas penuntut umum secara ringkas adalah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan membuat surat dakwaan.

Mengingat Penjelasan Pasal 142 menyatakan bahwa biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru yang para tersangka saling menjadi saksi sehingga perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi, *splitsing* dilakukan pada saat penuntut umum melakukan kegiatan prapenuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Huruf b KUHP, yaitu:

"Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik."

Oleh karena itu, *splitsing* dilakukan pada saat tahap prapenuntutan, yaitu ketika penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memecah berkas perkara.

Hal tersebut disebabkan pemecahan penuntutan perkara (*splitsing*) seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 142 KUHP biasanya memang dilakukan dengan membuat berkas perkara lagi sehingga perlu dilakukan kembali pemeriksaan terhadap saksi ataupun terhadap terdakwa.

Dalam hal ini, tugas untuk menyusun berkas perkara dilakukan oleh pihak penyidik dan bukan di pihak penuntut umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 Ayat (1), yaitu:

"Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum."

Oleh karena itu, penyidik melakukan *splitsing* atas perintah penuntut umum apabila dari hasil penelitian berkas perkara, penuntut umum berpendapat bahwa perkara pidana tersebut perlu dilakukan *splitsing*.

Hal tersebut juga disebabkan, salah satu urgensi dari pemecahan berkas perkara menjadi berkas perkara yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi secara timbal balik di antara sesama mereka.

Oleh karena itu, jelas diperlukan kembali pemeriksaan penyidikan, dalam hal inilah sekalipun pemecahan berkas perkara dilakukan oleh penuntut umum, tetapi pemeriksaan penyidikan yang diakibatkan pemecahan berkas perkara tetap menjadi wewenang penyidik. Oleh karena itu, dalam pemecahan berkas perkara dilakukan hal-hal berikut.

- a. Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan jalan pihak penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dalam arti "*penyidikan tambahan*".
- b. Pemeriksaan penyidikan akibat pemecahan berkas perkara dilakukan oleh penyidik berdasar petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.
- c. Tata cara pengembalian berkas, baik yang dilakukan oleh penuntut umum kepada penyidik maupun oleh penyidik kepada penuntut umum dalam rangka pemecahan berkas perkara, berpedoman kepada ketentuan tata cara dan batas-batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 110 Ayat (4) dan Pasal 138 Ayat (2) KUHP.

7. Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara (Deponer)

Pembahasan *Deponering* tidak terlepas dari pembahasan masalah penghentian penuntutan oleh kejaksaan (penerbitan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan/SKPP). Oleh karena itu, penulis menekankan perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (*deponering*). Berikut ini adalah beberapa hal yang membedakan antara *deponering* dan penghentian penuntutan.

a. Penyampingan Perkara

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 jo Pasal 32 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 jo. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 berbunyi: "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum.*"

Dalam Penjelasan UU No. 16 tahun 2004 pasal 35 huruf c disebutkan: "*Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan*

pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

Kemudian, dalam KUHAP Pasal 46 Ayat (1) huruf (c) yang berbunyi: "Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana", dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP menyebutkan, "Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung."

Kejaksaan dalam konteks Hukum Acara Pidana Indonesia disebut sebagai badan yang berhak mengadakan penuntutan (*Dominus Litis*). Dari hak penuntutan tersebut, muncul asas legalitas (penuntut umum wajib menuntut suatu delik) dan asas oportunitas (*opportunitateit beginsel*) yang menurut A.Z. Abidin Farid dirumuskan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum.

Kesimpulannya adalah setiap perkara yang bersangkutan harus memiliki cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi, perkara yang cukup fakta dan bukti itu "sengaja dikesampingkan" dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan demi kepentingan umum. Deponering ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung langsung.

b. Penghentian Penuntutan

Alasan penghentian penuntutan tidak didasarkan atas kepentingan umum, tetapi berdasarkan alasan dan kepentingan hukum itu sendiri. Alasan penghentian penuntutan adalah sebagai berikut.

1) Ditutup Demi Kepentingan Hukum

Karena tidak cukup bukti. Contohnya: tidak mencapai minimal dari alat bukti yang diharuskan seperti disebut dalam Pasal 183 KUHAP, alat bukti yang ada tidak sah menurut hukum, tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal yang didakwakan.

2) Ditutup Demi Hukum

Apabila dijumpai suatu tindakan pidana yang oleh undang-undang telah ditentukan bahwa hak kejaksaan untuk menuntut tindak pidana tersebut gugur, tindak pidana tersebut harus ditutup demi hukum.

Di samping perbedaan dasar yang telah diungkapkan di atas, terdapat perbedaan prinsipil antara *deponering* dengan penghentian penuntutan perkara, yaitu:

- 1) *deponering* satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan;
- 2) pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan kembali jika ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan, misalnya ditemukan bukti baru sehingga bukti baru tersebut dapat diharapkan untuk menghukum. Penghentian penuntutan dapat diajukan upaya hukum dalam proses praperadilan (Pasal 77-81 KUHAP), jika *Deponering* dilakukan oleh Jaksa Agung, sedangkan penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh jaksa pada lingkup kejaksaan RI.

E. Tahapan dan Proses Persidangan

Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formal yang harus dilakukan hakim untuk mengambil putusan dalam perkara pidana. Tanpa melalui proses pemeriksaan persidangan, hakim tidak dapat mengambil putusan dalam perkara pidana yang ditanganinya karena hanya dengan melalui proses inilah didapatkan peristiwa konkret yang dilakukan terdakwa.

Melalui proses persidangan ini, semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasihat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektif masing-masing. Pada akhir proses pemeriksaan persidangan, hakim akan mengambil putusan.

Proses pemeriksaan persidangan perkara pidana di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat dengan sebutan KUHAP (Undang-undang

Nomor 3 tahun 1981) dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya, seperti PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.06.UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Tertib dan Tata Ruang Sidang.

Dalam praktik, pelaksanaan tahap-tahap dan tata cara persidangan sering disesuaikan dengan keadaan berdasarkan kebijakan hakim/ketua majelis hakim atau atas kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana, selama tidak menyimpang dari asas dan tujuan pemeriksaan perkara pidana.

Pada garis besarnya, proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara biasa terdiri atas empat tahap berikut.

1. Pejabat Pelaksana Administrasi Persidangan

Sebelum membahas proses persidangan perkara pidana pengadilan, berikut ini penulis akan menguraikan pejabat-pejabat yang terkait dalam pelaksanaan administrasi persidangan perkara di Pengadilan Negeri.

Pejabat pengadilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara disebut hakim. Apabila hakim yang bersidang lebih dari seorang, disebut Majelis Hakim yang biasanya berjumlah tiga, lima orang, atau seterusnya dengan jumlah ganjil dan salah seorang daripadanya bertindak sebagai Ketua Majelis. Pejabat Pengadilan yang bertugas melaksanakan administrasi perkara yang akan dan sedang diperiksa dan disidangkan hakim disebut dengan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

Kedua jenis pejabat ini (pejabat hakim dan pejabat kepaniteraan) berada di bawah koordinasi pimpinan Pengadilan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Pejabat yang bertugas mendampingi hakim sewaktu bersidang adalah Panitera Pengganti yang mencatat seluruh pelaksanaan persidangan yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara sidang. Selain itu, Panitera Pengganti juga bertugas membuat penetapan yang dikeluarkan oleh hakim.

Sebagai pejabat fungsional, hakim, dalam melaksanakan tugas teknis yudisial, yaitu ketika bersidang dan duduk di belakang meja hijau dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sedang dihadapi, secara filosofis tidak berada di bawah komando Ketua/Wakil Ketua Pengadilan karena hakim memiliki independensi/kebebasan, tetapi

tunduk kepada hukum, kebenaran, dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan selalu dengan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dengan kata lain, ketika menjatuhkan putusan, seorang hakim tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT. Yang Mahaadil dan Mahabijaksana.

Sebaliknya, sebagai pejabat struktural, seorang panitera dan pejabat yang berada di bawahnya bertanggung jawab penuh terhadap tugas administrasi yang dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan dan selalu berada di bawah komando Ketua Pengadilan. Di sinilah perbedaan tugas dan tanggung jawab antara seorang hakim dan tugas seorang Panitera Pengadilan.

Pelaksanaan tugas administrasi yang dilakukan oleh pejabat kepaniteraan dilakukan sejak perkara diterima (dalam perkara perdata)/dilimpahkan (dalam perkara pidana) ke Pengadilan dan berakhir setelah perkara tersebut mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap/BHT (*inkracht van gewijsde*). Bahkan, dalam perkara perdata, tugas tersebut tidak berhenti sampai putusan berkekuatan tetap (BHT), tetapi berlanjut dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang sering disebut dengan pelaksanaan eksekusi.

2. Praperadilan

Praperadilan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP merupakan hak setiap Tersangka, keluarga, kuasa hukum atau pihak ketiga guna menjamin suatu kepastian hukum terhadap proses hukum yang sedang atau telah berjalan.

Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dasar hukum berlakunya praperadilan adalah Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan

oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79).¹⁰⁰

Adapun permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80).¹⁰¹

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 81).¹⁰² Adapun tentang tata cara pengajuan pra peradilan dan mekanisme pemeriksaan di sidang pengadilan selengkapya bisa dibaca di KUHAP Pasal 82 dan 83.

Setiap penyidik ataupun atasan penyidik seolah antipati dengan praperadilan. Ada suatu anggapan bahwa seorang penyidik yang pernah di praperadilan dipandang mempunyai suatu cacat sehingga dianggap tidak cakap atau tidak mampu melakukan penyidikan. Padahal, proses hukum praperadilan merupakan hal yang wajar dan tidak perlu ditakuti sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Hal ini karena tidak semua putusan praperadilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Proses sidang pemeriksaan praperadilan tentunya mempertimbangkan fakta, baik secara yuridis maupun fakta materiel.

Dikabulkannya praperadilan harus ditinjau lagi secara adil apakah karena suatu sebab yang disengaja atau suatu sebab yang berasal dari luar proses penyidikan. Praperadilan adalah untuk menjaga agar penyidik tidak sewenang-wenang serta untuk mengawal agar proses penyidikan dan/atau penuntutan berjalan dengan mekanisme yang diatur di dalam KUHAP.

Adapun hal-hal yang dinilai penting untuk diketahui dan dipahami oleh para pembaca adalah penyidik harus bersikap netral, profesional, dan proporsional. Apabila setiap orang yang sedang berperkara memiliki keyakinan bahwa proses penuntutan tersebut telah dilaksanakan secara

profesional dan tidak memihak, tidak ada hal yang perlu dirisaukan dan dikhawatirkan. Hal yang tidak kalah penting adalah anggapan bahwa praperadilan adalah hal yang tabu bagi penyidik harus disingkirkan. Demikian pula, dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan.

Untuk mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan, pengawas penyidikan juga dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang penyidikan. Kerja pengawas penyidikan ini bersifat independen.

Selain itu, mekanisme pengawasan internal juga berlaku terhadap setiap keberatan atau komplain dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, praperadilan adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan dan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

3. Wewenang Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa

Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu sudah termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Selanjutnya, hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Hakim yang ditunjuk adalah majelis hakim atau hakim tunggal.

Hakim dapat menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang disidang pengadilan. Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus diterima terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai (Pasal 152).¹⁰³ Pasal 153 KUHAP mengatur persidangan sebagai berikut:¹⁰⁴

- (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang
- (2) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

100 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, loc.cit., hlm. 262.

101 Ibid., hlm. 262.

102 Ibid., hlm. 263.

103 Ibid., hlm. 292.

104 Ibid.

- b. Ia wajib menjaga supaya tidak ada pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
 - (4) Tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (2) dan Ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Jaminan yang diatur dalam Ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan terbuka tidak terpenuhi.
 - (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Untuk menjaga supaya jiwa anak yang masih di bawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat, maka hakim dapat menentukan bahwa anak di bawah umur tujuh belas tahun, kecuali yang telah atau pernah kawin, tidak diperbolehkan mengikuti sidang.

Berkenaan dengan pemanggilan terdakwa oleh hakim, Pasal 154 KUHAP menegaskan sebagai berikut.¹⁰⁵

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas; sedangkan yang dimaksud dengan "keadaan bebas" adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawasan.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara sah, hakim sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa di panggil sekali lagi. Kehadiran terdakwa di sidang merupakan

¹⁰⁵ Ibid., hlm. 293.

- harus hadir di sidang pengadilan.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
 - (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya. Dalam hal terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa.
 - (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan Ayat (6) dan dapat menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memerhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang. Selanjutnya, seorang hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.

Selanjutnya, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti. Penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan. Untuk menjamin terlindungnya hak terdakwa guna memberikan pembelaannya, penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaan, tetapi penjelasan ini hanya dapat dilaksanakan pada permulaan sidang.¹⁰⁶

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menerima keberatan tersebut, perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya, dalam hal tidak diterima atau

¹⁰⁶ Perhatikan Pasal 155 KUHAP.

Dalam hal penuntut umum merasa keberatan terhadap keputusan tersebut, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi. Dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya dapat membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

Selanjutnya, hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan dalam sidang. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi tersebut ke persidangan.

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi ia menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli (Pasal 159 KUHP).

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (3) dan Ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang untuk mengajukan tanggapan sekali lagi yang disebut duplik.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.¹⁰⁷ Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

¹⁰⁷ Perhatikan Pasal 183 KUHP.

petunjuk;

keterangan terdakwa.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Proses Ajudikasi Perkara Pidana

Keberatan/Eksepsi

Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan penuntut umum. Keberatan (*eksepsi*) terdakwa dan penasihat hukum itu meliputi:¹⁰⁸

Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolut/relatif).

Dakwaan tidak dapat diterima (karena dakwaan dinilai kabur/*obscuur libel*).

Dakwaan harus dibatalkan (karena keliru, kedaluwarsa atau *nebis in idem*).

Sesudah pembacaan keberatan (*eksepsi*) dari terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas keberatan (*eksepsi*) yang biasanya disebut replik.¹⁰⁹ Dalam praktik, sebelum menjatuhkan putusan sela, hakim ketua masih memberikan kesempatan pada terdakwa/penasihat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi yang disebut duplik.

Kesempatan terakhir ini tidak diatur dalam KUHP, tetapi merupakan kebijaksanaan hakim berdasarkan asas keseimbangan pada pemeriksaan atas eksepsi beserta tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketua sidang menjatuhkan putusan sela.¹¹⁰ Model putusan sela dalam praktik ada dua macam.

Tidak dibuat secara khusus

Biasanya untuk putusan sela yang pertimbangannya sederhana, majelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan,

¹⁰⁸ Periksa Pasal 156 Ayat (1) KUHP.

¹⁰⁹ *Ibid*.

¹¹⁰ Dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHP istilahnya bukan putusan sela, tetapi keputusan.

dan akan dimuat dalam putusan akhir.

- 2) Dibuat secara khusus dalam suatu naskah putusan untuk putusan sela yang memerlukan pertimbangan yang rumit/kompleks, majelis hakim biasanya menyusun putusan sela secara sistematis dalam suatu naskah putusan yang dibacakan dalam sidang.

Secara garis besar ada tiga macam kemungkinan isi putusan sela:¹¹¹

- 1) Eksepsi terdakwa/penasihat hukum diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.
- 2) Eksepsi terdakwa/penasihat hukum ditolak, sehingga terhadap perkara tersebut harus dilanjutkan.
- 3) Eksepsi terdakwa/penasihat hukum baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga sidang harus dilanjutkan.

Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan, hakim ketua menjelaskan seperlunya garis besar isi putusan sela, sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk mengambil sikap menerima atau akan mengajukan perlawanan.¹¹²

b. Perlawanan/Verzet

Menurut M. Yahya Harahap, *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga.¹¹³ Yahya Harahap menjelaskan dalam praktik, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih bahwa barang yang disita adalah milik pihak ketiga.

Dalil dan keberatan itu pada umumnya tidak dihiraukan pengadilan atas alasan. Sekiranya barang itu benar milik pihak ketiga, ia dapat mengajukan keberatan melalui upaya *derden verzet*. Ternyata, meskipun sita telah diletakkan di atasnya, tidak ada muncul perlawanan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, cukup alasan untuk menduga, harta tersebut milik tergugat bukan milik pihak ketiga.

111 Periksa: ketentuan pasal 156 ayat (2) KUHAP.

112 Baca: prosedur pengajuan perlawanan terhadap putusan sela dalam Pasal 156 ayat (3) sampai ayat (7) KUHAP.

113 M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, hlm. 299.

ketiga? Yahya Harahap menjelaskan bahwa pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Beslag* yang sering disingkat CB (sita jaminan).

Demikian penegasan Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*.¹¹⁴ Menurut Yahya Harahap, *derden verzet* atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996K/Pdt/1989 bahwa *derden verzet* yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.

Selain itu, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slman. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Apakah pihak Pelawan (pihak ketiga yang dirugikan atas sita jaminan) dapat menarik pihak lain menjadi terlawan ataupun turut terlawan, padahal diketahui terlawan/turut terlawan dimaksud bukan pihak dalam sengketa awal?

Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para

114 *Ibid.*, hlm. 299-300.

dan akan dimuat dalam putusan akhir.

- 2) Dibuat secara khusus dalam suatu naskah putusan untuk putusan sela yang memerlukan pertimbangan yang rumit/kompleks, majelis hakim biasanya menyusun putusan sela secara sistematis dalam suatu naskah putusan yang dibacakan dalam sidang.

Secara garis besar ada tiga macam kemungkinan isi putusan sela:¹¹¹

- 1) Eksepsi terdakwa/penasihat hukum diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.
- 2) Eksepsi terdakwa/penasihat hukum ditolak, sehingga terhadap perkara tersebut harus dilanjutkan.
- 3) Eksepsi terdakwa/penasihat hukum baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga sidang harus dilanjutkan.

Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan, hakim ketua menjelaskan seperlunya garis besar isi putusan sela, sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk mengambil sikap menerima atau akan mengajukan perlawanan.¹¹²

b. Perlawanan/Verzet

Menurut M. Yahya Harahap, *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga.¹¹³ Yahya Harahap menjelaskan dalam praktik, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih bahwa barang yang disita adalah milik pihak ketiga.

Dalil dan keberatan itu pada umumnya tidak dihiraukan pengadilan atas alasan. Sekiranya barang itu benar milik pihak ketiga, ia dapat mengajukan keberatan melalui upaya *derden verzet*. Ternyata, meskipun sita telah diletakkan di atasnya, tidak ada muncul perlawanan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, cukup alasan untuk menduga, harta tersebut milik tergugat bukan milik pihak ketiga.

111 Periksa: ketentuan pasal 156 ayat (2) KUHAP.

112 Baca: prosedur pengajuan perlawanan terhadap putusan sela dalam Pasal 156 ayat (3) sampai ayat (7) KUHAP.

113 M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, hlm. 299.

ketiga? Yahya Harahap menjelaskan bahwa pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Beslag* yang sering disingkat CB (sita jaminan).

Demikian penegasan Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*.¹¹⁴ Menurut Yahya Harahap, *derden verzet* atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996K/Pdt/1989 bahwa *derden verzet* yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.

Selain itu, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Sltn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Apakah pihak Pelawan (pihak ketiga yang dirugikan atas sita jaminan) dapat menarik pihak lain menjadi terlawan ataupun turut terlawan, padahal diketahui terlawan/turut terlawan dimaksud bukan pihak dalam sengketa awal?

Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para

114 *Ibid.*, hlm. 299-300.

pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara.

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatan bahwa tidak mungkin membiarkan harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh terlawan (awalnya tergugat), dapat menarik pihak lain menjadi terlawan ataupun turut terlawan yang bukan pihak dalam sengketa awal.

Pelawan dalam *derden verzet* (pihak ketiga) sebenarnya merupakan pihak yang tidak ada pada sengketa awal antara penggugat dan tergugat, tetapi yurisprudensi sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia (melalui Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991) yang telah dijelaskan, memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan *derden verzet* agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik objek yang terkena sita jaminan (CB).

Apabila pelawan (pihak ketiga) menarik pihak lain, menurut penulis tidak akan ada relasinya, baik terhadap perkara pokok maupun sita jaminan yang diupayakan dalam *derden verzet*. Kalaupun muncul pihak baru yang dianggap membawa kerugian bagi pelawan (pihak ketiga) yang mengajukan *derden verzet*, melihat dari prinsip penyelesaian perkara yang pada dasarnya hanya menyangkut pihak-pihak di dalamnya (Pasal 1340 KUHPerdara), upaya hukum yang dapat dilakukan pelawan (pihak ketiga) terhadap pihak baru yang muncul itu bukanlah *derden verzet*, tetapi berbentuk gugatan perkara biasa. Adapun upaya hukum perlawanan ini digunakan terhadap hal-hal berikut.

- 1) Ketua Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum yang dapat menggunakan upaya hukum perlawanan terhadap Penetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut adalah Penuntut Umum yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan tadi.
- 2) Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menerima Eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya yang dapat menggunakan upaya hukum perlawanan terhadap putusan hakim itu adalah penuntut umum yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- 3) Putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pelanggaran Undang-Undang lalu lintas jalan (Acara Pemeriksaan Cepat) yang terdakwa tidak dapat hadir di mana putusannya berupa

perampasan kemerdekaan yang dapat menggunakan upaya hukum perlawanan terhadap putusan Hakim itu adalah terdakwa yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, bukan kepada pengadilan tinggi.

- 4) Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum perlawanan ini adalah 7 (tujuh) hari setelah penetapan/putusan dijatuhkan/dikeluarkan/diterima.

6. Mengenai Pembuktian/Pemeriksaan Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian memiliki peran penting. Hal ini disebabkan di sinilah proses yang akan membuat terang perbuatan pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan apakah benar perbuatan pidana yang didakwa itu dilakukan oleh terdakwa yang didakwakan tersebut.

Pembuktian dalam hukum acara pidana ditujukan untuk mencapai atau mewujudkan dari tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil dan pada akhirnya tercapailah suatu ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Untuk mendukung proses pembuktian tersebut, haruslah berpedoman juga pada asas-asas yang berlaku pada proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), asas pemeriksaan akusatoir, sebagai konsekuensi dari adanya asas praduga tidak bersalah tersebut, terdakwa sebagai subjek dalam semua tingkat pemeriksaan tidak dibebani dengan beban pembuktian.¹¹⁵

Oleh karena itu, tersangka/terdakwa diberi kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya¹¹⁶ dan penuntut umum memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terhadap diri terdakwa. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar

¹¹⁵ M.Yahya Harahap, 2003.

¹¹⁶ Darwan Prinst, 1998.

pembuktian bahwa pihak yang mendakwakan, pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah sebagai berikut.

1) Keterangan Saksi (*Verklaringen Van Een Getuige*)

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi semua orang, kecuali dikecualikan atau ditentukan lain oleh Undang-Undang dan apabila seseorang yang diminta untuk memberikan kesaksian, tapi tidak memenuhinya, maka ia dapat dikenakan pidana.¹¹⁷ Ada beberapa tata cara dalam pemeriksaan saksi, yaitu:

- a) Saksi dipanggil satu persatu menurut urutan sebaiknya oleh hakim dan diperiksa identitas saksi.¹¹⁸
- b) Saksi wajib mengucapkan sumpah:
 - (1) Sumpah diberikan sebelum memberi keterangan.¹¹⁹
 - (2) Sumpah diberikan sesudah memberi keterangan.¹²⁰
- c) Sumpah dapat diucapkan di luar sidang.¹²¹
- d) Penolakan sumpah dapat dikenakan sandera.¹²²
- e) Keterangan saksi disidang berbeda dengan berita acara.¹²³
- f) Terdakwa dapat membantah atau membenarkan keterangan saksi.¹²⁴
- g) Kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa (Pasal 165 KUHP).¹²⁵
- h) Larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat.¹²⁶

117 Perhatikan Pasal 159 Ayat (2) KUHP.

118 Perhatikan Pasal 160 Ayat (1) KUHP.

119 Perhatikan Pasal 160 Ayat (3) KUHP.

120 Perhatikan Pasal 160 Ayat (4) KUHP.

121 Perhatikan Pasal 233 Ayat (1) KUHP.

122 Perhatikan Pasal 161 KUHP.

123 Perhatikan Pasal 185 Ayat (1) KUHP.

124 Perhatikan Pasal 164 Ayat (1) KUHP.

125 Perhatikan Pasal 165 KUHP.

126 Perhatikan Pasal 166 KUHP.

- j) Yang tidak dapat didengar sebagai saksi.¹²⁸
- k) Mereka yang dapat minta dibebaskan menjadi saksi.¹²⁹
- l) Mereka yang boleh memberi keterangan tanpa sumpah.¹³⁰
- m) Pemeriksaan saksi dapat didengar tanpa hadirnya terdakwa.¹³¹
- n) Keterangan saksi palsu.¹³²
- o) Pemeriksaan saksi dan terdakwa dapat dilakukan dengan juru bahasa dan penerjemah.¹³³

Berdasarkan Pasal 185 KUHP, keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di muka persidangan sehingga keterangan yang diberikan di muka persidangan itulah yang menjadi alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Sehubungan dengan prinsip satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP, yaitu satu orang yang menjadi saksi tidaklah dapat dijadikan alat bukti bagi majelis hakim untuk memutuskan tentang kebenaran peristiwa pidana itu terjadi, sehingga hakim haruslah mendengar 2 orang saksi. Akan tetapi, berdasarkan Putusan MA No. 81/K/Kr/1956 tanggal 9 November 1957, "Jika terdakwa di sidang pengadilan negeri telah mengaku atas segala yang didakwakan (dituduhkan) kepadanya, maka oleh karena itu, hakim cukup mendengar seorang saksi saja."

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

127 Perhatikan Pasal 167 KUHP.

128 Perhatikan Pasal 168 Huruf (a) KUHP.

129 Perhatikan Pasal 170 Ayat (1) dan (2) KUHP.

130 Perhatikan Pasal 171 KUHP.

131 Perhatikan Pasal 173 KUHP.

132 Perhatikan Pasal 174 KUHP.

133 Perhatikan Pasal 177 KUHP.

a) Syarat formal

- (1) Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan.¹³⁴
- (2) Seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa sumpah dan dianggap sebagai keterangan biasa.¹³⁵

b) Syarat materiel

- (1) Melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.¹³⁶
- (2) Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu.¹³⁷
- (3) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa/asas unus testis nullus testis.¹³⁸

Dalam perkembangan kasus-kasus pidana yang terjadi dalam proses peradilan pidana, ditemukan istilah-istilah saksi yang sebenarnya tidak ada dasar pengaturan hukumnya, baik di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, di antaranya *saksi terlibat* dan *saksi mahkota*.

Penggunaan istilah *saksi terlibat* dapat terlihat dari keterangan yang disampaikan oleh Jampidsus Marwan Effendy dalam keterangannya terkait kasus Policarpus dan kasus yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra dalam perkara Sisminbakum. Adapun penggunaan istilah *saksi mahkota* terdapat dalam beberapa kasus korupsi. Istilah saksi tersebut muncul karena adanya ketentuan Pasal 142 KUHAP yang mengatur tentang pemisahan perkara (*splitsing*), yaitu karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan dalam menguatkan dakwaan yang dibuat oleh JPU.

134 Perhatikan Pasal 160 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP

135 Perhatikan Pasal 171 butir (a) KUHAP.

136 Perhatikan Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP.

137 Perhatikan Pasal 1 butir 27 KUHAP.

138 Perhatikan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan penyidik ataupun JPU untuk menemukan alat bukti yang akan membuktikan bahwa tersangka/terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Dengan adanya pemisahan berkas perkara, keterangan terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang berbeda berkas perkaranya dapat dijadikan sebagai keterangan saksi untuk perkara lain yang serupa untuk dijadikan sebagai alat bukti terhadap terdakwa lainnya yang berbeda berkas dengan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai saksi tersebut.

Secara normatif, penggunaan saksi terlibat dan saksi mahkota ini merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Dalam beberapa kasus, keterangan saksi berdasarkan pemisahan perkara ini yang juga sebagai terdakwa dapat dijadikan sebagai keterangan yang memberatkan (*a charge*). Hal ini karena berdasarkan keterangan itulah, JPU mendakwakan terdakwa lainnya di dalam berkas perkara yang lain.

Selain itu, menurut penulis, bukti ketidakmampuan JPU untuk menemukan dan mengajukan alat bukti lainnya adalah tidak diadikannya saksi *a charge* di depan sidang pengadilan sehingga keterangannya hanya berdasarkan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang pada akhirnya dibacakan di depan sidang pengadilan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, yaitu "*keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.*"

Selain itu, Pasal 162 Ayat (1) KUHAP memberi pengecualian apabila saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam BAP di tingkat penyidikan tidak dapat hadir karena:

- a) meninggal dunia atau karena ada halangan yang sah.
- b) tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang.
- c) adanya tugas atau kewajiban dari negara yang dibebankan kepadanya.

Maka keterangan yang telah diberikan di tingkat penyidikan tersebut dapat atau boleh dibacakan di persidangan. Pertanyaannya adalah apakah keterangan yang bukan disampaikan di sidang pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa apa yang didakwakan terhadap diri terdakwa adalah benar? Menurut Eddy O.S. Hiarije, pemeriksaan saksi

yang menguntungkan tersangka wajib dilakukan apalagi jika saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang relevan dengan perkara yang diproses penegak hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kecurangan dalam proses penegakan hukum.

Karena hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif, konsekuensinya adalah apabila dianggap perlu, hakim bisa memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan seorang saksi. Adapun pengajuan alat bukti adalah hak penuntut umum dan hak terdakwa atau penasihat hukumnya sehingga penolakan pengajuan alat bukti harus benar-benar dipertimbangkan dan beralasan.

Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 184 KUHP yang menyebutkan, alat bukti yang sah terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Pasal 187 Huruf (a) KUHP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi ("BAP Saksi") merupakan alat bukti surat. BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar negeri oleh Pejabat Asing.

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya menjadi pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Merujuk pada Pasal 187 Huruf (a) KUHP, BAP merupakan alat bukti surat, termasuk berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing. Banyak ahli hukum juga setuju bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 Huruf (a) KUHP. Bahkan, R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. Ia mengatakan:

"Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakikatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah."

Beberapa hal yang menjadi isu terkait kekuatan pembuktian BAP Saksi di persidangan adalah sebagai berikut.

a) **Pembacaan BAP Saksi di Depan Persidangan**

Pembacaan BAP Saksi di depan persidangan sering terjadi dalam praktik pembuktian di persidangan. Pada prinsipnya, KUHP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Pasal 162 KUHP, KUHP memberikan pengecualian dengan ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, Pasal 162 Ayat (1) KUHP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yaitu BAP Saksi, bilamana saksi yang bersangkutan:

1. meninggal dunia;
2. berhalangan hadir karena alasan yang sah;
3. tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; dan
4. ada kepentingan negara.

Keempat alasan ini bersifat limitatif, yaitu bahwa BAP Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya jika alasan tersebut dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, BAP Saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan. Pasal 185 Ayat (1) KUHP telah menentukan dengan tegas bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan.

Fenomena ini sering terjadi di dalam praktik peradilan di Indonesia karena penuntut umum yang bersangkutan tidak mampu menghadirkan saksi-saksi di persidangan, khususnya terhadap saksi yang memberatkan (*a charge*).

Adapun bagi pihak terdakwa atau penasihat hukum, pembacaan BAP Saksi ini selalu dijadikan kesempatan untuk menyangkal keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam BAP Saksi. Alasan-alasan yang dipergunakan adalah bahwa keterangan di dalam BAP Saksi telah diberikan karena terpaksa atau pemeriksaan dilakukan dengan kekerasan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia sering terjadi keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan saksi. Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini, keterangan di depan persidangan lebih diutamakan.

Apabila yang diutamakan adalah keterangan dalam BAP Saksi, otomatis dakwaan penuntut umum terbukti semua. Apabila terjadi hal seperti ini, hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP tersebut untuk diperiksa di depan persidangan.

Berdasarkan Pasal 163 KUHAP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP Saksi, tetapi hal yang penting di sini adalah setiap seorang saksi yang diperiksa harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut.

Di sinilah letak peran hakim sebagai hakim yang aktif dalam mencari kebenaran materiel yang merupakan ciri khas hakim pada sistem peradilan pidana negara yang menganut sistem *civil law*. Ketika terjadi perbedaan keterangan yang diberikan saksi, hakim harus melihat apakah keterangan atau alasan yang diberikan saksi secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut.

c) *Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan*

Hal menarik selanjutnya adalah seorang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dapat menarik (mencabut) keterangannya yang telah ia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik.

Tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang "ditarik/dicabut" di muka persidangan. Jika seorang saksi "menarik/mencabut" keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, berakulah ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk.¹³⁹

¹³⁹ Perhatikan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.

2) *Keterangan Ahli (Verklaringen Van Een Deskundige)*

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁴⁰ Dalam KUHAP juga diatur mengenai kewajiban memberikan keterangan ahli¹⁴¹ dan nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli.¹⁴²

Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti itu sama dengan saksi lainnya, yaitu sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, penentuan kualifikasi seorang ahli diputuskan oleh hakim dengan proses pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*).

Kekuatan pembuktian seorang ahli dapat dilihat saat proses pengangkatan sumpah sebelumnya, serta keterangan seorang ahli tidak dapat menjadi alat bukti yang mutlak akan tetapi, harus disertai dengan alat bukti lain dalam proses pembuktiannya yang dalam hal ini hakim sangat berperan penting sesuai nalar, apakah menyertakan pertimbangan keterangan ahli atau tidak dalam pengambilan keputusan untuk mencari kebenaran materiel berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat (*Wysum Et Repertum*) yang dijelaskan oleh seorang ahli.¹⁴³

3) *Surat (Schriftelijke Bescheiden)*

Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim (*volledig en beslissende bewijskracht*). Akan tetapi, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal dan pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya. Menurut Pasal 187 KUHAP, yang termasuk surat adalah:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

¹⁴⁰ Perhatikan Pasal 1 butir 28 KUHAP.

¹⁴¹ Perhatikan Pasal 179 KUHAP.

¹⁴² Perhatikan Pasal 183 dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.

¹⁴³ Perhatikan Pasal 186 KUHAP.

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Oleh karena itu, secara formal, alat bukti surat tersebut di atas adalah alat bukti yang sempurna.

4) **Petunjuk (*Eigen Waarneming Van De Rechter*)**

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Mengenai cara memperoleh alat bukti petunjuk ini, dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a) keterangan saksi;
- b) surat;
- c) keterangan terdakwa.

5) **Keterangan Terdakwa (*Verklaringen Van De Verdachte*)**

Berdasarkan Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat prinsip dari keterangan terdakwa, maka terhadap terdakwa tidak boleh diajukan pertanyaan yang bersifat menjerat.¹⁴⁴

Pada dasarnya setiap keterangan terdakwa dapat diberikan di dalam dan di luar sidang. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah keterangan terdakwa di hadapan sidang. Adapun setiap keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam sidang, selama didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya.

¹⁴⁴ Perhatikan Pasal 166 KUHAP.

Adapun keterangan terdakwa sebagai alat bukti, tanpa disertai oleh alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini merupakan ketentuan beban minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Setelah pemeriksaan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan.¹⁴⁵ Akan tetapi, pemeriksaan yang telah dinyatakan tertutup tersebut dapat dibuka sekali lagi sebelum dibacakannya tuntutan oleh Penuntut Umum, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.¹⁴⁶

d. **Sidang Pembuktian**

Apabila hakim/majelis hakim menetapkan dalam putusan sela sidang pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terhadap alat-alat¹⁴⁷ dan barang bukti¹⁴⁸ yang diajukan.

Keseluruhan proses peradilan pidana tahap pembuktian ini sangat penting karena hasil pembuktian ini akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam putusan. Pentingnya tahap sidang pembuktian ini, digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan,

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."

Dari Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya seseorang dan selanjutnya hakim

¹⁴⁵ Perhatikan Pasal 182 Ayat (1) KUHAP.

¹⁴⁶ Perhatikan Pasal 182 Ayat (2) KUHAP.

¹⁴⁷ dalam Pasal 184 KUHAP ditentukan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

¹⁴⁸ Barang bukti adalah sesuatu barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung alat bukti, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya, barang yang merupakan objek delik, hasil delik maupun alat/sarana, untuk melakukan delik.

menjatuhkan pidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) kesalahan dipandang telah terbukti jika telah dipenuhi, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- 2) sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan yang melakukan adalah terdakwa.

Dengan memerhatikan isi Pasal 183 KUHP, jelaslah bahwa KUHP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*) dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke*).

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini, keterbuktian itu tidak cukup hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga harus ada keyakinan hakim.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bersalah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ditentukan oleh dua komponen:

- 1) pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara, dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- 2) keyakinan hakim harus didasarkan atas ketentuan, cara, dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Pada persidangan tahap pembuktian ini, penuntut umum dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHP. Pengajuan alat bukti oleh penuntut umum ini dimaksudkan untuk meneguhkan dan membuktikan dakwaannya. Sebaliknya, terdakwa/penasihat hukum diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat-alat bukti yang sama untuk melemahkan dakwaan penuntut umum terhadap dirinya.

8. Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum

Apabila sidang tahap pembuktian dinyatakan selesai, hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana.¹⁴⁹ Tuntutan pidana yang dibuat penuntut umum pada hakikatnya merupakan kesimpulan yang diambil dari fakta yang terungkap di persidangan menurut versi penuntut umum, disertai dengan tuntutan sanksi pidana/atau tindakan yang akan dijatuhkan pada terdakwa.¹⁵⁰

Tuntutan pidana ini diajukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Karena surat tuntutan pidana dilakukan secara tertulis dan merupakan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan di persidangan, dengan sendirinya tuntutan pidana tersebut harus disusun dalam surat tuntutan pidana secara sistematis.

KUHP tidak menentukan syarat-syarat penyusunan surat tuntutan pidana, tetapi berdasarkan pengamatan penulis dalam persidangan pidana, secara umum surat tuntutan pidana harus lengkap menggambarkan/memuat:

- 1) identitas terdakwa;
- 2) dakwaan;
- 3) fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan diawali dengan uraian tentang:
 - a) keterangan saksi-saksi;
 - b) keterangan ahli, surat dan petunjuk (jika ada);
 - c) keterangan terdakwa;

¹⁴⁹ Baca Pasal 182 ayat (1) a KUHP.

¹⁵⁰ Al, Wisnubroto, *Praktik Paradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Bekasi: Galaxy Pustaka Nusa, hlm. 78.

- d) barang bukti yang diajukan di persidangan;
- 4) analisis yuridis (pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan);
- 5) aspek pertimbangan pemidanaan (hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa);
- 6) amar tuntutan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa terbukti atau tidak terbukti, lamanya pidana yang akan dijatuhkan atau pembebasan terdakwa. Selain itu, juga hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti, penahanan, dan lain-lain.

Isi tuntutan pidana tidak selalu berupa penjatuhan pidana, bergantung pada hasil pembuktian penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum, fakta yang terungkap di persidangan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan ia dapat mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana.

Apabila fakta di persidangan menunjukkan unsur dakwaan yang tidak terpenuhi, secara objektif penuntut umum harus menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan dalam tuntutanannya ia harus mengajukan permohonan agar majelis hakim membebaskan terdakwa.

f. Pengajuan/Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi)

Pengajuan pembelaan merupakan salah satu hak yang diberikan kepada terdakwa dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) di samping hak terdakwa untuk menanggapi setiap keterangan yang diajukan saksi-saksi. Dalam kaitannya dengan prosedur pemeriksaan perkara pidana, pembelaan menurut KUHAP merupakan jawaban terdakwa/penasihat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum kepadanya.

KUHAP tidak mengatur secara terperinci hakikat pembelaan dan syarat sahnya nota pembelaan. Akan tetapi, dalam praktik peradilan di Indonesia, pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara langsung merupakan pembelaan bebas. Artinya, pembelaan tersebut mengemukakan sangkalan, tanggapan atas tuntutan penuntut umum yang disertai dengan ungkapan situasi kondisi mengenai dirinya, keluarganya, dan rasa penyesalannya. Hal itu diajukan agar ia tidak dihukum atau sekadar untuk memohon keringanan hukuman. Berbeda halnya dengan pembelaan yang diajukan

melalui penasihat hukum yang pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, dan logis.

Biasanya sangkalan atas tuntutan penuntut umum disertai dasar bukti/fakta yang terungkap selama persidangan yang relevan dan disertai analisis yuridis yang akurat. Pembelaan seperti ini sangat menolong majelis hakim dalam menyusun putusan sehingga tidak mudah terbawa arus menuruti kemauan penuntut umum sebagaimana tertera dalam tuntutan pidananya.

g. Pengajuan Tanggapan-tanggapan (Replik dan Duplik)

Setelah terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaan, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada pihak jaksa penuntut umum untuk menanggapi pembelaan tersebut. Tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa/penasihat hukum tersebut dinamakan replik.

Selanjutnya, atas replik penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi. Tanggapan terdakwa/penasihat hukum atas replik penuntut umum dalam perkara pidana disebut duplik. Dalam praktik persidangan, penulis sering mendapati replik dan duplik ini disampaikan secara singkat (secara lisan ataupun tertulis), yaitu langsung menanggapi poin-poin yang dipandang perlu karena ada perbedaan pendapat disertai dengan argumentasinya.

Berbeda dengan perkara perdata, dalam perkara pidana, hal-hal yang tidak ditanggapi tidak secara otomatis dianggap sebagai pengakuan atau suatu kebenaran. Hal ini disebabkan tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah menemukan kebenaran materiel sehingga pada akhirnya, semuanya diserahkan pada penilaian hakim yang tertuang dalam pertimbangan putusannya terhadap semua hal yang diajukan selama proses persidangan.

h. Sidang Pembacaan Putusan Pengadilan

Tahap akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan perkara pidana adalah sidang pengambilan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan surat dakwaan. Segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan sebagai dasar pertimbangan dalam

putusan hakim harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim.¹⁵¹ Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara dalam persidangan terdiri atas sebagai berikut.

1) Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan dapat dilihat dari sudut pandang berikut.

a) Dilihat dari segi fungsinya

(1) Putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- (a) putusan gugur;
- (b) putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
- (c) putusan tidak menerima;
- (d) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

(2) Putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan. Hal-hal yang dinilai penting untuk diketahui pembaca kaitannya dengan putusan sela, yaitu sebagai berikut.

- (a) Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.
- (b) Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

¹⁵¹ Prosedur musyawarah hakim untuk mengambil putusan dapat dibaca pada Pasal 182 ayat (4) sampai dengan ayat (8) KUHAP.

- (c) Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.
- (d) Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.
- (e) Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat mengubahnya sesuai dengan keyakinannya.
- (f) Putusan sela tidak dapat dimintakan banding, kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
- (g) Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

b) Dilihat dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan dijatuhkan

(1) Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan.

Putusan gugur dapat dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat:

- (a) penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu;
- (b) penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakili orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah;
- (c) tergugat/termohon hadir dalam sidang;
- (d) tergugat/termohon mohon keputusan.

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, hakim dapat menjatuhkan putusan gugur. Dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara meskipun putusan ini dapat dimintakan banding.

- (2) Putusan verstek, adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir. Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan, sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat:

- (a) tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang;
- (b) tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakili orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah;
- (c) tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan;
- (d) penggugat hadir dalam sidang;
- (e) penggugat mohon keputusan.

Putusan verstek hanya bernilai secara formal surat gugatan dan belum menilai secara materiel kebenaran dalil-dalil tergugat.

Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak, putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan dalil-dalil gugat, karena dibantah, harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan, kecuali dalam perkara perceraian.

Apabila gugatan itu tidak beralasan dan/atau melawan hak, putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat. Di sini tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*) dan ia tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *verzet*nya, kecuali jika penggugat yang dapat mengajukan banding.

Apabila penggugat mengajukan banding, tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*. Apabila tergugat mengajukan *verzet*, putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu perlawanan (*verzet* berkedudukan sebagai jawaban tergugat).

Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, hakim akan

membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Akan tetapi, jika perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, dalam putusan akhir akan menguatkan verstek.

- (3) Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Hal ini karena dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa, baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang meskipun putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

e) Dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara

- (1) Putusan tidak menerima, yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon. Dengan kata lain, gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formal maupun materiel.

Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat meskipun tidak ada eksepsi. Hakim dapat memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan/atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban.

Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat), tetapi baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi, gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa, dan putusan ini berlaku sebagai putusan akhir meskipun putusan ini, khususnya pihak tergugat, dapat mengajukan banding.

- (2) Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan di mana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

- (3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya

Dalam kasus ini dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:

- dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan;
- dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak;
- dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.

- (4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti, untuk mengabulkan suatu tuntutan (*Petitum*) harus didukung dalil gugat.

Satu tuntutan (*Petitum*) mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila di antara dalil-dalil gugat itu sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan, telah cukup untuk dibuktikan meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti, prinsip utamanya dari putusan ini adalah setiap tuntutan (*Petitum*) harus didukung oleh dalil gugat.

d) Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan

- (1) Putusan diklatoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam bentuk penetapan. Putusan diklatoir tidak mengubah atau menciptakan hukum baru, tetapi hanya memberikan kepastian hukum terhadap keadaan yang telah ada.
- (2) Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, yang berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan konstitutif berkaitan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan konstitutif biasanya menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan, dan sebagainya.

- (3) Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.

Putusan kondemnatoir menyebutkan, "menghukum" dan memerlukan eksekusi, apabila pihak ter hukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.

Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta-merta). Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk:

- (a) menyerahkan suatu barang;
- (b) membayar sejumlah uang;
- (c) melakukan suatu perbuatan tertentu;
- (d) menghentikan suatu perbuatan/keadaan;
- (e) mengosongkan tanah/rumah.

2) Penetapan

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

3) Akta Perdamaian

Akta Perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Ada tiga kemungkinan putusan hakim pengadilan, yaitu sebagai berikut.

- a) Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terdakwa dinyatakan dalam putusan bahwa perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b) Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- c) Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Perbuatan terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan pemaaf pada diri terdakwa.¹⁵²

Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dan menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan itu, hakim ketua sidang menawarkan pada terdakwa untuk menentukan sikapnya, untuk menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau berpikir-pikir. Hal serupa diberikan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan kepada jaksa penuntut umum. Dalam dunia peradilan, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu:

- a) putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang;
- b) putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan;
- c) putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap;
- d) eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.

Selanjutnya dalam mengeksekusi putusan pengadilan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

- a) putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:
 - (1) pelaksanaan putusan serta-merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu;
 - (2) pelaksanaan putusan provinsi;
 - (3) pelaksanaan akta perdamaian;
 - (4) pelaksanaan Grose Akta.
- b) Putusan tidak dijalankan oleh pihak terdakwa secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh ketua pengadilan agama.

- c) Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir sehingga dalam putusan diklaratoir dan konstitutif tidak diperlukan eksekusi.
- d) Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan agama.

Adapun pihak yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama. PTA tidak berwenang melaksanakan eksekusi. Tata cara sita eksekusi, yaitu sebagai berikut.

- a) Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan.
- b) Berdasarkan surat perintah ketua pengadilan agama, surat perintah dikeluarkan apabila:
 - (1) tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah;
 - (2) tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
- c) Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita.
- d) Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi:
 - (1) keharusan adanya dua saksi merupakan syarat sah sita eksekusi;
 - (2) dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi;
 - (3) nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi;
 - (4) saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat:
 - (a) telah berumur 21 tahun;
 - (b) Berstatus penduduk Indonesia;
 - (c) Memiliki sifat jujur.
- e) Sita eksekusi dilakukan di tempat objek eksekusi.
- f) Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat hal berikut.
 - (1) Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua saksi.
 - (2) Memerinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan.
 - (3) Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua saksi.

¹⁵² Baca Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP.

- (4) Pihak tersita dan kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menandatangani berita acara sita.
- (5) Isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika tidak hadir, dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya.
- g) Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut.
 - (1) Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan tersita.
 - (2) Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat dilakukan penjualan lelang.
 - (3) Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain.
 - (4) Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita.
 - (5) Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita.
- h) Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.

F. Tahap Setelah Persidangan

1. Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Biasa (Pasal 233–Pasal 258 KUHAP)

1) Banding (Pasal 233–Pasal 243 KUHAP)

Pasal 233–Pasal 243 KUHAP memberikan hak kepada terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas murni dari segala dakwaan (*vrijpraak*), dan putusan bebas tidak murni dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolgging*) yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, seperti putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah mengoreksi, dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta, dan pembuktian. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan banding sebagai berikut.

- a) Diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.
- b) Diajukan masih masa tenggang waktu banding. Masa tenggang banding, yaitu 14 hari terhitung dari tanggal pembacaan putusan. Namun, jika pihak yang mengajukan banding tidak hadir pada saat pembacaan putusan, tenggang waktu 14 hari dihitung sejak pemberitahuan amar putusan kepada pihak yang bersangkutan.
- c) Setiap putusan pengadilan negeri tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding.

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon banding:

- a) Permohonan Banding disampaikan secara tertulis/lisan kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- b) Membayar biaya perkara Banding.¹⁵³
- c) Panitera memberitahukan adanya permohonan Banding.¹⁵⁴
- d) Pemohon Banding dapat mengajukan memori Banding dan termohon Banding dapat mengajukan memori Banding.¹⁵⁵
- e) Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.¹⁵⁶
- f) Berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung tingkat provinsi selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterima perkara Banding.
- g) Salinan putusan dikirim oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung provinsi ke Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang memeriksa

¹⁵³ Perhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

¹⁵⁴ Perhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947.

¹⁵⁵ Perhatikan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor tahun 1947.

¹⁵⁶ Perhatikan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947.

perkara pada tingkat pertama dan disampaikan kepada para pihak.

- h) Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung menyampaikan putusan kepada masing-masing pihak.
- i) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera:
 - (1) untuk perkara cerai talak:
 - (a) Memberitahukan tentang Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.
 - (b) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari.
 - (2) untuk perkara cerai gugat:
 - (a) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari.

Penguatan putusan dapat dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Adapun prosedur dan proses pemeriksaan tingkat Banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding seperti yang ditentukan Pasal 67 jo Pasal 233 Ayat (1) KUHP.¹⁵⁷

Pasal 67 jo Pasal 233 Ayat (1) KUHP¹⁵⁸ tersebut merupakan penjabaran Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan Banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diperluas dengan Pasal 67 KUHP¹⁵⁹ bahwa putusan yang tak dapat diminta Banding bukan hanya putusan bebas (*Vrijspraak*) tapi juga putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechts Vervolging*). Akan tetapi, pada kedua hukum itu jelas bahwa upaya hukum

Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap semua putusan Pengadilan Negeri sebagai instansi peradilan yang memutus pada tingkat pertama.

Adapun letak pengertian upaya hukum biasa terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan Banding sehingga permintaan dan pemeriksaan tingkat Banding merupakan hal yang umum dan biasa serta dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap "putusan bebas" atau "*Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*" serta "*Putusan Acara Cepat*".

Pada prinsipnya, semua putusan akhir (*final judgement*) Pengadilan Negeri dapat diajukan permintaan Banding, kecuali ditegaskan dalam Pasal 67 KUHP¹⁶⁰ tersebut. Adapun putusan akhir pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan pemeriksaan pada tingkat Banding adalah sebagai berikut.

- 1) Putusan Pemidanaan dalam Acara Biasa

Putusan pemidanaan dalam acara biasa sekalipun sifat putusan pemidanaan itu berupa "percobaan" atau "pidana bersyarat" seperti yang diatur dalam Pasal 14 Huruf (a) KUHP terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan Banding.

- 2) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima dalam Acara Biasa dan Singkat

Menurut penulis, setiap dakwaan yang diajukan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana atau jika dakwaan diajukan setelah lampau waktu dan sebagainya, putusan pengadilan menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.

- 3) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Terhadap putusan yang dakwaan batal demi hukum, baik dalam acara biasa maupun acara singkat, penuntut umum dapat mengajukan permintaan Banding. Contohnya, putusan pengadilan menyatakan dakwaan batal demi hukum karena dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf (b) KUHP terhadap putusan ini dapat dimintakan Banding.

157 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, *op.cit.*, hlm. 326.

158 *Ibid.*, hlm. 326-330.

159 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 259.

160 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 259.

4) Putusan Perampasan Kemerdekaan dalam Acara Cepat

Pasal 205 Ayat (3)¹⁶¹ dan Pasal 214 Ayat (8)¹⁶² menegaskan bahwa terdakwa dapat mengajukan banding jika dirinya dijatuhkan putusan pidana perampasan kemerdekaan.

5) Putusan Pemidanaan dalam Acara Singkat

Putusan pemidanaan dalam acara biasa terhadap putusan pemidanaan dalam acara singkat, sekalipun pidana bersyarat, dapat dimintakan Banding oleh terdakwa dan penuntut umum.

6) Putusan Praperadilan terhadap Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Putusan Praperadilan terhadap Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan biasanya terjadi setelah mengutarakan putusan yang dapat di-Banding, maka ada putusan yang tidak dapat di-Banding, berpedoman pada Pasal 67 KUHP,¹⁶³ setiap putusan yang ditetapkan oleh hakim pengadilan tinggi mempunyai nilai kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, khusus dalam pembicaraan mengenai putusan yang tidak dapat diminta Banding, kita dapat menggunakan Pasal 67 KUHP. Adapun putusan yang tidak dapat diminta Banding adalah sebagai berikut.

a) Putusan Bebas atau Vrijspraak (*Acquitted*)

Pasal 191 Ayat (1) KUHP¹⁶⁴ menyebutkan apabila kesalahan terdakwa sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap putusan bebas yang demikian tidak dapat diajukan permintaan Banding.

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van rechts Vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum telah diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP¹⁶⁵, yaitu apabila pengadilan

berpendapat yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c) Putusan Acara Cepat

Putusan acara cepat yang diperiksa dengan acara tindak pidana ringan ataupun acara pelanggaran lalu lintas jalan tidak dapat diminta Banding.

Permohonan Banding dapat ditolak. Panitera dilarang menerima permintaan Banding yang tidak memenuhi syarat hukum berikut.

(1) Putusan yang tidak dapat diajukan Banding, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diperkenankan untuk dimintakan Banding, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan acara cepat.

(2) Permintaan Banding diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir, dasar hukum Pasal 233 Ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa tenggang waktu mengajukan Banding:

(a) Dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan.

(b) Dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan.

Adapun proses penolakan permintaan Banding oleh seorang panitera Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi tingkat pertama adalah sebagai berikut.

(1) Panitera membuat akta penolakan permohonan Banding. Penolakan harus dituangkan panitera dalam bentuk surat akta penolakan Banding, tidak cukup dilakukan dengan lisan.

(2) Akta penolakan ditandatangani oleh panitera dan pemohon.

(3) Serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(4) Berkas perkara tidak dikirim ke Pengadilan Tinggi.

161 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 316-317.

162 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 319.

163 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 259.

164 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 309.

165 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 309.

Penolakan demikian harus disertai bukti dan kepastian hukum tentang penolakan serta merupakan upaya pembinaan tata administratif peradilan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Setiap Permohonan Banding dalam perkara pidana sesuai Pasal 233 Ayat (2) KUHP harus memenuhi hal-hal berikut.

1. Membuat:
 - a. Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
 - b. Akta permintaan Banding.
 - c. Akta terlambat mengajukan permintaan Banding.
 - d. Akta pencabutan Banding.
2. Permintaan Banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register Banding oleh petugas.
3. Permintaan Banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
4. Permintaan Banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan Banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Dalam hal Pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Panitera wajib memberitahukan permintaan Banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
7. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori Banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relasi pemberitahuan.
8. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori Banding, sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi (PT), pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi (PT), sedangkan salinannya disampaikan

ke Pengadilan Negeri (PN) untuk disampaikan kepada pihak lain.

9. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri.
10. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh Pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
11. Berkas perkara Banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan Banding diajukan sesuai dengan Pasal 236 Ayat 1 KUHP,¹⁶⁶ harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi (PT).
12. Selama perkara Banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan Banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
13. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
14. Petugas register harus mencatat semua kegiatan berkenaan dengan perkara Banding ke dalam buku register.
15. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua dilakukan oleh Panitera Muda Pidana di bawah koordinasi Wakil Panitera.

Terkait dengan makna memori Banding adalah uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Dalam memori Banding tersebut, pemohon banding dapat mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penafsiran hukum dalam putusan. Bahkan, dapat mengemukakan hal baru atau fakta baru dan meminta kepada pengadilan tinggi melalui panitera untuk mengadakan pemeriksaan atas bukti baru yang diajukan.

¹⁶⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 327.

Sebaliknya, pada memori Banding yang diajukan pemohon Banding, pihak lain dapat mengajukan kontra memori Banding. Tujuan kontra memori Banding berupa risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori Banding yang dapat menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan di samping memori dan kontra memori Banding tersebut masih dapat disempurnakan dan disusul dengan tambahan memori atau tambahan kontra memori.

2) Kasasi (Pasal 244–Pasal 258 KUHP)

Kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa ataupun kepada penuntut umum jika terdakwa melalui kuasa hukumnya menilai putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim telah mengesampingkan haknya sesuai prinsip menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperoleh unsur kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur kesamaan di depan hukum. Pengajuan permintaan Kasasi ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA).¹⁶⁷

Hak mengajukan permintaan Kasasi yang diberikan oleh hukum terhadap terdakwa melalui kuasa hukum terdakwa dengan sendirinya menimbulkan kewajiban bagi kantor pengadilan untuk menerima permintaan Kasasi. Hal ini disebabkan permohonan Kasasi tersebut bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai, melainkan sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung (MA). Sekalipun permohonan Kasasi yang diajukan telah melampaui tenggang waktu 14 hari seperti yang diatur dalam Pasal 245 Ayat (1) KUHP,¹⁶⁸ Pengadilan Negeri tetap diwajibkan untuk menerima permohonan Kasasi tersebut. Demikian pula, seandainya permohonan Kasasi tidak dibarengi dengan memori Kasasi maupun terlambat menyampaikan memori kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 248 KUHP yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tetap menerima dan menyampaikan permohonan dan berkas perkara Kasasi untuk menilai sah tidaknya permohonan Kasasi hanya Mahkamah Agung (MA).

Oleh karena itu, setiap putusan pidana yang diberikan oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), kecuali terhadap putusan bebas murni (*Vrijpraak*).¹⁶⁹

Pasal 253 KUHP menegaskan pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHP ditujukan untuk menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Kasasi dalam setiap permohonan yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukum terdakwa dapat diterima dengan catatan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori. Kasasi tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa dengan ketentuan umum apabila tanpa memori Kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

Pemeriksaan perkara pidana oleh Mahkamah Agung (MA) pada peradil kasasi harus mempergunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP sebagai hukum acara.¹⁷⁰ Selanjutnya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 258 Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam KUHP hanya berlaku sebagai hukum acara Kasasi bagi lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman¹⁷¹ menegaskan Mahkamah Agung adalah peradil Kasasi bagi semua lingkungan peradil, sedangkan ketentuan Pasal 244 KUHP menegaskan, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), terdakwa atau penuntut

167 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri)*, Upaya Hukum dan Eksekusi, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 169.

168 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 331.

169 Perhatikan Pasal 253 KUHP, Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 335.

170 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 331-337.

171 Perhatikan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), kecuali terhadap putusan bebas.

Setiap putusan pidana pada tingkat terakhir, selain dari putusan Mahkamah Agung (MA) dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa atau penuntut umum, tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada persyaratan dan kondisi tertentu terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh pengadilan pada tingkat terakhir dapat diajukan permintaan pemeriksaan Kasasi oleh terdakwa dan penuntut umum kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap semua putusan pidana yang diambil oleh pengadilan tingkat terakhir.

Tujuan adanya Kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum. Di samping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) dalam peradilan Kasasi, adakalanya tindakan koreksi dapat menciptakan hukum baru (penemuan hukum) dalam bentuk yurisprudensi.

Tujuan lain pemeriksaan Kasasi adalah mewujudkan kesadaran keseragaman penerapan hukum (*Unified Legal Frame Work* dan *Unified Legal Opinion*). Dengan adanya putusan Kasasi yang menciptakan yurisprudensi akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum.

Melalui upaya hukum Kasasi, pihak terdakwa dapat terhindar dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda untuk memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimiliki oleh seorang hakim sebagai wakil tuhan untuk menciptakan keadilan di muka bumi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 259–Pasal 269)

Upaya hukum luar biasa mempunyai dasar hukum pada Pasal 259-269 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHP)

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain daripada Mahkamah Agung (MA) dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH).

Fungsi Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) adalah menjaga kesatuan hukum tidak bisa dibebankan semata pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam lingkungannya.

Mahkamah Agung (MA) hanya dapat menjaga kesatuan hukum dari putusan-putusan pengadilan yang berada di bawahnya jika putusan-putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi oleh para pihak yang bersengketa. Jika ada suatu putusan pengadilan yang mengandung kesalahan penerapan hukum, tetapi para pihak tidak mengajukan upaya hukum, MA tidak dapat melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Tata cara pengajuan permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) adalah sebagai berikut.¹⁷²

- a) Permohonan diajukan Jaksa Agung (JA) secara tertulis yang ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.
- b) Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) diwajibkan mengajukan memori kasasi dan selanjutnya diperlakukan seperti kasasi biasa.

2) Peninjauan Kembali (PK) (Pasal 263 KUHP)

Terhadap setiap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) secara bersamaan dengan memori Peninjauan Kembali (PK) dan disertai dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHP terhadap Mahkamah Agung (MA), yaitu sebagai berikut.¹⁷³

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas (lepas) dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam setiap putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi, hal atau keadaan sebagai dasar dan

¹⁷² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 206.

¹⁷³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 209-210.

alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selanjutnya, melalui 3 (ketiga) poin tersebut dengan dasar hukum Pasal 263 KUHAP, suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK). Jika permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung (MA) dapat menolak permintaan Peninjauan Kembali (PK) tersebut.

Permintaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana diwajibkan memenuhi persyaratan dan alasan Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu sebagai berikut.

1. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), dan dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya.
2. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak dibatasi waktu.
4. Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6. Terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali (PK) kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali (PK).
7. Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK), wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut kepada Penuntut Umum.

8. Masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
9. Terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapat.
10. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan di mana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11. Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
 - a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus tingkat pertama.
 - b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon melakukan pendaftaran Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan.
 - d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama.
14. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.

15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan 1 (satu) kali.¹⁷⁴

Melalui kedelapan belas poin tersebut, khususnya dalam perkara pidana, Mahkamah Agung (MA) diwajibkan untuk memeriksa permohonan tersebut dan membuat putusan sebagai berikut.

1. Apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah Agung (MA) menolak permintaan Peninjauan Kembali (PK) dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya.
2. Apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) tersebut dan menjatuhkan putusan yang alternatifnya sebagai berikut:
 - a. Putusan bebas.
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan.
 - c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum.
 - d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana lebih ringan.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa yang telah mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK), maka dengan alasan apa pun pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi yang dijatuhkan pada putusan semula.

¹⁷⁴ Perhatikan Pasal 268 Ayat 3 KUHP, Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, ..., hlm. 339.

BAB 5

PENEGAKAN HUKUM EKSEKUSI MATI DIKAITKAN DENGAN PENINJAUAN KEMBALI

A. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Setiap Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dengan mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara agar dapat mengembangkan potensi sepenuhnya yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya bukan semata-mata dari manusia sendiri, melainkan dari Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Kesadaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berawal sejak manusia ada di muka bumi sejalan dengan amanat konstitusi. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus didasarkan pada prinsip hak-hak sipil, politik,

¹ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori, dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, Terjemahan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994, hlm. 32.

ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan, pemantauan, ataupun pelaksanaannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) mulai berkembang dan semakin dikenal dunia sebagai instrumen hukum modern sekitar abad ke-17 dan abad ke-18 pada wilayah bagian Eropa. Hak Asasi Manusia (HAM) semula dimaksudkan untuk melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa, tetapi dalam perkembangannya, Hak Asasi Manusia (HAM) bukan lagi milik segelintir orang, melainkan hak semua orang (universal).

Atas dasar kesadaran itulah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) tahun 1948 menuangkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat membawa konsep tatanan dalam berbagai rezim baru yang terlibat dalam pembangunan institusi ataupun konstruksi demokrasi. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kambuhnya kembali kecenderungan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).²

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafat, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern menjadi cenderung bersifat yuridis dan politik. Hal ini disebabkan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis.³

Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak hanya terbatas pada konstitusi hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 telah menentukan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didasari pada materi muatan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) oleh kalangan publik menengah yang berada di wilayah NKRI dijadikan sebagai nilai konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat yang dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) dari zaman pergerakan hingga sekarang, yaitu ketika Amandemen terhadap

2 Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005, hlm. 2.

3 Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep, dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 6.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara eksplisit memuat Pasal-Pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Beberapa peraturan perundangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,⁴ antara lain Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (*tidak berlaku lagi setelah keluarnya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM*), Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang (UU) Nomor 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Teori-teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU tentang Hak Asasi Manusia.

Jika dirumuskan kembali, materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup beberapa materi berikut.

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁵
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁶
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷
4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁸

4 Sunarto, *Dasar-dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*, Semarang: UPT UNNES Press, 2012, hlm. 131.

5 Dari Pasal 28A Perubahan Kedua UUD 1945.

6 Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua.

7 Berasal dari ayat 28B ayat (2) Perubahan Kedua.

8 Dari Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua.

5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.⁹
6. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.¹⁰
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹¹
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹²
9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹³
10. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.¹⁴
11. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁵
12. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.¹⁶

9 Dari Pasal 28E ayat (1) Perubahan Kedua.

10 Pasal 28E ayat (2) Perubahan Kedua.

11 Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua.

12 Dari Pasal 28F Perubahan Kedua.

13 Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G ayat (1) Perubahan Kedua.

14 Dari Pasal 28G ayat (2) Perubahan Kedua.

15 Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28H ayat (1) Perubahan Kedua.

16 Pasal 28H ayat (2) Perubahan Kedua.

13. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.¹⁷
14. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.¹⁸
15. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.¹⁹
16. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.²⁰
17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²¹
18. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.²²
19. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.²³
20. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.²⁴

17 Pasal 28H ayat (3) Perubahan Kedua.

18 Pasal 28H ayat (4) Perubahan Kedua.

19 Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28C ayat (1) Perubahan Kedua.

20 Dari Pasal 28C ayat (2) Perubahan Kedua.

21 Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua.

22 Ayat (8) ini berasal dari Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua.

23 Ayat ini berasal dari Pasal 28E ayat (4) Perubahan Kedua.

24 Berasal dari rumusan Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua yang perumusannya mengundang kontroversi di kalangan banyak pihak. Di sini perumusannya dibalik dengan subjek negara.

21. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.²⁵
22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.²⁶
23. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.²⁷
24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸
25. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang.²⁹
26. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

25 Berasal dari Pasal 28I ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.

26 Ini adalah ayat tambahan yang diambil dari usulan berkenaan dengan penyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam lampiran TAP No.IX/MPR/2000, yaitu alternatif 4 dengan menggabungkan perumusan alternatif 1 butir 'c' dan 'a'. Akan tetapi, khusus mengenai anak kalimat terakhir ayat ini, yaitu: "...serta melindungi penduduk dari penyebaran paham yang bertentangan dengan ajaran agama", sebaiknya dihapuskan saja, sebab, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada satu kelompok paham keagamaan dapat berarti pemberangusan hak asasi kelompok paham yang lain dari kebebasan yang seharusnya dijamin oleh UUD.

27 Ayat (6) ini berasal dari Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua.

28 Dari ayat (5) Pasal 28I Perubahan Kedua dengan menambahkan perkataan "...memajukan, sehingga menjadi "Untuk memajukan, menegakkan, dan melindungi...."

29 Komnas HAM memang telah dikukuhkan keberadaannya dengan undang-undang. Akan tetapi, agar lebih kuat, hal itu perlu dicantumkan tegas dalam UUD.

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.³⁰

Jika ketentuan-ketentuan yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar diperluas dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan yang ada, lalu dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat di dalamnya, rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dapat mencakup dua kelompok materi sebagai berikut.

a. **Teori Hukum Kodrat (Natural Law)**

Pemikir skolastik Thomas Aquino, Gratianus (Decretum), dan beberapa lainnya³¹ menjelaskan hukum kodrat merupakan hukum yang lahir dari kegiatan akal-budi manusia sendiri yang dituntun oleh Tuhan untuk dijalankan sesuai dengan kodrat. Hukum kodrat merupakan prinsip-prinsip perkembangan dari manusia yang bekerja dalam bentuk kesadaran rohani yang senantiasa tunduk pada hukum-hukum alam sehingga manusia dalam konteks hukum kodrat memiliki kesadaran untuk hidup sesuai dengan nurani dan mempunyai ciri moral.³²

Hukum kodrat mengacu pada realitas atau struktur realitas. Hakikat realitas yang dapat membuat manusia mengetahui perbuatan yang baik dan buruk. Prinsip hukum kodrat sebagai berikut.³³

- 1) Prinsip hukum kodrat primer, yaitu prinsip hukum yang telah dirumuskan para pemikir Stoa klasik yang berlaku bagi setiap manusia, seperti: hidup secara terhormat, tidak merugikan seorang pun, memberikan kepada tiap-tiap orang menurut haknya (*honeste vivere, neminem laedere, unicuique suum tribuere*).
- 2) Prinsip hukum kodrat sekunder, yaitu hukum kodrat yang tersimpul dari norma hukum kodrat primer, misalnya dalam hukum kodrat primer terdapat ketentuan untuk tidak merugikan orang lain, turunan

30 Berasal dari Pasal 28J Perubahan Kedua.

31 Rasjidi Lili dan Thania R, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 53.

32 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t., hlm. 50.

33 *Ibid.*

atau hukum kodrat sekundernya seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan sebagainya.

Kodrat manusia merupakan landasan aturan fundamental hukum kodrat, atau hukum kodrat dipromulgasikan kepada manusia melalui kodrat rasionalnya sendiri yang masing-masing kelompok aturan hukum kodrat disusun atas dasar putusan akal budinya dalam menyimpulkan intisari kodratnya sendiri.³⁴

Hukum kodrat bukan satu jenis hukum, melainkan penamaan seragam untuk banyak ide yang dikelompokkan menjadi satu nama, yaitu hukum kodrat. Untuk memperoleh gambaran umum mengenai hukum kodrat, ada baiknya menyimak apa yang dikemukakan Dias tentang hukum kodrat, yaitu:³⁵

- 1) ideal-ideal yang menuntut perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
- 2) dasar dalam hukum bersifat moral yang menjaga agar tidak terjadi suatu pemisahan secara total antara yang sekarang dan yang seharusnya;
- 3) metode untuk menemukan metode yang sempurna;
- 4) isi hukum yang sempurna yang dapat dideduksi melalui akal;
- 5) kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

Hukum kodrat pada dasarnya memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat universal dan abadi, diterima manusia sebagai sesuatu yang dipatuhi meskipun tidak tertulis yang disimpulkan berdasarkan rasio yang bersifat kodrat.

Gagasan mengenai hukum kodrat didasarkan melalui penalaran yang ditujukan untuk mengetahui hakikat hidup manusia serta dasar bagi tertib hukum dan tertib sosial eksistensi manusia. Dasar pemikiran yang khas dari hukum kodrat adalah tidak ada pemisahan secara tegas antara hukum dan moral. Hukum dan moral dijadikan standar untuk penyelenggaraan hidup bermasyarakat.

34 Paulus Wahan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 54.

35 B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 35.

b. Teori Hukum Positivisme

Lili Rasjidi dalam bukunya menjelaskan,³⁶ positivisme hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*).

Positivisme hukum mempunyai pandangan yang sama tentang diterimanya validasi, seperti halnya positivisme sains yang tidak dapat menerima pemikiran dari suatu proposisi yang tidak dapat diverifikasi atau yang tidak dapat difalsifikasi, tetapi karena hukum tersebut ada karena termuat dalam perundang-undangan, baik dipercaya maupun tidak, termasuk di dalamnya ada suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif.³⁷

Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat, tetapi membahas ajaran *Analytical Jurisprudence* yang dikemukakan oleh John Austin. Inti ajaran *Analytical Jurisprudence* adalah *Law is a command* (hukum merupakan perintah dari penguasa). John Austin mendefinisikan hukum sebagai berikut.

"Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his auhority is supreme."

Dengan demikian, hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, yang otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas yang tertinggi.³⁸

Menurut Austin, hukum adalah peraturan yang berisi perintah yang diperuntukkan bagi makhluk yang berakal dan dibuat oleh makhluk yang berakal yang mempunyai kekuasaan terhadap mereka. Jadi, landasan hukum adalah "kekuasaan dari penguasa".

36 Lili Rasjidi dan Thania R., *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 55-56.

37 Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

38 Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Austin menganggap hukum sebagai sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), karena keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memerhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk.

Karakteristik hukum yang terpenting menurut Austin terletak pada karakter imperatifnya. Hukum dipahami sebagai perintah dari penguasa, tetapi tidak semua perintah dapat dianggap sebagai hukum. Menurutny, hanya perintah-perintah umum yang mengharuskan seseorang atau orang-orang untuk bertindak untuk menaati hukum tersebut.

Kata kunci dalam hukum menurut Austin adalah perintah yang diartikan perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yaitu otoritas politik yang paling tinggi (*the supreme political authority*). Yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat yang memiliki kedaulatan ini mungkin individu atau sekelompok individu.

Adapun syaratnya, yaitu: (1) individu atau kelompok individu merupakan orang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat; (2) individu atau kelompok individu yang berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun di atasnya. Jadi, sumber hukum menurut Austin adalah penguasa tertinggi yang secara *de facto* dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, sedangkan ia sendiri tidak tunduk pada siapa pun.

Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum dapat bersifat *non optional*. Oleh karena itu, Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral.

Ketika hukum tidak dapat dipaksakan atas pelanggaran-pelanggarannya dikenai hukuman atau sanksi hukum, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini karena menyebut perintah sebagai hukum, tetapi dalam praktik tidak dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah *absurd* sebab hukum yang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat.

Dalam pandangan tersebut, Austin sepakat dengan Aquinas yang juga melihat hukum sebagai alat kontrol sosial. Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas yang melihat hukum sebagai hasil kerja rasio, Austin justru

menekankan watak perintah hukum yang bersumber pada kedaulatan penguasa.

Pandangan hukum Aquinas lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Austin. Hukum sebagai perintah, menurut Austin, memuat dua elemen dasar berikut.

- 1) Hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan, yaitu keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu.

Keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yaitu pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum dalam arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku.

- 2) Hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau membahayakan subjek yang melanggarnya. Individu yang terkena perintah dengan sendirinya terikat, wajib berada di bawah keharusan untuk melakukan apa yang diperintahkan, kegagalan memenuhi tuntutan perintah berakibat bahwa subjek yang terkena perintah mendapat sanksi hukum.

3. Sanksi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut:

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Dengan demikian, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun

terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia."

Kejahatan *genosida* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- 1) membunuh anggota kelompok;
- 2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Serangan tersebut ditunjukkan secara langsung kepada penduduk sipil dan dapat berupa:

- 1) pembunuhan;
- 2) pemusnahan;
- 3) perbudakan;
- 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum pokok internasional;
- 6) penyiksaan;
- 7) pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- 8) penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,

agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang secara hukum internasional;

- 9) penghilangan orang secara paksa;
- 10) kejahatan *apartheid*.

Pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap warganya juga terjadi di Indonesia. Kasus-kasus penyiksaan dalam proses penyidikan merupakan salah satu contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan aparat negara terhadap warga negara. Pada era Orde Baru, ketika militer mempunyai kekuasaan yang hampir tak terbatas, Indonesia banyak diwarnai oleh kasus kekerasan yang dilakukan oleh militer. Kasus Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada 1990-an merupakan wujud kesewenang-wenangan militer terhadap rakyat. Selain itu, masih banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan negara terhadap warga negara, seperti penembakan terhadap empat warga Nipah yang ingin mempertahankan tanahnya, kasus penyiksaan terhadap warga transmigran di Sei Lapan, dan kasus Kedung Ombo.

Fenomena pembredelan terhadap media massa yang dianggap vokal pada masa Orde Baru juga merupakan salah satu bentuk pengekangan kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya di muka umum. Berbagai catatan tersebut merupakan beberapa contoh peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang seharusnya dilindungi.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Tap. MPR Nomor XVII/MPR/1998, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁹

Walaupun tidak sampai pada tingkatan studi kritis dan dengan mencoba melakukan komparasi secara sederhana antara konsep Hak Asasi

³⁹ Perhatikan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Manusia (HAM) yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 dan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam melalui pendekatan relevansional, pembahasan ini bermaksud menjawab pertanyaan tentang relevansi antarkedua konsep tersebut.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁴⁰

Pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua dijelaskan:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua dijelaskan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Pasal 28 A dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua merupakan pengaturan hak asasi manusia. Perbedaannya adalah Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua hanya mengatur hak hidup seseorang, sedangkan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, baik dalam keadaan normal (tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan sengketa bersenjata) maupun dalam keadaan tidak normal (keadaan darurat, dalam keadaan perang dan dalam keadaan sengketa bersenjata) hak hidup tidak dapat dikurangi oleh negara, pemerintah, maupun masyarakat.

Hak hidup bersifat *Non Deregoble Human Right*, artinya hak hidup seseorang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun. Hak hidup tidak bersifat *Deregoble Human Right*, artinya dapat disimpangi dalam keadaan darurat atau ada alasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

Sejak tahun 2000, dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Mekanisme ini menutup peluang pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang sebelumnya menikmati impunitas.

Setiap Pengadilan harus memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban, yaitu pengaturan tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi melalui upaya penyelidikan atas peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat yang dilakukan dengan serangkaian penyelidikan. Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menjadikan 3 (tiga) kasus yang telah diselidiki di antaranya dua pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, dan satu Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Makassar untuk kasus Abepura.

Hasil putusan pengadilan tersebut membebaskan hampir semua terdakwa. Banyak kalangan menyatakan bahwa pengadilan tersebut dinilai gagal dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Bahkan, selama proses pengadilan berjalan, kritik yang berkaitan dengan kinerja pengadilan yang berada di bawah standar pengadilan internasional telah bermunculan.⁴¹

Pandangan lain menyatakan bahwa pengadilan ini memang sejak awal sengaja diupayakan untuk mengalami kegagalan.⁴² Beberapa kasus dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) secara prosedural belum selesai karena masih ada proses selanjutnya, yaitu ada tingkat banding ataupun kasasi sehingga penilaian atas proses peradilan yang terjadi belum bisa dikatakan lengkap.

⁴¹ Progress Report ELSAM IV, *Pengadilan HAM di Bawah Standar: Preliminary Conclusive Report*, 4 Juli 2002.

⁴² David Cohen, *Intended to Fail, the Trial Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, ICTJ, July, 2004.

⁴⁰ Perhatikan Pasal 1 angka 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Ketidakberhasilan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ini selain membebaskan seorang terdakwa, pengadilan tidak mampu memenuhi hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, yang sampai saat ini tidak satu pun yang diterima oleh korban. Padahal, setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berhak mendapat kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kegagalan pengadilan untuk melakukan proses penghukuman yang efektif dan memberikan *remedies* kepada korban menyisakan banyak pertanyaan mengenai proses pengadilan yang terjadi.

Kegagalan pengadilan tersebut berakibat pada tidak tercapainya keadilan bagi korban dan menunjukkan kembali bahwa pengadilan ini memiliki sejumlah kelemahan dan hambatan. Studi dan pengkajian yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kelemahan proses peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi dalam tahap mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan disertai dengan kelemahan kapasitas aparat penegak hukumnya, baik tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tidak terkecuali para hakim yang mengadili kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat ini.

Dari ketiga kasus yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), berbagai putusan yang dijatuhkan tidak secara keseluruhan membuktikan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, kecuali kasus Timor-Timur yang sampai saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan. Selebihnya, pengadilan terhadap kasus Tanjung Priok dan kasus Abepura dalam putusan-putusannya menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti.

Semua surat dakwaan yang diajukan di pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa untuk membuktikan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, pengadilan harus membuktikan adanya bentuk kejahatan yang terjadi. Misalnya, pembunuhan juga harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan terhadap penduduk sipil secara meluas atau sistematis.

Serangan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil

sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi.⁴³

Ketidakberhasilan membuktikan dakwaan atau perbedaan putusan dalam menentukan ada tidaknya perbuatan yang termasuk kejahatan kemanusiaan sangat bergantung pada penafsiran atas unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam ketiga kasus yang terjadi, beberapa putusan menunjukkan adanya perbedaan kesimpulan meskipun kasusnya sama atau setidaknya merupakan bagian dari peristiwa yang terjadi. Dalam kasus Timor-Timur, keseluruhan putusan pengadilan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat terhadap semua peristiwa yang didakwakan. Akan tetapi, tidak semua terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat tersebut.

Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan lukanya orang terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun dapat dibuktikan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat pola pengungkapan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴⁴

Kasus Tanjung Priok pada tingkat pertama memunculkan dua pandangan mengenai terjadi peristiwa berdarah pada bulan September 1984. *Pertama*, terbukti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan secara meluas dan sistematis dan adanya kebijakan untuk melakukan kejahatan.

Kedua, tidak terbuktinya kejahatan terhadap kemanusiaan karena peristiwa yang terjadi hanya berupa bentrokan, dan bukan merupakan perencanaan kejahatan, seperti yang dituduhkan. Pada tingkat banding, pihak yang memeriksa perkara para terdakwa yang dinyatakan bersalah, menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk kejahatan

43 Lihat Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

44 Ada dua putusan yang menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan antara satu kelompok masyarakat dan masyarakat lainnya, yaitu yang pro kemerdekaan dengan yang pro integrasi. Penyerangan ini melepaskan faktor dukungan aparat birokrasi sipil, institusi militer ataupun institusi Polri dalam setiap pola penyerangan yang dilakukan sehingga kebijakan penyerangan yang dilakukan adalah kebijakan organisasional dari masyarakat tersebut.

terhadap kemanusiaan karena tidak ada kebijakan untuk melakukan penyerangan. Perbuatan yang dilakukan adalah tindakan spontanitas.⁴⁵

Kasus Abepura pada tingkat pertama semua terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti adanya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang didakwakan. Kejahatan kemanusiaan tidak terbukti karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu penyerangan dan pengejaran yang dilakukan terhadap sekelompok orang dilakukan sesuai prosedur, dengan tujuan pengamanan untuk menghindari eksekusi yang lebih besar, dan para korban sipil akibat peristiwa penyerangan tidak ditimbulkan oleh tindakan yang disengaja.

Berdasarkan putusan-putusan dalam ketiga kasus di atas, kelemahan terbesar adalah tidak terbongkarnya kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan meluas, termasuk pembuktian atas adanya unsur kebijakan negara. Hampir semua putusan dalam pengadilan HAM tidak mampu membuktikan bahwa kejahatan yang terjadi bagian dari kebijakan negara.

Kasus Timor-Timur pun yang sampai akhir persidangan mampu menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan pada akhirnya hanya mampu membuktikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan tidak ada sangkut pautnya dengan *policy* negara pada saat itu.

B. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang dikenal di Indonesia ini⁴⁶ sebenarnya merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari "*Criminal Justice System*". Untuk pertama kalinya, istilah ini diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science* karena

45 Dalam putusan banding terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk., tidak terungkap di persidangan adanya kebijakan Dandim untuk melakukan serangan, tetapi yang terungkap adalah permintaan bantuan dari Arhanudse 06 yang kemudian dibagi menjadi tiga regu. Bentrokan yang terjadi, pasukan tersebut membela diri dari serangan masa dan tembakan regu tiga tersebut tanpa dikomandoi serta melakukan tembakan peringatan ke atas. Bentrokan tersebut juga hanya terjadi di tempat itu dan berlangsung 5-10 menit.

46 Anton Muliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 6-7.

ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang dibuktikan dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.

Menurut Neil C. Chalin, pada mulanya di Amerika Serikat komponen SPP hanyalah terdiri atas Polisi, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang timbul di dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat *local government*. Ia menyatakan:

*"Basically the American Criminal Justice System is composed of Police, Courts and Corrections in local, state and Federal levels. These criminal justice componen function separately and together with majority of activities accuring at the lokal level of government (city and country)."*⁴⁷

Dalam perkembangan kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal 1970, *criminal justice* sebagai disiplin studi tersendiri telah menggeser posisi *law enforcement* atau *police studies*, yang di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada *the administration of justice* dan memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah pendekatan hukum dan ketertiban (*law and order approach*). Adapun penegakan hukum dalam konteks pendekatannya dikenal dengan istilah *law enforcement*⁴⁸ yang mengedepankan aspek hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan dengan kepolisian sebagai pendukung utama.

Efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian sangat menentukan berhasil atau tidaknya penanggulangan kejahatan, karena dalam praktiknya, pihak kepolisian banyak dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat *operasional* maupun prosedur-hukum.⁴⁹

47 Neil C. Chalin et al., *Introduction to Criminal Justice*, New Jersey: Prentice-Hall, 1975 hlm. 1 (*Introduction*), lihat juga Indrianto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 4-5.

48 Jerome Scholnik, *Justice Without Trial Democratic Order and Rule of Law, Chapter I*, 1996, hlm. 10, dan Romli Atmasadmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cet. II (Revisi), Bandung: Binacipta, 1996, hlm. 7.

49 Indrianto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Cet. I, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2001, hlm. 4.

Remington dan Ohlin⁵⁵ menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem peradilan terhadap mekanisme administrasi peradilan. Peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Untuk pertama kalinya di Indonesia pemahaman *Criminal Justice System* diperkenalkan Mardjono Reksodipoetro⁵⁶ yang memberikan batasan pengertian tentang sistem peradilan pidana sebagai berikut:

"Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat."

Dikatakan suatu sistem karena dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) tersebut tidak terlepas dari sub-subsistem (komponen) yang mendukung jalannya Sistem Peradilan Pidana (SPP) seperti berikut:⁵⁷

"Suatu Pengendalian Kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasasyarakatan terpidana."

Romli Atmasasmita⁵⁸ berpendapat bahwa pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- 1) titik berat pada koordinasi dari sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasasyarakatan);
- 2) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- 3) efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;

55 Romli Atmasasmita, *idem.*, hlm. 14.

56 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994, hlm. 84-85.

57 *Idem.*, hlm. 141.

58 Romli, *op.cit.*, hlm. 9-10.

- a) penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*the administration of justice*".

Sistem Peradilan Pidana (SPP) mempunyai tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁹

Muladi⁶⁰ juga mengemukakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai berikut:

"Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana, namun jika sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan."

Indriyanto⁶¹ memberikan pemahaman lain tentang Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan membedakannya dengan Administrasi Peradilan Pidana (*Criminal Justice Administration*). Administrasi Peradilan Pidana adalah jalannya prosedural dari suatu acara persidangan pidana, yaitu sejak adanya dakwaan sampai dengan diucapkannya suatu putusan bagi terdakwa. Dengan demikian, administrasi peradilan pidana merupakan bagian dari cara kerja subsistem peradilan.

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, dalam konteks yang lebih luas, perundang-undangan buku pidana (baik formal maupun material) merupakan subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hal ini disebabkan mekanisme dan manajemen kerja Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak terlepas dari cara sistem itu diatur dan dirumuskan dalam suatu perundang-undangan.

59 *Ibid.*, hlm. 14-15.

60 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. UNDIP, 1995, hlm. 1-2.

61 Indriyanto Seno Aji, *Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Aji, 2001, hlm. 9.

Dalam konteks yang sempit, apabila yang dijadikan pemahaman adalah proses peradilan pidana, subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan proses peradilan pidana (*Criminal Justice Processes*), seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita,⁶² dari uraian tersebut terlihat aspek penegakan hukumnya kurang menyentuh. Oleh karena itu, apabila Sistem Peradilan Pidana (SPP) diartikan sebagai alat penegakan hukum atau *law Enforcement*, di dalamnya harus mengandung aspek hukum yang menitikberatkan pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan untuk mencapai kepastian hukum. Landasan dalam praktik peradilan pidana, yaitu KUHAP, walaupun dikatakan telah mengandung nilai-nilai Sistem Peradilan "Pidana yang baik, belum menunjukkan secara tegas dan jelas mekanisme dalam atau manajemen yang dipergunakan dalam SPP tersebut.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dari berbagai pengertian sebagaimana yang telah penulis paparkan terkait dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya dapat diketahui tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro yang menjelaskan secara terperinci terkait dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana, yaitu:⁶³

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

⁶² *Op.cit.*, hlm. 15.

⁶³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84-85.

Demikian pula, sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita,⁶⁴ bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah terciptanya mekanisme kerja antarmasing-masing subsistem untuk terciptanya tolok ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan. Muladi membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana dalam beberapa tujuan berikut:⁶⁵

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.⁶⁶

- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Tujuan ini dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.⁶⁷

- c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini merupakan konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah sehingga keberhasilannya juga bergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.⁶⁸

Adapun Bairda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum, menyebutkan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Hulsman mengungkapkan bahwa

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 16-18.

⁶⁵ Fransiska Aviarti, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2008, hlm. 49.

⁶⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 3-4.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan:⁶⁹

- a. sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan (*the criminal justice system inflicts suffering*);
- b. sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri (*the criminal justice system does not work in term of its own declared aims*);
- c. kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana (*fundamental uncontrollability of criminal justice system*);
- d. pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat (*criminal justice approach is fundamentally flawed*).

Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Ia juga menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:⁷⁰

- a. mencegah kejahatan;
- b. menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- c. peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d. putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e. disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- f. lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Keberagaman tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana adalah wajar karena adanya keberagaman sudut pandang. Meskipun demikian, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi dalam kerangka konsep *welfare state*.

69 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 1.

70 Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 13-14.

3. Komponen Sistem Peradilan Pidana

a. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan berikut.

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh anggota kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai daerah yang terendah, yaitu Pos Polisi, dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat, yaitu Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden RI.

b. Peran Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan yang dimaksud adalah tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁷¹

Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan harus

⁷¹ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Etika dan tanggung jawab profesi jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷² Karena kedudukannya tersebut, dalam melakukan penuntutan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) menerima dan memeriksa berkas;
- 2) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas pada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan;
- 3) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) membuat surat dakwaan;
- 5) melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan, kepada terdakwa maupun saksi-saksi;
- 7) melakukan penuntutan;
- 8) menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum;
- 10) melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan, antara lain:

⁷² Pasal 1 Angka 6 Huruf a UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, ataupun lainnya. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu sebagai berikut.

1) Bidang Pidana

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu:⁷³

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik.

⁷³ Perhatikan Pasal 30 Ayat (1), BAB III Tugas dan Wewenang, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan, pasalnya hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

2) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Menurut Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

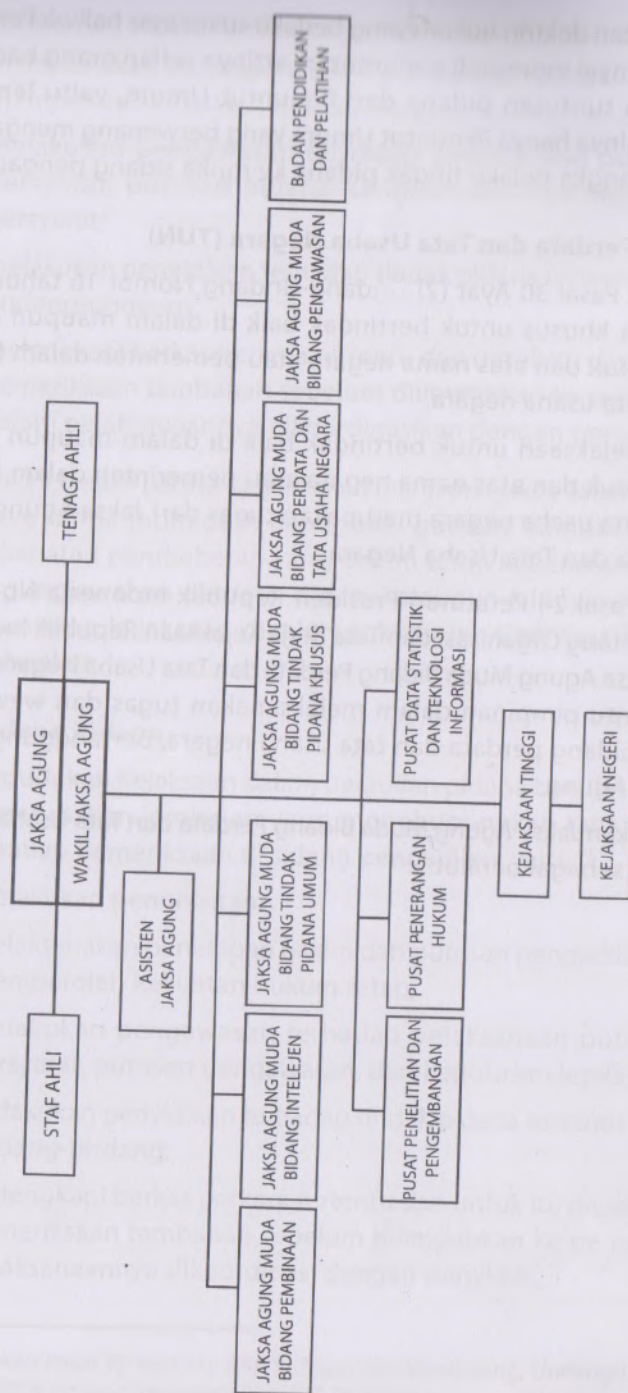
Fungsi kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara digambarkan sebagai berikut:

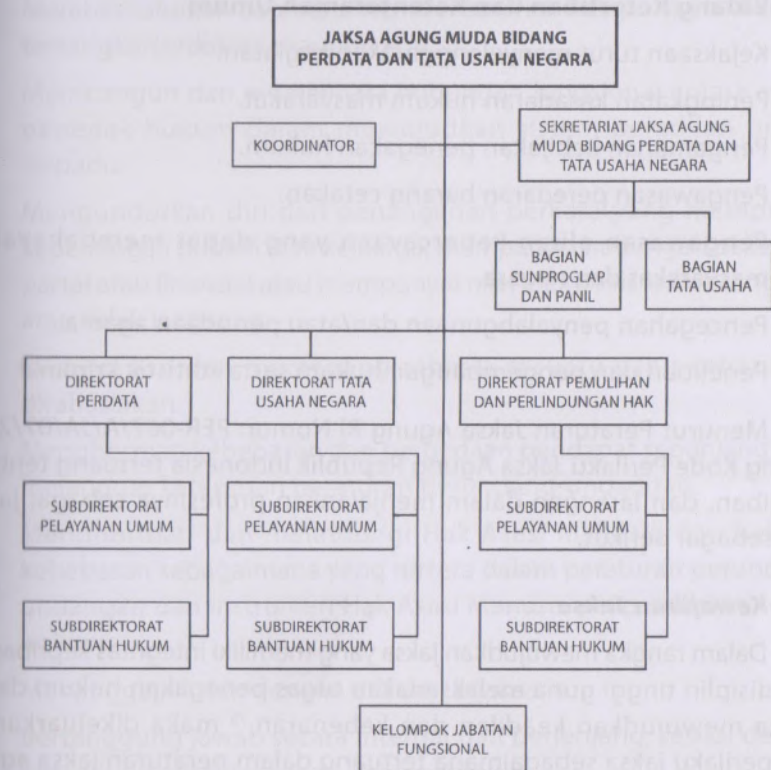
Bagan 5.1

Kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



Sementara Struktural di dalam Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:

Bagan 5.2 Kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



Hasil analisis di atas dapat disimpulkan tugas, fungsi, dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 tahun 2011. Tugas, fungsi, dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu:

- Penegakan Hukum.
- Bantuan Hukum.
- Pertimbangan Hukum.
- Pelayanan Hukum.

- e) Tindakan Hukum Lain.
- f) Menjamin Tegaknya Hukum.
- g) Mengamankan Kekayaan negara.
- h) Melindungi Kepentingan Umum.

3) Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:⁷⁴

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Menurut Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia tertuang tentang kewajiban, dan larangan dalam menjalankan profesinya sebagai jaksa, yaitu sebagai berikut.

a) Kewajiban Jaksa

Dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran,⁷⁵ maka dikeluarkanlah kode perilaku jaksa sebagaimana tertuang dalam peraturan jaksa agung RI (PERJA) No.: Per-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007. Dalam kode perilaku jaksa antara lain disebut:

- 1. Menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- 2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

⁷⁴ Perhatikan Pasal 30 Ayat (3) BAB III Tugas dan Wewenang, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷⁵ Perhatikan Pasal 3, BAB II Kewajiban, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia.

3. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran.

4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan/ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung.

5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak.

6. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban.

7. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.

9. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.

10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal.

12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.

13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

14. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

b) Larangan Jaksa

Dalam menjalankan tugas profesi, jaksa dilarang:⁷⁶

⁷⁶ Perhatikan Pasal 4, BAB II Kewajiban, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia.

tersangka yang telah melanggar hukum adalah saudara, kerabat dekat, ataupun atasannya dalam suatu organisasi.

Pengertian tanggung jawab sangat bervariasi, adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu dan tanggung jawab dihubungkan dengan kesediaan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Namun, pengertian tanggung jawab lebih berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan. Tanggung jawab dalam profesi hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para aparat bersangkutan.⁸⁵
- 2) Tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.
- 3) Tanggung jawab profesi merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi, baik bersifat umum maupun khusus dalam lembaganya.⁸⁶

Tanggung jawab tidak lepas dari kewajiban seseorang yang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas dan kapabilitas sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat dalam berinteraksi. Tanggung jawab dapat melahirkan tuntutan hukum, tuntutan moral, dan etika yang bersifat pribadi, seperti penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang erat dengan kualitas moral dan etika. Oleh karena itu, perlu dipertegas kembali asas-asas moralitas yang mendasari profesi hakim sebagai pegangan dalam bersikap dan bertindak selama mengemban profesi sebagai Hakim Peradilan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

1) Tanggung Jawab Moral Hakim

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah menegakkan keadilan. Cita hukum keadilan yang terdapat dalam kenyataan normatif

⁸⁵ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, op.cit., hlm. 80-82.

⁸⁶ Ibid.

(*das sollen*) harus dapat diwujudkan dalam kenyataan alamiah (*das sein*) melalui nilai-nilai yang terdapat pada etika profesi, termasuk etika profesi hakim.

Salah satu etika profesi yang menjadi pedoman profesi hakim dilihat dari perspektif hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri atas empat butir berikut.

- a) Mendengar dengan sopan dan beradab (*hear courteously*);
- b) Menjawab dengan arif dan bijaksana (*answer wisely*);
- c) Mempertimbangkan tanpa terpengaruh apa pun (*consider soberly*);
- d) Memutus tidak berat sebelah (*decide impartially*).

Salah satu literatur sejarah bidang peradilan pada peradaban Islam yang masih tercatat adalah risalah Khalifah *Umar bin Khaththab* mengenai pentingnya peradilan, cara pemeriksaan, dan pembuktian, serta mampu menjelaskan tentang etika profesi. Pada risalah *Umar bin Khaththab* dituliskan kode etik hakim, yaitu sebagai berikut.⁸⁷

- a) Mempersamakan kedudukan para pihak dalam majelis, pandangan, dan putusan sehingga pihak yang merasa lebih mulia tidak mengharapkan kecurangan hakim, sementara pihak yang lemah tidak berputus asa dalam usaha memperoleh keadilan hakim.
- b) Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara para pihak yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Sebagai perwujudan dari sikap di atas, hakim harus memiliki etika kepribadian, seperti:

- a) percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim;
- c) berkelakuan baik dan tidak tercela;
- d) menjadi teladan bagi masyarakat;

⁸⁷ Wildan Suyuthi, *Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama*, dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006, hlm. 29.

- e) menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat;
- f) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim;
- g) bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab;
- h) berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu;
- i) bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan);
- j) dapat dipercaya;
- k) berpandangan luas.

a) **Sikap Hakim dalam Kedinasan**

Sikap, sifat, dan etika kepribadian yang harus dimiliki oleh hakim seperti telah diuraikan di atas dapat diimplementasikan pada persidangan saat hakim menjalankan tugasnya. Sementara itu, seorang hakim dituntut untuk menjaga perilakunya kepada atasan, sesama rekan, ataupun bawahan. Dalam perilaku terhadap atasan, hakim harus bersikap:⁸⁸

- (1) taat kepada pimpinan;
- (2) siap menjalankan tugas dengan jujur dan ikhlas;
- (3) memberikan rekomendasi yang dapat membangun kesadaran hukum;
- (4) mempunyai kesanggupan untuk mengungkapkan pendapat tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan;
- (5) tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apa pun.

Adapun sikap terhadap sesama rekan hakim adalah:⁸⁹

- (1) memupuk hubungan kerja sama yang baik antarsesama rekan;
- (2) memiliki sifat setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antarsesama rekan;
- (3) memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim;

88 C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, loc.cit., hlm. 53.

89 Ibid.

- (4) menjaga nama baik dan martabat keprofesian hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Perilaku terhadap pegawai bawahan, yaitu seorang hakim:⁹⁰

- (1) mempunyai sifat kepemimpinan;
- (2) membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan;
- (3) mempunyai sikap sebagai seorang bapak/ibu yang baik;
- (4) memelihara sikap kekeluargaan antara bawahan dengan hakim;
- (5) memberi contoh kedisiplinan.

b) **Sikap Hakim di Luar Kedinasan**

Di luar kedinasannya, hakim juga harus senantiasa menjaga sikap dan perilakunya. Terhadap diri pribadi, hakim harus:

- (1) berkelakuan baik dan tidak tercela;
- (2) tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi ataupun golongan;
- (3) menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat;
- (4) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim.

Dalam kehidupan rumah tangga, hakim harus bersikap:⁹¹

- (1) menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, baik menurut norma hukum maupun norma kesusilaan;
- (2) menjaga ketenteraman dan keutuhan keluarga dan rumah tangga;
- (3) menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat;
- (4) tidak dibenarkan hidup berlebih-lebihan dan mencolok.

Dalam kehidupan bermasyarakat hakim:⁹²

- (1) tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat;

90 Ibid., hlm. 53-54.

91 Ibid., hlm. 55.

92 Ibid., hlm. 55.

(3) menjaga nama baik dan martabat hakim.

2) Tanggung Jawab Hukum Hakim

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu sebagai berikut.⁹³

1. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
3. Bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera.

Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus menyebutkan tanggung jawab profesi Hakim Agung, yaitu UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur terhadap beberapa ketentuan yang harus ditaati dan menjadi tanggung jawab Hakim Agung. Undang-Undang lain yang menegaskan mengenai tanggung jawab profesi hakim adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁹³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, loc.cit., hlm. 319.

Jenis tanggung jawab yang sangat menentukan sikap profesi hakim adalah tanggung jawab teknis profesi yang merupakan proses penilaian terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu poin penting dalam tanggung jawab hakim adalah mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang diperbuat sebagai profesionalisme hukum, baik secara materi maupun formal. Oleh karena itu, seorang hakim peradilan yang tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya dianggap telah melakukan pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.⁹⁴

Setiap orang yang mengaku sebagai pengemban profesi hukum harus dapat dipercaya dan mampu membuktikan untuk tidak menyalahgunakan situasi yang ada dengan mengerahkan kemampuan dan keahlian untuk menjalankan tugas yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar perwujudan martabat manusia. Oleh karena itu, pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat.⁹⁵

d. Peran Advokat

Advokat berasal dari kata "*Advocaat*" dan berasal dari bahasa Latin, yaitu "*advocatus*" yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara di dalam atau di luar pengadilan. Advokat yang disebut juga penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan dalam bidang hukum baik perdata maupun pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para pengguna jasanya.⁹⁶

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan

⁹⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, op.cit., hlm. 53.

⁹⁵ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, loc.cit., 2011, hlm. 49-51.

⁹⁶ Perhatikan BAB IV Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14-Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, setiap orang yang memenuhi persyaratan, dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yaitu sebagai berikut.

1. Warganegara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya.

Tanggung jawab profesi advokat hendaknya mengacu pada sumpah profesi advokat dan kepercayaan yang diberikan kliennya, dan bukan hanya berdasarkan honorarium. Advokat/Penasihat Hukum adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Advokat/Penasehat Hukum diwajibkan untuk menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan.
2. Advokat/Penasehat Hukum harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya.
3. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
4. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun.
5. Advokat/Penasehat Hukum wajib memperjuangkan serta melindungi hak-hak azasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup dalam Negara Hukum Republik Indonesia.
6. Advokat/Penasehat Hukum wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antarsesama sejawat.
7. Advokat/Penasehat Hukum wajib memberikan bantuan pembelaan hukum kepada sejawat Advokat/Penasehat Hukum yang disangka atau didakwa dalam suatu perkara pidana oleh yang berwajib, secara sukarela baik secara pribadi maupun atas penunjukkan/permintaan organisasi profesi.
8. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Penasehat Hukum sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
9. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan tugas pekerjaannya harus bersikap sopan santun terhadap para pejabat hukum, terhadap sesama sejawat Advokat/Penasehat Hukum dan terhadap masyarakat, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat/Penasehat Hukum di mimbar manapun.
10. Advokat/Penasehat Hukum berkewajiban membela kepentingan kliennya tanpa rasa takut akan menghadapi segala kemungkinan resiko yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi profesi baik resiko atas dirinya maupun orang lain.

11. Seorang Advokat/Penasehat Hukum yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif, Judikatif) tidak dibenarkan untuk tetap dicantumkan/dipergunakan namanya oleh kantor dimana semulanya ia bekerja.

Advokat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:⁹⁷

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
- d. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
- f. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Sedangkan yang menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat di antaranya adalah sebagai berikut.⁹⁸

97 Perhatikan BAB IV Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14–Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

98 Perhatikan BAB IV Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14–Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial & budaya.

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya.

Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan.

4. Model dan Bentuk Sistem Peradilan Pidana

Ada beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana seperti yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi dari Michael King⁹⁹ yang mengajukan 7 jenis model Sistem Peradilan Pidana, sedangkan Herbert L. Packer mengidentifikasi dua model (*crime control model* dan *due process model*) yang paling abadi yang menawarkan penjelasan tentang cara lembaga dan kebijakan dapat dibentuk. Model-model yang mereka kemukakan dapat berguna yang dapat dilihat sebagai ujung-ujung kontinum karena mereka menyajikan kontras pemikiran dan karakteristik.

Dalam pokok pembahasan ini, penulis mencoba untuk menguraikan semua model tersebut.

8. Crime Control Model

Crime control model didasarkan pada sistem nilai yang mempresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam sistem peradilan pidana.¹⁰⁰ Menurut *crime control model*, tujuan sistem

99 Lilik Mulyadi, *Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS)*, Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, Jakarta Utara, 9 Juli 2012, diakses tanggal 7 Januari 2013.

100 Keith A. Findley, *Toward a New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process*, Sumber: http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf, diunduh pada tanggal 5 April 2014, hlm. 8.

peradilan pidana adalah menekan kejahatan, yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam bentuk hukuman.¹⁰¹

Untuk mencapai tujuan tersebut, *crime control model* menyatakan bahwa perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi. Efisiensi adalah di atas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana.¹⁰²

b. *Due Process Model*

Menurut *due process model*, tujuan sistem peradilan pidana adalah menangani terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi.¹⁰³ *Due process model* jauh lebih skeptis terhadap proses investigasi administrasi dan kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat tanpa pengawasan yudisial. *Due process model* menghargai hak-hak individu dan martabat dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap kejahatan.

Menurut John Griffith, *due process model* sangat berbeda dengan *crime control model*. Sistem *due process model* berkisar sekitar konsep penghormatan terhadap individual dan konsep pembatasan kekuasaan resmi.¹⁰⁴ Oleh karena itu, *due process model* menolak informal administrasi pencarian fakta, dan preferensi adjudikasi yang mengambil posisi berseberangan dengan proses formal.

Dalam *due process model* tidak ada temuan fakta yang sah sampai kasus tersebut disidangkan secara terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil, dan terdakwa telah memiliki kesempatan penuh untuk mendiskreditkan kasus terhadap dirinya. Menurut Romli Atmasasmita, nilai-nilai yang mendasari *due process model* adalah sebagai berikut.¹⁰⁵

101 Raul Soares da Viegua dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspective*, Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, Vol. 2, No. 2, 2010, hlm. 204.

102 Perhatikan BAB IV Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14–Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

103 Raul Soares da Viegua dan Andre Ventura, *op.cit.*, hlm. 204.

104 John Griffith, *Ideology in Criminal Procedure or a Third "Model" of Criminal Process*, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, Paper 3994, 1970, hlm. 363. Teks Asli: "The Due Process Model Seems Radically Different. Its system of values revolves around" the concept of the primacy of the individual and the complementary concept of limitation on official power.

105 Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 9-10.

- 1) Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi (*human error*) menyebabkan model ini menolak *informal fact finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif *factual guilt* seseorang. Model ini hanya mengutamakan *formal adjudicative and adversary fact finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus, tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- 2) Model ini menekankan pada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan.
- 3) Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi) dan merendahkan martabat manusia.
- 4) Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan.
- 5) Adanya gagasan persamaan di muka hukum.
- 6) Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

c. *Family Model*

Family Model adalah Sistem Peradilan Pidana yang dipelopori oleh John Griffith. Ia menegaskan sebagai berikut:¹⁰⁶

"a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family, whom the parent might reprove but ought not to reject" (Terjemahan bebas: pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi untuk pengendalian kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan).

Menurut John Griffith, Herbert L. Packer tidak memberikan dua model sistem peradilan pidana, tetapi hanya satu model, yaitu *battle model*. Hal tersebut didasarkan pada ideologi yang dianut oleh *crime control model* dan *due process model* adalah *to put a suspected criminal in jail*.¹⁰⁷ John Griffith mencoba mengajukan ideologi alternatif dalam memandang pelaku bahwa

106 Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 9-10.

107 John Griffith, *op.cit.*, hlm. 367.

seorang pelaku harus di-*treatment* dengan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Agar muncul perasaan bahwa ia (si petindak) merupakan bagian dari 'keluarga' yang sedang dinasihati.

d. *Medical Model*

Empat puluh tahun setelah *medical model* ilmu pidana yang berorientasi pada sistem pemasyarakatan rehabilitatif yang mendominasi Amerika dari Perang Dunia II sampai tahun 1970-an mulai ditinggalkan. *Brown vs Plata* menunjukkan kembalinya analisis kedokteran dan masalah penyakit publik, pada pandangan publik didasarkan pada imanasasi terhadap penjara dan pemahaman konstitusional terhadap penghukuman yang manusiawi.

Hal tersebut didasarkan pada gambaran yang mengejutkan bahwa tahanan yang menderita penyakit mental dan fisik kronis yang kompleks lebih mengingatkan pada penjara abad pertengahan dari penjara modern. Kasus *Brown vs Plata* lebih menggambarkan bahwa sistem pemasyarakatan yang telah bergeser jauh sekali dari asal pemasyarakatan *medical model* yang lama telah teruji secara ilmiah dalam pengobatan pidana.¹⁰⁸

e. *Bureaucratic Model*

Penyelesaian sengketa di antara warga negara merupakan salah satu pelaksanaan fungsi utama dari pemerintahan, yaitu meskipun terjadi pelanggaran kewenangan antara beberapa institusi administrasi berdasarkan sejarah termasuk ke ranah peradilan, pentingnya peradilan dan prosesnya tersebut sebagaimana disebutkan dengan jelas oleh Thurmond Arnold sebagai Simbol dari Pemerintahan.

Sebuah penilaian yang berarti dari tenor keadilan dalam masyarakat harus fokus pada sidang pengadilan, sementara pengadilan banding lebih dibersihkan dan terisolasi dari realitas yang paling sengketa. Selain itu, mereka memengaruhi langsung hanya sebagian kecil dari semua warga negara yang datang dalam kontak dengan peradilan.

Beberapa persidangan di pengadilan yang paling menarik untuk memeriksa adalah pengadilan pidana, khususnya pengadilan kejahatan

108 Jonathan Simon, *The Return of the Medical Model: Disease and the Meaning of Imprisonment from John Howard to Brown vs Plata*, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol 48, 2013, hlm. 217.

yang taruhannya tertinggi untuk kedua terdakwa dan masyarakat yang mana pemerintah terlibat sebagai inisiator, peserta, dan mediator.¹⁰⁹

Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

f. *Just Deserts Model*

Teori *Just Deserts* merupakan derivasi dari pendapat Immanuel Kant. Dalam bukunya, Kant berpandangan bahwa manusia merupakan agen yang bersifat bebas berakal. Oleh karena itu, setiap orang harus mengetahui akibat hukum dari setiap tindakan dan harus menerima "*deserts*" (ganjaran) dari setiap perbuatannya.

Teori Pidanaan *Just Deserts* menganjurkan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Filsafat pidanaan *just deserts* menekankan pentingnya proses hukum, penentuan hukuman, dan penghapusan diskresi peradilan dalam praktik peradilan pidana.

Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya dan setiap tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya. Hanya mereka yang bersalah yang dihukum, juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

Kegagalan untuk menghukum yang bersalah, menurut Kant, merupakan pelanggaran terhadap keadilan, tetapi Kant menyatakan bahwa ganjaran dalam bentuk hukuman dari pengadilan hanya harus ditimbulkan untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan dan bukan untuk tujuan lain.

Untuk mempertahankan alasan moral dari teori tersebut, *just deserts theory* mengajukan pertimbangan bahwa pelaku seharusnya dihukum, tetapi hanya karena pelaku patut menerima hukuman tersebut. Penganut *just deserts theory* mengklaim, walaupun terdapat keuntungan positif lainnya yang mungkin muncul sebagai hasil dari pidanaan, misalnya

109 Peter F. Nardulli et al., *Criminal Courts and Bureaucratic Justice: Concessions and Consensus in the Guilty Plea Process*, Northwestern University, School of Law, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 76, No. 4, 2009, hlm. 1104.

seperti pencegahan kejahatan lebih lanjut. Hal tersebut merupakan akibat sampingan (*incidental effects*) dan bukan merupakan tujuan dari pembedaan.

g. *Integrated Criminal Justice System Model*

Nilai-nilai yang mendasari *Integrated Criminal Justice System Model* atau Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah:

- 1) menuntut adanya keselarasan hubungan antarsubsistem secara administrasi;
- 2) menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pembedaan yang dianut;
- 3) menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
- 4) menjaga hukum dan ketertiban.¹¹⁰

Tujuan dari Sistem Peradilan pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan, antara lain:¹¹¹

- 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- 3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Apabila sistem peradilan pidana diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antarsubsistem, manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, juga bermanfaat dalam hal berikut.¹¹²

110 TIM FH-UI, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum*, 2001, hlm. 4-6.

111 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994, hlm. 84-85.

112 HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK, 2012, hlm. 4.

- 1) Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu, yaitu polisi. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan.
- 2) Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
- 3) Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional.
- 4) Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat.

Muladi menyetujui apabila penyebutan Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut lebih diarahkan untuk memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan. Menurut *Black's Law Dictionary*,¹¹³ rumusan Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* adalah:

"... the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...."

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang sesungguhnya adalah tidak hanya pemahaman dalam konsep "integrasi" itu sendiri, tetapi juga mencakup makna substansial dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi, tetapi menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi.

Oleh karena itu, penegakan hukum pidana materiel yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

5. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 memiliki sepuluh asas sebagai berikut.

113 Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, West Group, 2006, hlm. 381.

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada pembedaan perlakuan (*asas equality before the law*).
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (*asas legalitas*).
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*asas presumption of innocence*).
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi (*Asas Remedy and Rehabilitation*).
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (*Fair, Impartial, Impersonal, and Objective*).
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (*Legal Assistance*).
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum (*asas miranda rule*).
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (*Asas Presentai*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (*Asas Keterbukaan*).

- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (*asas pengawasan*).

6. Tindak Pidana Delik

Dalam memberikan pembahasan mengenai definisi tindak pidana, penulis mencoba memberikan penguraian serta pemahaman awal tentang tindak pidana dari berbagai sumber yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan ini. Para ahli hukum pidana Indonesia memberikan pengertian yang berbeda-beda dalam memberikan pengertian istilah *strafbaar feit*.

Strafbaar feit terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Adami Chazawi¹¹⁴ menguraikan beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli, yaitu sebagai berikut.

- a. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu "kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan".
- b. R. Tresna menyatakan bahwa *peristiwa pidana* adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan yang diadakan tindakan penghukuman.

Dalam merumuskan pandangan tentang definisi dari *strafbaar feit*, para ahli memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*.

Amir Ilyas menguraikan beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli, yaitu:

- a. Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan".

¹¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 67.

- b. Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai "suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".
- c. Menurut Pompe,¹¹⁵ ada dua macam definisi terkait *strafbaar feit*.
 - 1) Definisi teoretis, yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - 2) Definisi yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat, berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Istilah *strafbaar feit* disebut juga istilah tindak pidana. Tindak pidana sering juga disebut dengan kata "delik" dari bahasa Latin *delictum*.

Menurut Adami Chazawi,¹¹⁶ ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, baik yang digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu sebagai berikut.

- a. Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dan beberapa ketentuan perundangan lainnya.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna, H.J. van Schravendijk, A. Zainal Abidin. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
- c. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

¹¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 67.

dijumpai dalam berbagai literatur yang ditulis oleh beberapa ahli hukum, seperti E. Utrecht, walaupun ia juga menggunakan istilah lain, yaitu peristiwa pidana. A. Zainal Abidin dan Moeljatno juga menggunakan istilah ini walaupun menurut Moeljatno lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

Moeljatno¹¹⁷ dengan menggunakan istilah perbuatan pidana mendefinisikan sebagai berikut:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut."

E. Utrecht (Leden Marpaung, 2009: 7)¹¹⁸ memakai istilah "peristiwa pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang menyalahi undang-undang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada alasan pembeda (pemaaf), dan memiliki sanksi pidana.

7. Macam-macam Hukum Pidana

Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan sebagai berikut.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

¹¹⁸ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 7.

- 1) Hukuman mati. Beberapa negara telah menghapuskan bentuk hukuman mati, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang-kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.¹¹⁹

Pidana ini merupakan pidana terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),¹²⁰ pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat (4) KUHP),¹²¹ pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP,¹²² Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 KUHP, yaitu:

"Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri."

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati termasuk urutan pertama jenis pidana pokok. Dalam praktiknya, undang-undang masih memberikan alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.¹²³ Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari presiden (kepala negara) berupa penolakan grasi walaupun terpidana tidak mengajukan permohonan grasi.

Pidana mati ditunda jika terpidana yang dijatuhi hukuman mati menderita sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperlihatkan kemanusiaan.

- 2) Hukuman penjara, hukuman penjara dibedakan dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara.¹²⁴ Hukuman penjara

119 Subandi A.L. Marsudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 146-154.

120 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 134.

121 *Ibid.*, hlm. 142.

122 *Ibid.*, hlm. 52.

123 lihat Pasal 340 KUHP *Ibid.*, hlm. 134.

124 *Ibid.*, Subandi AL Marsudi, hlm. 146-154.

sementara adalah minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, pelaku terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.¹²⁵

Menurut Andi Hamzah, pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, melainkan juga berupa pengasingan. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:¹²⁶

"Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut."

Perihal mengenai hukuman penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP, yaitu sebagai berikut.¹²⁷

- a) Pidana penjara seumur hidup atau sementara.
- b) Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan dengan pidana yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal masa lima belas tahun itu dilampaui, sebab pidana ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.
- d) Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 2 puluh tahun.

125 Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 59-61.

126 Amir Ilyas, 2012, hlm. 110.

127 Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 6.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan seterusnya.

- 3) Hukuman seumur hidup, adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP¹²⁸ yang menyebutkan pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, apabila pidana penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.

Contoh kasusnya adalah seseorang dipidana penjara seumur hidup ketika ia berusia 21 tahun, yang bersangkutan hanya akan menjalani hukuman penjara selama 21 tahun. Hal itu tentu melanggar ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP¹²⁹ karena lamanya hukuman yang dijalani oleh terpidana, yaitu 21 tahun-melebihi batasan maksimal 20 tahun.

- 4) Hukuman kurungan, hukuman ini tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda.

Perbedaan hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan, terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya jika ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja. Selain itu, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan. Terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib), sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.¹³⁰

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, yaitu merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah

Lembaga Pemasyarakatan. Perihal mengenai hukuman kurungan ini telah diatur dalam Pasal 18 KUHP¹³¹ bahwa:

- a) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun.
- b) Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.
- c) Pidana kurungan tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terdakwa sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.

- 5) Hukuman denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.¹³²

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, bahkan lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena ia telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Lebih lanjut pada Pasal 30 KUHP¹³³ pada prinsipnya perihal mengenai pidana denda keberadaannya harus mengacu pada hal-hal sebagai berikut.

- a) Besarnya denda itu sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b) Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- c) Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

128 *Ibid.*, hlm. 6.

129 *Ibid.*

130 Subandi A.L. Marsudi, *loc.cit.*, hlm. 146-154.

131 Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 13.

132 *Ibid.*, Fully Handayani, hlm. 59-61.

133 Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 16-17.

d) Lamanya itu dalam putusan hakim di tentukan sebagai berikut:

- (1) Jika denda atau setengah rupiah atau kurang, gantinya satu hari.
- (2) Jika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari.

e) Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah, karena ada gabungan kejahatan, karena berulang membuat kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP.¹³⁴

f) Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak lebih dari delapan bulan (Pasal 30 KUHP).¹³⁵

6) Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.¹³⁶

b. Pidana Tambahan

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, tetapi harus disertakan pada hukuman pokok. Jenis-jenis hukuman tambahan tersebut, yaitu sebagai berikut.

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hal-hal yang menyangkut pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, di dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 KUHP.¹³⁷

Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP¹³⁸ penjatuhannya oleh hakim tidak dapat dijatuhkan secara terpisah (tidak dapat dipisahkan) dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya, apabila hakim hendak menjatuhkan pidana berupa pencabutan beberapa

hak tertentu, seorang hakim harus menyertakan di dalamnya pencabutan beberapa hak tertentu bersama dengan pidana pokok.

Dari penjelasan di atas, secara garis besar bahwa apa pun jenis kejahatannya ataupun pelanggaran, hakim dapat sekaligus menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Waluyadi (2003: 213), yang mengatakan:

“Undang-undang ternyata tidak menjelaskan secara limitatif tentang kriteria yang dapat dipedomani oleh hakim sehingga ia menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu. Dalam arti, apakah seluruh kejahatan dan pelanggaran yang terdapat di dalam KUHP dapat dikenakan pidana tambahan tersebut, di samping pidana pokoknya.”

2) Penyitaan Barang-barang Tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 39 KUHP¹³⁹ yang mengatur sebagai berikut.

- a) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk mengerjakan kejahatan, boleh dirampas.
- b) Jika seseorang dipidana karena melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran, boleh juga dijatuhkan pidana rampasan itu dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Pidana rampasan itu boleh juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita.

3) Pengumuman keputusan hakim

Pasal 195 KUHP¹⁴⁰ menyatakan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, di samping ketentuan Pasal 195 KUHP¹⁴¹ yang menegaskan

134 *Ibid.*, hlm. 25-26.

135 *Ibid.*, hlm. 16-17.

136 *Ibid.*, Subandi A.L. Marsudi, hlm. 146-154.

137 Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 19-20.

138 *Ibid.*, hlm. 6.

139 *Ibid.*, hlm. 21.

140 *Ibid.*, hlm. 311.

141 *Ibid.*

- 2) pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Beberapa teori telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi (Amir Ilyas, 2012: 97), teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:

- 1) teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
- 2) teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*);
- 3) teori gabungan (*vernegins theorien*).

b. Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan

Secara singkat, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut fungsional (dari sudut bekerjanya, berfungsi, dan proses), dan sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif).

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana yang secara keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Melalui definisi di atas, sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri atas subsistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, subsistem Hukum Pidana Formal, dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

Ketiga subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan (ditegakkan) secara konkret hanya dengan salah satu subsistem tersebut. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional (sistem pemidanaan dalam arti luas).

Dilihat dari sudut norma-substantif (dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan atau keseluruhan

sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dengan pengertian demikian, keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada dalam KUHP ataupun Undang-Undang (UU) khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri atas "aturan umum" (*general rules*) dan "aturan khusus" (*special rules*).

Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, sedangkan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP ataupun dalam Undang-Undang (UU) Khusus di luar KUHP.

c. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Dengan demikian, pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya karena yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana. Pada satu pihak, pemidanaan

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pada pihak lain, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*). Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok berikut.

- 1) Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- 2) Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
- 3) Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, yaitu pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* bahwa pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integratif, perangkat tujuan pemidanaan adalah: (a) pencegahan umum dan khusus; (b) perlindungan masyarakat; (c) pemeliharaan solidaritas masyarakat; (d) pengimbangan (pengimbangan). Mengenai tujuan merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Demikian pula, model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama. Adapun pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan.

Ada dua kritik terhadap teori *just desert* ini. *Pertama*, teori ini menempatkan secara utama dan menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan. Dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya. Dengan demikian, teori ini sering memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama.

Kedua, secara keseluruhan, tetapi eksklusif, teori ini menekankan pada pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan memengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.

Di samping *just desert model*, ada pula model lain, yaitu *restorative justice model* yang sering dihadapkan pada *retributive justice model*. Van Ness menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkas dalam beberapa karakteristik berikut.

- 1) *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking.*
- 2) *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*

- 3) *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*

Secara lebih terperinci, Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik berikut.

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
- 6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator dalam proses restoratif.
- 8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
- 9) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
- 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis.
- 11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relativis dasar-dasar struktur dari sistem tersebut harus diubah, dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol. Adapun pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.

Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas terhadap nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antarsesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang menyebabkan korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh—korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka—dan memberikan keutamaan pada kepentingan mereka.

Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apa pun. Selanjutnya, *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam konsep dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”. Dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran berikut.

- 1) Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Tujuan pemidanaan merupakan bagian integral (subsistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping subsistem lainnya, yaitu subsistem, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana.

- 3) Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali (kontrol, pengarah) dan sekaligus memberikan landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.
- 4) Dilihat secara fungsional (operasional), sistem pemidanaan merupakan rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif).

Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap tersebut sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam penerapan tentang kebutuhan perlindungan masyarakat ini, Rancangan KUHP mengatur adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu. Adapun ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan Rancangan KUHP dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.

Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana.

Terhadap setiap pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan, perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat daripada putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa: (a) pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau (b) penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan terpidana, yaitu dengan menyatakan bahwa terhadap terpidana yang memenuhi syarat-syarat dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan.

Dengan pengertian ini, hal-hal yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah: (a) kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; (b) perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pemidanaan kepada pelaku bertujuan mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Salah satu perkembangan dalam Rancangan KUHP berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Tindakan adalah perlakuan (*treatment*) yang dikenakan oleh pelaku yang memenuhi beberapa ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Rancangan KUHP atau tindakan yang dikenakan kepada seorang pelaku bersama-sama dengan pidana pokoknya. Jenis-jenis tindakan yang dikenakan kepada pelaku yang memenuhi ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 berupa:

1. perawatan di rumah sakit jiwa;
2. penyerahan kepada pemerintah; atau
3. penyerahan kepada seseorang.

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok terdiri atas:

1. pencabutan surat izin mengemudi;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. latihan kerja;
5. rehabilitasi; dan/atau
6. perawatan di lembaga.

Penjelasan Pasal 101 menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan.

Penetapan sanksi berupa tindakan ini harus sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Ketentuan Pasal 102 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Pengenaan tindakan ini bukan didasarkan atas ancaman yang terdapat dalam tindak pidananya, karena memang tidak ada tindak pidana yang diancamkan dengan pengenaan tindakan, tetapi didasarkan pada kondisi pelaku.

Ada dua kelompok pelaku yang dapat dikenakan tindakan, yaitu orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab dan orang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) secara teoretis telah dianut dalam KUHP, tetapi sanksi tindakan hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah umur sebagaimana dirumuskan pada Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.¹⁴²

Dalam perkembangannya, perundang-undangan di luar KUHP telah menerima konsep perluasan pengenaan jenis sanksi tindakan yang juga dapat diancamkan terhadap orang yang tidak mampu bertanggung jawab

dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis tindakan dalam pola pemidanaan dalam beberapa regulasi di Indonesia ini hanya dianggap sebagai sanksi yang bersifat komplementer atau pelengkap dan tidak ada bedanya dengan jenis sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Meskipun telah ada sanksi tindakan yang bersifat mandiri atau sebagai sanksi alternatif, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada penjelasan yang memadai mengenai argumentasi atau landasan pengenaan sanksi tindakan yang bersifat mandiri tersebut.

Sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan KUHP terlihat bahwa merupakan sanksi yang bersifat mandiri untuk tindakan sudah menunjuk secara jelas tentang pihak yang dapat dikenai sanksi tindakan tersebut, yaitu setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.

Sanksi tindakan berupa: (a) pencabutan surat izin mengemudi, (b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, (c) perbaikan akibat tindak pidana, (d) latihan kerja, (e) rehabilitasi, dan/atau (f) perawatan di lembaga bukan merupakan sanksi yang mandiri karena hanya bisa dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokoknya.

Beberapa tindakan yang dirumuskan juga ditujukan untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku, di antaranya tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, tindakan berupa latihan kerja, dan tindakan berupa rehabilitasi.

Beberapa tindakan turut diberikan pengaturan yang menunjukkan kebutuhan bagi pelaku yang dikenai pidana. Misalnya, untuk tindakan berupa latihan kerja yang harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana, kemampuan pembuat tindak pidana, dan jenis latihan kerja yang dalam menentukan jenis latihan kerja ini, latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan dan tempat tinggal pembuat tindak pidana wajib diperhatikan.

Perumusan dan penegasan tentang sistem penggunaan *double track system* dengan mengatur secara khusus tentang sanksi tindakan menunjukkan bahwa pandangan baru yang diadopsi untuk menuju ke sistem pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

142 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*..., op.cit., hlm. 23-24.

Pengaturan dalam Rancangan KUHP ini relatif lebih maju karena sanksi tindakan bukan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mampu bertanggung jawab dan mengalami gangguan jiwa sebagaimana dianut dalam paham klasik, melainkan juga bagi pihak yang mampu bertanggung jawab.

Penetapan sanksi berupa tindakan ini juga merupakan bentuk penegasan tentang berbagai alternatif penentuan sanksi dengan diberikannya hak kepada pengadilan untuk mengadakan kebijaksanaan dalam penjatuhannya. Hal ini sejalan dengan hukum pidana modern tentang individualisasi pidana yang mensyaratkan adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang patut (*proper*) untuk individu yang bersangkutan meskipun dalam batas-batas yang ditentukan dengan undang-undang sebagaimana diisyaratkan, penjatuhannya harus mempertimbangkan ketentuan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Aliran ini berpandangan bahwa dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhannya penderitaannya berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi.

Menurut Kant,¹⁴³ pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum merupakan syarat mutlak menurut hukum dan keadilan. Hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Adapun Stahl¹⁴⁴ mengemukakan bahwa:

"Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya."

143 Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana I: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, 2012, hlm. 98.

144 *Ibid.*

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart¹⁴⁵ bahwa:

"Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhannya pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya."

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana. Karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, di samping tujuan lainnya, terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatschappelijke orde*).

Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu, pidana merupakan sesuatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan, yaitu sebagai berikut.

a) *Prevensi umum*

Prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel,¹⁴⁶ teori pencegahan umum ini adalah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut berbuat jahat.

b) *Prevensi khusus*

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya ke dalam bentuk perbuatan nyata. Van Hamel¹⁴⁷ membuat suatu gambaran berikut ini tentang pemidanaan bersifat pencegahan khusus.

145 *Ibid.*, hlm. 99.

146 *Ibid.*, hlm. 100.

147 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 166.

- (1) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- (2) Akan tetapi, apabila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- (3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau menjadikan mereka tidak berdaya.
- (4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

3) Teori Gabungan

Di samping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang dinamakan teori gabungan. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini muncul karena kelemahan dalam teori absolut dan relatif. Amir Ilyas¹⁴⁸ menyatakan kelemahan kedua teori tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Kelemahan teori pembalasan:
 - (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, pada kasus pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, tetapi harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
 - (2) Apabila dasar teori ini adalah untuk pembalasan, mengapa hanya negara yang memberikan pidana?
- b) Kelemahan teori tujuan:
 - (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, pelaku kejahatan yang ringan akan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk

menakut-nakuti sehingga menjadi tidak seimbang, hal mana bertentangan dengan keadilan.

- (2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya, jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan akan diabaikan.
- (3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya, terhadap residivis.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar berikut.

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini adalah Pompe¹⁴⁹ yang berpandangan:

"Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian, terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum."

Van Barmell¹⁵⁰ yang menganut teori ini menyatakan:

"Pidana' bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara 'tindakan' bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat."

- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan

148 Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana I: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, op.cit., hlm. 101.

149 Ibid., hlm. 102.

150 Ibid., hlm. 102.

adalah sifat suatu pidana, tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Pendukung teori ini adalah Vos¹⁵¹ yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum, yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya, tetapi juga pada penjatuhannya secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti.

Oleh karena itu, penjatuhannya tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan dalam teori tujuan). Dengan demikian, penjatuhannya suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat di samping kepada masyarakat. Jadi, harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dan kejahatan yang telah dilakukan.

d. Ide-ide Dasar Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan dituangkan dalam konsep yang dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip berikut.

- 1) Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- 2) Ide keseimbangan antara *social welfare* dan *social defence*.
- 3) Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/*offender* (individualisasi pidana) dan *victim* (korban).
- 4) Ide penggunaan *double track system* (antara pidana/*punishment* dan tindakan/*treatment/measures*).
- 5) Ide mengefektifkan *non custodial measures* (*alternatives to imprisonment*).
- 6) Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*elasticity/flexibility of sentencing*).
- 7) Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*).

151 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, loc.cit., hlm. 168.

- 8) Ide subsidiaritas dalam memilih jenis pidana.
- 9) Ide maafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*).
- 10) Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Bertolak dari ide-ide dasar tersebut, dalam konsep tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Adanya pasal yang menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*asas culpabilitas*) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang *strict liability* dan *vicarious liability*.¹⁵²
- 2) Adanya batas usia pertanggungjawaban pidana anak (*the age of criminal responsibility*).¹⁵³
- 3) Adanya bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak (Bab III Bagian Keempat).
- 4) Adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversifikasi).¹⁵⁴
- 5) Adanya pidana mati bersyarat.¹⁵⁵
- 6) Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat.¹⁵⁶
- 7) Adanya pidana kerja sosial, pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan kewajiban menurut hukum yang hidup.¹⁵⁷
- 8) Adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya.¹⁵⁸
- 9) Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan).

152 Pasal 35.

153 Pasal 46.

154 Pasal 111.

155 Pasal 86.

156 Pasal 67 jo. 69.

157 Pasal 62 jo. 64.

158 Pasal 66, 82, 120, 121, 130, 137.

- 10) Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri.¹⁵⁹
- 11) Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal.¹⁶⁰
- 12) Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif.¹⁶¹
- 13) Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apa pun kepada terdakwa sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.¹⁶²
- 14) Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas "*culpa in causa*" atau asas "*actio libera in causa*").¹⁶³
- 15) Dimungkinkannya perubahan (modifikasi) putusan pembedaan, walaupun sudah berkekuatan tetap.¹⁶⁴

9. Proses Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri

Jalur untuk mengetahui adanya tindak pidana adalah melalui sebagai berikut.

- a. *Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.*¹⁶⁵

¹⁵⁹ Pasal 64 Ayat 2.

¹⁶⁰ Pasal 56-57.

¹⁶¹ Pasal 58.

¹⁶² Pasal 52 Ayat 2.

¹⁶³ Di dalam RUU 2004, redaksi Pasal 54 terdapat juga dalam Pasal 37 dan 53. Seharusnya hanya Pasal 54 saja (lihat Tabel Lampiran).

¹⁶⁴ Pasal 55 dan Pasal 2 Ayat 3.

¹⁶⁵ Untuk lebih jelas, lihat kembali Pasal 1 butir 25 KUHP.

- b. *Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.*¹⁶⁶

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHP,¹⁶⁷ penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan berikut.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.¹⁶⁸
2. Mencari keterangan dan barang bukti.¹⁶⁹
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.¹⁷⁰
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas.¹⁷¹

¹⁶⁶ Untuk lebih jelas, lihat kembali Pasal 1 butir 24 KUHP.

¹⁶⁷ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 230.

¹⁶⁸ Untuk lebih jelas lihat Pasal 5 KUHP.

¹⁶⁹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab...*, Pasal 5 KUHP.

¹⁷⁰ Perhatikan Pasal 5 KUHP, Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 235.

¹⁷¹ Pasal 5 KUHP.

7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.¹⁷²

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, dilanjutkan dengan tahap penyidikan.

Menurut Pasal 1 Butir 2 KUHAP, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.¹⁷³
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.¹⁷⁴
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.¹⁷⁵
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.¹⁷⁶
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

172 Perhatikan dengan cermat dan pahami Pasal 16 Ayat (1) KUHAP.

173 Poin nomor 1 s.d. 3, 6, 7, 9, mempunyai kedudukan yang sama Pasal 7 KUHAP.

174 Perhatikan dengan cermat dan pahami Pasal 7 jo Pasal 131 KUHAP.

175 Perhatikan dengan cermat Pasal 7 jo Pasal 132 Ayat (2), (3), (4), (5) KUHAP.

176 Perhatikan dan pahami Pasal 7 jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 133 Ayat (1) KUHAP.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹⁷⁷
12. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.¹⁷⁸
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.¹⁷⁹
14. Penyerahan berkas perkara dilakukan:
 - a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada penuntut umum.¹⁸⁰
15. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Penangkapan.
 - c. Penahanan.
 - d. Penggeledahan.
 - e. Pemasukan rumah.
 - f. Penyitaan benda.
 - g. Pemeriksaan surat.
 - h. Pemeriksaan saksi.
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian.
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.¹⁸¹

177 Perhatikan dan pahami Pasal 7 Ayat (3) KUHAP.

178 Perhatikan dan pahami Pasal 8 Ayat (1) KUHAP.

179 Perhatikan dengan cermat dan pahami Pasal 8 Ayat (2) KUHAP.

180 Perhatikan dan pahami Pasal 8 Ayat (3) KUHAP.

181 Perhatikan dan pahami Pasal 75 KUHAP.

16. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.¹⁸²
17. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.¹⁸³
18. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan.¹⁸⁴
19. Melakukan penyidikan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi.¹⁸⁵
20. Seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.¹⁸⁶

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum melakukan upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri atas:

- a. Penangkapan, menurut Pasal 1 Butir 20 KUHP¹⁸⁷ merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b. Penahanan, menurut Pasal 1 Butir 21 KUHP merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, hakim yang penetapannya diatur dalam undang-undang.

182 Perhatikan dan pahami Pasal 110 Ayat (2) KUHP.

183 Lihat Pasal 31 Ayat (1) KUHP.

184 Lihat Pasal 31 Ayat (2) KUHP.

185 Lihat Pasal 110 Ayat (3) KUHP.

186 Lihat Pasal 114 KUHP.

187 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 232.

- c. Penyitaan, menurut Pasal 1 Butir 16 KUHP¹⁸⁸ adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- d. Penggeledahan Rumah, menurut Pasal 1 Butir 17 KUHP¹⁸⁹ merupakan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, pasal tersebut diketahui bahwa tujuan penggeledahan rumah adalah untuk melakukan tindakan pemeriksaan, melakukan tindakan penyitaan, dan tindakan penangkapan.
- e. Penggeledahan Badan, menurut Pasal 1 Butir 18 KUHP penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Pemeriksaan badan atau pakaian hanya bertujuan mencari benda-benda yang tersembunyi di dalam badan untuk disita. Adapun benda yang dicari tersebut haruslah yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan atau yang dituduhkan.

Tindakan penggeledahan dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik dan penyidik sendiri. Penyelidik dalam hal ini adalah setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang dalam penggeledahan rumah atau badan hanya dapat bertindak atas perintah dari penyidik.¹⁹⁰

Sementara itu, karena kewenangan yang diberikan oleh KUHP, penyidik dapat melakukan penggeledahan sendiri terkait dengan perkara yang ditanganinya,¹⁹¹ tetapi dalam melakukan tindakan penggeledahan, ada syarat-syarat formal yang wajib dipenuhi oleh penyidik, kemudian menyalurkan hasil penyidikan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk

188 *Ibid.*, hlm. 231.

189 *Ibid.*, hlm. 231-232.

190 Perhatikan Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) KUHP, Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*..., hlm. 235.

191 Perhatikan Pasal 7 Ayat (1) Huruf (d) KUHP, *ibid.*, hlm. 236.

dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.

Menurut Pasal 38 KUHP,¹⁹² penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas.

Apabila penuntut umum menilai BAP tersebut telah lengkap, penuntut umum membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan sebagaimana tertulis pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 yang menyebutkan hal-hal khusus yang harus diperhatikan terkait masalah penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian sebagai berikut.

- a. Penggeledahan badan, khususnya terhadap wanita, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu wanita atau dapat meminta bantuan seorang wanita yang dapat dipercaya.
- b. Jika perlu dilakukan pemeriksaan penggeledahan rongga badan dapat diminta bantuan pejabat kesehatan/paramedis.
- c. Penggeledahan pakaian, harus dilakukan di ruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum.

Dengan demikian, seorang wanita yang akan digeledah, khususnya pada bagian rongga badan, dapat menolak untuk digeledah/diperiksa jika penyidik/penyidik pembantunya bukanlah seorang wanita. Setelah melakukan penggeledahan, penyidik wajib memberikan berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

C. Pidana Mati

Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden. Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.

Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang

sakit jiwa tersebut sembuh. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:

1. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
2. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
3. kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak terlalu penting;
4. ada alasan yang meringankan.

Apabila terpidana mati selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Akan tetapi, apabila terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

1. Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati

Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP,¹⁹³ kemudian dengan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat oleh Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana.

Pelaksanaan eksekusi harus dihadiri jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis, pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian. Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati harus dilaksanakan setelah putusan pengadilan dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan terpidana telah

192 Perhatikan Pasal 38 KUHP, *ibid.*, hlm. 249-250.

193 *Ibid.*, hlm. 6.

diberi kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui *fiat executie* (persetujuan presiden).

Oleh karena itu, pidana mati seharusnya dapat dijadikan sebagai sarana *penal* yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dianggap membahayakan kehidupan masyarakat luas, bahkan negara. Pidana penjara secara normatif tidak ada kaitannya sama sekali, tetapi pidana mati dipergunakan sebagai sarana bagi negara untuk merampas kemerdekaan terpidana menjelang dilaksanakan eksekusi agar ia tidak melarikan diri.

Dinamika permasalahan sarana pidana penjara terhadap pidana mati dijatuhkan negara sebagai bentuk hukuman tambahan terhadap terpidana mati. Dikatakan demikian karena kecenderungan yang terjadi adalah pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga seolah-olah sebagian besar terpidana mati menjalani dua bentuk hukuman sekaligus, yaitu dengan diawali pidana penjara terlebih dahulu, diikuti pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padanya, yaitu pidana mati.

Permasalahan ini menyebabkan semakin kompleksnya problematika pada pidana mati. Kini topik problematika pada pidana mati menjadi pemberitaan hangat menyangkut problematika penundaan eksekusi pidana mati.¹⁹⁴

2. Akibat Hukum Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati

Secara yuridis normatif, penundaan pelaksanaan pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) yang menyebutkan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Penundaan pelaksanaan pidana mati menyebabkan terpidana mati mengalami penderitaan lebih dari satu sanksi pidana. Hal ini bertentangan dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Untuk menghindari pelanggaran terhadap terpidana mati, eksekusi terhadap terpidana mati yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan dan segera dibuat aturan peraturan perundang-undangan yang pasti tentang penundaan pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89 Ayat (1), yang menyebutkan adanya penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila:

1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki.
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan
4. Ada alasan yang meringankan.

Berikut ini beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang penundaan eksekusi pidana mati telah melanggar hak asasi manusia.¹⁹⁵

a. Pertentangan Penundaan Pidana Mati dengan Pasal 28 Huruf (d) Ayat (2) UUD 1945 tentang Hak untuk Mendapatkan Kepastian Hukum

Penulis mencermati kasus yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1988, tetapi pelaksanaan pidana mati keduanya baru dilakukan pada tahun 2008. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun tersebut, mereka mengalami situasi ketidakpastian hukum tentang waktu dan kapan dilaksanakannya pidana mati. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf d Ayat (2):

"Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Situasi ketidakpastian hukum yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng termasuk dalam kualifikasi tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apabila ditelaah secara mendalam tentang substansi ketentuan Pasal 28 Huruf (d) Ayat (2) tersebut, jelas bahwa pada dasarnya

194 J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 75.

195 Tri Wahyudi, *Problematisasi Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum*, Mahkamah Agung: *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2, 2012, hlm. 23-24.

- 3) Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali (kontrol, pengarah) dan sekaligus memberikan landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.
- 4) Dilihat secara fungsional (operasional), sistem pemidanaan merupakan rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif).

Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap tersebut sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam penerapan tentang kebutuhan perlindungan masyarakat ini, Rancangan KUHP mengatur adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu. Adapun ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan Rancangan KUHP dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.

Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana.

Terhadap setiap pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan, perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat daripada putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa: (a) pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau (b) penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan terpidana, yaitu dengan menyatakan bahwa terhadap terpidana yang memenuhi syarat-syarat dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan.

Dengan pengertian ini, hal-hal yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah: (a) kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; (b) perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pemidanaan kepada pelaku bertujuan mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Salah satu perkembangan dalam Rancangan KUHP berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Tindakan adalah perlakuan (*treatment*) yang dikenakan oleh pelaku yang memenuhi beberapa ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Rancangan KUHP atau tindakan yang dikenakan kepada seorang pelaku bersama-sama dengan pidana pokoknya. Jenis-jenis tindakan yang dikenakan kepada pelaku yang memenuhi ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 berupa:

1. perawatan di rumah sakit jiwa;
2. penyerahan kepada pemerintah; atau
3. penyerahan kepada seseorang.

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok terdiri atas:

1. pencabutan surat izin mengemudi;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. latihan kerja;
5. rehabilitasi; dan/atau
6. perawatan di lembaga.

Penjelasan Pasal 101 menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan.

Penetapan sanksi berupa tindakan ini harus sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Ketentuan Pasal 102 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Pengenaan tindakan ini bukan didasarkan atas ancaman yang terdapat dalam tindak pidananya, karena memang tidak ada tindak pidana yang diancamkan dengan pengenaan tindakan, tetapi didasarkan pada kondisi pelaku.

Ada dua kelompok pelaku yang dapat dikenakan tindakan, yaitu orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab dan orang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) secara teoretis telah dianut dalam KUHP, tetapi sanksi tindakan hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah umur sebagaimana dirumuskan pada Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.¹⁴²

Dalam perkembangannya, perundang-undangan di luar KUHP telah menerima konsep perluasan pengenaan jenis sanksi tindakan yang juga dapat diancamkan terhadap orang yang tidak mampu bertanggung jawab

dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis tindakan dalam pola pemidanaan dalam beberapa regulasi di Indonesia ini hanya dianggap sebagai sanksi yang bersifat komplementer atau pelengkap dan tidak ada bedanya dengan jenis sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Meskipun telah ada sanksi tindakan yang bersifat mandiri atau sebagai sanksi alternatif, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada penjelasan yang memadai mengenai argumentasi atau landasan pengenaan sanksi tindakan yang bersifat mandiri tersebut.

Sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan KUHP terlihat bahwa merupakan sanksi yang bersifat mandiri untuk tindakan sudah menunjuk secara jelas tentang pihak yang dapat dikenai sanksi tindakan tersebut, yaitu setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.

Sanksi tindakan berupa: (a) pencabutan surat izin mengemudi, (b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, (c) perbaikan akibat tindak pidana, (d) latihan kerja, (e) rehabilitasi, dan/atau (f) perawatan di lembaga bukan merupakan sanksi yang mandiri karena hanya bisa dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokoknya.

Beberapa tindakan yang dirumuskan juga ditujukan untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku, di antaranya tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, tindakan berupa latihan kerja, dan tindakan berupa rehabilitasi.

Beberapa tindakan turut diberikan pengaturan yang menunjukkan kebutuhan bagi pelaku yang dikenai pidana. Misalnya, untuk tindakan berupa latihan kerja yang harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana, kemampuan pembuat tindak pidana, dan jenis latihan kerja yang dalam menentukan jenis latihan kerja ini, latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan dan tempat tinggal pembuat tindak pidana wajib diperhatikan.

Perumusan dan penegasan tentang sistem penggunaan *double track system* dengan mengatur secara khusus tentang sanksi tindakan menunjukkan bahwa pandangan baru yang diadopsi untuk menuju ke sistem pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

142 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*..., op.cit., hlm. 23-24.

Pengaturan dalam Rancangan KUHP ini relatif lebih maju karena sanksi tindakan bukan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mampu bertanggung jawab dan mengalami gangguan jiwa sebagaimana dianut dalam paham klasik, melainkan juga bagi pihak yang mampu bertanggung jawab.

Penetapan sanksi berupa tindakan ini juga merupakan bentuk penegasan tentang berbagai alternatif penentuan sanksi dengan diberikannya hak kepada pengadilan untuk mengadakan kebijaksanaan dalam penjatuhan sanksi. Hal ini sejalan dengan hukum pidana modern tentang individualisasi pidana yang mensyaratkan adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang patut (*proper*) untuk individu yang bersangkutan meskipun dalam batas-batas yang ditentukan dengan undang-undang sebagaimana diisyaratkan, penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan ketentuan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Aliran ini berpandangan bahwa dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi.

Menurut Kant,¹⁴³ pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum merupakan syarat mutlak menurut hukum dan keadilan. Hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Adapun Stahl¹⁴⁴ mengemukakan bahwa:

"Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya."

143 Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana I: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, 2012, hlm. 98.

144 *Ibid.*

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart¹⁴⁵ bahwa:

"Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethesthica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya."

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana. Karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, di samping tujuan lainnya, terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*).

Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu, pidana merupakan sesuatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan, yaitu sebagai berikut.

a) *Prevensi umum*

Prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel,¹⁴⁶ teori pencegahan umum ini adalah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut berbuat jahat.

b) *Prevensi khusus*

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya ke dalam bentuk perbuatan nyata. Van Hamel¹⁴⁷ membuat suatu gambaran berikut ini tentang pemidanaan bersifat pencegahan khusus.

145 *Ibid.*, hlm. 99.

146 *Ibid.*, hlm. 100.

147 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 166.

3. Rumusan Delik Eksekusi Pidana Mati pada KUHP dan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur cara dan syarat yang boleh dilakukan untuk pencabutan atau penundaan pidana mati, sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) penundaan tercantum dalam Pasal 89, yaitu pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.

Jika terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan ada alasan yang meringankan. Apabila ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, dapat diubah menjadi tindak pidana seumur hidup atau tindak pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri hukum dan HAM.

Menurut Pasal 90, apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan dipidana mati tidak dilaksanakan 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa pidana mati bertujuan untuk mengayomi masyarakat, dan bukan menjadi jenis pidana pokok semata, melainkan menjadi jalur alternatif dalam penjatuhannya. Pengaturan pidana mati di dalam KUHP diperuntukkan bagi empat jenis kejahatan, yaitu antara lain:

1. Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, 111 Ayat (2), 124 Ayat (3), dan 140 Ayat (3)).¹⁹⁶
2. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat (4)).¹⁹⁷
3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340).¹⁹⁸

196 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 44-58.

197 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, hlm. 141-142.

198 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., hlm. 134.

4. Kejahatan Pelayaran Pasal 444,¹⁹⁹ 479 huruf (k) Ayat (2), dan 479 huruf (o) Ayat (2).²⁰⁰

Adapun pidana mati dalam RUU KUHP diatur untuk tindak pidana, antara lain:

1. Tindak pidana makar, berupa makar terhadap presiden.²⁰¹
2. Pengkhianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara.²⁰²
3. Tindak pidana sabotase dan pada waktu perang.²⁰³
4. Tindak pidana terorisme.²⁰⁴
5. Perusakan pesawat udara.²⁰⁵
6. Tindak pidana terhadap negara sahabat (makar terhadap kepala negara sahabat).²⁰⁶
7. Tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia.²⁰⁷
8. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (narkotika),²⁰⁸ dan (psikotropika).²⁰⁹
9. Tindak pidana terhadap nyawa.²¹⁰
10. Tindak pidana jabatan (penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara).²¹¹

199 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., hlm. 172-173.

200 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., hlm. 187-189.

201 Perhatikan Pasal 215, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

202 Perhatikan Pasal 228 Ayat (2), Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

203 Perhatikan Pasal 237 Ayat (3) → (masih dalam proses RUU KUHP).

204 Perhatikan Pasal 242, 244, 247 → (masih dalam proses RUU KUHP).

205 Perhatikan Pasal 262 Ayat (2) → (masih dalam proses RUU KUHP).

206 Perhatikan Pasal 269 Ayat (2) → (masih dalam proses RUU KUHP).

207 Perhatikan Pasal 399 Ayat (2) → (masih dalam proses RUU KUHP).

208 Perhatikan Pasal 504, 506 Ayat (2) → (masih dalam proses RUU KUHP).

209 Perhatikan Pasal 513 → (masih dalam proses RUU KUHP).

210 Perhatikan Pasal 574 Ayat (3) → (masih dalam proses RUU KUHP).

211 Perhatikan Pasal 686 → (masih dalam proses RUU KUHP).

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana mati bagi pelanggarnya, antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 (Prp) tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak.
4. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
5. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
6. Pasal 36 Ayat (4) sub (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.
7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Pidana mati di Indonesia dianggap masih efektif untuk digunakan dalam sistem perumusan pidana. Hal tersebut terbukti dengan penempatan pidana mati yang masih dibubuhkan dalam perumusan RUU KUHP Indonesia, yang walaupun terdapat perbedaan, ada pula persamaan yang bersifat universal dari sistem perumusan pidana eksekusi mati tersebut. Hasil komparasi antara KUHP dan RUU KUHP ternyata menunjukkan beberapa macam persamaan dan perbedaan dalam penjatuhan pidana mati, yaitu sebagai berikut.

No.	Persamaan	KUHP	RUU KUHP
1.	Pidana mati bagi WNI di luar negeri	Pasal 6	Pasal 7
2.	Alternatif pidana penjara 20 tahun	Pasal 12	Pasal 69
3.	Pencabutan hak selamanya	Pasal 38 ayat (1) Butir 1	Pasal 94 ayat (1) huruf (a)

4.	Percobaan pidana penjara maks. 15 tahun	Pasal 47 ayat (2)	Pasal 133 ayat (2)
5.	Pidana tambahan untuk penjatuhan pidana mati	Pasal 67	Pasal 141
6.	Kewenangan untuk menuntut 18 tahun	Pasal 78	Pasal 149 ayat (1) huruf (e)
7.	Wewenang pelaksanaan hukuman mati tidak mempunyai tenggang waktu	Pasal 84 ayat (4)	Pasal 155 ayat (3)

Perbedaannya adalah sebagai berikut.

No.	Perbedaan	KUHP		RUU KUHP	
		Ada	Tidak	Ada	Tidak
1.	Penundaan pelaksanaan pidana mati	-	√	√	-
2.	Pencabutan dan penundaan pidana mati	-	√	√	-
3.	Syarat pencabutan dan penundaan pidana mati	-	√	√	-
4.	Pidana mati untuk kejahatan makar kepala negara	√	-	√	-
5.	Pidana mati untuk kejahatan makar terhadap kepala negara sahabat	√	-	√	-
6.	Pidana mati untuk pengkhianatan negara dan pembocoran rahasia negara	√	-	√	-
7.	Pidana mati untuk kejahatan negara sahabat dan kepala negara sahabat	√	-	√	-
8.	Pidana mati kejahatan perang	√	-	√	-
9.	Pidana mati untuk pencurian dengan kekerasan dan menyebabkan luka atau kematian	√	-	-	√
10.	Pidana mati untuk terorisme	-	√	√	-
11.	Pidana mati untuk perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan	√	-	√	-

12.	Pidana mati untuk pelayaran	√	-	√	-
13.	Pidana mati untuk penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika	-	√	√	-
14.	Pidana mati untuk pelanggaran HAM	-	√	√	-
15.	Pidana mati untuk kejahatan terhadap nyawa	-	√	√	-
16.	Pidana mati untuk kejahatan terhadap jabatan (penyalahgunaan wewenang)	-	√	√	-

Di samping perbedaan di atas, yang paling terlihat jelas adalah perbedaan regulasi yang diatur lebih spesifik di dalam RUU KUHP daripada di dalam KUHP. Di samping itu, pidana mati dalam RUU KUHP digunakan sebagai pidana pokok alternatif, bukan hanya sebagai pidana pokok seperti dalam sistem perumusan pidana KUHP.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial yang secara strategis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap formulasi hukum oleh lembaga legislatif, tahap penerapan hukum oleh Pengadilan, dan tahap eksekusi.²¹²

Permasalahan yang menjadi fokus pembicaraan bagian ini adalah kebijakan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang lebih penting adalah apakah peraturan saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai sudah efektif untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi, sesuai dengan harapan dari Lembaga Legislatif sebagaimana tertuang dalam Konsiderans Undang-Undang tersebut, yaitu sebagai berikut.

212 Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 77-79.

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
2. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang masing-masing Pasal-Pasal tersebut pada intinya merumuskan sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa: "Beberapa ketentuan dan penjelasan Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana diubah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan Pasal demi Pasal dirubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 1 Undang-undang ini".

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang tersebut merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹³

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC) ternyata cukup berhasil dalam

213 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas. 2009.

diterapkan karena kejahatan narkotika termasuk ke dalam kejahatan *extra ordinary crime*.

Adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku, bahkan ada terpidana narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika. Berikut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 sebagai berikut:

Pasal 113

Ayat 1: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Ayat 2: "Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 114

Ayat 1: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Ayat 2: "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 118

Ayat 1: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Ayat 2: "Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 119

Ayat 1: "Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Ayat 2: "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 121

Ayat 1: "Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Ayat 2: "Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 144

Ayat 1: "Setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga)."

Ayat 2: "Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 Ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhkan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun."

d. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur tentang penggolongan psikotropika, yaitu yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma kebergantungan. Psikotropika dapat digolongkan menjadi sebagai berikut.²²⁴

1. Psikotropika golongan I;
2. Psikotropika golongan II;
3. Psikotropika golongan III;
4. Psikotropika golongan IV.

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, dan memberantas peredaran gelap psikotropika.²²⁵

Hukuman eksekusi mati bagi pelaku dan pengedar psikotropika golongan I dapat diterapkan dan diberlakukan jika dilakukan secara terorganisasi.²²⁶ Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran ketentuan Pasal 59, dapat dijatuhkan ketentuan pidana maksimal, dan dibatasi dengan ketentuan pidana minimal.

224 Perhatikan Pasal 2 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

225 Perhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

226 Perhatikan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Ketentuan pidana minimal tersebut hanya terdapat dalam Pasal 59 Ayat (1) dan hanya dikhususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap psikotropika golongan I, sedangkan terhadap psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal.

Ketentuan pidana lainnya tidak secara tegas menyebutkan psikotropika golongan berapa, hanya disebutkan kata-kata psikotropika. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa psikotropika golongan I juga dapat diterapkan Pasal 59 dan pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 60, 62, dan lain-lain, sedangkan ketentuan Pasal 59 hanya dikhususkan terhadap psikotropika golongan I.

Perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59-66 merupakan delik kejahatan, dilihat dari akibat kejahatannya tersebut. Adapun pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat, yaitu maksimal pidana mati dan ditambah denda paling banyak Rp. 5 miliar (Pasal 59 Undang-undang Psikotropika).

Tujuannya agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang psikotropika mengurungkan niatnya. Psikotropika, dilihat dari segi bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut.

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi psikotropika.
- b. Kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika.
- c. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor psikotropika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penggunaan psikotropika.
- f. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi psikotropika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan Man psikotropika.
- h. Kejahatan yang menyangkut transito psikotropika.
- i. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psikotropika.
- j. Kejahatan yang menyangkut saksi dalam perkara psikotropika.
- k. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan psikotropika.

Pelaksanaan eksekusi mati bagi pelaku tindak pidana psikotropika dapat diterapkan dengan memperberat hukumannya jika dilakukan secara terorganisasi atau dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (3) yang telah diuraikan.

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Hukuman mati terhadap teroris selama ini tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, beberapa program penanggulangan terorisme yang berbentuk pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional penting dilakukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Pemerintah Belanda, masih mencantumkan pidana mati untuk kasus pidana. Begitu juga dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pelaksanaan hukuman eksekusi mati terhadap teroris beberapa tahun lalu menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara yang bersifat retensionis (mempertahankan) pidana mati, baik secara *de jure* maupun *de facto*. Eksekusi tersebut menimbulkan pro-kontra di lingkungan masyarakat yang keadaan tersebut akan sangat relevan untuk dikaji manakala dihubungkan dengan keberadaan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pemerintah menetapkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, rumusan tindak pidana terorisme pada Undang-Undang tersebut

hampir selalu mencantumkan unsur dengan sengaja (kealpaan), dengan demikian, dapat disimpulkan tindak pidana terorisme didasarkan pada adanya kesalahan.²²⁷

Adapun dasar hukum yang subsidair, yaitu Pasal 6 Perpu Nomor 1 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 jo Pasal 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.²²⁸

Dasar hukum yang lebih subsidair adalah Pasal 15 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu Nomor 2 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 dengan Lebih subsidair adalah Pasal 9 Perpu Nomor 1 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²²⁹

Lebih khusus, penjatuhan pidana mati bagi pelaku adalah sebagai orang yang langsung bertindak sebagai pelaku, tetapi juga sebagai otak atau pencetus dan perencana tindak pidana terorisme tersebut.²³⁰ Oleh karena itu, para pemegang profesi sebagai penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut relevan dengan Pasal 55 KUHP.²³¹ Dasar hukum tersebut mempertimbangkan

227 Perhatikan Pasal 6 s.d. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

228 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 26-27.

229 *Ibid.*, hlm. 26-27.

230 Perhatikan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

231 Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 26-27.

unsur adanya keterlibatan dalam hal orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang lain melakukan perbuatan.

Digunakannya dasar hukum Pasal 55 KUHP²³² tersebut karena dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang pengertian orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang lain melakukan perbuatan.

Untuk membentuk persepsi mengenai pengertian tersebut, digunakan pendekatan berdasarkan teori-teori dalam hukum pidana yang kemudian dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, yaitu KUHP. KUHP khususnya Pasal 55²³³ yang mengatur mengenai penyertaan (*Deelneming*). Pasal 55 KUHP²³⁴ menyatakan sebagai berikut.

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
 - a) Melakukan, menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b) Mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dari perumusan Pasal 55 KUHP²³⁵ tersebut, pelaku dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) pelaku yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*);
- 2) pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (*doen plegen*);
- 3) pelaku yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*);

232 Ibid.

233 Ibid.

234 Ibid.

235 Ibid.

- 4) pelaku yang dengan sengaja menggerakkan (menganjurkan) orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (*uitlokking*).²³⁶

f. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diundangkan tanggal 23 November 2000.

Undang-Undang (UU) tersebut secara tegas menyatakan sebagai Undang-Undang (UU) yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat, Undang-Undang (UU) ini juga mengatur adanya pengadilan HAM *ad hoc* yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.

Berikut ini penulis akan menguraikan perumusan hukuman eksekusi mati dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, baik secara teori maupun secara praktik. Sebagaimana telah penulis ketahui, ketentuan pidana diatur dalam Bab VII dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ini menggunakan ketentuan pidana minimal yang dianggap sebagai ketentuan yang sangat progresif untuk menjamin bahwa pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat ini tidak akan mendapatkan hukuman yang ringan.²³⁷

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2001 tentang Pengadilan HAM juga memberlakukan ancaman pidana mati terkait dengan kejahatan

236 I Made Widnyana, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Denpasar: Yayasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Selanjutnya disebut I Made Widnyana II), 1992, hlm. 33.

237 Mengenai hukuman minimal ini ternyata dalam praktiknya di pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus pelanggaran HAM yang berat di Tim-Tim tidak dapat diaplikasikan. Hal ini terbukti dengan lama hukuman yang dijatuhkan untuk terdakwa yang di bawah hukuman 10 tahun (terdakwa Soejarwo 5 tahun, M. Noer Muis 5 tahun, Hulman Gultom 3 tahun dan Abilio Soares selama 3 tahun) kecuali terhadap terdakwa Eurico Guterres yang dijatuhi hukuman 10 tahun. Hakim dalam hal ini melakukan terobosan hukum.

genosida, penerapan pidana mati tidak hanya memerhatikan HAM terpidana dan keluarga terpidana, namun turut serta memerhatikan HAM korban, keluarga, dan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, dan aparat penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, kejaksaan tinggi harus turut serta menekankan pentingnya dukungan program penanggulangan terorisme yang berbentuk pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2001 tentang Pengadilan HAM mengatur tentang ketentuan pidana untuk kejahatan genosida, yaitu dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan pidana paling singkat 10 tahun.

Ketentuan pidana ini sama dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang intinya menegaskan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf (b) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,

budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai larangan oleh hukum internasional;

9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.

Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, yaitu perbudakan yang perilakunya diancam dengan pidana selama-lamanya 15 tahun dan paling singkat 5 tahun.²³⁸ Demikian pula, dengan kejahatan kemanusiaan yang berupa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa penyiksaan diancam hukuman paling lama 15 tahun dan paling rendah 5 tahun.²³⁹

Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, kemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara diancam pidana selama-lamanya 20 tahun dan serendah-rendahnya selama 10 tahun.²⁴⁰

Pasal 41 mengatur khusus mengenai pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat berupa percobaan dan ikut serta berupa permufakatan jahat atau pembantuan terhadap terlaksananya pelanggaran HAM berat, ancaman hukumannya dipersamakan dengan ketentuan Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40.

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa apa pun peranan pelaku, baik karena percobaan pelanggaran HAM berat, ikut serta dalam permufakatan jahat untuk melakukan pelanggaran HAM berat maupun pembantuan terhadap terlaksananya pelanggaran HAM ancamannya disamakan. Berikut gambaran tentang pelaksanaan hukuman eksekusi pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2001 tentang Pengadilan HAM, yaitu sebagai berikut:

238 Perhatikan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

239 Perhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

240 Perhatikan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kejahatan	Hukuman	
	Minimal	Maksimal
Genosida	10 tahun	Mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun.
Kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa:		
a. Pembunuhan	10 tahun	Mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun.
b. Pemusnahan	10 tahun	Mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun.
c. Perbudakan	5 tahun	15 tahun.
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa	10 tahun	Mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun.
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional	10 tahun	Mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun.
f. Penyiksaan	5 tahun	15 tahun.
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi, secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara	5 tahun	20 tahun.

h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau persampulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional	5 tahun	20 tahun.
i. Penghilangan orang secara paksa	5 tahun	20 tahun.
j. Kejahatan apartheid	10 tahun	Mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun.
Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.	Dipersamakan dengan ketentuan di atas sesuai dengan bentuk kejahatannya.	Dipersamakan dengan ketentuan di atas sesuai dengan bentuk kejahatannya.
Komandan militer, polisi dan atasan sipil yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida (dengan delik <i>by omission</i>)	Dipersamakan dengan ketentuan di atas sesuai dengan bentuk kejahatannya.	Dipersamakan dengan ketentuan di atas sesuai dengan bentuk kejahatannya.

D. Fakta dan Data Eksekusi Mati di Indonesia

1. Eksekusi Mati pada Tindak Pidana Kejahatan Politik

Menurut Pasal 90, apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan dipidana mati tidak dilaksanakan 10 tahun, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden. Pengaturan pidana mati di dalam KUHP diperuntukkan untuk 4 jenis kejahatan, yaitu antara lain:

- Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, 111 Ayat (2), 124 Ayat (3), dan 140 Ayat (3)).²⁴¹

²⁴¹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 44-58.

- b. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat (4)).²⁴²
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340).²⁴³
- d. Kejahatan Pelayaran Pasal 444,²⁴⁴ 479k Ayat (2), dan 479o Ayat (2).²⁴⁵

Adapun untuk pidana mati dalam RUU KUHP diatur untuk tindak pidana, antara lain sebagai berikut.

- a. Tindak pidana makar, berupa makar terhadap presiden.²⁴⁶
- b. Pengkhianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara.²⁴⁷
- c. Tindak pidana sabotase dan pada waktu perang.²⁴⁸
- d. Tindak pidana terorisme.²⁴⁹
- e. Perusakan pesawat udara.²⁵⁰
- f. Tindak pidana terhadap negara sahabat (makar terhadap kepala negara sahabat).²⁵¹
- g. Tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia.²⁵²
- h. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika (narkotika),²⁵³ dan (psikotropika).²⁵⁴
- i. Tindak pidana terhadap nyawa.²⁵⁵

242 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, hlm. 141-142.

243 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., hlm. 134.

244 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., hlm. 172-173.

245 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., hlm. 187-189.

246 Perhatikan Pasal 215, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

247 Perhatikan Pasal 228 Ayat (2), Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

248 Perhatikan Pasal 237 Ayat (3) → (masih dalam proses RUU KUHP).

249 Perhatikan Pasal 242, 244, 247 → (masih dalam proses RUU KUHP).

250 Perhatikan Pasal 262 Ayat (2) → (masih dalam proses RUU KUHP).

251 Perhatikan Pasal 269 Ayat (2) → (masih dalam proses RUU KUHP).

252 Perhatikan Pasal 399 Ayat (2) → (masih dalam proses RUU KUHP).

253 Perhatikan Pasal 504, 506 Ayat (2) → (masih dalam proses RUU KUHP).

254 Perhatikan Pasal 513 → (masih dalam proses RUU KUHP).

255 Perhatikan Pasal 574 Ayat (3) → (masih dalam proses RUU KUHP).

- j. Tindak pidana jabatan (penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara).²⁵⁶

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 (Prp) tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- c. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
- d. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
- e. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
- f. Pasal 36 Ayat (4) Sub (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika
- g. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Pidana mati di Indonesia dianggap masih efektif untuk digunakan dalam sistem perumusan pidana. Hal tersebut terbukti dengan penempatan pidana mati yang masih dibubuhkan dalam perumusan RUU KUHP Indonesia. Walaupun terdapat perbedaan dalam perumusan RUU tersebut, masih terdapat pula persamaan yang bersifat universal dari sistem perumusan pidana eksekusi mati, terutama pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana kejahatan politik.

2. Eksekusi Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah

256 Perhatikan Pasal 686 → (masih dalam proses RUU KUHP).

kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan definisi tersebut, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material apabila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa telah disebut sebagai pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain dengan melakukan rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain yang diatur dalam buku II bab XIX yang terdiri atas 13 Pasal, yaitu Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi:

1. Atas dasar unsur kesalahan.
2. Atas dasar objeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahan, ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

1. kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*);
2. kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose misdrijven*).

Atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

1. kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya;²⁵⁷
2. kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat/tidak lama setelah dilahirkan;²⁵⁸

257 Perhatikan Pasal: 338, 339, 340, 344, 345, Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 134-135.

258 Perhatikan Pasal 341, 342, dan 343.

3. kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin).²⁵⁹

Pelaksanaan hukuman eksekusi mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur oleh Pasal 340 KUHP:²⁶⁰

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

Dari rumusan tersebut, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- a. unsur subjektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan;
- b. unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Apabila unsur-unsur di atas telah terpenuhi dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat, tetapi ia tidak membatalkan niatnya, ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP. Bahkan, merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, bahwa sanksi pidana mati tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya yang menjadi dasar beratnya hukuman adalah adanya perencanaan terlebih dahulu.

Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Akan tetapi, ancaman hukuman tersebut tidak menurunkan angka pembunuhan setiap tahunnya, dilihat dari statistik kriminalitas pembunuhan yang penulis peroleh dari lembaga Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut.

259 Perhatikan Pasal 346, 377, 348, dan 349.

260 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 134.

TABEL D.2.1²⁶¹

JUMLAH KASUS PEMBUNUHAN 5 TAHUN TERAKHIR

Bulan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah	1.605	1.467	1.456	1.715	1.847

Jumlah tersangka pembunuhan yang sudah terjerat hukuman eksekusi mati oleh beberapa Pengadilan Negeri se-Indonesia dengan kekuatan hukum yang final meskipun angka pembunuhan sudah mencapai ribuan seperti Tabel D.2.1 di atas, yaitu sebagai berikut.

TABEL D.2.2²⁶²

JUMLAH TERSANGKA PEMBUNUHAN TERJERAT HUKUMAN EKSEKUSI MATI

TAHUN	PEMBUNUHAN	
	SUDAH EKSEKUSI MATI	BELUM EKSEKUSI MATI
2014	0	1
2013	0	8
2012	0	3
2008	3	1
2007	1	0
2006	3	9
2005	2	4
2004	0	2

261 Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2013*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013, hlm. 26-36.

262 Kontras, dari berbagai sumber. Informasi mungkin tidak akurat karena data tentang hukuman mati di Indonesia tidak terlalu terbuka. Tidak ada kepastian waktu kapan seseorang akan dieksekusi mati setelah ia mendapat vonis dengan kekuatan hukum yang final. Salah satu dari terpidana mati, Bahar bin Matar, misalnya sudah menunggu eksekusi 34 tahun sejak grasinya ditolak (1972).

2003	0	6
2002	0	8
2001	3	4
2000	0	1
1998	1	0
1997	0	3
1996	0	2
1995	2	0
1994	0	1
1992	1	1
1990	0	2
1988	0	3
1987	2	0
1980	2	0
1979	1	0
1972	0	1
Jumlah	21	60

Adapun persentasi dari daftar Tabel D.2.2 di atas antara yang sudah tereksekusi mati ataupun yang belum tereksekusi mati adalah 74% pelaku yang belum tereksekusi mati, sedangkan 26% adalah pelaku yang sudah tereksekusi mati. Data hasil penelitian tersebut yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana kasus pembunuhan masih dapat dikatakan lemah dan sangat jauh dari unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah angka pembunuhan perlima tahun yang semakin meningkat dan disertai dengan ketidaksesuaian (antara harapan dan kenyataan) pelaksanaan hukuman eksekusi mati bagi terpidana mati kasus pembunuhan, padahal seluruh Hakim Pengadilan

Negeri yang telah memberikan vonis hukuman mati sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶³

3. Eksekusi Mati pada Tindak Pidana Korupsi

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004, disinyalir praktik tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pusat, pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Praktik korupsi dapat dikenal dalam berbagai bentuk umum berikut.

- Penyuapan (*bribery*), yaitu pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi.²⁶⁴
- Penggelapan (*embezzlement*), yaitu tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau aparat birokrasi.²⁶⁵
- Penipuan (*fraud*), jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan melibatkan pejabat.²⁶⁶
- Pemerasan (*extortion*), jenis korupsi yang melibatkan aparat yang melakukan pemaksaan atau pendekatan koersif untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa atas pelayanan yang diberikan.²⁶⁷

Adapun faktor penyebab terhambatnya upaya pemberantasan korupsi, antara lain perumusan perundang-undangan yang masih memiliki celah penyelewengan, administrasi yang lamban, mahal, dan berbelit-belit, lemahnya penegakan hukum, kondisi yang menganggap berbagai macam korupsi sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan moral sehingga orang berani mencoba berlomba-lomba untuk korupsi.

263 *Ibid.*, hlm. 3.

264 Inge Amundsen, *Corruption: Definitions and Concepts*, Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights, 2000, hlm. 2.

265 *Ibid.*, hlm. 3.

266 *Ibid.*, hlm. 3.

267 *Ibid.*, hlm. 4.

Berikut adalah data hasil verifikasi korupsi di Indonesia.

TABEL D.3.1²⁶⁸

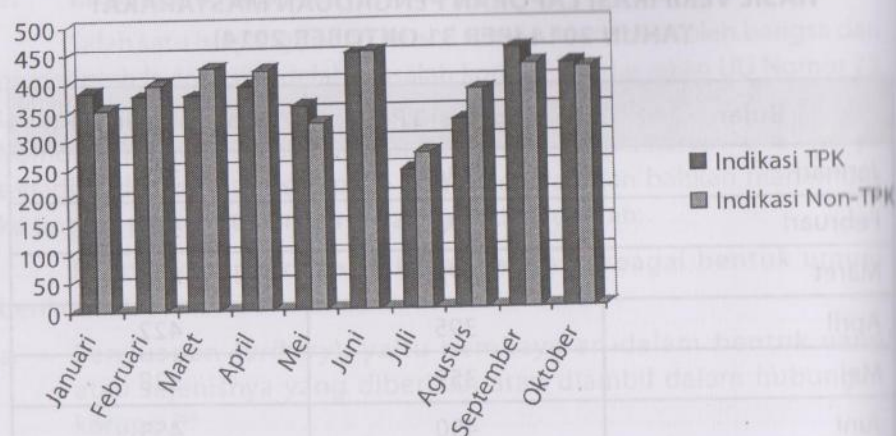
HASIL VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2014 (PER 31 OKTOBER 2014)

Bulan	Indikasi TPK	Indikasi Non-TPK
Januari	386	356
Februari	378	397
Maret	378	426
April	395	422
Mei	359	328
Juni	450	453
Juli	243	275
Agustus	331	384
September	456	428
Oktober	427	420
Jumlah	3.803	3.889

Berdasarkan Tabel D.3.1 per 31 Oktober 2014 dari unsur indikasi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dan indikasi Non-Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sejak bulan Januari hingga Oktober 2014, jelas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan jumlah kasus yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebanyak 3.803, dan kasus yang terindikasi Non-Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebanyak 3.889. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Hasil Verifikasi Laporan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut.

268 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Memahami untuk Membasmi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP tahun 1999.

HASIL VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2014 (PER 31 OKTOBER 2014)



Kewenangan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian, baik POLRI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 6 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan tambahan, yaitu mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan,²⁶⁹ tetapi pengambilalihan perkara korupsi tersebut diatur lebih lanjut terkait dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶⁹ Perhatikan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut ini data Tabel D.3.2 Tabulasi Data Penindakan Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2015 (Per 31 Juni 2015) dengan perincian sebagai berikut: jumlah angka Penyelidikan (Tahun 2004-2015) mencapai 705, angka Penyidikan (Tahun 2004-2015) mencapai 429, angka Penuntutan (Tahun 2004-2015) mencapai 345, angka *Inkracht* (Tahun 2004-2015) mencapai 297, dan angka Eksekusi (Tahun 2004-2015) mencapai 313.

TABEL D.3.2²⁷⁰

TABULASI DATA PENINDAKAN PENANGANAN KORUPSI (OLEH KPK) TAHUN 2004-2015 (PER 30 JUNI 2015)

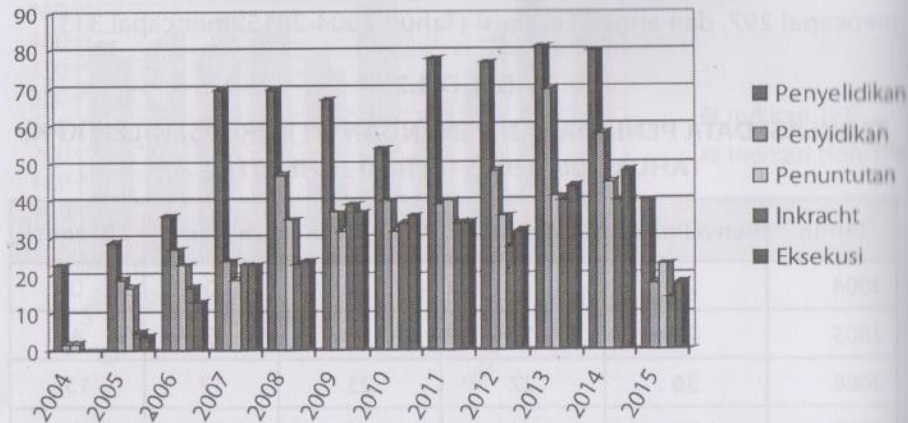
Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkracht	Eksekusi
2004	23	2	2	0	0
2005	29	19	17	5	4
2006	36	27	23	17	13
2007	70	24	19	23	23
2008	70	47	35	23	24
2009	67	37	32	39	37
2010	54	40	32	34	36
2011	78	39	40	34	34
2012	77	48	36	28	32
2013	81	70	41	40	44
2014	80	58	45	40	48
2015	40	18	23	14	18
Jumlah	705	429	345	297	313

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa praktik penanganan tindak pidana korupsi oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

²⁷⁰ UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP tahun 1999.

**TABULASI DATA PENINDAKAN PENANGANAN KORUPSI (OLEH KPK)
TAHUN 2004-2015 (PER 30 JUNI 2015)**

PENANGANAN KORUPSI (OLEH KPK)



Berdasarkan Tabel D.3.2 Tabulasi Data Penindakan Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2015 (Per 30 Juni 2015), dan Tabulasi Data Penindakan Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2015 (Per 30 Juni 2015), tampak bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani suatu kasus setiap tahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

TABEL D.3.3²⁷¹

**TABULASI DATA PENANGANAN KORUPSI (OLEH KPK)
BERDASARKAN JENIS PERKARA TAHUN 2004-2015 (PER 30 JUNI 2015)**

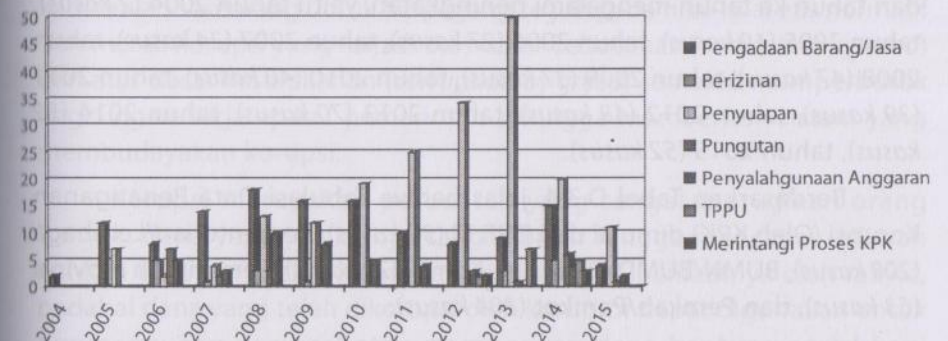
Item	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	4	130
Perizinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	0	18
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	11	197

271 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP tahun 1999.

Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	20
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	44
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	0	14
Merintangi Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	49	70	58	18	428

Berdasarkan Tabel D.3.3 Tabulasi Data Penanganan Korupsi (Oleh KPK) dilihat dari Jenis Perkara dimulai dari Pengadaan Barang/Jasa (130 Kasus), Perizinan (18 Kasus), Penyuapan (197 Kasus), Pungutan (20 Kasus), Penyalahgunaan Anggaran (44 Kasus), Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU (14 Kasus), dan Merintangi Proses KPK (5 Kasus).

**TABULASI DATA PENANGANAN KORUPSI (OLEH KPK) BERDASARKAN
JENIS PERKARA TAHUN 2004-2015 (PER 30 JUNI 2015)**



Dilihat dari Tabel D.3.3 tampak bahwa penanganan korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2004 (2 kasus), tahun 2005 (19 kasus), tahun 2006 (27 kasus), tahun 2007 (24 kasus), tahun 2008 (47 kasus), tahun 2009 (37 kasus), tahun 2010 (40 kasus), tahun 2011 (39 kasus), tahun 2012 (49 kasus), tahun 2013 (70 kasus), tahun 2014 (58 kasus), dan tahun 2015 (18 kasus).

TABEL D.3.4²⁷²

**TABULASI DATA PENANGANAN KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI
TAHUN 2004-2015 (PER 30 JUNI 2015)**

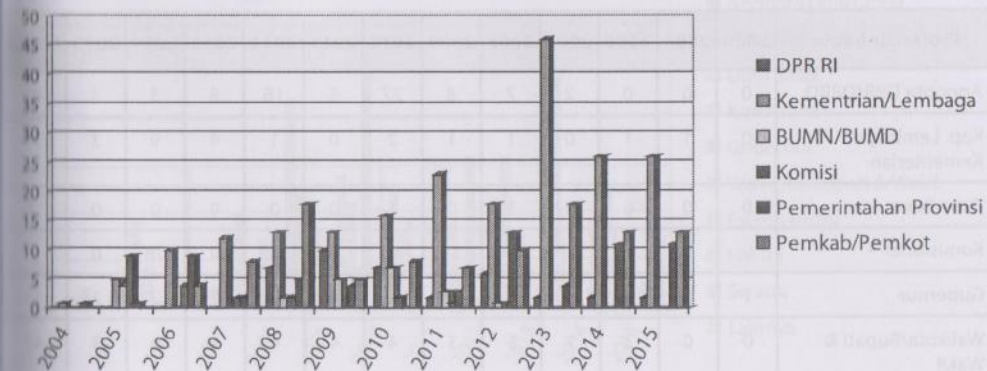
Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
DPR RI	0	0	0	0	7	10	7	2	6	2	2	2	38
Kementerian/ Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	46	26	26	208
BUMN/BUMD	0	4	0	0	2	5	7	3	1	0	0	0	22
Komisi	0	9	4	2	2	0	2	1	0	0	0	0	20
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	0	3	13	4	11	11	63
Pemkab/Pemkot	0	0	4	8	18	5	8	7	10	18	13	13	104
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	52	52	455

Dilihat dari Tabel D.3.4 tampak bahwa penanganan korupsi oleh KPK dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2004 (2 kasus), tahun 2005 (19 kasus), tahun 2006 (27 kasus), tahun 2007 (24 kasus), tahun 2008 (47 kasus), tahun 2009 (37 kasus), tahun 2010 (40 kasus), tahun 2011 (39 kasus), tahun 2012 (48 kasus), tahun 2013 (70 kasus), tahun 2014 (52 kasus), tahun 2015 (52 kasus).

Berdasarkan Tabel D.3.4, jelas bahwa Tabulasi Data Penanganan Korupsi (Oleh KPK) dimulai dari DPR RI (38 kasus), Kementerian/Lembaga (208 kasus), BUMN/BUMD (22 kasus), Komisi (20 kasus), Pemerintah Provinsi (63 kasus), dan Pemkab/Pemkot (104 kasus).

272 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP tahun 1999.

**TABULASI DATA PENANGANAN KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI
TAHUN 2004-2015 (PER 31 JUNI 2015)**



Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa perilaku korupsi yang mengakar pada setiap tingkatan pemerintah telah menghancurkan keberanian seseorang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai etis normatif dan moral. Korupsi yang terjadi atas dasar kebutuhan (*corruption by need*) dan atas dasar keserakahan (*corruption by greed*) semakin memperburuk lingkungan kerja aparat pemerintah sehingga membentuk sistem yang membudayakan korupsi.

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang banyak, dana yang jumlahnya sangat besar hingga mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah hilang tanpa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, padahal dana yang telah dikorupsi oleh koruptor dapat digunakan untuk pembangunan nasional atau memberikan dana bantuan sosial bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

TABEL D.3.5²⁷³
TABULASI DATA PELAKU KORUPSI BERDASARKAN JABATAN
TAHUN 2004-2015 (PER 30 JUNI 2015)

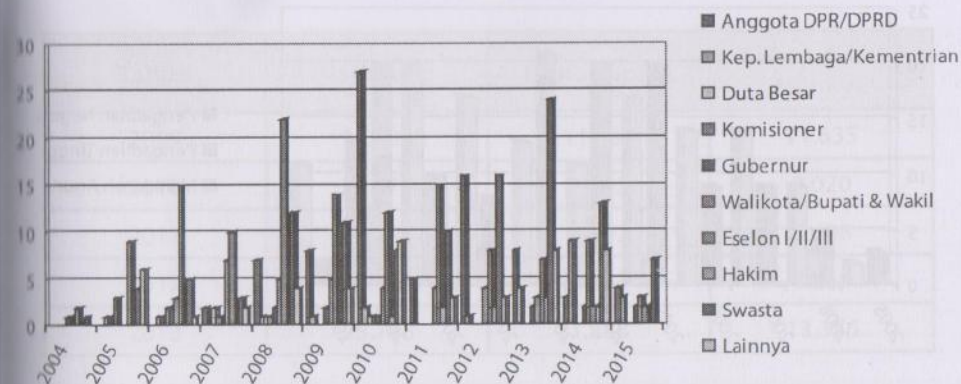
Profesi/Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Anggota DPR/DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	3	4	80
Kep. Lembaga/ Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	9	3	23
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	2	2	13
Walikota/Bupati & Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	9	3	47
Eselon I/II/III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	2	118
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	0	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	13	7	113
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	0	48
Jumlah	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	48	21	461

Berdasarkan Tabel D.3.5 penanganan korupsi (oleh KPK) dimulai dari anggota DPR/DPRD (80 kasus), Kep. Lembaga/Kementerian (23 kasus), duta besar (4 kasus), komisioner (7 kasus), gubernur (13 kasus), walikota/bupati dan wakil (47 kasus), eselon i/ii/iii (116 kasus), hakim (10 kasus), swasta (113 kasus), dan lainnya (48 kasus).

Dilihat Tabel D.3.5 Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Profesi/Jabatan tahun 2004-2015 (Per 30 Juni 2015), dan Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) dilihat dari tahun-ke tahun mengalami peningkatan, tahun 2004 (4 kasus), tahun 2005 (23 kasus), tahun 2006 (29 kasus), tahun 2007 (27 kasus), tahun 2008 (55 kasus), tahun 2009 (45 kasus), tahun 2010 (65 kasus), tahun 2011 (39 kasus), tahun 2012 (50 kasus), tahun 2013 (59 kasus), tahun 2014 (48 kasus), dan tahun 2015 (21 kasus).

273 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP tahun 1999.

TABULASI DATA PELAKU KORUPSI BERDASARKAN JABATAN
TAHUN 2004-2014 (PER 30 JUNI 2015)



TABEL D.3.6²⁷⁴

TABULASI DATA PELAKU KORUPSI BERKEKUATAN HUKUM TETAP
TAHUN 2005-2015 (PER 30 JUNI 2015)

Berkekuatan Hukum	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Pengadilan Negeri	3	5	9	9	20	20	21	8	10	20	2	127
Pengadilan Tinggi	0	3	0	0	2	3	0	3	10	7	1	29
Mahkamah Agung	2	9	14	14	17	11	13	17	20	13	11	141
Jumlah	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	14	297

Berdasarkan Tabel D.3.6, penanganan korupsi (oleh KPK) yang berkekuatan hukum tetap dimulai dari Pengadilan Negeri (127 kasus), Pengadilan Tinggi (PT) (29 kasus), dan Mahkamah Agung (MA) (141 kasus).

274 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP tahun 1999.

TABEL D.3.5²⁷³
TABULASI DATA PELAKU KORUPSI BERDASARKAN JABATAN
TAHUN 2004-2015 (PER 30 JUNI 2015)

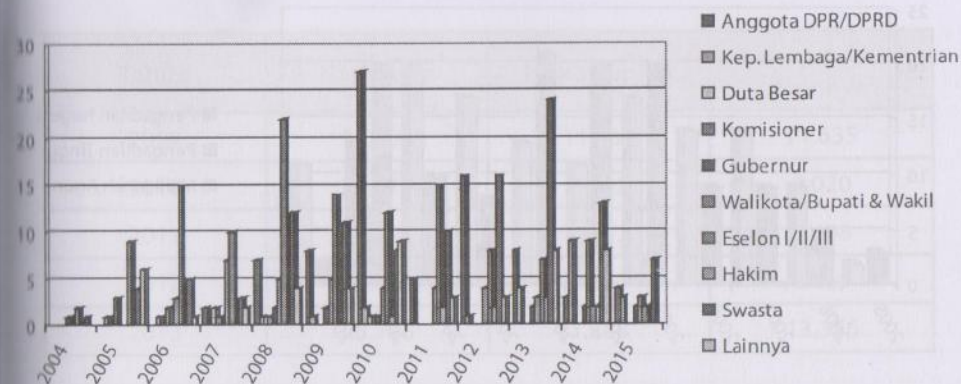
Profesi/Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Anggota DPR/DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	3	4	80
Kep. Lembaga/ Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	9	3	23
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	2	2	13
Walikota/Bupati & Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	9	3	47
Eselon I/II/III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	2	116
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	0	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	13	7	113
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	0	48
Jumlah	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	48	21	461

Berdasarkan Tabel D.3.5 penanganan korupsi (oleh KPK) dimulai dari anggota DPR/DPRD (80 kasus), Kep. Lembaga/Kementerian (23 kasus), duta besar (4 kasus), komisioner (7 kasus), gubernur (13 kasus), walikota/bupati dan wakil (47 kasus), eselon i/ii/iii (116 kasus), hakim (10 kasus), swasta (113 kasus), dan lainnya (48 kasus).

Dilihat Tabel D.3.5 Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Profesi/Jabatan tahun 2004-2015 (Per 30 Juni 2015), dan Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) dilihat dari tahun-ke tahun mengalami peningkatan, tahun 2004 (4 kasus), tahun 2005 (23 kasus), tahun 2006 (29 kasus), tahun 2007 (27 kasus), tahun 2008 (55 kasus), tahun 2009 (45 kasus), tahun 2010 (65 kasus), tahun 2011 (39 kasus), tahun 2012 (50 kasus), tahun 2013 (59 kasus), tahun 2014 (48 kasus), dan tahun 2015 (21 kasus).

273 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP tahun 1999.

TABULASI DATA PELAKU KORUPSI BERDASARKAN JABATAN
TAHUN 2004-2014 (PER 30 JUNI 2015)



TABEL D.3.6²⁷⁴

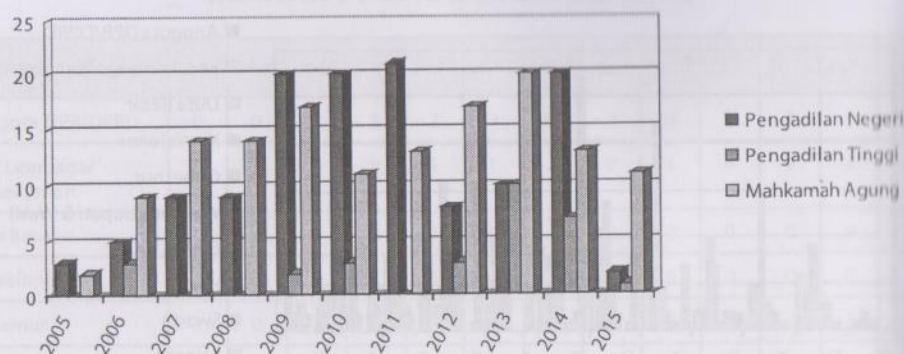
TABULASI DATA PELAKU KORUPSI BERKEKUATAN HUKUM TETAP
TAHUN 2005-2015 (PER 30 JUNI 2015)

Berkekuatan Hukum	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Pengadilan Negeri	3	5	9	9	20	20	21	8	10	20	2	127
Pengadilan Tinggi	0	3	0	0	2	3	0	3	10	7	1	29
Mahkamah Agung	2	9	14	14	17	11	13	17	20	13	11	141
Jumlah	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	14	297

Berdasarkan Tabel D.3.6, penanganan korupsi (oleh KPK) yang berkekuatan hukum tetap dimulai dari Pengadilan Negeri (127 kasus), Pengadilan Tinggi (PT) (29 kasus), dan Mahkamah Agung (MA) (141 kasus).

274 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP tahun 1999.

**TABULASI DATA PELAKU KORUPSI BERKEKUATAN HUKUM TETAP
TAHUN 2005-2015 (PER 30 JUNI 2015)**



Dilihat Tabel D.3.6 penanganan korupsi (oleh KPK) dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tahun 2005 (5 kasus), tahun 2006 (17 kasus), tahun 2007 (23 kasus), tahun 2008 (23 kasus), tahun 2009 (39 kasus), tahun 2010 (34 kasus), tahun 2011 (34 kasus), tahun 2012 (28 kasus), tahun 2013 (40 kasus), tahun 2014 (40 kasus), dan tahun 2015 (14 kasus).

4. Eksekusi Mati pada Tindak Pidana Narkoba

Jumlah terpidana narkoba yang terkena vonis hukuman mati masih lebih rendah dari jumlah pengedar narkoba yang sebenarnya masih lemah dan sangat jauh dari unsur kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Berikut data pengedar narkoba yang umumnya bersumber dari lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia:

TABEL D.4.1.²⁷⁵

**TERSANGKA NARKOBA BERDASARKAN PENGGOLONGAN NARKOBA
TAHUN 2009-2013**

Tahun	Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif Lainnya
2009	15.083	11.687	11.635
2010	23.975	1.502	8.020
2011	25.297	1.997	9.438
2012	25.309	2.062	8.269
2013	28.788	1.868	13.356

Dari Tabel D.4.1. tersebut terlihat bahwa jumlah tersangka tertinggi, yaitu tersangka kasus Narkotika tahun 2013 sebanyak 28.788 tersangka dan jumlah tersangka terendah, yaitu tersangka kasus Psikotropika pada tahun 2010 sebanyak 1.502 tersangka. Tren kenaikan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka kasus Bahan Adiktif Lainnya dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 61,52% dan penurunan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka kasus Psikotropika dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 87,15%.

Menurut Tabel D.4.1 jelas bahwa pada tahun 2013 jumlah tersangka Narkoba tertinggi terjadi pada kasus Narkotika dengan total 28.788 orang yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 13,75%. Adapun penurunan jumlah tersangka kasus Psikotropika berkisar sebesar 9,41%, dari sejumlah 2.062 orang yang ditangkap pada tahun 2012 menjadi 1.868 orang pada tahun 2013.

Tersangka kasus Bahan Adiktif Lainnya mengalami kenaikan sebesar 61,52%, dari 8.269 orang pada tahun 2012 menjadi 13.356 orang pada tahun 2013.

275 Sumber: Polri & BNN, Maret 2014.

TABEL D.4.2.²⁷⁶

**TERSANGKA NARKOBA BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN 2009-2013**

Tahun	Warga Negara Indonesia	Warga Negara Asing
2009	38.295	110
2010	33.338	159
2011	36.571	161
2012	35.524	116
2013	43.885	127

Menurut Tabel D.4.2. tersebut, tren tersangka kasus tindak pidana Narkoba tahun 2013, berdasarkan kewarganegaraan, dengan jumlah tersangka kasus Narkoba terbesar adalah tersangka WNI dengan jumlah 43.885 orang, yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan persentase peningkatan 23,54%.

Adapun tersangka WNA yang ditangkap mengalami penurunan sebesar 9,48% dibandingkan dengan tahun 2012, dari 116 orang yang ditangkap pada tahun 2012 menjadi 127 orang pada tahun 2013. Jumlah tersangka tertinggi, yaitu tersangka Narkoba WNI tahun 2013 sebanyak 43.885 tersangka, sedangkan jumlah tersangka terendah, yaitu tersangka Narkoba WNA pada tahun 2009 sebanyak 110 tersangka. Tren kenaikan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka Narkoba WNA dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 44,55% dan penurunan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka Narkoba WNA dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 27,95%.

276 Sumber: Polri & BNN, Maret 2014.

TABEL D.4.3.²⁷⁷

**TERSANGKA NARKOBA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2009-2013**

Tahun	Pria	Perempuan
2009	35.286	3.119
2010	30.635	2.862
2011	33.030	3.702
2012	32.358	3.282
2013	39.715	4.297

Menurut Tabel D.4.3 tersebut, jelas bahwa pada tahun 2013 berdasarkan jenis kelamin, jumlah tersangka kasus Narkoba terbesar yang berhasil ditangkap berjenis kelamin laki-laki dengan total 39.715 orang, yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan persentase peningkatan 22,74%. Adapun tersangka berjenis kelamin perempuan yang ditangkap berjumlah 4.297 orang, dengan persentase peningkatan 30,93% dibandingkan dengan tahun 2012.

Jumlah tersangka tertinggi, yaitu tersangka Narkoba jenis kelamin laki-laki tahun 2013 sebanyak 39.715 tersangka dan jumlah tersangka terendah, yaitu tersangka Narkoba jenis kelamin perempuan pada tahun 2010 sebanyak 2.862 tersangka. Tren kenaikan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka Narkoba jenis kelamin perempuan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 30,93%, sedangkan penurunan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka Narkoba jenis kelamin laki-laki dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 13,18%.

277 Sumber: Polri & BNN, Maret 2014.

TABEL D.4.4.²⁷⁸

**TERSANGKA NARKOBA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN
2009-2013**

Tahun	< 16	16-19	20-24	25-29	> 29
2009	113	1.731	5.430	9.757	21.374
2010	88	1.515	4.993	8.939	17.962
2011	117	1.774	5.377	11.718	17.746
2012	132	2.106	5.478	10.339	17.585
2013	122	2.382	6.269	16.216	19.023

Menurut Tabel D.4.4 tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2013, berdasarkan kelompok usia, tersangka kasus Narkoba berusia lebih dari 29 tahun merupakan tersangka paling banyak dengan total 19.023 orang. Adapun tersangka paling sedikit merupakan tersangka berusia di bawah 16 tahun dengan jumlah 122 orang.

Menurut tabel D.4.4 tersebut, tren kenaikan tersangka terbesar, yaitu terjadi pada tersangka berusia antara 25-29 tahun dengan persentase kenaikan 56,84%, dari 10.339 orang yang ditangkap pada tahun 2012 menjadi 16.216 orang pada tahun 2013. Adapun penurunan jumlah tersangka hanya terjadi pada tersangka berusia kurang dari 16 tahun dengan persentase penurunan 7,58%, dari 132 orang pada tahun 2012 menjadi 122 orang pada tahun 2013.

Jumlah tersangka tertinggi, yaitu tersangka berusia lebih dari 29 tahun pada tahun 2009 sebanyak 21.374 tersangka dan jumlah tersangka terendah, yaitu tersangka berusia di bawah 16 tahun pada tahun 2010 sebanyak 88 tersangka. Tren kenaikan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka Narkoba berusia antara 25-29 tahun dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 56,84%, sedangkan penurunan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka Narkoba berusia kurang dari 16 tahun dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 22,12%.

²⁷⁸ Sumber: Polri & BNN, Maret 2014.

TABEL D.4.5.²⁷⁹

**TERSANGKA NARKOBA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2009-2013**

Tahun	SD	SLTP	SLTA	PT
2009	4.763	8.322	24.328	992
2010	4.012	8.262	20.280	943
2011	5.092	10.013	20.503	1.124
2012	4.980	9.768	19.730	1.162
2013	7.573	12.216	23.086	1.137

Menurut Tabel D.4.5 tersebut, pada tahun 2013, berdasarkan latar belakang pendidikan, tersangka dengan latar belakang pendidikan SLTA merupakan tersangka paling banyak dengan total 23.086 orang, mengalami peningkatan jika dibandingkan 19.730 orang pada tahun 2012 dengan persentase peningkatan 17,01%. Sedangkan tersangka paling sedikit merupakan tersangka dengan latar belakang pendidikan PT dengan jumlah 1.137 orang, mengalami penurunan sebesar 2,15% jika dibandingkan dengan 1.162 orang pada tahun 2012.

Jumlah tersangka tertinggi, yaitu tersangka dengan latar belakang pendidikan lulusan SLTA pada tahun 2009 sebanyak 24.328 tersangka dan jumlah tersangka terendah, yaitu tersangka dengan latar belakang pendidikan lulusan PT pada tahun 2010 sebanyak 943 tersangka. Tren kenaikan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka narkoba dengan latar belakang pendidikan lulusan SD dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 52,07% dan penurunan jumlah tersangka terbesar, yaitu tersangka narkoba dengan latar belakang pendidikan lulusan SD dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 15,77%.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional ataupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime*).

²⁷⁹ Sumber: Polri & BNN, Maret 2014.

TABEL D.4.6.²⁸⁰

TERSANGKA NARKOBA BERDASARKAN TINGKAT JABATAN TAHUN 2009-2013

No.	Pekerjaan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	PNS	250	251	337	320	413
2.	Polri/TNI	307	227	294	287	262
3.	Swasta	14.550	13.943	17.444	16.071	19.804
4.	Wiraswasta	11.258	7.480	7.730	7.545	9.105
5.	Petani	780	902	1.079	1.388	2.108
6.	Buruh	3.598	3.944	3.525	4.025	4.954
7.	Mahasiswa	653	518	611	710	870
8.	Pelajar	635	531	605	695	1.121
9.	Pengangguran	6.374	5.701	5.107	4.599	5.375

Menurut Tabel D.4.6 tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2013, berdasarkan jenis pekerjaan, tersangka kasus narkoba karyawan Swasta merupakan tersangka paling banyak dengan total 19.804 orang, yang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2012 dengan persentase 23,23%. Adapun tersangka paling sedikit merupakan tersangka yang bekerja sebagai Polri/TNI dengan jumlah 262 orang, mengalami penurunan sebesar 8,71% jika dibandingkan dengan tahun 2012.

Tren kenaikan tersangka terbesar terjadi pada tersangka pelajar dengan persentase kenaikan 61,29%, dari 695 orang yang ditangkap pada tahun 2012 menjadi 1.121 orang pada tahun 2013.

Adapun penurunan jumlah tersangka terbesar terjadi pada tersangka yang bekerja sebagai PNS dengan persentase penurunan 29,06%, dari 320 orang pada tahun 2012 menjadi 413 orang pada tahun 2013. Jumlah tersangka tertinggi, yaitu tersangka dengan pekerjaan swasta pada tahun 2013 sebanyak 19.804 tersangka dan jumlah tersangka terendah, yaitu tersangka dengan pekerjaan Polri/TNI pada tahun 2010 sebanyak 227

280 Sumber: Polri & BNN, Maret 2014.

tersangka, tren kenaikan tersangka terbesar, yaitu tersangka narkoba pelajar dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 61,29% dan penurunan tersangka terbesar, yaitu tersangka Narkoba yang bekerja sebagai wiraswasta dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 33,56%.

Berdasarkan Tabel D.4.1, D.4.2, D.4.3, D.4.4, D.4.5, dan D.4.6, jelas bahwa jumlah pengedar narkoba, dan pemakai narkoba dari beberapa kalangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan disertai dengan sanksi hukum yang berbeda-beda. Bahkan, ada yang saling menyogok terhadap aparat penegak hukum dengan maksud dan tujuan agar peredaran dan bisnis ganja tetap berjalan hanya demi meraup keuntungan, meskipun mempunyai dampak negatif yang sangat tinggi terhadap dunia kesehatan.

Adapun jumlah tersangka narkoba yang sudah terjerat hukuman eksekusi mati oleh beberapa Pengadilan Negeri se-Indonesia dengan kekuatan hukum yang final dapat dilihat dari tabel berikut.

TABEL D.4.7²⁸¹

JUMLAH TERSANGKA NARKOBA TERJERAT HUKUMAN EKSEKUSI MATI

TAHUN	NARKOBA	
	SUDAH EKSEKUSI MATI	BELUM EKSEKUSI MATI
2013	-	2
2012	-	3
2008	2	2
2007	-	10
2006	-	18
2005	-	3
2004	3	5
2003	-	4

281 Kontras, dari berbagai sumber. Informasi mungkin tidak akurat karena data tentang hukuman mati di Indonesia tidak terlalu terbuka. Tidak ada kepastian waktu kapan seseorang akan dieksekusi mati setelah ia mendapat vonis dengan kekuatan hukum yang final. Salah satu dari terpidana mati, Bahar bin Matar, misalnya sudah menunggu eksekusi 34 tahun sejak grasinya ditolak (1972).

2002	-	13
2001	-	4
1996	-	1
1995	1	1
Jumlah	6	66

Menurut Tabel D.4.7, jumlah tersangka yang terjerat vonis hukuman eksekusi mati kasus narkoba mencapai 75 tersangka. Perinciannya adalah 6 tersangka sudah dieksekusi mati dan 66 tersangka belum dieksekusi mati. Jika dibandingkan pada beberapa tabel di atas terkait dengan jumlah pengedar narkoba yang sudah mencapai ribuan, masih dipertanyakan sejauhmana keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba di Indonesia (antara harapan dan kenyataan).

Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, dalam kenyataannya, para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dinilai tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatan ataupun mengedarkan narkoba.

Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelaku.

5. Eksekusi Mati pada Tindak Pidana Terorisme

Seperti telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa rumusan tindak pidana terorisme pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencantumkan unsur dengan sengaja (kealpaan) sehingga dapat disimpulkan tindak pidana terorisme didasarkan pada adanya kesalahan.²⁸²

Dasar hukum yang subsidair adalah Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu Nomor 2 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003. Dasar hukum yang lebih subsidair adalah Pasal 9 Perpu Nomor 1

²⁸² Perhatikan Pasal 6 s.d. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu Nomor 2 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.²⁸³

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut relevan dengan Pasal 55 KUHP, mempertimbangkan unsur adanya keterlibatan dalam hal orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang lain melakukan perbuatan. Oleh karena itu, para pemegang profesi dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pelaku terorisme layak diberi hukuman yang tegas dan adil, yaitu hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus sebagai pelajaran dan peringatan masyarakat secara universal. Jumlah tersangka teroris yang belum dieksekusi mati ataupun yang sudah dieksekusi mati adalah sebagai berikut.

TABEL D.5.1.²⁸⁴
JUMLAH KASUS TERORIS DI INDONESIA

Tahun	KASUS			
	Ledakan Bom	Bom di TKP Tidak Meledak	Ancaman Telepon	Kematian
1999	7	15	137	6
2000	75	66	96	35
2001	81	55	114	10
2002	25	45	14	202
2003	8	1	-	11
2004	6	1	-	11

²⁸³ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 26-27.

²⁸⁴ Ihat Subihat, *Yurisdiiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Teroris*, Bandung: Logoz Publishing, 2014, hlm. 108.

2005	6	-	4	45
2006	1	-	-	-
2007	2	-	-	-
2009	2	1	-	11
Jumlah	213	183	364	331

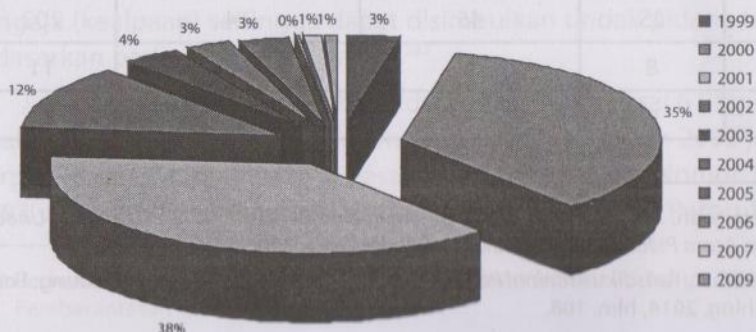
Menurut Tabel D.5.1, kasus peledakan bom yang terjadi di Indonesia paling banyak terjadi pada tahun 2001 dengan 81 ledakan bom, bom tidak meledak yang ditemukan di TKP paling banyak ditemukan tahun 2000, yaitu 66 bom, ancaman melalui telepon paling banyak tahun 1999, yaitu sebanyak 137 ancaman, sedangkan kematian akibat ledakan bom paling banyak tahun 2002, yaitu 202 orang.

Menurut Tabel D.5.1, ledakan bom paling banyak terjadi pada tahun 2006 sejumlah 1 kasus, bom tidak meledak yang ditemukan di TKP paling sedikit terjadi pada tahun 2003, 2004, dan 2009, yaitu 1 kasus, ancaman melalui telepon paling sedikit tahun 2005, yaitu sebanyak 4 kasus, sedangkan kematian akibat dari ledakan bom paling sedikit tahun 1999, yaitu 6 kasus.

Menurut Tabel D.5.1 tersebut, secara keseluruhan, terjadinya ledakan bom dinilai sangat signifikan dan disertai jumlah yang bervariasi dimulai dari Ledakan BOM (213 kasus), bom di TKP tidak meledak (183 kasus), ancaman telepon (364 kasus), dan kematian (331 kasus),

**PERSENTASE TABEL D.5.1
JUMLAH KASUS TERORIS DI INDONESIA**

LEDAKAN BOM



Jumlah data penanggulangan tindak pidana teroris adalah sebagai berikut:

**TABEL D.5.2²⁸⁵
JUMLAH PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORIS**

No.	Perincian	Jumlah
1.	Tersangka yang ditangkap	694 Orang
2.	Tersangka yang meninggal dunia di TKP	65 Orang
3.	Sudah divonis	347 Orang
4.	Sudah bebas/keluar dari lapas	210 Orang
5.	Tersanga mengulang TP (Residivis)	22 Orang
6.	Sedang menjalani hukuman	137 Orang
7.	Proses siding	18,Orang
8.	Proses sidik	47 Orang

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa 65 dari 694 pelaku terorisme (9.36%) tewas di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini membuktikan bahwa pada umumnya pelaku teroris melakukan perlawanan saat polisi berusaha melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan, yang dalam berbagai kasus penangkapan teroris, terjadi perlawanan sengit dengan kontak senjata.

Data statistik di atas mencerminkan keberhasilan polisi dalam menanggulangi dan memburu gembong-gembong teroris di Indonesia. Akan tetapi, polisi juga harus "membayar mahal" yang ditandai dengan meninggalnya 11 anggota polisi, dan korban luka-luka 41 orang. Para narapidana yang dijatuhi pidana penjara, menjalani pidana di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

285 Keterangan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo pada rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin, 13 Juni 2013.

Ihat Subihat, *Yurisdiiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Teroris*, Bandung: Logoz Publishing, 2014, hlm. 108.

TABEL D.5.3²⁸⁶
JUMLAH TERSANGKA TERORIS TERJERAT EKSEKUSI MATI

TAHUN	TERORIS	
	SUDAH EKSEKUSI MATI	BELUM EKSEKUSI MATI
2008	3	-
2005	-	2
2002	-	4
1991	1	-
1985	2	-
Jumlah	6	6

Berdasarkan Tabel D.5.3. tersebut, jumlah tersangka yang terjerat vonis hukuman eksekusi mati kasus teroris umumnya masih sedikit, tetapi jika dibandingkan pada beberapa tabel di atas terkait dengan jumlah pelaku teroris, jelas bahwa keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba di Indonesia (antara harapan dan kenyataan) masih harus dipertanyakan.

E. Peninjauan Kembali (PK) pada Ketentuan Pasal 263 dan Pasal 268 Ayat (3) KUHP

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terpidana terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali. Demikian pula, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat juga dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) dengan prosedur sebagai berikut.²⁸⁷

²⁸⁶ Kontras, dari berbagai sumber. Informasi mungkin tidak akurat karena data tentang hukuman mati di Indonesia tidak terlalu terbuka. Tidak ada kepastian waktu kapan seseorang akan dieksekusi mati setelah ia mendapat vonis dengan kekuatan hukum yang final. Salah satu dari terpidana mati, Bahar bin Matar, misalnya sudah menunggu eksekusi 34 tahun sejak grasinya ditolak (1972).

²⁸⁷ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 339-342.

1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya.
2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3. Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4. Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam surat yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 8-11.

10. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan di mana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11. Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13. Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
 - a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama.
 - b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada.
 - c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan.
 - d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama.
14. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan pada tingkat pertama.
15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.

17. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (Pasal 268 ayat 3 KUHP).

Dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan yang menjadi titik pembahasan dalam bagian ini adalah Pasal 263 Ayat (2) huruf a, yaitu permintaan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan atas dasar:

"Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan."

Menurut Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)²⁸⁸ dalam permintaan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung (MA) dapat menerima dan menolak permintaan pemohon atas Peninjauan Kembali (PK) dengan dasar berikut.

1. *Tidak Dapat Diterima*, dalam hal permintaan Peninjauan Kembali (PK) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 Ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
2. *Dapat Diterima*, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan Peninjauan Kembali (PK) dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan Peninjauan Kembali (PK) dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
 - b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan

²⁸⁸ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, hlm. 341-342.

Peninjauan Kembali (PK) tersebut dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

- 1) putusan bebas;
- 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- 4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan apabila ada *novum*. Jika ada suatu perkara pidana yang terpidana atau ahli warisnya telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan pengajuan tersebut diterima ataupun ditolak oleh MA, apabila terpidana atau ahli waris tersebut menemukan *novum* untuk perkaranya, terpidana atau ahli warisnya boleh mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan ketentuan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (MA), dan Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)²⁸⁹ menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Meskipun demikian, semua telah berubah saat dikeluarkannya putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengikat lagi dan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan lebih dari sekali.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang boleh dilakukan satu kali yang telah diatur secara limitatif pada Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut menyebabkan setiap pelaku terpidana dan ahli warisnya merasa dirugikan karena hak-haknya untuk memperjuangkan suatu keadilan harus dibatasi. Padahal, Peninjauan Kembali (PK) merupakan gerbang terakhir bagi terpidana atau ahli warisnya untuk memperjuangkan keadilan.

²⁸⁹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, hlm. 342.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHP tentang permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali, bertentangan dengan UUD NKRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai "*kecuali ditemukan bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek dan teknologi)*."

Pasal 268 Ayat (3) KUHP menjadi tidak berlaku jika memenuhi persyaratan berupa ditemukan *novum* yang berkaitan dengan pemanfaatan iptek dan teknologi. Persyaratan tersebut didasarkan pada Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI tahun 1945 yang mengandung hak bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang digunakan sebagai norma penguji dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013.

Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiel. Keadilan tidak dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karena itu, pengadilan yang seharusnya melindungi HAM hendaknya tidak membatasi Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan apabila ditemukannya *novum*. Atas dasar hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 bersifat *conditionally constitutional*.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), dengan membatasi Peninjauan Kembali (PK), pengadilan telah menutup proses pencarian keadilan dan kebenaran. Hal ini karena ada kemungkinan setelah diajukannya Peninjauan Kembali (PK) dan diputus terdapat *novum* yang substansial yang pada saat Peninjauan Kembali (PK) sebelumnya belum ditemukan. Pada sisi lain, ditemukan adanya *novum* dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan oleh orang yang belum dihukum masih bisa dianggap belum bersalah.

Selain hal tersebut, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuat pelaksanaan hukuman eksekusi mati bagi terpidana mati yang sudah divonis

oleh Kepolisian,²⁹⁰ Pengadilan Negeri,²⁹¹ Kejaksaan Tinggi (KEJATI),²⁹² dan Mahkamah Agung (MA)²⁹³ atas pidana yang telah dijatuhkan tidak kunjung terwujud, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melegakan bagi pencari keadilan.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa Peninjauan Kembali (PK) merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, ada tiga alasan permintaan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP,²⁹⁴ yaitu fakta adanya *novum*, fakta terdapat putusan yang saling bertentangan, atau fakta adanya kekhilafan/kekeliruan nyata dari majelis hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan telah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan satu kali. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 400 Bab XI Peninjauan Kembali Reglemen Acara Perdata (S. 1847-52 jo. 1849-63), Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 (UU MA), dan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP. Artinya, jika ketentuan tersebut dilanggar, terjadi pengabaian terhadap undang-undang atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daag*).

Selain prinsip tersebut, prinsip lain yang harus diperhatikan adalah prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagaimana tersurat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD N RI tahun 1945 yang secara faktual sebelum ada putusan MK, MA melalui Surat Edaran MA (SE-MA) No 10 tahun 2009, telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) lebih

290 Perhatikan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

291 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1996, hlm. 46-48.

292 Perhatikan Pasal 30 Ayat (1), BAB III Tugas dan Wewenang, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Perhatikan Pasal-3, BAB II Kewajiban, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia.

293 Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Ke-10, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 314.

294 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*..., hlm. 339.

dari satu kali untuk perkara yang mempunyai pertentangan putusan persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mengeliminasi ketentuan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP bersifat *conditionally constitutional*, hal ini tidak dapat diartikan bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan beberapa kali secara serta-merta untuk ketiga alasan pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (3) KUHAP.

Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali hanya diperbolehkan apabila ditemukan *novum*. Dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ini tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan karena kepastian hukum pada prinsipnya sudah mulai tercipta sejak ada putusan *inkracht van gewijsde*.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 mengandung dualisme sehingga menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum suatu perkara meskipun memberikan keadilan bagi orang yang berperkara sehingga diperlukan pengaturan baru mengenai Peninjauan Kembali (PK) dalam suatu peraturan perundang-undangan.

F. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice sytem*) merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiel, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Pemahaman tersebut terlihat adanya beberapa penekanan.

1. Sistem dari suatu proses yang merupakan proses pelaksanaan tanggung jawab yang terdapat dalam suatu lembaga peradilan pidana.
2. Fungsi komponen yang berperan menjalankan proses tersebut bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian

kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.²⁹⁵

3. Penekanan tiap-tiap komponen untuk menjalankan tugasnya.
4. Tujuan dari proses bekerjanya komponen-komponen dalam sistem tersebut.

Untuk mencari kebenaran materiel atau kebenaran yang sesungguhnya yang mencerminkan keadilan, termasuk dengan adanya upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pihak terpidana atau ahli warisnya dapat melakukan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang disebut dengan Peninjauan Kembali (PK) yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila.²⁹⁶

Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa karena upaya hukum tersebut diajukan untuk melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun dasar dibentuknya lembaga PK dalam perkara yang pidana berpijak pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Ketentuan Pasal 268 Ayat (3) menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menengguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat dilakukan satu kali. Landasan filosofis yang terkandung dalam upaya hukum luar biasa PK ini adalah untuk memberikan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dengan jalan membuka kembali perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

295 Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

296 Risalah Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1979.

Peninjauan kembali perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana, dan wujud penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah yang semestinya harus dilindunginya.

Syarat materiel pengajuan PK-Pasal 263 Ayat (2) KUHP:

1. Keadaan baru, adalah keadaan yang sudah ada sebelum/pada saat sidang pemeriksaan perkara berlangsung, yang baru diketahui setelah putusan menjadi tetap. Keadaan tersebut baru diketahui keberadaannya dari alat-alat bukti yang baru diketahui/ditemukan kemudian setelah perkara diputus dan menjadi tetap. Alat bukti ini pun bukan alat bukti baru, melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelumnya, tetapi belum diajukan dan diperiksa di sidang.²⁹⁷
2. Berbagai putusan yang saling bertentangan, adalah terdapatnya dua atau lebih putusan yang saling berhubungan dan bersifat saling pengaruhi terhadap satu dengan yang lain secara timbal balik, yang pertimbangan hukumnya atau amar putusannya saling bertentangan.
3. Putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, merupakan kesalahan hakim dalam memutus.

Berkaitan dengan keadaan baru (*novum*) yang dapat dijadikan landasan permintaan Peninjauan Kembali (PK) adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat, yaitu:²⁹⁸

1. diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
2. ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;

297 Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 265.

298 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 598.

3. dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Parameter yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru tersebut sangat kuat adalah:²⁹⁹

1. didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP;
2. berdasarkan hukum pembuktian, "keadaan baru" tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung, karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan semula yang dilawan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);
3. berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan.

Menurut penulis, pembatasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) telah dijalankan beriringan dengan peraturan yang diatur di dalam KUHP karena mengatur hal yang sama-sama bersifat umum. Pembatasan yang diatur dalam KUHP ataupun undang-undang MA tersebut tidak akan menyimpangi satu sama lain karena sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum dan prinsip cepat murah sederhana sesuai asas dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terbatas hanya untuk satu kali didasarkan pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Rabruch. Adapun tujuan hukum adalah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Prinsip Peninjauan Kembali (PK) diajukan hanya satu kali merupakan tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum. Akan tetapi, mencapai kepastian hukum di sini bukan tanpa ruang untuk mencari keadilan, tetapi proses mencapai keadilan dibatasi, yaitu hanya melalui Peninjauan Kembali (PK) satu kali.

²⁹⁹ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 65.

Jika dilihat dari segi praktik dan proses persidangan, ruang dan kesempatan dalam mencapai suatu keadilan tersebut sudah terbuka lebar mulai dari tahapan pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan negeri bahwa dalam 7 hari pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap Pengadilan Tinggi setelah itu juga diberi kesempatan selama 14 hari untuk mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Selain hal tersebut, juga diberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali satu kali sebagai upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa dilalui semuanya, proses yang demikian tentunya sudah memberikan ruang yang sangat luas bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang semestinya adalah haknya, dan proses untuk hal tersebut sesungguhnya adalah proses yang amat sangat panjang bahkan dalam praktiknya suatu perkara pidana tersebut baru berakhir atau mempunyai kekuatan tetap setelah proses bertahun-tahun telah berlalu.

Mengingat keadaan yang demikian maka kepastian hukum menjadi perlu dijamin dengan adanya batasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK), yaitu cukup satu kali. Akan tetapi, berlakunya ketentuan tersebut sesungguhnya sudah menutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai pada keadilan yang sesungguhnya (keadilan materiil) sekalipun pada kemudian hari setelah kesempatan Peninjauan Kembali (PK) satu kali baru diketahui kebenaran materiil tersebut.

Hal yang demikian terlihat bahwa sesungguhnya makna tujuan hukum yang terkandung dalam batasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tersebut adalah lebih mengedepankan kepastian daripada keadilan. Berkaitan dengan kepastian hukum tersebut terdapat asas yang menyebut setiap perkara harus ada akhirnya yang disebut dengan istilah *Litisi Finiri Oportet*. Prinsip ini mengarah kepada *offender oriented*, yaitu keadilan *retributive*.

Dengan asumsi dalam suatu kepastian hukum tersebut akan ada keadilan, selain alasan yang demikian pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali juga sesuai dengan Pasal 268 Ayat (3) KUHP dilaksanakan berdasarkan atas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dasar dalam penanganan perkara pidana sejak diajukan ke peradilan.

Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan

ada kepastian tentang tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut, serta berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya dapat berlaku mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia sejak putusan itu dikeluarkan,³⁰⁰ Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terkait pembatalan pembatasan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang menjadi inti putusan adalah bahwa pasal yang mengatur tentang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan pemohon bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan dihapuskannya Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terbatas satu kali, bahwa Peninjauan Kembali (PK) bisa diajukan lebih dari satu kali, bahkan tidak ada batasan pengajuan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berperkara, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Hal ini disebabkan sifat norma Undang-Undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (*abstract and impersonal*).

Pada sisi lain, pada saat proses pembuatan putusan sampai dengan dibacakan putusan tentunya banyak argumen yang muncul dari berbagai kalangan yang menanyakan kejelasan amar putusan tersebut terkait dengan bagaimana kepastian hukum terkait dengan pembatasan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali (PK), sebab diputuskannya putusan MK tersebut menimbulkan kekaburan norma, yaitu muncul asumsi bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan berkali-kali tanpa ada batasan/limitasi.

Putusan No. MK 34/PUU-XI/2013 menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Menurut Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, putusan MK tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, tetapi pada sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian hukum di negeri ini.

300 Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1, Februari 2011, Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kabupaten Malang dan Kota Pasuruhan), Pusat Kajian Konstitusi FH-UB, hlm. 155.

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang mengeliminasi ketentuan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP bersifat *conditionally constitutional*. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan beberapa kali secara serta-merta untuk ketiga alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP.

Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali hanya diperbolehkan apabila ditemukan *novum* baru berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ini tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan karena kepastian hukum pada prinsipnya sudah mulai tercipta sejak ada putusan *inkracht van gewisjde*.

Hukum tidak pernah bermain di wilayah kosong (*nullum delictum noela poena sine praevia logi poenale*) sehingga peluang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam undang-undang terkait. Ketentuan Peninjauan Kembali (PK) ini perlu dimasukkan dalam agenda revisi KUHAP yang sedang dibahas oleh DPR RI mengenai persyaratan dan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan jika tidak diatur dalam RUU KUHAP atau undang-undang terkait. Untuk menghindari kekosongan hukum, MA dapat menggunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang MA yang memberikan kewenangan kepada MA untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

G. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang Penolakan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 02/PnPs/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang diajukan oleh Pemohon (**Amrozi bin Nurhasyim, Ali Ghufron bin Nurhasyim als Muklas, dan Abdul Aziz als Imam Samudra**) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Oktober 2008, Pukul 10.00–11.30 WIB, Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, persidangan tersebut dipimpin oleh

Prof. Dr. H. Moh. Mahfud M.D., S.H. (Ketua), Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. (**Anggota**), Maruarar Siahaan, S.H. (**Anggota**), Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. (**Anggota**), Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. (**Anggota**), Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (**Anggota**), H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (**Anggota**), Dr. Muhammad Alim, S.H. M.Hum (**Anggota**), dan Cholidin Nasir, S.H. (**Panitera Pengganti**).

Dihadiri oleh **Kuasa Hukum Pemohon**: A. Wirawan Adnan, Achmad Michdan, Ahmad Kholid, Agus (Staf), dan Yali (Staf), **Pemerintah**: Mualimin Abdi (Ka. Subdit Penyiapan Ket. Pemerintah dan Pendampingan Persidangan Dephukham), Netty Firdaus (Direktur TUN), Puji Basuki (Kasubdit Bantuan Hukum), dan Antonius Budi Satria (Jaksa Fungsional). **DPR RI**: Rudi Rohmansyah (Tim Biro Hukum DPR RI), dan Agus Trimarowulan (Tim Biro Hukum DPR RI). Adapun materi yang diujikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya adalah sebagai berikut:

1. **Pasal 1:** *"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam pasal-pasal berikut."*
2. **Pasal 14 Ayat (3):** *"Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak."*
3. **Pasal 14 Ayat (4):** *"Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya."*

Dinilai oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 02/PnPs/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang diajukan oleh Pemohon (**Amrozi bin Nurhasyim, Ali Ghufron bin Nurhasyim als Muklas, dan Abdul Aziz als Imam Samudra**). KUHP yang menjadi buku induk dari semua ketentuan hukum pidana di luar KUHP sebenarnya telah memberikan satu cara pelaksanaan pidana mati secara spesifik, Pasal 11 KUHP menyatakan:

"Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri."

KUHP memberikan tata cara pelaksanaan pidana mati melalui hukuman gantung sampai mati, jenis hukuman gantung pada abad ke-16 yang menerapkan hukuman gantung dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan bagi para calon pelaku yang akan melanggar hukum, melalui asas konkordansi Indonesia memberlakukan hukum kolonial ternyata tidak semua peraturan tersebut diterima secara mentah-mentah menjadi produk hukum yang berlaku secara nasional (Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945).

Terbukti dari inisiatif pemerintah Indonesia pada masa itu telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati yang berbeda dari pelaksanaan pidana mati menurut KUHP (Pasal 11 KUHP), melalui Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati, pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif.

Salman Luthan memberikan perbandingan cara hukuman mati ini dengan ketentuan *Gunsei Keizirei*, khususnya ketentuan Pasal 5 yang dikeluarkan 1 Januari 1944 oleh Pemerintah Kolonial Jepang, dan *Staatblad* 1945 Nomor 123 yang dibuat Pemerintah Kolonial Belanda yang mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, secara yuridis Pasal 11 KUHP yang mengatur tentang hukuman gantung tidak berlaku, berlaku asas *hukum lex posterior derogate legi lex priori* (ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama).

Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Narkotika yang pada dasarnya tetap memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia. Pro dan Kontra tentang pidana mati sebenarnya berawal dari disepakatinya Kongres Internasional menentang Hukuman Mati (*International Conference on the Death Penalty*) tahun 2001 di Strassburg, Uni Eropa walaupun secara internasional sedang beredar kampanye untuk mortarium dan penghapusan pidana mati (Pasal 6 ICCPR) karena dinilai merampas Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, Indonesia tetap memandang penting dicantumkannya pidana mati dalam hukum nasionalnya.

Hendarman Supandji menjelaskan bahwa pada dasarnya semua bentuk pembedaan merupakan perampasan terhadap hak asasi orang. Jadi, sanksi pidana mati sah-sah saja untuk diterapkan, hanya penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Senada dengan pendapat ini, Mahkamah Konstitusi menjabarkan lebih lanjut posisi Indonesia yang tidak melanggar perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) yang menganjurkan penghapusan pidana mati.

Mahkamah Konstitusi mendasarkan argumentasinya pada Pasal 6 Ayat (2) ICCPR yang memberikan peluang dan persetujuan bagi negara yang menerapkan pidana mati hanya terhadap kejahatan khusus dan berat dengan harus memerhatikan prinsip untuk tidak memberikan sanksi yang beratnya melebihi kesalahan, bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum.

Oleh karena itu, permasalahan pro dan kontra mengenai pidana mati sudah mendapatkan titik terang, hanya mengenai tata pelaksanaan (eksekusi) pidana mati yang masih banyak silang pendapat. Sebenarnya banyak cara pelaksanaan pidana mati di antaranya pidana mati dengan cara disuntik, distrum listrik, dipenggal pada leher, dimasukkan dalam ruang gas dan ditembak.

Langkah-langkah pelaksanaan pidana mati tersebut ternyata Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 lebih memilih ditembak sampai mati. Pasal 1 dan 14 UU No. 2/Pnps/1964 menyatakan:

Pasal 1:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut."

Pasal 14:

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan prosedur yang tegas:

- a. Jaksa Tinggi/jaksa yang bertugas memimpin pelaksanaan pidana mati.
- b. Pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- c. Komandan Regu Tembak memberi tanda persiapan pada Regunya dengan membidik jantung terpidana sebagai sasaran.
- d. Dengan tanda ayunan pedang secara cepat, komandan memerintahkan regu untuk menembak.

Kondisi khusus andaikan setelah ditembak ternyata terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, Komandan regu segera memerintahkan Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan

dengan menekankan ujung laras senjata pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

Ditinjau tata cara pelaksanaan pidana mati di atas secara setahap demi tahap, nyata sekali sikap hati-hati dari eksekutor dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat dari sasaran tembakan dari regu tembak adalah jantung terpidana. Penetapan jantung sebagai sasaran tembak dimaksudkan agar setelah peluru mengenai jantung terpidana, secara langsung terpidana mati. Sangat dihindarkan tujuan untuk menyiksa terpidana karena itu berarti melanggar hak asasi manusia. Terkait dengan hak untuk tidak disiksa sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28I UUD 1945:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Tata cara pelaksanaan pidana mati melalui ditembak sampai mati dengan sasaran jantung terpidana justru menjadi suatu cara yang paling efektif dan manusiawi untuk mencabut nyawa, kecil kemungkinan seorang terpidana yang ditembak mati mengenai jantungnya masih hidup. Oleh karena itu, tata cara ini dapat dinilai tidak melanggar UUD 1945 karena terpidana tidak tersiksa dahulu baru mati dengan kondisi khusus di mana tembakan ternyata meleset atau dengan satu tembakan yang mengenai jantung ternyata terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan maka Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 telah memberikan pengaturan.

Setelah mengetahui terpidana masih hidup tidak berarti diadakan tembakan tahap kedua atau dilakukan penembakan secara beramai-ramai. Pasal 14 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 memberikan prosedur tegas agar Komandan Regu segera berinisiatif memerintahkan Bintara Regu Tembak untuk segera menghampiri terpidana, mengarahkan ujung larasnya pada pelipis korban dan menembaknya, tindakan ini dilakukan untuk menghindari penderitaan dari si terpidana sebelum menjelang ajalnya.

Demikian tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati telah terbukti tidak melanggar hak konstitusional untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD tahun 1945.

BAB 6

ANALISIS PASAL 263 DAN 268 KUHP DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATAAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

A. Pertimbangan Penundaan Eksekusi Mati terhadap Terpidana Mati Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Mengenai pidana mati jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) memang menjadi masalah yang besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para penegak hukum, pada satu pihak ada yang harus menegakkan keadilan dan pada pihak lain dianggap pelanggaran hak asasi manusia sehingga menghambat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menghambat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilihat terlebih dahulu sejauh mana konteks kejahatan-kejahatan tersebut telah dilakukan apakah dapat ditolerir atau tidak, pasalnya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari Pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci, yaitu Pasal 28J bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi ini diteruskan dan ditegaskan juga oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum.

Dengan demikian, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati tersebut, bahkan pada Pasal 6 Ayat (2) ICCPR itu sendiri memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati kepada kejahatan yang paling serius.²

B. Tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Berkaitan dengan Penundaan Eksekusi Pidana Mati

Seperti yang telah penulis uraikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan yang dimaksud adalah tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.³

Berdasarkan undang-undang tersebut, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Jaksa adalah

1 Perhatikan Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2009.

3 Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴ Karena kedudukan tersebut, dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat mengambil langkah-langkah berikut.

1. Menerima dan memeriksa berkas.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas pada penyidik dengan memberikan petunjuk untuk kesempurnaan.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan, kepada terdakwa dan saksi-saksi.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Sehubungan dengan makna kekuasaan, dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa negara akan menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, ataupun lainnya. Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan

4 Pasal 1 Angka 6 Huruf (A) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan, yaitu:⁵

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan. Hal ini karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.⁶ Berikut ini penulis akan mengaitkan temuan-temuan yang mempunyai hubungan erat dengan Tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Berkaitan dengan Penundaan Eksekusi Pidana Mati.

1. Analisis Pasal 263 KUHAP dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Pasal 263 Ayat (2) KUHAP⁷ memuat alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang dituangkan pemohon dalam "Surat Permintaan Peninjauan Kembali (PK)". Menurut Pasal 264 Ayat (1) dan Ayat (4), syarat formal menentukan sahnya permohonan peninjauan kembali adalah Surat Permintaan Peninjauan Kembali (PK). Tanpa surat

permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar, permohonan peninjauan kembali dianggap tidak ada. Pendapat ini didukung oleh Pasal 264 Ayat (1) dan Ayat (4)⁸ yang menegaskan:

- a. Ayat (1) kalimat terakhir menegaskan, "*pemohon harus menyebutkan secara jelas alasan permintaan Peninjauan Kembali (PK)*".
- b. Ayat (4) menegaskan, "*jika pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu penerima permintaan Peninjauan Kembali (PK), wajib menanyakan alasannya kepada pemohon dan untuk itu panitera membuat surat permintaan Peninjauan Kembali (PK)*".

Bertitik tolak dari penegasan tersebut, syarat formal permohonan Peninjauan Kembali (PK), yaitu adanya surat permintaan yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan Peninjauan Kembali (PK) dibuat sendiri oleh terpidana atau panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 264 Ayat (4) KUHAP.

Persoalan yang dinilai penting sebagai syarat sahnya permohonan surat permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang menjelaskan alasan-alasan yang mendasari permohonan, dan alasan yang menjadi dasar permintaan Peninjauan Kembali (PK) telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 263 Ayat (2) serta Ayat (3) KUHAP.⁹

Apabila terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali (PK) kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuat surat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan permintaan Peninjauan Kembali (PK) tersebut oleh Panitera wajib diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum, prosedural selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut diterima Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan menyidangkan perkara Peninjauan Kembali (PK). Baik pemohon maupun jaksa ikut hadir dalam persidangan untuk memberikan pendapatnya. Kemudian, panitera membuat berita acara pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan panitera.

5 Perhatikan Pasal 30 Ayat (1), BAB III Tugas dan Wewenang, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

6 Lihat Pasal 54 Ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

7 Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, op.cit., hlm. 339.

8 *Ibid.*, hlm. 340.

9 *Ibid.*, hlm. 339-340.

Selain itu, pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dan panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tentang Peninjauan Kembali (PK). Selanjutnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari panitera mengirimkan berkas perkara (bundle B) Peninjauan Kembali (PK) yang berupa:

1. surat keterangan permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang ditandatangani panitera dan pemohon;
2. surat permintaan Peninjauan Kembali (PK) disertai alasan-alasannya;
3. berita acara pendapat Hakim/Ketua Peninjauan Kembali (PK);
4. salinan putusan pengadilan tingkat pertama;
5. salinan putusan pengadilan tingkat banding;
6. salinan putusan Mahkamah Agung;
7. surat-surat lain yang mungkin ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 KUHPA tersebut,¹⁰ tata cara mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai berikut.

a. Permintaan Peninjauan Kembali (PK) Diajukan kepada Panitera

Pemohon mengajukan permintaan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.¹¹ Pengadilan Negeri selanjutnya akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permintaan Peninjauan Kembali (PK) pada prinsipnya:

1. Diajukan secara tertulis.
2. Serta menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang mendasari permintaan Peninjauan Kembali (PK).
3. Boleh juga diajukan secara lisan.

Cara pengajuan secara lisan ditarik dari ketentuan Pasal 264 Ayat (4)¹² khusus bagi pemohon yang kurang memahami hukum permintaan dapat

diajukan secara lisan, kemudian permintaan secara lisan dapat dituangkan dan dirumuskan panitera dalam bentuk "surat permintaan" Peninjauan Kembali (PK) sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon.

b. Panitera Membuat Akta Permintaan Peninjauan Kembali (PK)

Untuk pertanggungjawaban yuridis, panitera Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan mencatat dalam sebuah surat keterangan yang lazim juga disebut "Akta Permintaan Peninjauan Kembali (PK)".

- 1) Akta atau surat keterangan ditandatangani oleh panitera dan pemohon.
- 2) Kemudian akta tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Cara pembuatan akta permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 264 Ayat (2)¹³ jo. Pasal 245 Ayat (2) KUHPA.¹⁴

c. Tenggang Waktu Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)

Tenggang waktu diatur dalam Pasal 264 Ayat (3)¹⁵ yang secara tegas menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali "Tanpa Batas Waktu".

Pada pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung (MA) dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada pemohon dan Jaksa.

Suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) adalah putusan Pengadilan Banding maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan. Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA).

10 *Ibid.*, hlm. 340.

11 Perhatikan Pasal 264 Ayat (1) KUHPA, *ibid.*, hlm. 340.

12 *Ibid.*, hlm. 340.

13 *Ibid.*, hlm. 340.

14 *Ibid.*, hlm. 331.

15 *Ibid.*, hlm. 340.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali,¹⁶ dan setelah berkas diterima, sebelum Pengadilan Negeri meneruskan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, Pasal 265 menugaskan Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk membuka persidangan. Pasal 265 Ayat (4) KUHP¹⁷ telah memerinci apa-apa saja yang harus diteruskan kepada Mahkamah Agung. Menurut ketentuan ini, hal-hal yang harus dikirimkan Ketua Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung adalah:

- 1) surat permintaan Peninjauan Kembali (PK);
- 2) berkas perkara semula selengkapnya, termasuk berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta segala putusan yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- 3) berita acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali (PK);
- 4) berita acara pendapat.

Di samping pengiriman permintaan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA), Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban untuk:

- 1) menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman kepada pemohon dan jaksa;
- 2) menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman pada Pengadilan Tinggi. Jika perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) adalah putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding, pengiriman tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri dengan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.

Beberapa putusan peninjauan kembali yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut.

- 1) Permintaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
- 2) Putusan Menolak Permintaan Peninjauan Kembali (PK).
- 3) Putusan yang Membenarkan Alasan Pemohon.

Bentuk putusan lain yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara permintaan Peninjauan Kembali (PK) adalah putusan

yang membenarkan alasan permohonan, alasan permintaan benar-benar mengandung kenyataan yang relevan dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP,¹⁸ misalnya keadaan baru yang dikemukakan pemohon secara faktual mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula atau secara nyata dan konkret terdapat saling pertentangan antara berbagai putusan maupun dalam putusan dijumpai kekeliruan yang fatal yang oleh hukum tidak mungkin ditolerir, jika hal-hal yang demikian dijumpai alasan tersebut dapat dibenarkan.

Menurut ketentuan Pasal 266 Ayat (2) Huruf (b), apabila Mahkamah Agung (MA) membenarkan alasan permintaan Peninjauan Kembali (PK),¹⁹ putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengiringi pembenaran tersebut adalah sebagai berikut.

1) Putusan bebas

Misalnya pemohon mengajukan alasan keadaan baru yang didukung "bukti baru" yang dapat melumpuhkan keterbuktian kesalahan terpidana. Dalam kondisi ini, bukti baru atau keadaan baru dinilai dan dianggap meniadakan pembuktian semula sehingga kesalahan terpidana menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu, kesalahan terpidana dinyatakan tidak terbukti dan ia memperoleh putusan bebas.

Selain itu, jika dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat kekeliruan hakim, sedemikian rupa sifatnya, dan benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, atau kekhilafan atau kekeliruan tersebut tidak bisa dimaafkan, atau kekeliruan tersebut bukan merupakan kekeliruan yang sifatnya dapat ditoleransi, langkah alternatif untuk menghilangkan kekeliruan seperti itu adalah membatalkan putusan tersebut dengan alternatif putusan bisa berupa pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, menerapkan ketentuan yang lebih ringan. Fakta di lapangan, permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dibenarkan Mahkamah Agung (MA) jarang terjadi. Dari banyak permintaan yang diajukan, hanya satu dari seratus yang dibenarkan. Salah satu permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang dibenarkan Mahkamah Agung (MA) adalah putusan tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983.

16 Perhatikan Pasal 268 Ayat (3) KUHP., *ibid.*, hlm. 342.

17 *ibid.*, hlm. 340-341.

18- Perhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP., *ibid.*, hlm. 339.

19 Perhatikan Pasal 266 Ayat (2) KUHP., *ibid.*, hlm. 341.

Pada kasus tersebut, sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dijatuhi hukuman penjara 3 tahun atas kesalahan kejahatan pembunuhan yang dirumuskan Pasal 338 KUHP. Terhadap putusan tersebut, terpidana mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan putusan tersebut memperlihatkan kekeliruan hakim yang menyatakan bahwa kesalahan terpidana telah terbukti hanya atas dasar pembuktian petunjuk yang diperoleh hakim, bukan dari sumber alat bukti yang dibenarkan undang-undang.

Menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat ditarik dan diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan sidang. Dari keterangan saksi ataupun terdakwa, tidak ada satu pun yang memberikan petunjuk yang membuktikan kesalahan terpidana tersebut telah melakukan tindak pidana. Alasan keberatan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan alasan pertimbangan berikut.

- a) Putusan hakim secara nyata memperlihatkan kekeliruan yang nyata sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf (c), karena terdakwa sejak semula memungkirkan dan menyangkal kesalahan yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.
- b) Tak ada seorang saksi melihat korban didorong oleh terdakwa dari kereta api, sehingga korban jatuh dan mati seketika.
- c) Orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga terdakwa telah membunuh korban, meskipun hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah.

Melalui beberapa pertimbangan tersebut, permintaan Peninjauan Kembali (PK) dapat dibenarkan. Mahkamah Agung (MA) dapat menolak dan menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh pemohon jika seorang terpidana menemukan alat bukti baru (*novum*) yang dinilai penting bagi pencari keadilan.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Alternatif lain yang dapat diputuskan Mahkamah Agung (MA) dalam hal alasan permintaan Peninjauan Kembali (PK) dapat dibenarkan adalah putusan "*Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*". Hal ini terjadi jika keadaan baru yang dikemukakan pemohon itu mewujudkan suatu keadaan

yang melenyapkan sifat perbuatan yang didakwakan sehingga menjadi tindakan yang berada di luar jangkauan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

Pasalnya, perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran pidana, atau saling pertentangan atau kekeliruan yang terdapat dalam putusan dapat melunturkan sifat pidana yang diakibatkan saling pertentangan atau kekeliruan itu sendiri.

3) Tidak menerima tuntutan penuntut umum

Bentuk lain yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) dalam membenaran alasan permintaan Peninjauan Kembali (PK) adalah putusan yang menyatakan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. Putusan semacam ini bisa dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) apabila terdapat hal atau keadaan baru bahwa perkara yang dahulu pernah diperiksa dan diputus, atau pada saat pemeriksaan sidang berlangsung, terdakwa telah meninggal, tetapi pengadilan tetap memutus perkara dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Padahal, berdasarkan Pasal 77 KUHP, meninggalnya terdakwa merupakan unsur yang menghapus wewenang jaksa untuk menuntut.

4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

Putusan berupa penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan bisa terjadi dalam perkara yang surat dakwaannya bersifat alternatif (*subsidiaritas*), seperti seorang terdakwa didakwa secara alternatif melakukan tindak pidana, primair pembunuhan yang direncanakan, subsidair pembunuhan, subsidair lagi penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan berdasar dakwaan primair, yaitu melakukan kejahatan pembunuhan yang direncanakan, eks Pasal 340 KUHP dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas putusan tersebut, terpidana mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK).

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan, ternyata dalam putusan tersebut terjadi kekeliruan yang nyata atau terdapat keadaan baru yang dapat bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan perencanaan dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tindak pidana

yang tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah kejahatan pembunuhan sesuai dengan dakwaan subsidair eks Pasal 338 KUHP.

Kekeliruan hakim maupun keadaan baru tersebut mempunyai nilai kekuatan yang dapat melumpuhkan hal-hal yang telah dianggap terbukti bersalah melakukan kejahatan pembunuhan, misalnya kekeliruan atau keadaan baru mempunyai daya nilai yang melenyapkan kesengajaan menghilangkan jiwa orang lain, sehingga yang tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan subsidair, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian.²⁰

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.²¹ Tujuan adanya pidana adalah untuk pencegahan kejahatan dapat dibedakan antara prevensi spesial (*special deterrence*) dan prevensi general (*general deterrence*).

Prevensi spesial yang dimaksud adalah memengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana kedua kalinya dengan harapan terpidana benar-benar berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (*Reformation* atau *Rehabilitation Theory*).

Adapun *prevensi general* berarti pidana dimaksudkan untuk memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.²²

2. Analisis Pasal 268 KUHP Dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 340-341.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, 1994, hlm. 10-11.

²² Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 339.

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung (MA) memberlakukan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mencabut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara substansi dinilai kurang mengakomodasi masalah kekuasaan kehakiman. Selain itu, juga karena adanya *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah tidak berlaku sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dilakukan perubahan undang-undang dimaksud. Menurut Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945, wewenang Mahkamah Agung (MA) adalah sebagai berikut.

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA), kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Fungsi Mahkamah Agung (MA) menurut Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 ada 5, yaitu sebagai berikut.

a. Fungsi Peradilan

- 1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- 2) Di samping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung (MA) berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir:

- a) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³
 - b) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang.
 - c) Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁴
- 3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan adalah hak uji materiel, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiel peraturan perundangan di bawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.²⁵

b. Fungsi Nasehat

- 1) Mahkamah Agung (MA) memberikan nasihat dan pertimbangan-pertimbangan bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara.²⁶
- 2) Mahkamah Agung (MA) memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam pemberian atau penolakan grasi.²⁷
- 3) Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung (MA) diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam memberikan grasi dan rehabilitasi meskipun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan grasi dan rehabilitasi.
- 4) Mahkamah Agung (MA) berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk terhadap seluruh Peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁸

c. Fungsi Pengawasan

- 1) Mahkamah Agung (MA) melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.²⁹
- 2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:
 - a) Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan.
 - b) Setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim.³⁰
 - c) Terhadap Penasihat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.³¹

d. Fungsi Mengatur

- 1) Mahkamah Agung (MA) dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung (MA) sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.³²
- 2) Mahkamah Agung (MA) dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

23 Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985.

24 Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 tahun 1985.

25 Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985.

26 Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985.

27 Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985.

28 Pasal 38 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

29 Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 tahun 1970.

30 Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985.

31 Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985.

32 Pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang No. 14 tahun 1985.

e. Fungsi Administratif

- 1) Badan-badan Peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman walaupun menurut Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (MA).
- 2) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Fungsi Mahkamah Agung (MA) menurut Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pada bidang pengawasan, yaitu melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan setiap pengadilan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.³³

Setiap Hakim Pengadilan dituntut mampu menilai apa yang ada di ruang persidangan yang dalam hal ini keterangan saksi,³⁴ terdakwa,³⁵ barang bukti,³⁶ tuntutan jaksa,³⁷ dan pengacara.³⁸ Kelima unsur tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam

33 Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 tahun 1970.

34 Perhatikan Pasal 163, dan Pasal 174 Ayat (1) dan (2) KUHP, Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, *op.cit.*, hlm. 298, 301.

35 Perhatikan Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Zulkarnain Sirajudin, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*, *op.cit.*, hlm. 175. Perhatikan Pasal 176 KUHP, Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, *op.cit.*, hlm. 302.

36 Perhatikan Pasal 6 Ayat (2) UU RI Nomor 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perhatikan Pasal 181 KUHP, Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, *op.cit.*, hlm. 304. Perhatikan Pasal 26A Huruf (a), dan (b), dan Pasal 37A Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

37 Tuntutan jaksa sudah sesuai dengan pasal yang dituntutkan pada terdakwa.

38 Perhatikan Pasal 38 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (7) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang adil dan objektif.

Ketidakjelian hakim dalam persidangan seperti salah persepsi dalam menilai suatu kejahatan, dan kurangnya penggalian data dari saksi yang mungkin dapat memberatkan terdakwa, dan kesalahan pada saat proses penyidikan yang memaksa terdakwa untuk mengakui kesalahan yang tidak dilakukan dapat memengaruhi keputusan hakim.³⁹

Setiap putusan perkara pidana ada suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang dikenal dengan istilah disparitas hukuman. Disparitas dimaksud adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) terhadap tindak pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Penjatuhan pidana tersebut adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.⁴⁰

Faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas pidana sesuai dengan kasus yang telah penulis teliti adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemidanaan dimaksud menurut Sudarto dalam buku karangan Sholehuddin⁴¹ adalah pedoman pemberian pidana yang mempunyai nilai keunggulan untuk memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaan setelah terbukti seorang terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana.

Pedoman pemberian pidana tersebut memuat hal-hal yang bersifat objektif yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, penjatuhan pidana lebih proporsional dan rasional. Tidak adanya pedoman dalam hukum pidana menyebabkan terjadinya keragaman pidana walaupun majelis hakim melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan kecermatan.⁴²

Hal tersebut sesuai dengan salah satu butir hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan

39 Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, *op.cit.*, 2011, hlm. 320.

40 M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi ke-1 Cet. ke-2, 2004, hlm. 116.

41 *Ibid.*, hlm. 114 dan 119.

42 *Ibid.*, hlm. 117 dan 191.

serasi sebagaimana yang telah di ajukan oleh *Justice Model* mengenai pembatasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tersangka.⁴³

Dalam rangka mengurangi disparitas pidana, dalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982 pedoman pemberian pidana, hakim dituntut untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:⁴⁴

1. kesalahan pelaku kriminal atau tindak pidana;
2. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. cara melakukan tindak pidana;
4. sikap batin pelaku kriminal;
5. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku kriminal;
6. sikap dan tindakan pelaku kriminal sesudah melakukan tindak pidana;
7. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku kriminal;
8. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. masalah patokan pidana.

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas hukuman adalah ketiadaan patokan pembedaan dalam perundang-undangan ataupun dalam praktik di pengadilan seperti yang tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai tidak jelas patokan hukuman yang layak bagi seorang koruptor dengan menganut sistem ganda (*double track system*).⁴⁵ Akibatnya tentu akan memicu setiap narapidana usai menjalani hukuman penjara selama 1 tahun untuk kembali melakukan perbuatan serupa pada waktu dan kesempatan yang lain.

Ironisnya, saat ini setiap putusan majelis hakim dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi bagi pelaku tanpa mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memenuhi nilai objektif, tetapi lebih tertuju pada sikap-sikap terdakwa selama persidangan

berlangsung. Berikut tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.⁴⁶
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁷
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁴⁸
4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.⁴⁹
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁰
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁵¹

Perihal putusan tersebut, sebelum memberikan vonis hukuman seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Ini merupakan fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, harus jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan seorang hakim, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak lepas dari fakta, bukti, dan keterangan seorang saksi.

46 Perhatikan Pasal 5 Ayat (1) Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, loc.cit., 2011, hlm. 314.

47 Perhatikan Pasal 5 Ayat (2), *ibid.*

48 Perhatikan Pasal 16 Ayat (1), *ibid.*, hlm. 317.

49 Perhatikan Pasal 27, *ibid.* hlm. 319.

50 Perhatikan Pasal 28 Ayat (1), *ibid.*

51 Perhatikan Pasal 28 Ayat (2), *ibid.*

43 Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama (GMP), 2008, hlm. 271-273.

44 Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 68.

45 Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 116.

Karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankannya terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵² Jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, akan memengaruhi putusan tersebut.

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut.⁵³ Adapun dalam Ayat (4)⁵⁴ diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Demikian pula, pidana kurungan dalam Pasal 18 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵⁵ yang menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵⁶ diatur bahwa pidana kurungan tidak boleh lebih dari 1 tahun empat bulan.

Dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵⁷ diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen (Undang-Undang Nomor 15 (Prp) tahun 1960), apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama 6 bulan.

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim, yaitu profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak

dicapai, putusan terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang sama akan dijatuhkan pidana yang berbeda-beda.⁵⁸

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh pelaksanaan sistem hukum pidana dan penggunaan kebebasan hakim yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan diperlukan demi menjamin keadilan, sering penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan penegak hukum, khususnya hakim peradilan.

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang mencolok ini, menurut Edward M. Kennedy sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi adalah:⁵⁹

- a. tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada;
- b. kegagalan dalam mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. mendorong terjadinya tindak pidana;
- d. merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Dari pandangan Edward M. Kennedy, dapat penulis simpulkan bahwa akibat dari adanya disparitas pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang disertai ketidaksesuaian dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan, disparitas hukum pidana akan menimbulkan kekacauan yang tidak hanya menyakiti rasa keadilan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana sebagaimana yang telah penulis uraikan.

Fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang dalam hal ini ahli hukum tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, serta pakar hukum tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan

⁵² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, loc.cit., hlm. 312.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵⁸ Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, (Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, hlm. 33.

⁵⁹ Muladi dan B. Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 8.

hal tersebut, Oemar Seno Adji⁶⁰ berpendapat bahwa disparitas dalam pemidanaan dapat dibenarkan dalam hal sebagai berikut.

- 1) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
- 2) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila beralasan atau wajar.

Dari pandangan Oemar Seno Adji, dapat dipahami bahwa disparitas pemidanaan merupakan pembenaran dengan didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dibenarkan sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh penggugat sebagai bagian dari bentuk refleksi bahwa hakim untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, dan setiap hasil hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya.

Menurut penulis, jika hal ini diterapkan secara logika, tentu angka disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat tanpa mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan tidak mengoyak rasa keadilan meskipun disparitas pidana dalam penegakan hukum tidak dapat dihapuskan, dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat, perlu ditindaklanjuti.

Menurut pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri, Muladi berpendapat upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban tindak pidana.⁶¹

Sehubungan dengan ini, Hazewinkel Suringa dan Remmelink menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana tidak akan memberikan pemecahan yang memuaskan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana, kita dapat menerapkan sistem pemidanaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*) dengan menggunakan kata-kata Robert Kennedy "*Not making sentence equal, but in making sentencing*

philosophies agree" (bukan menjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi).⁶²

Terkait dengan Analisis Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁶³ dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana, dapat dikatakan bahwa Peninjauan Kembali (PK) merupakan gerbang terakhir bagi terpidana atau ahli warisnya untuk memperjuangkan keadilan.

Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya boleh satu kali. Apabila Pasal 268 Ayat (3) KUHP⁶⁴ tersebut terus diberlakukan, sudah tentu hak-hak yang dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya tidak terakomodasi dan mencederai rasa keadilan (*sense of justice*) pencari keadilan (*iustitia belen*).⁶⁵

Adapun batasan maksimal dan minimal pemidanaan, rasa keadilan dan keyakinan hakim atas Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana tertanggal 31 Desember 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan putusan mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
 - 1) Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

62 Oemar Seno Adji, *Hukum-hukum Pidana*, op.cit., hlm. 24.

63 Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, loc.cit., hlm. 342.

64 Ibid., hlm. 342.

65 Ibid.

60 Oemar Seno Adji, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984, hlm. 28-29.

61 Muladi dan B. Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, op.cit., hlm. 8-9.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berperkara, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Hal ini disebabkan sifat norma undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (*abstract and impersonal*).

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sudah semestinya dapat berlaku mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia sejak putusan tersebut dikeluarkan terkait pembatalan pembatasan permohonan pengajuan PK dalam Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁶⁶ Yang menjadi inti putusan adalah bahwa pasal yang mengatur tentang permohonan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan dihapuskannya Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁶⁷ yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terbatas hanya satu kali pengajuannya, dapat ditafsirkan bahwa Peninjauan Kembali (PK) bisa diajukan lebih dari satu kali, bahkan tidak ada batasan pengajuan hingga pada akhirnya dikhawatirkan menambah arus perkara di Mahkamah Agung (MA).

Setiap terpidana yang Peninjauan Kembali (PK)-nya pernah ditolak tentu dapat mengajukan kembali dengan alasan yang sama ataupun berbeda. Kondisi ini sangat bertentangan dengan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) memberikan petunjuk bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana, dibatasi hanya 1 (satu) kali, hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA).

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali yang apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih atas putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dinilai bertentangan antara khususnya dalam perkara perdata ataupun perkara pidana.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 10/Bua.6/Hs/SP/VI/2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana.

A. Buku

Abdini Djan Ali. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abdul Manan. 2008. *Demokrasi, Catatan 12 Tahun Elang Mengajar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Abdul Wahid dan M. Laili. 2005. *Kelangkaan Masyarakat (Cybercrime & Sandung)*. Raffles Aditama.

Adhinarul. 2005. *Keterampilan Hukum di Indonesia*. Penerbit dan Solusi. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.

Alfandi Chazawi. 2001. *Sistem Pidana, Undang Pidana, Perlindungan Peradilan dan Basis Berlakunya Hukum Pidana*. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press.

Alfandi Chazawi. 2005. *Pengantar Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adnan Aliyung Kusuman. 2003. *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Sistem Hukum dalam Seminar Pendidikan Hukum Nasional VII*. Denpasar.

Atandi Yudhanegara. 2003. *Kekuasaan Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: HAM dan Masyarakat.

Atandi Yudhanegara. 2010. *Pengantar Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Citra.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Manan. 2008. *Demi Keadilan, Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM*. Jakarta: Elsam.
- Abdul Wahid dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Achmad Ali. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana. Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana: Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adnan Buyung Nasution. 2003. *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII*. Denpasar.
- Afandi Emilianus. 2005. *Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*. Jakarta: PBHI.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Profresif*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.

Allan McChesney. 2003. *Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Semarang: Insist Press.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana I: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati di Indonesia pada Masa Lalu, Kini, dan pada Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 1985. *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Andi Hamzah. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Edisi Ke-13. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andrey Sujatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Jakarta: Grasindo.

Anthony Giddens. 2003. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Judul Asli: *The Constitution of Society: the Outline of the Theory of Structuration*. Terj. Adi Loka Sujono. Pasuruan: Pedati.

Arsyad Sanusi. 2007. *Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris-Yuridis)*. Jakarta: Indonesia Rearch.

Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum. Alumni.

Bagir Manan. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Bagir Manan. 2004. *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.

Bagir Manan. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Bagir Manan. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 04 Tahun 2004*. Yogyakarta: UII Press.

Bagir Manan. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi: Kesaint Blanc.

Bagir Manan. 2009. *Dimensi-dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, Butir-butir Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata. S.H., M.H.* Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Bambang D'wi Baskoro. 2001. *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Bambang Poernomo. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. 2004. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Boer Mauna. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Boven Van Theo. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Stas Restitusi. Kompensasi dan Rehabilitasi*. Elsam.

Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 1996. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita.

Didi Nazmi Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.

E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Cet. Ke-6. Yogyakarta: Kanisius.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

Fakih Mansour. 2003. *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: Insist.

- Farid Abidin Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Francis Fukuyama. 2005. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Judul Asli: *State Building: Governance and World Order in the 21st Century*. Terj. A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fransiska Avianti. 2008. *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro.
- Franz Magnis Suseno. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar Afan. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Ull Press.
- George H. Sabine. 1961. *A History of Political Theory*. Third Edition. New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London: Holt, Rinehart and Winston.
- H.A.W. Widjaja. 2000. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila & HAM di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK.
- Harahap. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi II. Cetakan Ke-10. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harrys Pratama Teguh dan H. Hafidi Z.A. 2013. *Kongkalikong Praktik Korupsi dan Hukumannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Harrys Pratama Teguh. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negara: Membangun Moralitas Warga Negara dengan Pancasila (antara Harapan dan Kenyataan)*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Harrys Pratama Teguh. 2015. *Hukum Islam & Dinamika Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hendarmin Ranadireksa. 2009. *Dinamika Konstitusi Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Henry Campbel Black. 2006. *Black's Law Dictionary*. 9th Edition. St. Paul Minn: West Group.

- Ihat Subihat. 2014. *Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Teroris*. Bandung: Logoz Publishing.
- J. B. Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.
- J.E. Sahetapy. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.E. Sahetapy. 2007. *Yang Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie t.t. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Serpihak Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Editor Zainal A.M. Husein. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Ferejohn et.al. (eds). 2001. *Constitutional Culture and Democratic Rule*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- K. Wantjik Saleh. 1981. *Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana Sampai dengan Akhir 1980*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komariah Emong Supardjaja. 2007. *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2006. *Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam RUU KUHPidana*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Krisna Harahap. 2001. *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2004. *Kasus-kasus Hukum yang Terkait dengan Pengadilan Pidana Internasional bagi Bekas Negara Yugoslavia*. t.t.p.: Elsam.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2006. *Kasus-kasus Hukum yang Terkait dengan Pengadilan Pidana Internasional bagi untuk Rwanda*. t.t.p.: Elsam.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2008. *Hak Asasi Manusia Miskin Dukungan Politik. Catatan Awal tahun 2008 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*. ELSAM.

Lili Rasjidi. 1992. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni.

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

M. Rudy Satrio. 2004. *Rancangan KUHP Menghindari Hukuman Mati*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moerdiono dkk. 1992. *Politik Pengembangan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.

Moh. Koesnoe. 1986. *Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali.

Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Cet. Ke-10. Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Edisi Ke-1. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Muladi. 1997. *Perbandingan Sistem Pidana dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Naning Mardiniah dkk. 2004. *Memperkuat Posisi Politik Rakyat*. Jakarta: Cesda-LP3ES.

Natangsa Surbakti. 2007. *Hukum Pidana Khusus*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nurdjana IGM. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

O.C. Kaligis. 2002. *Peradilan (Politik) HAM di Indonesia 1*. Jakarta: OC Kaligis & Associate.

O.C. Kaligis. 2002. *Peradilan Politik HAM di Indonesia 2*. Jakarta: OC Kaligis & Associate.

P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Edisi-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Patra M. Zein. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kelompok Kerja Ake Arif, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Prakoso Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Prayitno et.al. 2001. *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ratner Steven R. dan Abrams Jason S. 2008. *Melampaui Warisan Nuremberg, Pertanggungjawaban untuk Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional*. t.t.p.: Elsam.
- Robertus Robert. 2008. *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia, Sebuah Refleksi Kritis*. t.t.p.: Elsam.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Roscoe Pound. 1978. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhatara.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Samuel P. Huntington. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Satya Arinanto. 2008. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Scott Davidson. 1994. *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sinta Dewi dan Achmad Gusman Catur Siswandi (Ed.). 2008. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat: Suatu Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum di Indonesia*. Tim Editor Kumpulan Karya Ilmiah Para Ahli Hukum dalam Rangka Purna Bakti di Unpad dan Usia Ke-70 Tahun Prof. Dr. H.E. Saefullah Wiradipradja S.H., L.L.M. Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soeroso R. 2008. *Praktik Hukum Acara Perdata, Contoh Bentuk-bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*. Edisi Ke-2. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Soeroso R. 2010. *Hukum Acara Khusus, Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Sriwiyanti Eddyono dan Zainal Abidin. 2007. *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP*. Jakarta: Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Sulistiyowati Irianto dan Antonius Cahyadi. 2008. *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suparman Usman. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gaya Media Pratama (GMP).
- Suparman Usman. 2010. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Cet. Ke-1. Serang: SUHUD Sentra Utama.
- Syahrudin Husein. 2003. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Sumatera Utara: USU Digital Library.
- Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Teguh Prasetyo dkk. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wildan Suyuthi. 2006. *Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Cet. Ke-3. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Ke-4. 2011. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Projodikoro. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yustiavandana Ivan dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainal Arifin Hoesein. 2013. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnain Sirajudin. 2006. *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*. Cet. Ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

- Asmara Nababan. *Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Belajar dari Pengalaman*. Jurnal HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Vol. 2 No. 2. November 2004.
- E. Saefullah Wiradipradja. *Human Rights Law Journal*. N.P. Engel Publisher. Khel am Rhein. Strasbourg. Vol. 19. No. 1. 30 April 1998.
- E. Saefullah Wiradipradja. *Human Rights Quarterly a Comparative and International Journal of the Social Sciences Humanity and Law*. Volume 25 Number 4 November 2003. The Jhon Hopkins University Press.
- E. Saefullah Wiradipradja. *Human Rights Quarterly. A Comparative and International Journal of the Social Sciences, Humanities, and Law*. Volume 25 Number 1. February 2003
- E. Saefullah Wiradipradja. *Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO-GATS dan Pengaruhnya terhadap Industri dan Perdagangan Jasa*. Jurnal Hukum Internasional Unpad. Vol. I No. 1 Tahun 2002.
- John Griffith. *Ideology in Criminal Procedure or a Third Model of Criminal Process*. Faculty Scholarship Series. The Yale Law Journal. Paper 3994. 1970
- Jonathan Simon. *The Return of the Medical Model: Disease and the Meaning of Imprisonment from John Howard to Brown vs Plata*. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. Vol 48. 2013.
- Michael Goodhart. *Origins and Universality in the Human Rights Debates: Cultural Essentialism and the Challenge of Globalizations* dalam *Human Rights Quarterly a Comparative and international Journal of the Social Sciences Humanity and Law*. Volume 25 Number 4 November 2003. The Jhon Hopkins University Press.
- Peter F. et.al. *Criminal Courts and Bureaucratic Justice: Concessions and Consensus in the Guilty Plea Process*. Northwestern University. School of Law. *The Journal of Criminal Law & Criminology*. Vol. 76. No. 4. 2009.

Raul Soares da Viegua dan Andre Ventura. *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-a New Scientific Perspective*. Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas. Vol. 2. No. 2. 2010.

Tri Wahyudi. *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum*. Mahkamah Agung: Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1. Nomor 2. 2012.

Zehra F. Kabaskal Arat. *Forging a Global Culture of Human Rights: Origin and Prospects of International Bill of Rights* dalam *Human Rights Quarterly a Comparative and International Journal of the Social Sciences. Humanities. and Law*. Volume 28. Number 2. May 2006. The John Hopkins University.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menkumham tentang Pengangkatan Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan.
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.

BIOGRAFI PENULIS

Harrys Pratama Teguh S.H.I., M.H., lahir di Serang pada tanggal 1 Maret 1989. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara berdarah Minangkabau (Sumatra Barat). Jenjang pendidikan formal yang ia tempuh adalah SDN Kependilan pada tahun 2002, melanjutkan ke MTs Al-Inayah Jerang Ilir Cilegon (lulus pada tahun 2005), dan MA Al-Inayah Jerang Ilir Cilegon (lulus pada tahun 2008). Ketika duduk di bangku kelas 2 MA Al-Inayah Jerang Ilir Cilegon, ia mempunyai keinginan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan potensi untuk dikembangkan yang tidak lepas dari keinginan, motivasi, mimpi, dan cita-citanya, yaitu ingin mengikuti Pendidikan Penerbangan (Pendidikan Pilot). Sebelum memasuki dunia perkuliahan, ia sempat mengajukan permohonan bantuan ke seluruh industri yang berada di Kota Cilegon sambil menuangkan rasa semangatnya untuk menjadi jurnalis profesional hingga dinyatakan DITERIMA di Sekolah Tinggi Teknologi Adisutdjipto (STTA) Yogyakarta dan *Alfa Flying School* di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Namun, status perekonomian kedua orang tuanya tidak mendukung dan tidak memungkinkan dari jumlah biaya normal sekolah penerbangan. Ia ikhlas menerima keadaan tersebut yang tidak lepas dari keinginan untuk membanggakan kedua orang tuanya.

Kemudian, pada tahun 2008, ia melanjutkan kuliah di IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam dengan



Program S1 Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Politik), lulus pada tahun 2012 dengan IPK 3,41 (Skala 4).

Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di berbagai organisasi dan kegiatan, seperti UKM SiGMA menjadi Reporter *Public Relation* pada tahun 2009 hingga sekarang, UKM KOPMA menjadi anggota Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA) pada tahun 2009.

Ia duduk di bangku Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Program Studi: Ilmu Hukum, Konsentrasi: Hukum Pidana (Calon Dosen), belum menjadi dosen tetap, dan belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), serta Program Pascasarjana Strata 2 (S2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, lulus pada tahun 2015 dengan IPK 3,56 (Skala 4). Di samping itu, selama menjadi mahasiswa, ia aktif di berbagai kegiatan, seperti Lomba Desain Poster, Lomba Desain Grafis, Lomba Karikatur, Lomba Animasi, Lomba Lakon, Lomba Ikon, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Menulis Artikel, Lomba Menulis Esai, Lomba Menulis Puisi, Lomba Menulis Cerita Pendek (Cerpen), Lomba Menulis Pantun, Lomba Fotografer, dan sebagainya.

Ia pun dapat dikatakan produktif menulis. Ia menggawangi liputan Banten, khususnya di Merak. Berita-berita tentang aktivitas kemacetan di penyeberangan Merak sering menjadi topik beritanya.



Usep Saepullah, dilahirkan tanggal 10 September 1972 di Lebakwangi, Desa Sindangwangi, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dari orang tua Bapak H. Ucu Syamsudin dengan Hj. Eha Rohajati.

Adapun pendidikan ditempuh di Sekolah Dasar Negeri Cibiru V di Bandung, lulus pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cileunyi di Bandung, lulus pada tahun 1988. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Al-Hadi Bandung, lulus pada tahun 1991. Meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab sambil nyantri di Bustanul Wildan dan lulus S1 pada tahun 1995. Kemudian Meneruskan pendidikan pada Program Pascasama (S2) Jurusan Hukum Islam dan Pranata Sosial IAIN Sunan Gunung Djati

Bandung lulus tahun 2003. Pada tahun 2015 Lulus pendidikan Program Doktor Sekolah Pascasarjana di UPI Bandung. Untuk lebih mendalami kajian hukum positif dan Hukum Islam Penulis mengambil kembali Program Doktor (S3) Bidang Hukum Islam dari tahun 2014 sampai sekarang.

Pengalaman mengajar, pada tahun 1997 di angkat sebagai dosen tetap di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, di Fakultas Syari'ah dan Hukum Pada Matakuliah Filsafat Hukum Islam. Pada tahun 2003 diangkat sebagai Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) dua periode sampai 2011, pada tahun 2011 diangkat sebagai ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) dua periode sampai 2019.

Karya Ilmiah:

1. Hak Anak di Luar Perkawinan (Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 (Penelitian - Lemlit UIN Bandung 2014)
2. Internalisasi Nilai Akhlak di Persis Pajagalan Bandung (Penelitian Lamlit UIN Bandung 2013)
3. Pemikiran Hukum Hibah Perspektif Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung (Lemlit UIN Bandung 2015)
4. Peranan Posbakum di Pengadilan Agama (Journal (2014)
5. Prinsip Hukum Islam pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Journal (2015).



TEORI DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS

Hukum acara pidana, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur cara penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik meliputi bidang yang luas, yaitu selain memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, juga memuat eksekusi putusan hakim tentang susunan peradilan, wewenang

peradilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya yang berkaitan dengan urusan perkara pidana. Hukum acara pidana yang spesifik dapat disempitkan lagi menjadi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim. Dari tinjauan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana terkandung dua unsur hukum yang esensial, yaitu hukum acara pidana mulai dilaksanakan sekalipun masih pada tingkat timbul dugaan atau sangkaan terjadi perbuatan pidana; dan hukum acara pidana sebagai peraturan undang-undang mengatur kewenangan dalam bertindak terhadap alat-alat perlengkapan negara apabila terjadi perbuatan pidana.

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau mendekati kebenaran materiel, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Mengenai pidana mati jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) memang menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya para penegak hukum. Pada satu pihak ada yang harus menegakkan keadilan dan pada pihak lain dianggap pelanggaran hak asasi manusia sehingga menghambat penegakan HAM. Menghambat penegakan dan melanggar HAM harus dilihat terlebih dahulu konteks kejahatan-kejahatan yang dilakukan apakah dapat ditolerir atau tidak. Pasalnya HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati tersebut, bahkan pada Pasal 6 Ayat (2) ICCPR itu sendiri memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati kepada kejahatan yang paling serius.

PENERBIT **PUSTAKA SETIA**



Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164
Telp. (022) 5210588 | Fax. (022) 5224105
E-mail: pustaka_seti@yahoo.com
BANDUNG 40253

www.pustakasetia.com

ISBN 978-979-076-605-1



Teori & Praktik Hukum Acara Pidana Khusus

Harrys Pratama Teguh, S.H.I, M.H.
Dr. H. Usep Saepullah, M.Ag.

TEORI DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS

Penundaan Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati di Indonesia
(Kasus: Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik)

Pengantar Dr. H. Siswara, M.Si.

